

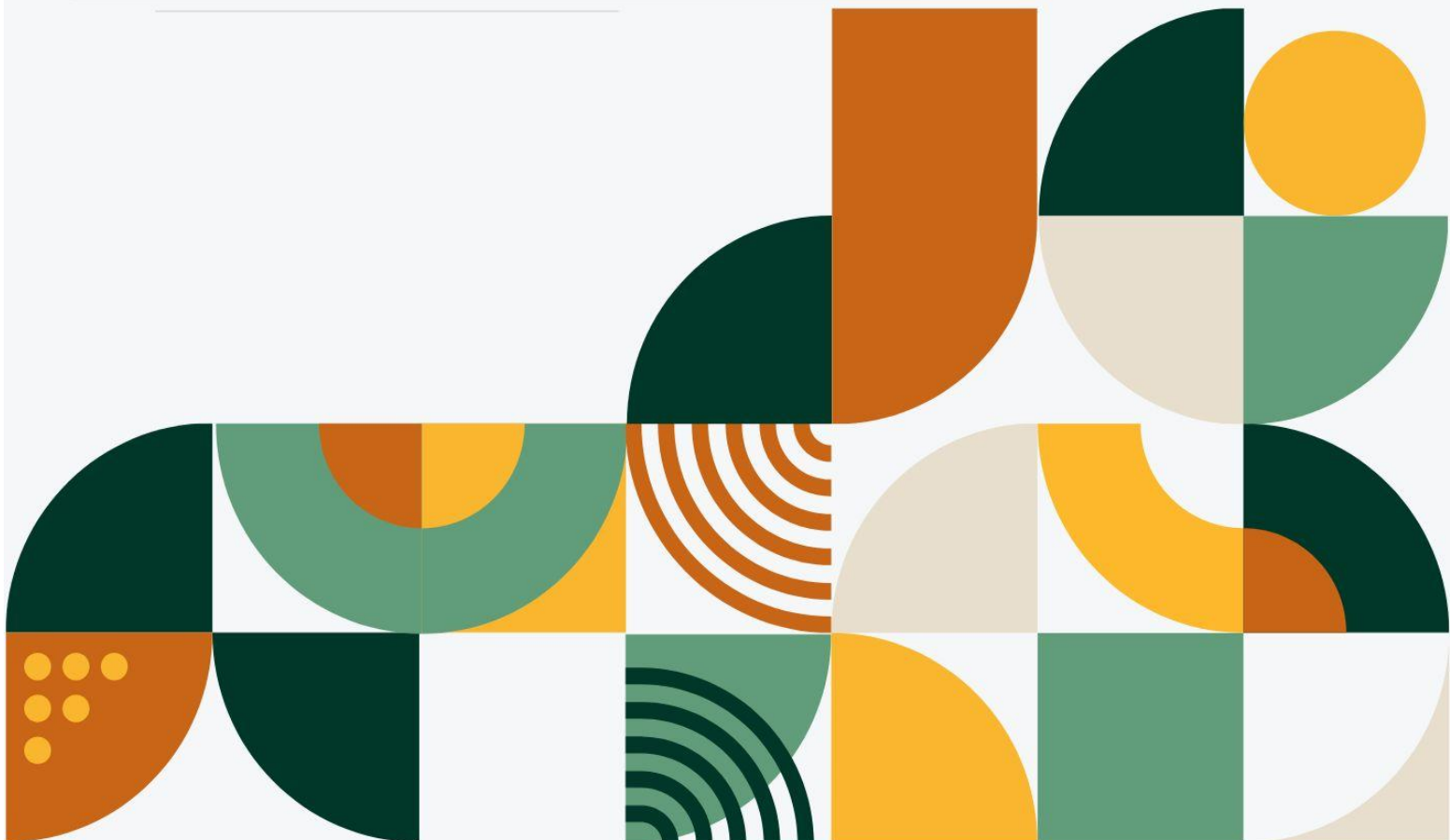


BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran melalui program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LKjIP memuat tentang informasi/uraian pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian kinerja kepada pimpinan unit kerja yang disepakati dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya serta pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan yang dijabarkan melalui program kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyusunan Laporan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB meliputi Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup dan Lampiran.

Dengan tersusunnya LKjIP ini maka diharapkan dapat memberikan informasi terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2025. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.

Mataram, April 2026
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Samsudin, S.Hut., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730812 199301 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mendapatkan alokasi APBD Provinsi NTB, yang didalamnya terdapat berbagai sumber pendanaan antara lain berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR). Mekanisme pengajuan anggaran telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip rencana strategis organisasi dengan memperhatikan tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan penjangkaran aspirasi serta usulan dari daerah dan masyarakat (Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi).

Dalam pelaksanaan program/kegiatan, Dinas LHK mengacu pada beberapa dokumen perencanaan baik tingkat Provinsi maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada tingkat provinsi, Dinas LHK NTB mengacu pada dokumen RPD NTB 2024-2026 dan RPJMD NTB Periode 2025-2029. Pada dokumen RPD Provinsi NTB, dalam rangka pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Dinas LHK NTB memiliki peran untuk terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sampai pada triwulan III Tahun 2025, belum terdapat capaian IKLH Provinsi NTB. Selain sektor lingkungan hidup dan kehutanan, Dinas LHK NTB menjadi OPD Pendukung dalam rangka mewujudkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri, peningkatan tata kelola pemerintahan daerah, serta transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah. Dinas LHK NTB menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis sebagaimana tertuang pada lampiran Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas LHK Provinsi NTB dengan Gubernur NTB sebagai berikut

Tabel 1 Realisasi Kinerja s/d Triwulan III 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Ketercapaian
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Realisasi s/d Triwulan III	
1	2	3	4	5	6	
1	Menurunnya tingkat pencemaran air	1 Persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu	%	25,57	-	Tidak Tercapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Ketercapaian	
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Realisasi s/d Triwulan III		
1	2	3	4	5	6		
2	Menurunnya tingkat pencemaran udara	1	Persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku mutu referensi	%	100	-	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan	1	Persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan	%	100	-	Tidak Tercapai
4	Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi	1	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon	%	30	-	Tidak Tercapai
5	Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi	1	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem	%	30	-	Tidak Tercapai
6	Meningkatnya upaya pengurangan sampah	1	Persentase pengurangan sampah	%	22,08	9,41	Tidak Tercapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Ketercapaian	
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Realisasi s/d Triwulan III		
1	2	3	4	5	6		
7	Meningkatnya upaya penanganan sampah	1	Persentase penanganan sampah	%	69,92	25,92	Tidak Tercapai
8	Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan	1	Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan	%	0.06-0.12	-	Tidak Tercapai
9	Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	1	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) (%)	%	10-15	-5,24	Tidak Tercapai
10	Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkaran hutan	1	Persentase desa di sekitar lingkaran hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial (%)	%	40	38,93	Tidak Tercapai
11	Meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi NTB	1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	%	3.5-4.2	-	Tidak Tercapai
12	Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap peningkatan PDRB Provinsi NTB	1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	5.3-6.3	-	Tidak Tercapai

Sedangkan pada RPJMD NTB 2025-2029, Dinas LHK NTB berperan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pendukung dalam perwujudan misi ke-3 yaitu “*Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agromaritim yang Berkelanjutan*”, serta memiliki peran utama dalam perwujudan misi ke-5 yaitu “*Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan*”. Di tingkat OPD, Dinas LHK NTB telah menetapkan dokumen Renstra periode 2025-2029 yang memiliki beberapa sasaran strategis dan target kinerja, yang akan dirincikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka pencapaian kinerja pada dokumen RPJMD Provinsi NTB, Dinas LHK NTB memiliki peran untuk mewujudkan beberapa sasaran pembangunan daerah antara lain :
 - a. Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan), dengan indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Kehutanan yang mencapai 1,11%* di tahun 2025
 - b. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2025, capaian IKLH Provinsi NTB adalah sebesar 77,40 poin atau melebihi target yang ditetapkan yaitu 76,19 (101,58%)
 - c. Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dengan indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan memiliki capaian kinerja sebesar 0,328 poin* pada tahun 2025 (99,09%* dari target yang ditetapkan yaitu 0,331 poin)
2. Dinas LHK Provinsi NTB telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagaimana tertuang pada lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan antara Kepala Dinas LHK Provinsi NTB dengan Gubernur NTB sebagai berikut.

Tabel 2 Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Ketercapaian	
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Realisasi		
1	2	3	4	5	6		
1	Menurunnya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Air	Indeks	74,36	71,24	Tidak Tercapai
		2	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	82,99	81,14	Tidak Tercapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Ketercapaian	
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Realisasi		
1	2	3	4	5	6		
		3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	75,62	81,44	Melampaui
		4	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah	%	8,83	76,50	Melampaui
2	Meningkatnya pengelolaan hutan lestari	1	Skor pengurangan ancaman kepunahan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati sektor kehutanan dan lahan	Skor	3,264	3,292	Melampaui
		2	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	77,63	77,36	Tidak Tercapai
		3	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan	%	50,27	*0,14	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya produksi hasil hutan dan jasa lingkungan	1	Persentase peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	%	4,20	229,83	Melampaui

3. Nilai serapan anggaran pada Dinas LHK Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai 86,50%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Aspek Strategis Organisasi.....	3
1.5 Isu Strategis.....	4
1.6 Cascading Kinerja	6
1.7 Proses Bisnis.....	1
1.8 Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi.....	1
1.9 Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2025	22
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	25
2.1. Perencanaan	25
2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026	25
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	35
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	44
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	63
3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 yang mengacu pada Renstra 2024-2026	63
3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 yang mengacu pada Renstra 2025-2029	107
b. Realisasi Anggaran	163
BAB IV. PENUTUP	175
LAMPIRAN.....	177

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Konsep Cascading Kinerja Dinas LHK NTB Berdasarkan Renstra 2024-2026 (IKU Gubernur : Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Emisi Gas Rumah Kaca).....	1
Gambar 2 Konsep Cascading Kinerja Dinas LHK NTB Berdasarkan Renstra 2024-2026 (IKU Gubernur : IKESOS, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah)	1
Gambar 3 Konsep Cascading Kinerja Dinas LHK NTB Berdasarkan Renstra 2024-2026 (IKU Gubernur : Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT))	1
Gambar 4 Konsep Cascading Kinerja Dinas LHK NTB Berdasarkan Renstra 2025 – 2029 (IKU Gubernur : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan)	1
Gambar 5 Konsep Cascading Kinerja Dinas LHK NTB Berdasarkan Renstra 2025 – 2029 (IKU Gubernur : Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan).....	1
Gambar 6 Peta Proses Bisnis Dinas LHK NTB.....	1
Gambar 7 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023.....	6
Gambar 8 Struktur Organisasi UPTD Balai TPA Regional	7
Gambar 9 Struktur Organisasi UPTD Balai Laboratorium Lingkungan.....	7
Gambar 10 Struktur Organisasi UPTD Balai KPH/Tahura	8
Gambar 11 Jumlah ASN Berdasarkan Eselon.....	18
Gambar 12 Jumlah ASN Berdasarkan Usia	18
Gambar 13 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Kinerja s/d Triwulan III 2025.....	ii
Tabel 2 Realisasi Kinerja Tahun 2025	v
Tabel 3 Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Eselon	18
Tabel 4 RATL LHE SAKIP Dinas LHK NTB Tahun 2025.....	22
Tabel 5 Tujuan dan Sasaran dalam Dokumen Renstra Dinas LHK NTB 2024-2026.....	28
Tabel 6 Tujuan dan Sasaran dalam Dokumen Renstra Dinas LHK NTB 2025-2029	33
Tabel 7 Indikator Kinerja Utama Dinas LHK NTB mengacu pada Dokumen Renstra 2024-2026.....	35
Tabel 8 Indikator Kinerja Utama Dinas LHK NTB mengacu pada Dokumen Renstra 2025-2029.....	40
Tabel 9 Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB Berdasarkan Renstra 2024-2026	44
Tabel 10 Rincian Pendanaan Dinas LHK NTB untuk mendukung Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB yang mengacu pada Renstra 2024-2026.....	45
Tabel 11 Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB Berdasarkan Renstra 2025-2029.....	47
Tabel 12 Rincian Pendanaan Dinas LHK NTB untuk mendukung Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB yang mengacu pada Renstra 2025-2029.....	47
Tabel 13 Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra 2024-2026 s/d Triwulan III 2025.....	64
Tabel 14 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Target Kinerja Persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu.....	71
Tabel 15 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan .	74
Tabel 16 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon	77
Tabel 17 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon	80

Tabel 18 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem	83
Tabel 19 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase Pengurangan Sampah.....	86
Tabel 20 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase Penanganan Sampah	90
Tabel 21 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase Peningkatan Tutupan Hutan dan Lahan.....	93
Tabel 22 Realisasi PAD Dinas LHK NTB per 30 September Tahun 2025.....	95
Tabel 23 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase Peningkatan Penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD).....	97
Tabel 24 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase desa di sekitar lingkaran hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial	100
Tabel 25 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu.....	103
Tabel 26 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang.....	106
Tabel 27 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	108
Tabel 28 Rekapitulasi Status Mutu Air Sungai di Provinsi NTB	113
Tabel 29 Sekolah Adiwiyata Provinsi NTB Tahun 2025.....	116
Tabel 30 Sekolah Adiwiyata Nasional NTB Tahun 2025	118
Tabel 31 Rekapitulasi Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2025	129
Tabel 32 Data Limbah B3 Medis Fasyankes Tahun 2025	135
Tabel 33 Perhitungan Skor Pengurangan Ancaman Kepunahan dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	137
Tabel 34 Indikator Penyusun Skor Pengurangan Ancaman Kepunahan dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	140
Tabel 35 Kondisi Tutupan Lahan Berdasarkan 22 Kelas Tutupan Lahan.	144
Tabel 36 Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai se-NTB	149
Tabel 37 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya pengelolaan hutan lestari”	153
Tabel 38 Produksi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan Tahun 2025.....	154
Tabel 39 Produksi Kehutanan dan Estimasi Nilai Tambah Bruto Sub Sektor Kehutanan Tahun 2025	157

Tabel 40 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya produksi hasil hutan dan jasa lingkungan”.....	161
Tabel 41 Realisasi Anggaran s/d Triwulan III per Program berdasarkan Sasaran Strategis Renstra 2024-2026.....	164
Tabel 42 Realisasi Anggaran per Program berdasarkan Sasaran Strategis Renstra 2025-2029.....	169
Tabel 43 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	174

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sekaligus menjadi alat pertanggungjawaban secara periodik sebagai kontrol jalannya kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB merupakan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB berperan penting dalam pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB periode 2025-2029, yaitu (1) Terwujudnya peningkatan produktivitas sektor kehutanan, (2) Terwujudnya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup berkualitas, dan (3) Terwujudnya peningkatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem. Program/kegiatan prioritas mengarah pada pencapaian (1) Pertumbuhan PDRB Kehutanan, (2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan (3) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan.

Sebagai instansi yang melaksanakan urusan wajib pemerintah bidang Lingkungan Hidup dan urusan pilihan bidang Kehutanan di Tingkat Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB juga dituntut melakukan pembenahan kinerja secara terus menerus. Pembenahan tersebut diharapkan menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Diharapkan juga akan

mewujudkan pemerintah yang baik dan akuntabel melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2025 ini menjadi bagian dari upaya menggambarkan berbagai hasil kinerja yang dicapai selama kurun waktu Tahun 2025. Laporan ini menjadi salah satu dokumen yang mendasari upaya perbaikan untuk pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada Tahun 2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan tingkat akuntabilitas melalui klarifikasi output dan outcome demi terwujudnya organisasi yang akuntabel. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini adalah :

1. Mengetahui capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2025;
2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu Tahun 2025;
3. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja Dinas LHK Provinsi NTB di Tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun LKJIP Dinas LHK NTB Tahun 2025 ini, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2045;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan kehutanan, dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya peningkatan produktivitas sektor agromatirim, khususnya pada sub sektor kehutanan.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan salah satu pilar penting dalam menghadapi tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sektor lingkungan hidup dan kehutanan juga merupakan pilar dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB) yang fokus pada pencapaian tujuan SDG 6 (Air bersih dan Sanitasi Layak), SDG 12 Konsumsi dan Produksi, SDG 13 9 Penanganan Perubahan Iklim), SDG 14 (Ekosistem Lautan), dan SDG 15 (Ekosistem Darat). Dinas LHK NTB juga memiliki peran strategis dalam mewujudkan salah satu program unggulan dalam RPJMD yaitu “NTB Lestari Berkelanjutan”. Program ini bertujuan untuk mewujudkan kondisi dimana

NTB memiliki pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dengan penguatan sektor kehutanan. Selain itu, Dinas LHK NTB juga turut mendukung program unggulan lainnya yaitu NTB Agro Maritim, yang bertujuan meningkatkan produktivitas ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat salah satunya melalui pengembangan ekonomi hijau yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim.

1.5 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan juga senantiasa dihadapkan pada permasalahan yang sangat dinamis. Dinamika tersebut terkait dengan adanya pengaruh dari tindakan manusia dan adanya gangguan alam. Beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di NTB antara lain kualitas dan daya dukung lingkungan belum optimal, penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan penegakan hukum) belum optimal, terjadinya degradasi ekosistem hutan, serta penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumberdaya alam yang masih lemah.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi NTB adalah indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Provinsi NTB. IKLH berfokus pada penilaian kualitas air, udara, air laut dan tutupan lahan. Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sarana mengukur kualitas badan air melalui beberapa parameter pengukuran antara lain DO, pH, BOD, TSS, CO, Ntrat, Total Fosfat dan Fecal Coliform. Kondisinya di Provinsi NTB dalam 5 tahun terakhir masih berada pada kategori buruk (nilai indeks 25-50). Hal ini disebabkan oleh sebagian besar sampel memiliki nilai DO yang tidak memenuhi nilai baku mutu dan nilai fecal coliform yang tinggi. Oksigen terlarut atau DO (*dissolved oxygen*) adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorbsi atmosfer/udara. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh makhluk hidup dalam air, jika kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi

anaerobik yang mungkin saja terjadi. Hal ini berkaitan juga dengan nilai BOD, dimana jika nilai BOD tinggi maka akan mempengaruhi nilai DO dalam air. Biological Oxygen Demand (BOD) adalah ukuran oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme untuk menguraikan sampah. Sungai yang memiliki kadar BOD tinggi merupakan indikasi tingginya pencemaran di sungai karena oksigen terlarut yang tersedia di dalam air digunakan oleh bakteri, dan hal ini mengakibatkan berkurangnya oksigen yang tersedia untuk ikan dan makhluk air lainnya. Fecal coliform adalah coliform yang berasal dari feses baik manusia maupun binatang, fecal coliform yang tinggi dapat membahayakan lingkungan, dekomposisi aerobiknya dapat menurunkan oksigen terlarut sehingga menimbulkan kematian pada ikan dan organisme akuatik lainnya. Fecal coliform tinggi juga dapat menekan pertumbuhan bakteri menguntungkan sehingga merusak keseimbangan akuatik secara keseluruhan.

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, IKU Provinsi NTB berada pada kategori sangat baik karena kedua parameter yang diukur di seluruh titik sampel yaitu SO₂ dan NO₂ berada di bawah baku mutu. Komponen pembentuk IKLH lainnya ialah Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), yaitu suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pelaksanaan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh instansi pelaksana atau berkerja sama dengan pihak ketiga yaitu laboratorium yang teregistrasi. Pengambilan sampel dilaksanakan sesuai prosedur pelaksanaan pengambilan sampel air laut mengikuti tata cara pengambilan sampel air laut sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang mengatur tentang Metode Pengambilan Contoh Uji Air Laut. Pemantauan kualitas air laut dalam 5 tahun terakhir dilakukan pada 23 titik lokasi yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi NTB, dan hasilnya berada dalam kategori sedang (nilai 50-70) dan meningkat di tahun 2021 hingga 2024 ke kategori baik (nilai 70-90).

Selain kualitas air, udara, dan air laut yang masuk dalam perhitungan IKLH, Indeks Kualitas Lahan (IKL) juga menjadi salah satu komponen pembentuknya. Berdasarkan Permen LHK Nomor 21 Tahun 2021 tentang nilai indeks ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain data tutupan hutan, data tutupan lahan, data ruang terbuka hijau, dan data rehabilitasi hutan dan lahan. Luas lahan kritis di Provinsi NTB mencapai 490.115 Ha atau sekitar 41,29% dari luas wilayahnya. Lahan kritis yang dimaksud yaitu lahan kritis yang terdapat di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Faktor penyebab lahan kritis adalah perambahan hutan, penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan, pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak

berazaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan belum berjalan, pola pengelolaan lahan tidak konservatif dan pengalihan status lahan untuk berbagai kepentingan.

Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di atas 60 selama 5 tahun terakhir. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan HHBK, serta pengamanan hutan. Tekanan lainnya terhadap lingkungan adalah masih tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan dan hasil hutannya. Gangguan keamanan hutan belum terpetakan dengan baik sehingga lokasi dan intensitas gangguan tidak dapat diantisipasi dalam rangka pengendalian dan pengamanan hutan yang efektif dan efisien. Sebagian besar lahan perambahan saat ini telah berubah fungsi menjadi areal tanaman jagung. Di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi namun di sisi lainnya mendorong degradasi hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir, longsor dan lain-lain, jika tidak ditangani dengan segera.

Kualitas lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh bagaimana pengolahan sampah yang dilakukan. Pengelolaan sampah dibagi menjadi dua upaya, yaitu melalui penanganan sampah dan pengurangan sampah. Terdapat beberapa permasalahan pengelolaan sampah, antara lain pada terbatasnya lahan TPA, kurangnya sarpras untuk pemrosesan akhir, dan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (khususnya 3R) serta kelembagaan yang tidak berjalan sehingga banyak infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak berfungsi.

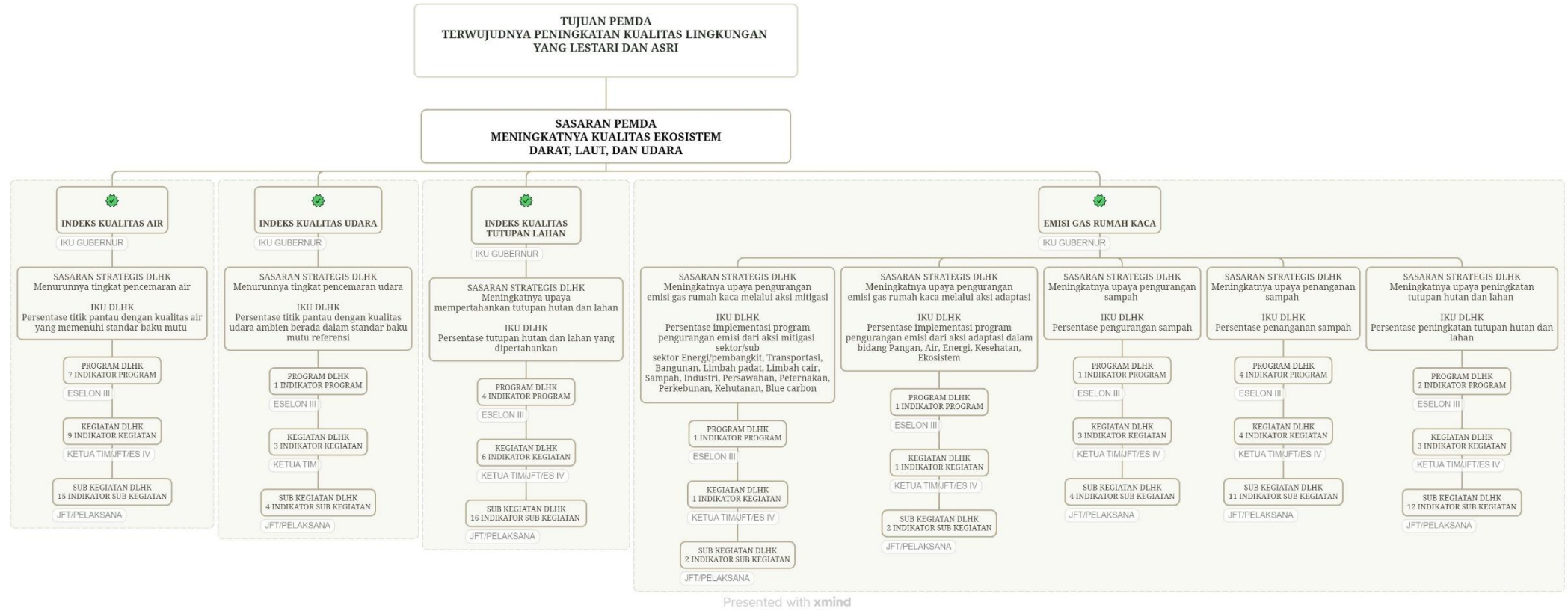
Dari permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan isu strategis sektor lingkungan hidup dan kehutanan sebagai berikut :

1. Penurunan kualitas lingkungan hidup;
2. Pengelolaan hutan belum lestari;
3. Pengelolaan sampah belum optimal;
4. Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) belum optimal.

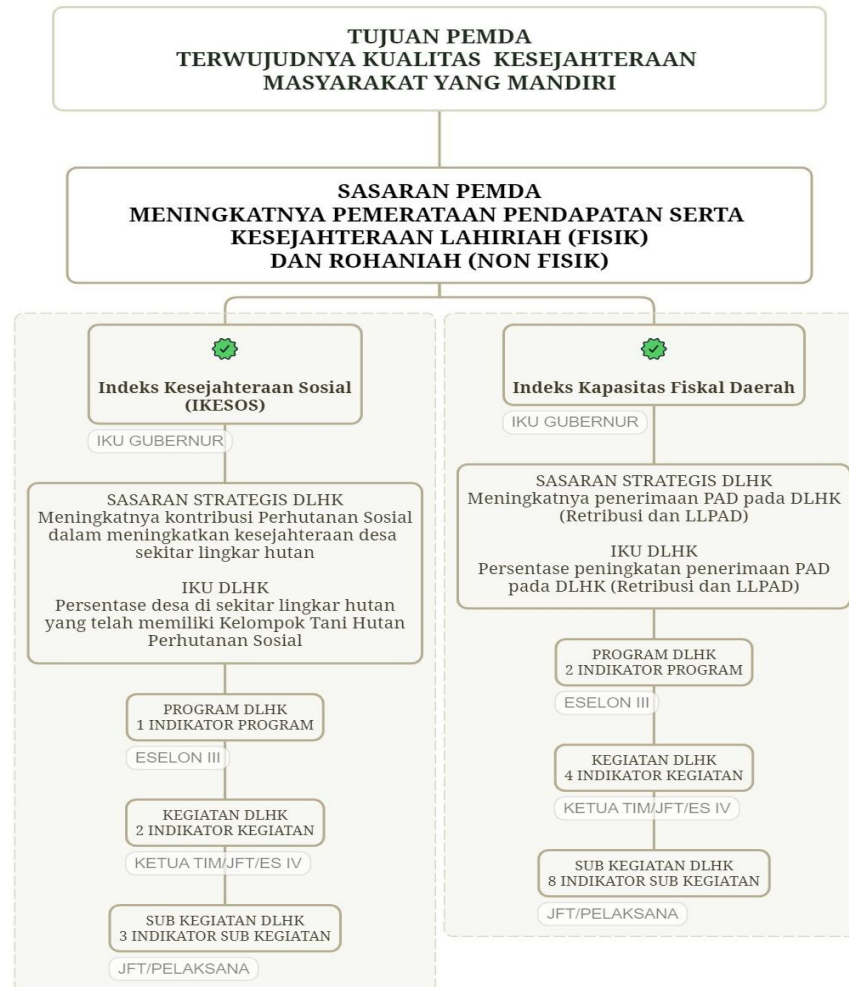
1.6 Cascading Kinerja

Dalam rangka mendorong implementasi organisasi berbasis kinerja (*Performance Based Organization*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, diharapkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sebagai tindak lanjut, Dinas LHK NTB telah menyusun cascading kinerja yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal (*vertical alignment*) berdasarkan Renstra 2024 – 2026 dan Renstra 2025 - 2029,

dari atas ke bawah dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Adapun skema cascading kinerja Dinas LHK NTB sebagai berikut.

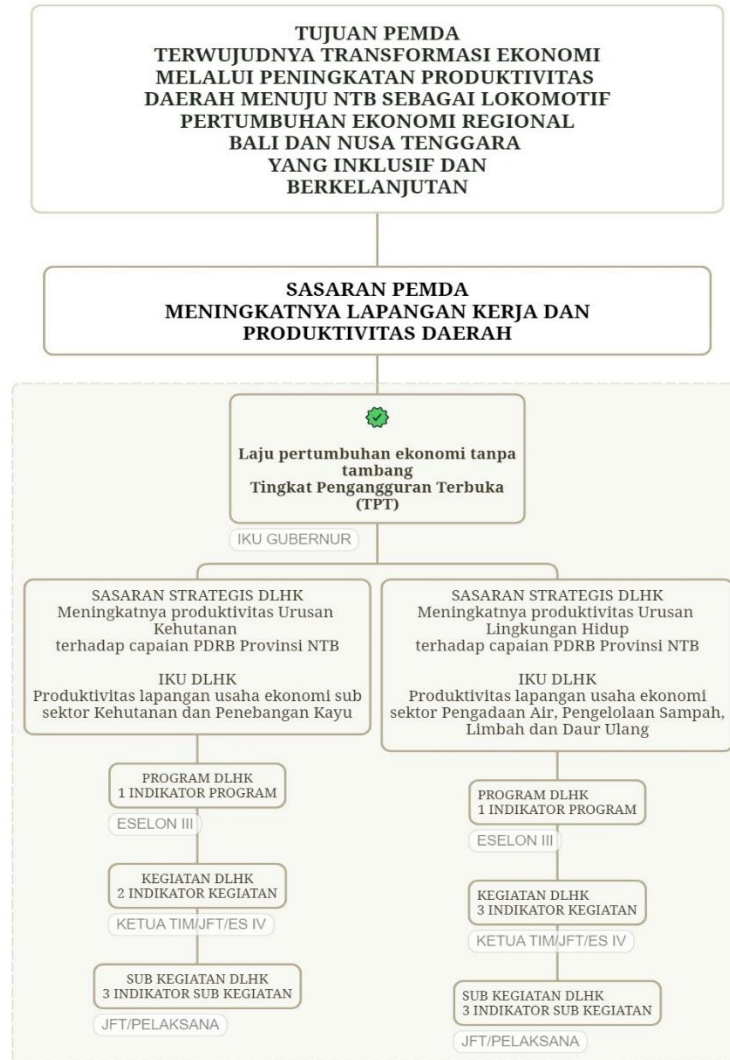


Gambar 1 Konsep Cascading Kinerja Dinas LHK NTB Berdasarkan Renstra 2024-2026 (IKU Gubernur : Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Emisi Gas Rumah Kaca)



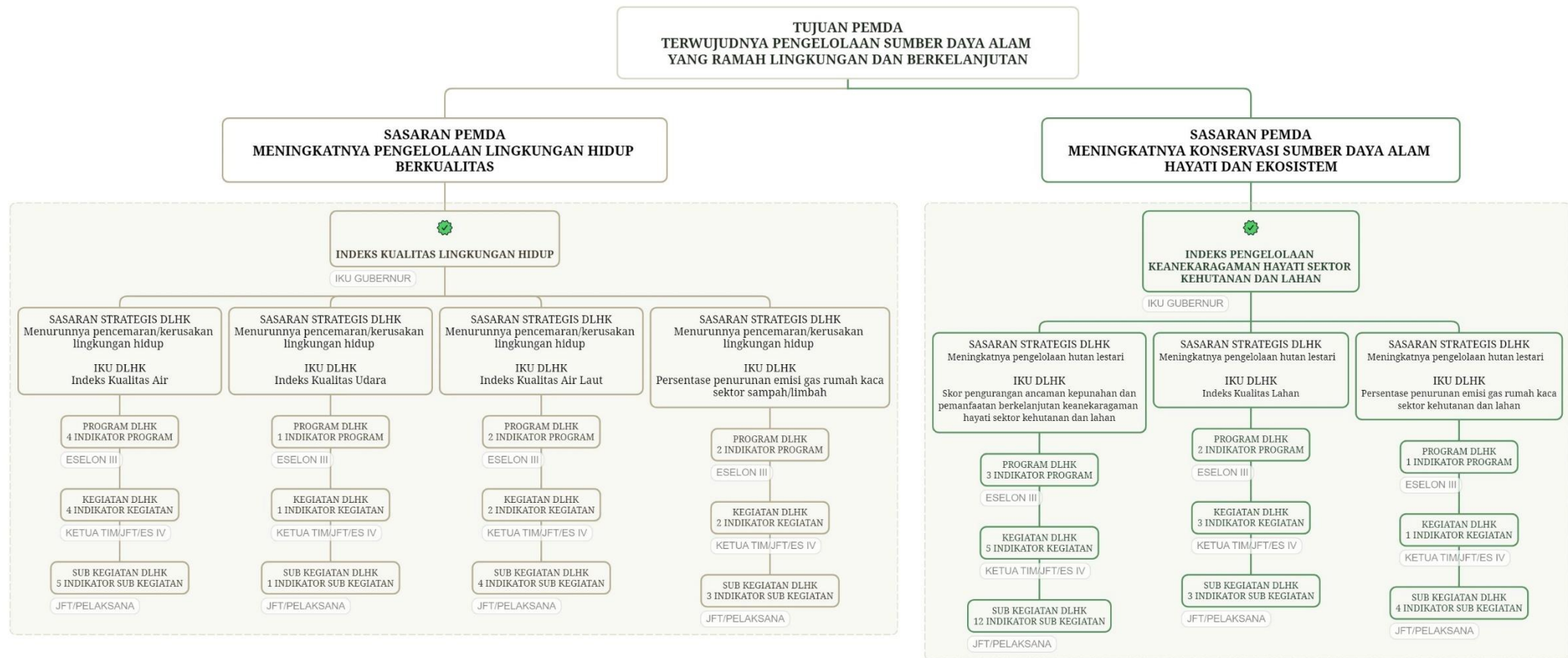
Presented with xmind

Gambar 2 Konsep Cascading Kinerja Dinas LHK NTB Berdasarkan Renstra 2024-2026 (IKU Gubernur : IKESOS, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah)



Presented with xmind

Gambar 3 Konsep Cascading Kinerja Dinas LHK NTB Berdasarkan Renstra 2024-2026 (IKU Gubernur : Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT))



Presented with xmind

Gambar 4 Konsep Cascading Kinerja Dinas LHK NTB Berdasarkan Renstra 2025 – 2029 (IKU Gubernur : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan)

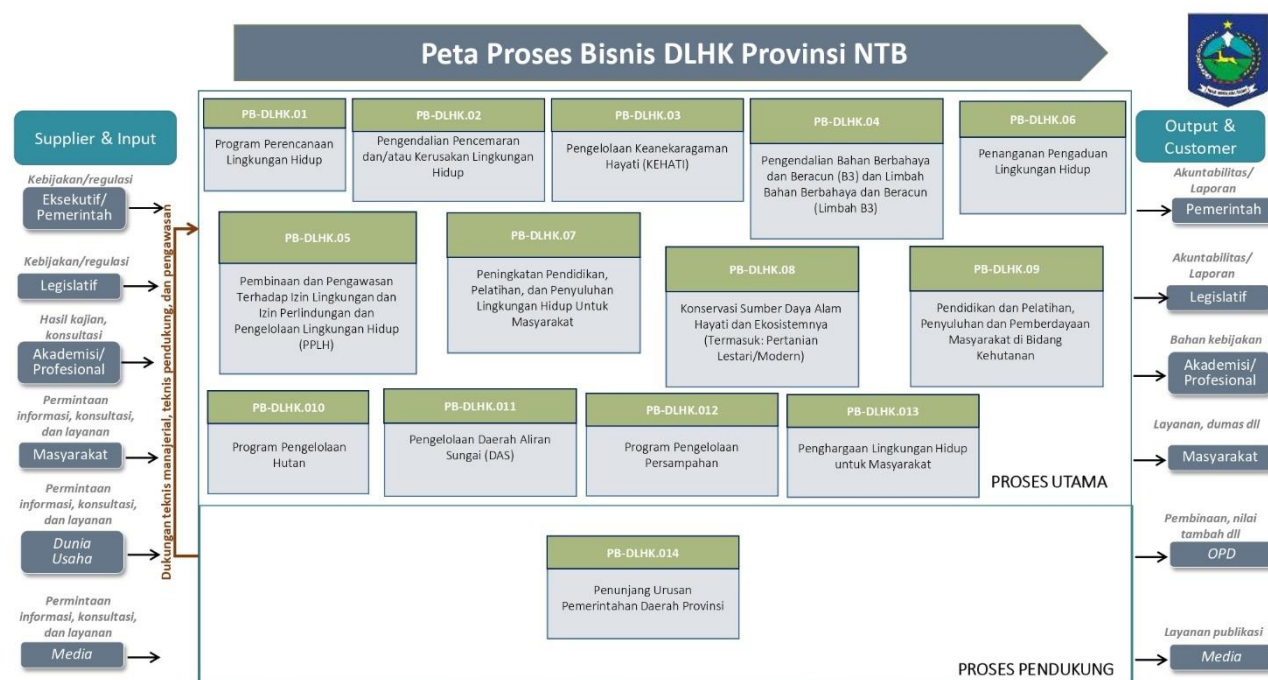


Presented with xmind

Gambar 5 Konsep Cascading Kinerja Dinas LHK NTB Berdasarkan Renstra 2025 – 2029 (IKU Gubernur : Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)

1.7 Proses Bisnis

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa Perangkat Daerah menyusun Peta Proses Bisnis guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Proses Bisnis Dinas LHK NTB telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 188.4/365/Skrt-Dislkh/2022 sebagai berikut.



Gambar 6 Peta Proses Bisnis Dinas LHK NTB

1.8 Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Penyelenggaraan kedua urusan tersebut dilakukan oleh (a). Kepala Dinas; (b). Sekretariat, terdiri atas: (1). Sub Bagian Keuangan; dan (2). Sub Bagian Umum; (c). Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran; (d). Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; (e). Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan; (f). Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; (g). Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat; (h). Kelompok Jabatan Fungsional; dan (i). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Adapun tugas Kepala Dinas adalah merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Planologi dan Pemanfaatan Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam , Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesekretariatan. Adapun fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan strategis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mempunyai tugas menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan Program, Keuangan dan Umum. Adapun fungsinya :

1. Penyusunan kebijakan strategis di bidang Kesekretariatan;
2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Kesekretariatan;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesekretariatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup kegiatan Pengelolaan Persampahan, dan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan kebijakan strategis di bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran;
2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup kegiatan Penataan Lingkungan Hidup, Pengaduan dan Pengawasan serta Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan kebijakan strategis di bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pengendalian, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kehutanan kegiatan Planologi Hutan, Pemanfaatan Hutan serta Pengolahan Hasil Hutan. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan kebijakan strategis Planologi dan Pemanfaatan Hutan;
2. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pengendalian, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kehutanan kegiatan Perlindungan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Penegakan Hukum serta Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan kebijakan strategis di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
2. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang

tugas.

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pengendalian, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kehutanan. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Jabatan fungsional yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain :

1. Penyuluh Kehutanan, bertugas untuk melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengembangan, dan pemantauan di bidang penyuluhan kehutanan;
2. Pengendali Ekosistem Hutan, bertugas untuk melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem;
3. Polisi Kehutanan, bertugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan;
4. Surveyor Pemetaan, bertugas untuk melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survei dan pemetaan;
5. Pranata Laboratorium, bertugas untuk memastikan kegiatan teknis operasional laboratorium yang memenuhi syarat standart Laboratorium dalam lingkup kegiatan pengambilan sampel, pengujian dan Bimbingan serta penyempurnaan instruksi kerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
6. Perencana, bertugas untuk identifikasi masalah/isu strategis rencana pembangunan, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, penyusunan adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

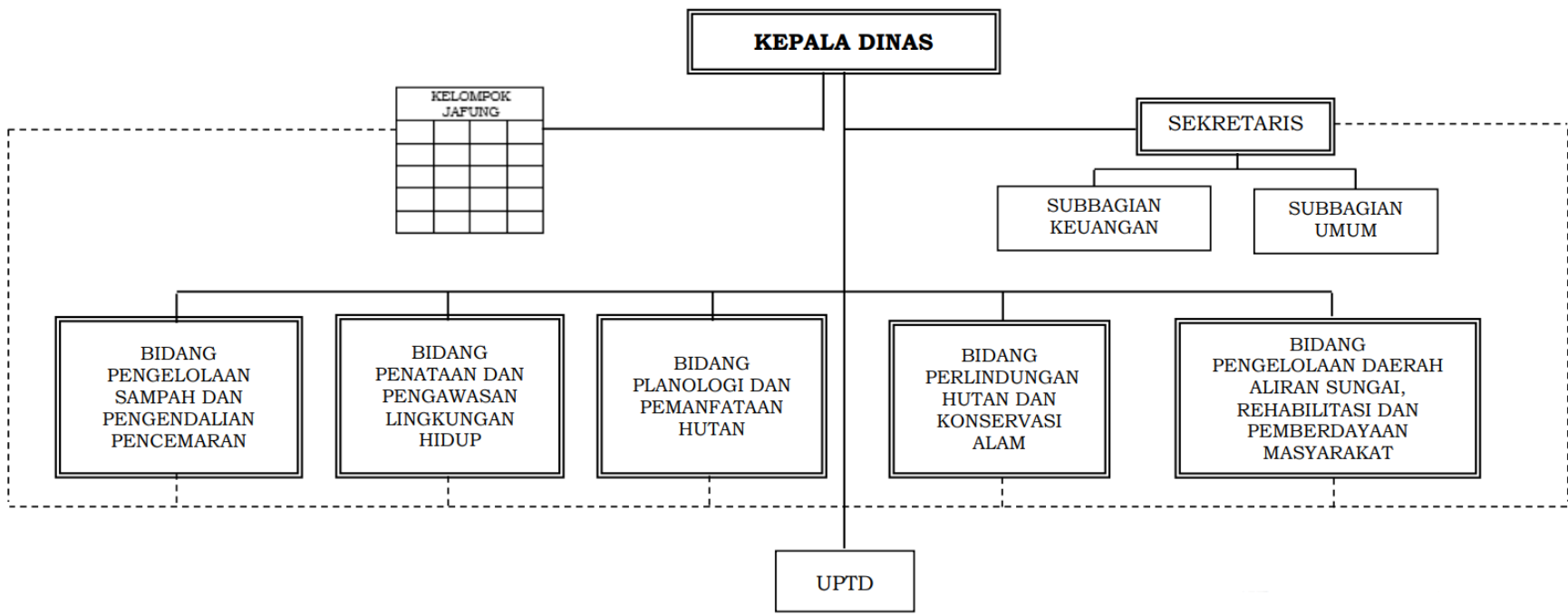
Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat; terdiri atas:
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum.
- c) Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran;

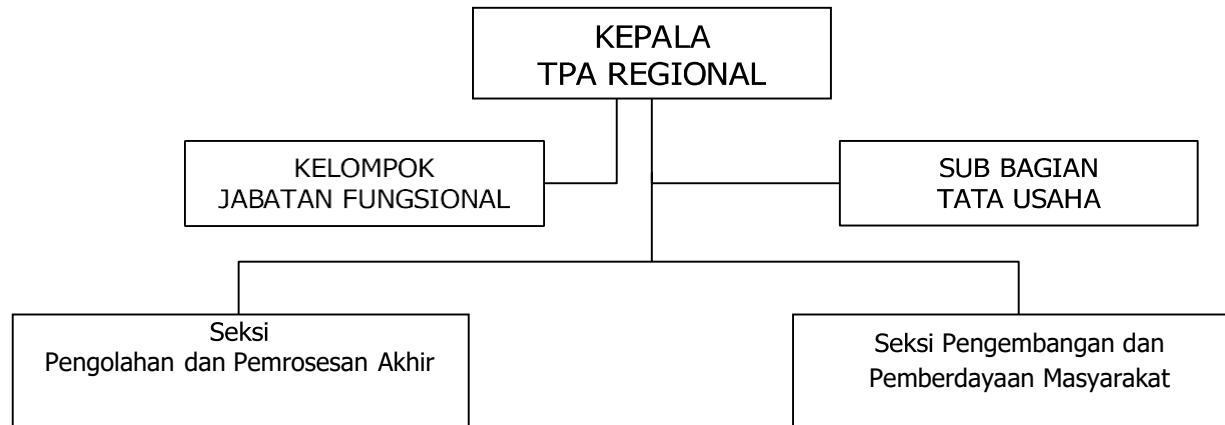
- d) Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
- e) Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan;
- f) Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- g) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditetapkan 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan klasifikasi "A", terdiri atas:

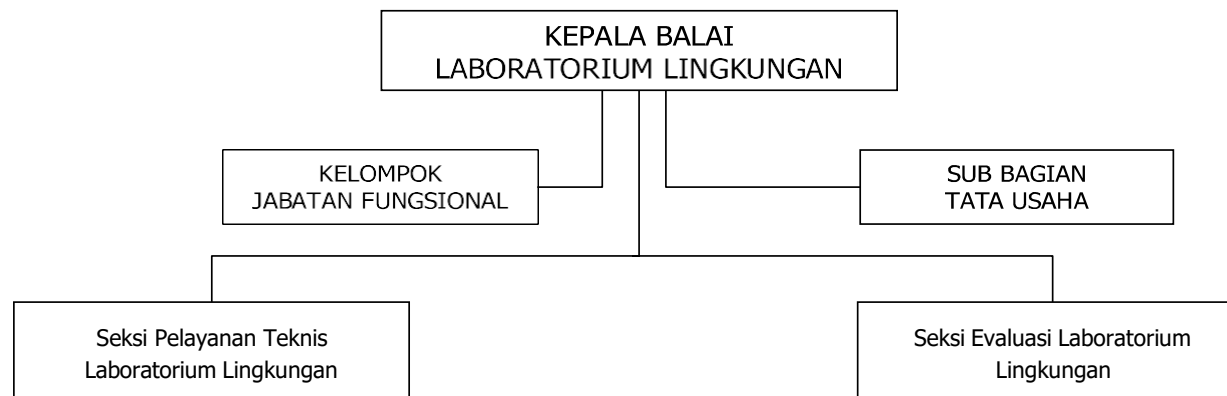
1. Balai Laboratorium Lingkungan;
2. Balai Taman Hutan Raya NURAKSA;
3. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat;
4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur;
5. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejong Mataiyang;
6. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh;
7. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang;
8. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang;
9. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora;
10. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo;
11. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi;
12. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa;
13. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu;
14. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Madapangga Rompu Waworada;
15. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh;
16. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura;
17. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas
18. Balai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB.



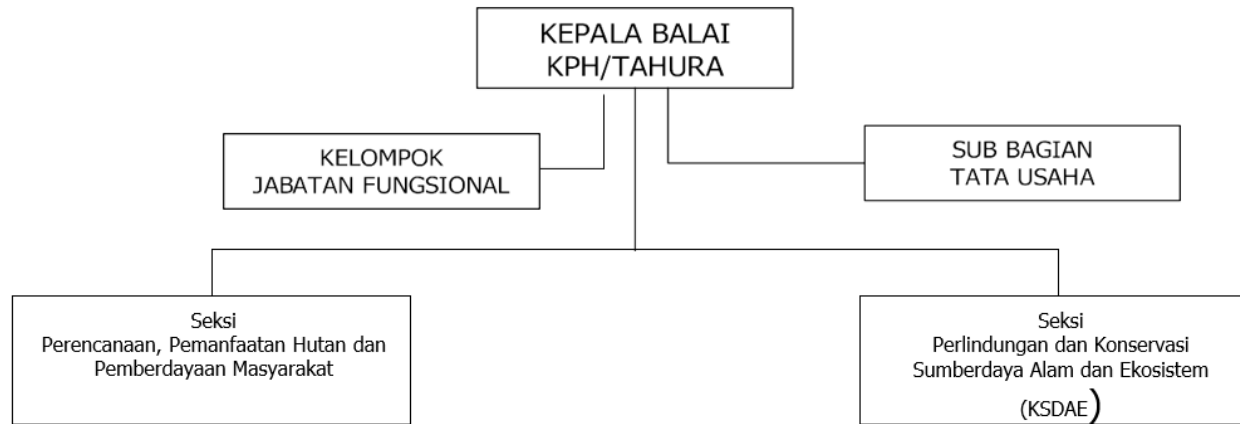
Gambar 7 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023



Gambar 8 Struktur Organisasi UPTD Balai TPA Regional



Gambar 9 Struktur Organisasi UPTD Balai Laboratorium Lingkungan

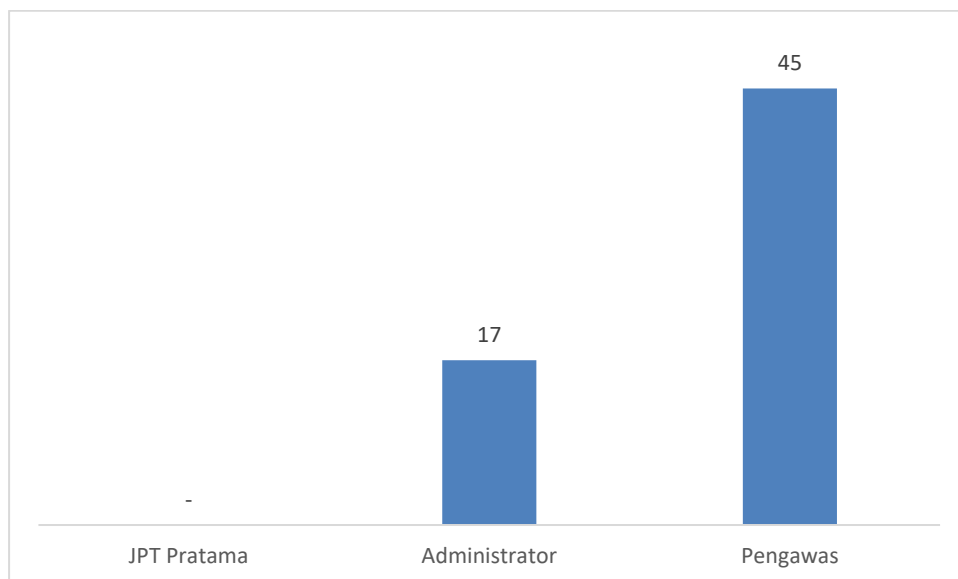


Gambar 10 Struktur Organisasi UPTD Balai KPH/Tahura

Dalam pelaksanaan organisasi, dibutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh sektor lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya yang bersifat spesifik di Nusa Tenggara Barat. Pengetahuan dan pemahaman tersebut dibuktikan dengan adanya kompetensi atau kemampuan teknis setiap aparatur sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Tabel 3 Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Eselon

JPT Pratama	Administrator	Pengawas	Total
-	17	45	62

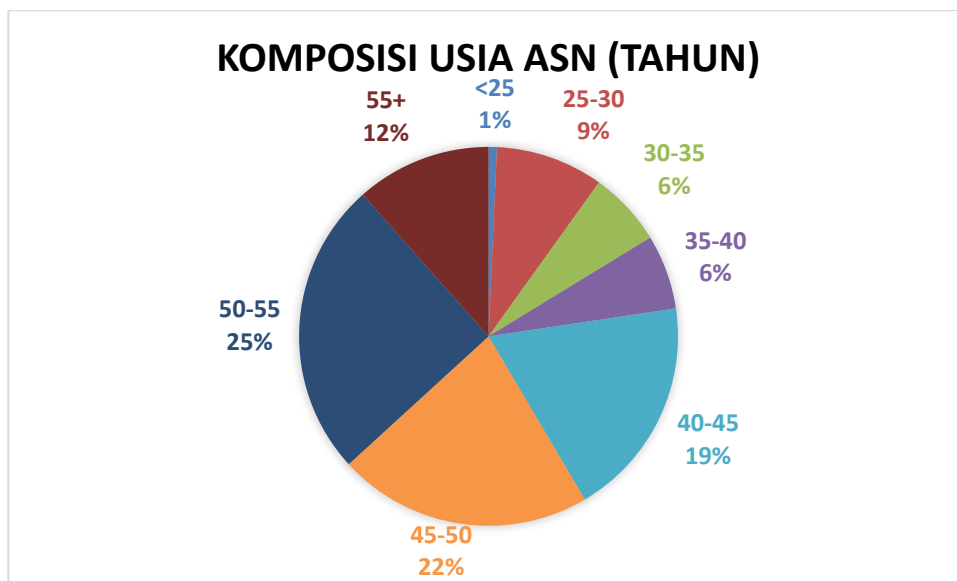


Gambar 11 Jumlah ASN Berdasarkan Eselon

Jumlah ASN berdasarkan kelas usia yaitu, untuk usia dibawah 25 tahun terdapat 3 orang, usia 25-30 sebanyak 39 orang, usia 30-35 sebanyak 27 orang, usia 35-40 sebanyak 35 orang, usia 40-45 sebanyak 80 orang, 45-50 sebanyak 92 orang, 50-55 sebanyak 107 orang, dan di atas 55 tahun sebanyak 49 orang.

Tabel 2 Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Usia

ASN	USIA								Total
	<25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55+	
PNS	2	23	15	20	75	89	102	49	375
P3K	1	16	12	7	5	3	5	-	49
Total	3	39	27	35	80	92	107	49	424



Gambar 12 Jumlah ASN Berdasarkan Usia

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 321 orang (76%) dan jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 103 orang (24%).

Tabel 3 Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin

ASN	JENIS KELAMIN		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
PNS	291	84	375
P3K	30	19	49
Total	321	103	424

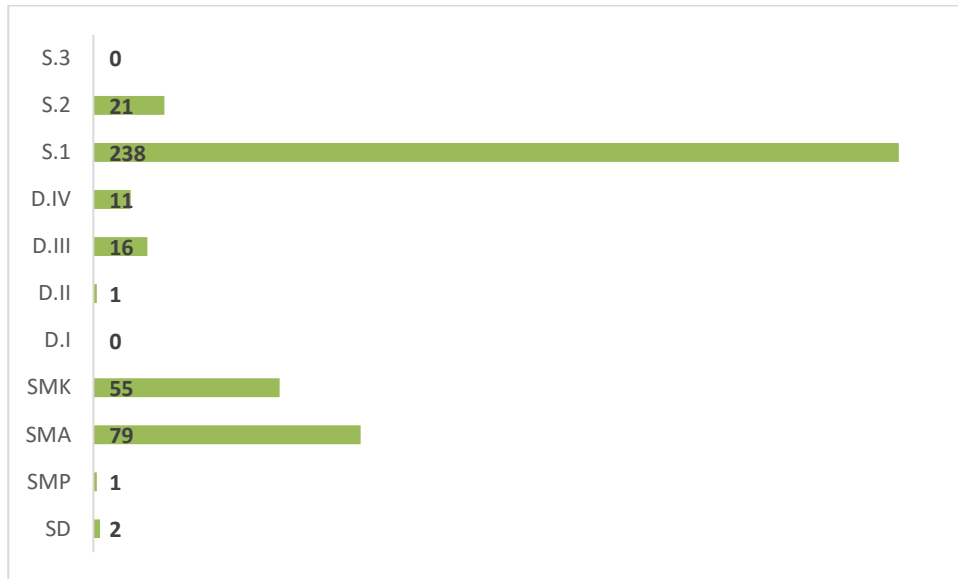


Gambar 13 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai berpendidikan SD-SMP sebanyak 3 orang, SMA/Sederajat sebanyak 134 orang, D1-D3 sebanyak 17 orang, S1 sebanyak 238 orang, S2 sebanyak 21 orang.

Tabel 4 Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Tingkat Pendidikan

ASN	TINGKAT PENDIDIKAN												Total
	SD	SMP	SMPK	SMA	SMK	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	
PNS	2	1	-	73	40	-	1	11	10	216	21	-	375
P3K	-	-	-	6	15	-	-	5	1	22	-	-	49
Total	2	1	0	79	55	0	1	16	11	238	21	0	424



Gambar 8 Komposisi Pegawai Dinas LHK Provinsi NTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.9 Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2025

Menindaklanjuti atas LHE SAKIP Dinas LHK NTB yang telah disampaikan melalui surat Inspektur Daerah Provinsi NTB Nomor 700/272-V/LHE.Itp.II-INSP/2025 tanggal 20 Mei 2025, Dinas LHK NTB telah menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) LHE SAKIP sebagaimana rincian pada tabel berikut

Tabel 4 RATL LHE SAKIP Dinas LHK NTB Tahun 2025

No	Catatan/ Rekomendasi	RATL	Link Bukti Dukung
1	Perencanaan Kinerja		
	Pohon kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	Menyusun pohon kinerja terkait informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	https://drive.google.com/drive/folders/1oVeAgOXdPLcXY-zNXqQRf5HZpZySqxr7?usp=sharing
	Cascading belum mencantumkan informasi terkait nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan	Menyusun cascading dengan mencantumkan informasi terkait nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan	
	Masih terdapat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang tidak selaras dengan Pohon Kinerja dan cascading	Menyelaraskan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan Pohon Kinerja dan cascading	

No	Catatan/ Rekomendasi	RATL	Link Bukti Dukung
2	Pengukuran Kinerja		
	Belum dilengkapi laporan monev pencapaian target kinerja Perangkat Daerah triwulanan	Melengkapi dokumen dengan capaian rencana aksi atas kinerja perangkat daerah triwulan I s/d IV	https://drive.google.com/drive/folders/1fCxms7YbYd5SK2Nll_MLaBO4W6Fz2hb3?usp=sharing
3	Pelaporan Kinerja		
	Dalam laporan kinerja belum membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	Menyempurnakan penyajian laporan kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	https://drive.google.com/drive/folders/1LvVeQIFWuJecdAOUy9pp8lluu32BgPhN?usp=sharing
	Belum menambahkan informasi terkait crosscutting dengan Perangkat Daerah/ pihak lain yang berkontribusi dalam pencapaian target kinerja atas sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menambahkan informasi terkait crosscutting dengan Perangkat Daerah/ pihak lain yang berkontribusi dalam pencapaian target kinerja atas sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	

No .	Catatan/ Rekomendasi	RATL	Link Bukti Dukung
		contohnya pada pencapaian target rehabilitasi hutan dan lahan	
4	Evaluasi Internal		
	Membuat rencana aksi tindak lanjut (RATL) atas hasil evaluasi implementasi SAKIP dan menyertakan bukti perbaikan sesuai rekomendasi	Menyusun rencana aksi tindak lanjut (RATL) atas hasil evaluasi implementasi SAKIP dan menyertakan bukti perbaikan sesuai rekomendasi	https://drive.google.com/drive/folders/1ncL87j_yRAikG19lhoA91nBaMjCTNr1T?usp=sharing

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB), penentuan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas LHK NTB tahun 2024 - 2026 didasarkan pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB tahun 2024-2026. Dokumen RPD Daerah Tahun 2024-2026 tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah, sehingga tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan visi, misi, sasaran pokok serta arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025, disertai isu-isu strategis yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026, terdapat salah satu tujuan yang terkait langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Yang Lestari dan Asri”. Pada tujuan ini, Dinas LHK NTB bertindak sebagai OPD penanggung jawab atau OPD utama. Tujuan ini berfokus pada pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tujuan tersebut memiliki 2 (dua) sasaran strategis, yaitu (1) Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi risiko bencana, dan (2) Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara. Sebagai bentuk penerjemahan tujuan dan sasaran RPD Provinsi NTB 2024-2026 ke dalam dokumen Renstra 2024-2026, Dinas LHK NTB menetapkan tujuan OPD yaitu (1) Terwujudnya peningkatan kualitas ekosistem darat, laut dan udara, (2) Terwujudnya pengurangan emisi gas rumah kaca, (3) Terwujudnya manajemen pengelolaan sampah yang baik, dan (4) Terwujudnya pemulihan fungsi ekologis hutan. Sedangkan sasaran strategis OPD yang ditetapkan antara lain :

1. Menurunnya tingkat pencemaran air
2. Menurunnya tingkat pencemaran udara
3. Meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan
4. Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi
5. Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi
6. Meningkatnya upaya pengurangan sampah
7. Meningkatnya upaya penanganan sampah
8. Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan

Dinas LHK NTB juga berperan sebagai OPD pendukung dalam pencapaian beberapa tujuan RPD lainnya antara lain pada tujuan RPD “Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Yang Mandiri”. Tujuan ini berfokus pada (1) Penurunan Angka Kemiskinan, (2) Penurunan Prevalensi Stunting, dan (3) Gini Rasio. Tujuan tersebut memiliki 2 (dua) sasaran strategis, antara lain (1) Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik), dan (2) Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan. Sehingga dalam dokumen Renstra, tujuan yang ditetapkan ialah Terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa sekitar lingkaran hutan, dengan sasaran strategis Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkaran hutan.

Tujuan RPD lainnya ialah Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, yang berfokus pada pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi, dan memiliki 2 (dua) sasaran strategis antara lain (1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan public, dan (2) Meningkatnya kemandirian fiskal daerah. Untuk mendukung tujuan dan sasaran RPD tersebut, maka dalam dokumen Renstra ditetapkan tujuan yaitu Terwujudnya kontribusi Dinas LHK terhadap capaian PAD Provinsi NTB, dengan sasaran strategis Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD).

Tujuan RPD terakhir yang didukung oleh Dinas LHK NTB ialah Terwujudnya Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas Daerah Menuju NTB Sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali Dan Nusa Tenggara Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, yang berfokus pada pencapaian (1) Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB, dan (2) Persentase

peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB. Tujuan ini memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah. Sehubungan dengan tujuan dan sasaran RPD tersebut, maka Dinas LHK NTB menetapkan tujuan yaitu Terwujudnya kontribusi Dinas LHK terhadap capaian PDRB Provinsi NTB dengan sasaran strategis (1) Meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi dan (2) Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap peningkatan PDRB Provinsi NTB.

Tabel 5 Tujuan dan Sasaran dalam Dokumen Renstra Dinas LHK NTB 2024-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target			Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
			2024	2025	2026			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya peningkatan kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Air (IKA)	45,71	46,8	47,9	Menurunnya tingkat pencemaran air	Persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu	23,25	25,57	28,13
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	75-89	50-75	<50	Menurunnya tingkat pencemaran udara	Persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku mutu referensi	100	100	100
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	65,56	65,53	65,51	Meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan	Persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan	100	100	100
2	Terwujudnya pengurangan emisi gas rumah kaca	Persentase implementasi program mitigasi dan adaptasi	30	30	30	Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi	30	30	30

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target			Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
			2024	2025	2026			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		perubahan iklim (%)					sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon			
						Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem	30	30	30

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target			Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
			2024	2025	2026			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Terwujudnya manajemen pengelolaan sampah yang baik	Persentase pengelolaan sampah (%)	90	90	90	Meningkatnya upaya pengurangan sampah	Persentase pengurangan sampah	21,6	21,6	21,6
						Meningkatnya upaya penanganan sampah	Persentase penanganan sampah	68,4	68,4	68,4
4	Terwujudnya pemulihan fungsi ekologis hutan	Persentase pemulihan sumber-sumber mata air yang telah hilang (%)	16-20	16-20	16-20	Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan	Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan	0,06-0,12	0,06-0,12	0,06-0,12
5	Terwujudnya kontribusi Dinas LHK terhadap capaian PAD Provinsi NTB	Persentase kontribusi PAD DLHK (Retribusi dan LLPAD) terhadap capaian PAD Provinsi NTB (%)				Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	7-10	7-10	7-10
6	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa sekitar lingkaran hutan	Persentase desa mandiri (keluar dari kantong kemiskinan) di	30	30	30	Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan	Persentase desa di sekitar lingkaran hutan yang telah memiliki	40	40	40

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target			Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
			2024	2025	2026			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sekitar lingkaran hutan (%)				kesejahteraan desa sekitar lingkaran hutan	Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial			
7	Terwujudnya kontribusi Dinas LHK terhadap capaian PDRB Provinsi NTB	Kontribusi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu serta Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang terhadap capaian PDRB NTB (%)				Meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi NTB	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,5-4,2	3,5-4,2	3,5-4,2
						Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap peningkatan PDRB Provinsi NTB	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,3-6,3	5,3-6,3	5,3-6,3

2.1.2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Dinas LHK NTB berperan dalam pencapaian 2 (dua) misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu misi ke-3 “Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agromaritim yang Berkelanjutan” dan misi ke-5 “Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan”.

Pada misi ke-3, Dinas LHK NTB memiliki peran dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 yaitu Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan. Tujuan ini berfokus pada pencapaian Kontribusi PDRB Industri Pengolahan dan memiliki sasaran strategis Meningkatkan Kontribusi Industri Agromaritim. Sehubungan dengan tujuan dan sasaran RPD tersebut, maka Dinas LHK NTB menetapkan tujuan yaitu Terwujudnya peningkatan produktivitas sektor kehutanan dengan sasaran strategis Meningkatkan produksi hasil hutan dan jasa lingkungan.

Dinas LHK NTB juga memiliki peran penting dalam pencapaian misi ke-5, yang berfokus pada tujuan Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan. Tujuan ini memiliki target dalam pencapaian Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Tujuan ini memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas, dan (2) Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas LHK NTB menetapkan tujuan dalam Renstra yaitu (1) Terwujudnya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup berkualitas, dan (2) Terwujudnya peningkatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem. Tujuan ini memiliki sasaran strategis yaitu (1) Menurunnya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, dan (2) Meningkatnya pengelolaan hutan lestari.

Tabel 6 Tujuan dan Sasaran dalam Dokumen Renstra Dinas LHK NTB 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya peningkatan produktivitas sektor kehutanan		1 Pertumbuhan PDRB Kehutanan	%	1,17	1,22	1,28	1,35	1,42
		1 Meningkatnya produksi hasil hutan dan jasa lingkungan	1 Persentase Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	%	4,20	4,41	4,63	4,86	5,10
2	Terwujudnya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup berkualitas		1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,19	76,40	76,61	76,82	77,03
		1 Menurunnya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	74,36	74,56	74,76	74,96	75,16
			2 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	82,99	83,04	83,09	83,14	83,19
			3 Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	75,62	75,92	76,22	76,52	76,82
			4 Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah	%	8,83	13,25	19,06	30,16	37,06

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
3	Terwujudnya peningkatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem	3 Meningkatkan pengelolaan hutan lestari	1 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	Indeks	0,331	0,334	0,337	0,34	0,342
			1 Skor pengurangan ancaman kepunahan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati sektor kehutanan dan lahan	Angka	3,299	3,331	3,360	3,386	3,409
			2 Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	77,63	77,7	77,77	77,84	77,91
			3 Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan	%	50,27	57,11	68,44	78,79	76,33

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 yang diampu oleh Dinas LHK NTB dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada Renstra 2024-2026, dan Renstra 2025-2029.

Tabel 7 Indikator Kinerja Utama Dinas LHK NTB mengacu pada Dokumen Renstra 2024-2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber Data, Alasan)
1.	Menurunnya tingkat pencemaran air	Persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu (%)	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah titik pantau kualitas air sungai yang memenuhi standar baku mutu}}{\text{Jumlah seluruh titik pantau kualitas air sungai}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Dinas LHK NTB Alasan : Untuk menggambarkan kualitas air sungai dilihat dari status mutu airnya</p>
2.	Menurunnya tingkat pencemaran udara	Persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku mutu referensi (%)	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah titik pantau kualitas udara ambien yang berada dalam standar baku mutu referensi}}{\text{Jumlah seluruh titik pantau kualitas udara ambien}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Dinas LHK NTB Alasan : Untuk menggambarkan kualitas udara di suatu tempat</p>
3.	Meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan	Persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan (%)	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Luasan tutupan hutan}}{\text{Total Luas Daratan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Kementerian LHK Alasan : Untuk menggambarkan tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan</p>
4.	Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon (%)	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sektor implementasi aksi mitigasi}}{\text{Jumlah sektor aksi mitigasi}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Dinas LHK Prov. NTB Alasan : Untuk menggambarkan besaran jumlah sektor/subsektor (12 sektor/sub sektor) yang menjadi sasaran implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi</p>
5.	Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah	Persentase implementasi program pengurangan emisi	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sektor implementasi aksi adaptasi}}{\text{Jumlah sektor aksi adaptasi}} \times 100\%$</p>

	kaca melalui aksi adaptasi	dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem (%)	<p>Tipe Perhitungan : Tahunan</p> <p>Sumber Data: Dinas LHK Prov. NTB</p> <p>Alasan : Untuk menggambarkan besaran jumlah sektor/subsektor (5 sektor/sub sektor) yang menjadi sasaran implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi</p>
6.	Meningkatnya upaya pengurangan sampah	Persentase pengurangan sampah (%)	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sampah yang dan dikurangi}}{\text{Jumlah sampah}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan</p> <p>Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB</p> <p>Alasan : Untuk memberikan gambaran jumlah sampah yang dapat ditangani, dan pengurangan jumlah sampah yang dilakukan (Bank Sampah, pengelola sampah dsb)</p>
7.	Meningkatnya upaya penanganan sampah	Persentase penanganan sampah (%)	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sampah yang ditangani di TPA}}{\text{Jumlah sampah}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan</p> <p>Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB</p> <p>Alasan : Untuk memberikan gambaran jumlah sampah yang dapat ditangani di TPA</p>
8.	Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan	Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan (%)	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Luasan tutupan hutan dan lahan tahun } n - \text{Luasan tutupan hutan dan lahan tahun } n - 1}{\text{Luasan tutupan hutan dan lahan tahun } n - 1} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan</p> <p>Sumber Data : Dinas LHK NTB</p> <p>Alasan : Untuk menggambarkan peningkatan tutupan hutan dan lahan</p>
9.	Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) (%)	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Penerimaan PAD tahun } n - \text{Penerimaan PAD tahun } n - 1}{\text{Penerimaan PAD tahun } n - 1} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan</p> <p>Sumber Data : Dinas LHK NTB</p> <p>Alasan : Untuk menggambarkan peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)</p>
10	Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkaran hutan	Persentase desa di sekitar lingkaran hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial (%)	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah desa lingkaran hutan yang telah memiliki KTH}}{\text{Jumlah desa lingkaran hutan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan</p> <p>Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB</p> <p>Alasan : Untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan desa lingkaran hutan</p>
11	Meningkatnya produktivitas	Produktivitas lapangan usaha	<p>Formulasi Perhitungan :</p>

	Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi NTB	ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu (%)	$\frac{PDRB \text{ Sektor HK tahun } t - (tahun t - 1)}{PDRB \text{ Sektor HK tahun } t - 1} \times 100\%$ Ket : PDRB sektor HK : PDRB sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB Alasan : Untuk menggambarkan pertumbuhan produktivitas pada sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu pada PDRB NTB
12	Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap peningkatan PDRB Provinsi NTB	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (%)	Formulasi Perhitungan : $\frac{PDRB \text{ Sektor AS tahun } t - (tahun t - 1)}{PDRB \text{ Sektor AS tahun } t - 1} \times 100\%$ Ket : PDRB sektor AS : PDRB sektor Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB Alasan : Untuk menggambarkan pertumbuhan produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang pada PDRB NTB
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Formulasi Perhitungan : Menggunakan 5 parameter yaitu DO, TSS, Minyak dan Lemak, Ortho Fosfat, Amonia Total $IKAL = \sum Qi \times Wi$ Qi = Sub-indeks untuk parameter kualitas air ke i; Wi = Bobot parameter kualitas air ke i; N = Jumlah parameter kualitas air Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Kementerian LH Alasan : Untuk menggambarkan kualitas air laut suatu wilayah
		Indeks Kualitas Udara	Formulasi Perhitungan : Menggunakan 3 parameter yaitu NO ₂ , SO ₂ , dan PM _{2,5} $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ $I_{INA} = \text{Rata-rata Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2 + \text{Indeks PM}_{2,5}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks PM}_{2,5} = \frac{\text{Rata-rata PM}_{2,5}}{\text{Baku Mutu INA}}$ Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Kementerian LHK Alasan : Untuk menggambarkan kualitas udara di suatu wilayah
		Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah emisi GRK Tahunan Skenario Kebijakan Ekonomi Hijau} - \text{Jumlah Emisi GRK Tahunan Skenario Business As Usual}}{\text{Jumlah Emisi GRK Tahunan Skenario Business As Usual}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Dinas LHK NTB, aplikasi AKSARA Bappenas

			Alasan : Untuk menggambarkan besaran penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah
5.	Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem (%)	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sektor implementasi aksi adaptasi}}{\text{Jumlah sektor aksi adaptasi}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data: Dinas LHK Prov. NTB Alasan :
6.	Meningkatnya upaya pengurangan sampah	Persentase pengurangan sampah (%)	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sampah yang dan dikurangi}}{\text{Jumlah sampah}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB Alasan : Untuk memberikan gambaran jumlah sampah yang dapat ditangani, dan pengurangan jumlah sampah yang dilakukan (Bank Sampah, pengelola sampah dsb)
7.	Meningkatnya upaya penanganan sampah	Persentase penanganan sampah (%)	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sampah yang ditangani di TPA}}{\text{Jumlah sampah}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB Alasan : Untuk memberikan gambaran jumlah sampah yang dapat ditangani di TPA
8.	Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan	Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan (%)	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Luasan tutupan hutan dan lahan tahun } n - \text{Luasan tutupan hutan dan lahan tahun } n - 1}{\text{Luasan tutupan hutan dan lahan tahun } n - 1} \times 100\%$ Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Dinas LHK NTB Alasan : Untuk menggambarkan peningkatan tutupan hutan dan lahan
9.	Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) (%)	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Penerimaan PAD tahun } n - \text{Penerimaan PAD tahun } n - 1}{\text{Penerimaan PAD tahun } n - 1} \times 100\%$ Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Dinas LHK NTB Alasan : Untuk menggambarkan peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)
10	Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkaran hutan	Persentase desa di sekitar lingkaran hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial (%)	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah desa lingkaran hutan yang telah memiliki KTH}}{\text{Jumlah desa lingkaran hutan}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB Alasan : Untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan desa lingkaran hutan

11	Meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi NTB	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu (%)	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{PDRB \text{ Sektor HK tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sektor HK tahun } t - 1} \times 100\%$ <p>Ket : PDRB sektor HK : PDRB sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan</p> <p>Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB</p> <p>Alasan : Untuk menggambarkan pertumbuhan produktivitas pada sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu pada PDRB NTB</p>
12	Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap peningkatan PDRB Provinsi NTB	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (%)	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{PDRB \text{ Sektor AS tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sektor AS tahun } t - 1} \times 100\%$ <p>Ket : PDRB sektor AS : PDRB sektor Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan</p> <p>Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB</p> <p>Alasan : Untuk menggambarkan pertumbuhan produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang pada PDRB NTB</p>

Sumber : Dinas LHK NTB, 2025

Tabel 8 Indikator Kinerja Utama Dinas LHK NTB mengacu pada Dokumen Renstra 2025-2029

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber Data, Alasan)
1.	Meningkatnya produksi hasil hutan dan jasa lingkungan	Persentase peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	<p>Formulasi Perhitungan : Nilai Tambah Bruto (NTB) = (Jumlah produksi x harga) – Konsumsi Antara Persentase peningkatan = $\frac{NTB \text{ Tahun ini} - NTB \text{ tahun lalu}}{NTB \text{ tahun lalu}} \times 100\%$ Ket : - Rasio konsumsi antara yang digunakan ialah 0,886 sesuai tabel input output Provinsi NTB yang dirilis BPS - Harga yang digunakan ialah harga produsen atau harga patokan mengacu pada 40 statistik harga produsen dan Permenhut tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu - Formulasi di atas berdasarkan arahan BPS, hasil perhitungannya masih berupa estimasi, yang perlu mendapat justifikasi lebih lanjut dari BPS</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Dinas LHK NTB Alasan : Untuk menggambarkan estimasi nilai tambah produk kehutanan yang telah dihasilkan dalam 1 tahun</p>
2.	Menurunnya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	<p>Formulasi Perhitungan : Menggunakan 8 parameter yaitu DO, pH, BOD, TSS, COD, Nitrat, Total Fosfat, Fecal Coliform</p> <p>$IKA \text{ Titik Pantau} = \sum W_i I_i$ Dimana, W :Faktor pembobot, I : sub-indeks</p> <p>Perhitungan IKA Kab/Kota IKA Kab/Kota didapatkan dari hasil rerata IKA seluruh titik pantau di wilayah administrasi</p> <p>$IKA \text{ Kab Kota} = \frac{\sum IKA \text{ Titik Pantau}}{\text{Jumlah titik pantau}}$</p> <p>Perhitungan IKA Provinsi IKA Provinsi didapatkan dari hasil rerata IKA seluruh kab/kota di wilayah administrasi</p> <p>$IKA \text{ Provinsi} = \frac{\sum IKA \text{ Kab/kota}}{\text{Jumlah Kab/Kota}}$</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Dinas LHK NTB, Dinas LH Kab/Kota, Kementerian LH Alasan : Untuk menggambarkan kualitas air sungai wilayah</p>
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	<p>Formulasi Perhitungan : Menggunakan 5 parameter yaitu DO, TSS, Minyak dan Lemak, Ortho Fosfat, Amonia Total</p> <p>$IKAL = \sum Q_i \times W_i$ Q_i = Sub-indeks untuk parameter kualitas air ke i; W_i = Bobot parameter kualitas air ke i; N = Jumlah parameter kualitas air</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Kementerian LH</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber Data, Alasan)
			<p>Alasan : Untuk menggambarkan kualitas air laut suatu wilayah</p>
		Indeks Kualitas Udara	<p>Formulasi Perhitungan : Menggunakan 3 parameter yaitu NO₂, SO₂, dan PM_{2,5}</p> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ $I_{INA} = \text{Rata-rata Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2 + \text{Indeks PM}_{2,5}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks PM}_{2,5} = \frac{\text{Rata-rata PM}_{2,5}}{\text{Baku Mutu INA}}$ <p>Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Kementerian LHK Alasan : Untuk menggambarkan kualitas udara di suatu wilayah</p>
		Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah emisi GRK Tahunan Skenario Kebijakan Ekonomi Hijau} - \text{Jumlah Emisi GRK Tahunan Skenario Business As Usual}}{\text{Jumlah Emisi GRK Tahunan Skenario Business As Usual}} \times 100\%$ <p>Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Dinas LHK NTB, aplikasi AKSARA Bappenas Alasan : Untuk menggambarkan besaran penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah</p>
3.	Meningkatnya pengelolaan hutan lestari	Skor pengurangan ancaman kepunahan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati sektor kehutanan dan lahan	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>1. Standardisasi Data Konversi nilai suatu indikator menjadi nilai yang dapat diperbandingkan Untuk skor pengurangan ancaman kepunahan membutuhkan data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi deforestasi terhadap luas tutupan hutan - Proporsi Kawasan Lindung terhadap luas daratan provinsi - Proporsi rehabilitasi hutan dan lahan terhadap luas lahan kritis - Proporsi luas kebakaran hutan dan lahan terhadap luas tutupan hutan <p>Untuk skor pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati membutuhkan data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas kayu bulat pada areal IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI <p>2. Perhitungan skor per indikator aksi Untuk indikator dalam pilar pengurangan ancaman</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber Data, Alasan)
			$S_{PA,i} = \frac{x_{PA,i} - \min_{PA}}{\max_{PA} - \min_{PA}}$ <p>dengan:</p> <p>$S_{PA,i}$ = skor indikator pengurangan ancaman (PA) pada provinsi i $x_{PA,i}$ = nilai untuk setiap indikator PA pada provinsi i \min_{PA} = nilai minimum untuk setiap indikator PA \max_{PA} = nilai maksimum untuk setiap indikator PA</p> <p>Untuk indikator dalam pilar pemanfaatan berkelanjutan</p> $S_{PB,i} = \frac{x_{PB,i} - \min_{PB}}{\max_{PB} - \min_{PB}}$ <p>dengan:</p> <p>$S_{PB,i}$ = skor indikator pemanfaatan berkelanjutan (PB) pada provinsi i $x_{PB,i}$ = nilai untuk setiap indikator PB pada provinsi i \min_{PB} = nilai minimum untuk setiap indikator PB \max_{PB} = nilai maksimum untuk setiap indikator PB</p> <p>3. Perhitungan skor per pilar Untuk indikator dalam pilar pengurangan ancaman</p> $IPA_i = \sum_{PA} S_{PA,i} \times W_{PA}$ <p>dengan:</p> <p>IPA_i = skor sub-indeks pengurangan ancaman untuk provinsi i $S_{PA,i}$ = skor untuk setiap indikator PA pada provinsi i W_{PA} = bobot untuk setiap indikator PA $\sum_{PA} W_{PA} = 1$</p> <p>Untuk indikator dalam pilar pemanfaatan berkelanjutan</p> $IPB_i = \sum_{PB} S_{PB,i} \times W_{PB}$ <p>dengan:</p> <p>IPB_i = skor sub-indeks pemanfaatan berkelanjutan untuk provinsi i $S_{PB,i}$ = skor untuk setiap indikator PB pada provinsi i W_{PB} = bobot untuk setiap indikator PB $\sum_{PB} W_{PB} = 1$</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Kementerian Kehutanan, Dinas LHK NTB, BPS Alasan : Untuk mencerminkan upaya/intervensi yang dikerahkan untuk mengelola keanekaragaman hayati.</p>
		Indeks Kualitas Lahan	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$ <p>keterangan : dimana, TL : Tutupan lahan C : Koefisien kelas tutupan lahan</p> <p>Tipe Perhitungan : Tahunan</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber Data, Alasan)
			<p>Sumber Data : Kementerian Kehutanan, Dinas LHK NTB Alasan : Nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang dihitung berdasarkan Luas Tutupan Hutan, belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung, Ruang Terbuka Hijau seperti Kebun Raya, Taman Keanekaragaman Hayati, Hutan Kota dan Taman Kota serta kejadian kebakaran hutan dan lahan serta keberadaan kanal pada ekosistem gambut (jika ada)</p>
		<p>Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan</p>	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah emisi GRK Tahunan Skenario Kebijakan Ekonomi Hijau} - \text{Jumlah Emisi GRK Tahunan Skenario Business As Usual}}{\text{Jumlah Emisi GRK Tahunan Skenario Business As Usual}} \times 100\%$ <p>Tipe Perhitungan : Tahunan</p> <p>Sumber Data : Dinas LHK NTB, Kementerian Kehutanan, aplikasi AKSARA Bappenas Alasan : Untuk menggambarkan besaran penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan</p>

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi di bawahnya untuk melaksanakan program atau kegiatan tertentu yang disertai dengan indikator kinerja. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja ini pada dasarnya merupakan pernyataan/ komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai hasil kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Untuk Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB diperjanjikan antara Kepala Dinas LHK NTB dengan Gubernur NTB.

Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Dokumen Renstra 2024-2026, Renstra 2025-2029, serta Rencana Kerja Tahun 2025 seperti disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 9 Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB Berdasarkan Renstra 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menurunnya tingkat pencemaran air	1. Persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu	25,57%
2	Menurunnya tingkat pencemaran udara	1. Persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku mutu referensi	100%
3	Meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan	1. Persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan	100%
4	Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi	1. Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon	30%
5	Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi	1. Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem	30%
6	Meningkatnya upaya pengurangan sampah	1. Persentase pengurangan sampah	22,08%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
7	Meningkatnya upaya penanganan sampah	1. Persentase penanganan sampah	69,92%
8	Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan	1. Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan	0,06-0,12%
9	Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	1. Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	10-15%
10	Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkaran hutan	1. Persentase desa di sekitar lingkaran hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial	40%
11	Meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi NTB	1. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,5-4,2%
12	Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap peningkatan PDRB Provinsi NTB	1. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,3-6,4%

Tabel 10 Rincian Pendanaan Dinas LHK NTB untuk mendukung Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB yang mengacu pada Renstra 2024-2026

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	621.527.678,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1,2, dan 5, indikator 1
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	75.000.000,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 4, indikator 1

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	57.000.000,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	96.500.000,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50.000.000,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	53.500.000,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.968.910.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 3,8, dan 11, indikator 1
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	376.500.000,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 3, indikator 1
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.174.572.300,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 6, 7, dan 12, indikator 1
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	100.000.000,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 8, indikator 1
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	988.328.000 ,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 10, indikator 1

Sumber : Dinas LHK NTB, 2025

Tabel 11 Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB Berdasarkan Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menurunnya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA) (Indeks) 2. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (Indeks) 3. Indeks Kualitas Udara (IKU) (Indeks) 4. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah (%)	1. 74,36 2. 82,99 3. 75,62 4. 8,83
2	Meningkatnya pengelolaan hutan lestari	1. Skor pengurangan ancaman kepunahan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati sektor kehutanan dan lahan (Skor) 2. Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Indeks) 3. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan (%)	1. 3,264 2. 77,63 3. 50,27
3.	Meningkatnya produksi hasil hutan dan jasa lingkungan	1. Persentase peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan (%)	1. 4,20

Tabel 12 Rincian Pendanaan Dinas LHK NTB untuk mendukung Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB yang mengacu pada Renstra 2025-2029

Program	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.983.796.615	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	57.482.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	300.000.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 2
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 2

Program	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	47.200.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 3
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	15.159.795.300	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 4
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	27.813.200	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 4
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.077.783.699	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 2, indikator 1
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	320.266.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 2, indikator 1
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	61.392.300	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 2, indikator 1
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	387.140.600	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 2, indikator 2
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	100.000.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 2, indikator 2
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.321.254.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 2, indikator 3
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	152.345.400	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 3, indikator 1
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.347.568.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 3, indikator 1

Rincian kegiatan dari setiap program yang diampu oleh Dinas LHK NTB adalah sebagai berikut.

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, terdapat 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, terdapat 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), terdapat 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- d. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, terdapat 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
- e. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, terdapat 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
- f. Program Pengelolaan Persampahan, terdapat 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
- g. Program Pengelolaan Hutan, terdapat 6 (enam) kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 3. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 4. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 6. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
- h. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 1. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi

2. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
3. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
- i. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), terdapat 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- j. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, terdapat 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- k. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keterkaitan antara perencanaan kinerja dan anggaran dengan target-target yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KODE PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	47.200.000
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) di Provinsi secara terencana	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang mengacu pada RPPLH Provinsi	47.200.000

KODE PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)
2.11.02.1.01.002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Tersedianya dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	47.200.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran air dan udara	Persentase pemenuhan baku mutu parameter kualitas air Persentase pemenuhan baku mutu parameter kualitas air laut Persentase pemenuhan baku mutu parameter kualitas udara Jumlah permohonan pengujian yang dilayani Jumlah seluruh pengujian yang dilakukan terhadap paramater	4.983.796.615
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah unit usaha/lokasi yang dilakukan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	4.983.796.615
2.11.03.1.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	82.895.600
2.11.03.1.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	37.401.300

KODE PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)
2.11.03.1.01.0015	<i>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi</i>	<i>Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan</i>	<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>	4.863.499.715
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola (%)	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya pengumpulan limbah B3 lintas daerah	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengumpulan Limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi (Unit)	
2.11.05.1.01.0002	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan</i>	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	<i>Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan kewenangan provinsi serta pelaksanaan pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi yang sesuai kewenangannya</i>	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan ijin lingkungan, ijin PPLH, dan PUU lingkungan hidup	79.687.000

KODE PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemprov yang dibina dan diawasi	79.687.000
			Jumlah usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan dan izin PPLH yang taat	
2.11.06.1.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya kegiatan fasilitasi rekomendasi dan/atau pemenuhan ketentuan persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	13.822.000
2.11.06.1.01.006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengawasan seluruh perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	65.865.000

KODE PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya keterlibatan/p artisipasi lembaga pendidikan/le mbaga masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	57.482.000
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kesadaran lembaga pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang ditingkatkan kesadarannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	57.482.000
2.11.08.1.01.002	<i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i>	<i>Terlaksananya pengembangan generasi lingkungan melalui pembinaan, pendampingan, pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan</i>	<i>Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan</i>	57.482.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	30.000.000
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Meningkatnya kinerja pelayanan pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan yang ditangani	30.000.000

KODE PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)
2.11.10.1.01.003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Terlaksananya penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	3.500.000
2.11.10.1.01.007	Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi	Terlaksananya penanganan pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	26.500.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	61.392.300
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Meningkatnya pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		61.392.300
2.11.04.1.01.001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tersusunnya Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	61.392.300
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya penanganan sampah dan pengurangan sampah	Persentase penanganan sampah Persentase pengurangan sampah	15.159.795.300
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di	Meningkatnya penanganan sampah	Persentase fasilitas pengolahan sampah metode	3.477.723.000

KODE PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)
	TPA/TPST Regional	melalui pemilahan dari sumbernya	3R/BSF yang beroperasi	
			Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan sampah di areal publik	
			Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan pemilahan sampah di rumah tangga	
			Jumlah kantor provinsi yang menerapkan pemilahan sampah	
		Meningkatnya penanganan sampah di TPA Regional	Volume sampah masuk yang akan dilakukan pemrosesan	11.682.072.300
2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	2.927.140.000
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	550.583.000
2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Tersedianya fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	11.682.072.300
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya pengelolaan hutan melalui aspek perencanaan dan tata hutan	Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	1.760.914.175

KODE PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi	Jumlah laporan kegiatan peningkatan perencanaan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	100.000.000
3.28.03.1.01.002	<i>Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan</i>	<i>Terlaksananya pembagian blok/petak pengelolaan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L)</i>	<i>Jumlah unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian blok</i>	100.000.000
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Meningkatnya perencanaan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah laporan kegiatan peningkatan perencanaan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	287.140.600
3.28.03.1.02.001	<i>Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan</i>	<i>Tersusunnya rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>	287.140.600
3.28.03.1.02.002	<i>Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P</i>	<i>Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P</i>	<i>Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P</i>	1.373.773.575
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya produktivitas pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	152.345.400
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Meningkatnya pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung	Jumlah PBPH yang beroperasi	52.345.400

KODE PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)
3.28.03.1.03.0013	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi</i>	<i>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi</i>	52.345.400
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	Volume produksi hasil hutan kayu	100.000.000
3.28.03.1.07.004	<i>Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/ atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi</i>	<i>Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/ atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi</i>	<i>Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/ atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi</i>	100.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya kinerja perlindungan hutan	Laju deforestasi	2.077.783.699
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Meningkatnya perlindungan terhadap hutan lindung dan hutan produksi	Persentase kasus hukum kehutanan yang ditangani Persentase kejadian kebakaran hutan/lahan yang ditangani	2.077.783.699
3.28.03.1.05.007	<i>Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan</i>	<i>Tercegahnya kerusakan kawasan hutan</i>	<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>	1.652.873.699
3.28.03.1.05.005	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan</i>	<i>Terlaksananya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</i>	<i>Jumlah laporan patroli/ sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun</i>	53.000.000
3.28.03.1.05.004	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>	<i>Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan</i>	<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>	163.640.000

KODE PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)
3.28.03.1.05.008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Terlaksananya pengamanan peredaran hasil hutan ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	208.270.000
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks keanekaragaman hayati	320.266.000
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatnya perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan Jumlah jenis spesies Tumbuhan dan Satwa Liar non appendix yang dilindungi	24.766.000
3.28.04.1.02.001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	24.766.000
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Meningkatnya pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah KEE, daerah penyangga kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam yang dikelola	35.000.000

KODE PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)
3.28.04.1.03.006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya pengelolaan daerah penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	35.000.000
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Meningkatnya pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kewenangan Provinsi	Jumlah koleksi tumbuhan dan satwa yang dikelola	310.500.000
3.28.04.1.01.006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Terlaksananya pelayanan pemanfaatan Hutan di Tahura	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	200.000.000
3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Terlaksananya kegiatan perencanaan Tahura Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	15.000.000
3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya pengamanan kawasan Tahura Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	45.500.000
3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Terlaksananya pemulihan ekosistem Tahura Provinsi	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	50.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya penanganan lahan kritis	Persentase luas lahan kritis	1.321.254.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Meningkatnya hutan dan lahan yang direhabilitasi	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (Ha)	1.321.254.000
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL)	Jumlah dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL)	16.793.000
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.187.374.000

KODE PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)
3.28.03.1.04.008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	117.087.000
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase tutupan lahan pada sempadan sungai dan mata air	100.000.000
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	100.000.000
3.28.06.1.01.007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	100.000.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan	1. Peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan 2. Peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	1.347.568.000
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan	1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani hutan 2. Persentase peningkatan kelas kelompok usaha perhutanan sosial	1.347.568.000
3.28.05.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya penguatan dan pendampingan kelembagaan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	562.371.000

KODE PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)
		<i>kelompok tani hutan</i>		
<i>3.28.05.1.01.004</i>	<i>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan</i>	<i>Terlaksananya peningkatan kapasitas untuk penyuluh kehutanan</i>	<i>Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas</i>	<i>25.060.000</i>
<i>3.28.05.1.01.006</i>	<i>Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial</i>	<i>Terlaksananya peningkatan kualitas KUPS</i>	<i>Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya</i>	<i>720.252.000</i>
<i>3.28.05.1.01.008</i>	<i>Penyiapan Perhutanan Sosial</i>	<i>Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial</i>	<i>Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial</i>	<i>39.885.000</i>

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan realisasi dan capaian kinerja suatu organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 yang mengacu pada Renstra 2024-2026

Capaian kinerja Dinas LHK NTB Tahun 2025 berdasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas LHK NTB dengan Gubernur NTB yang mengacu pada Renstra 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 13 Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra 2024-2026 s/d Triwulan III 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Renstrath 2025	Capaian Nasional 2025	Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan III 2025 terhadap (%)			Efisiensi
							Target	Realisasi s/d Triwulan III	Realisasi 2024	Target Renstrath 2025	Capaian Nasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Menurunnya tingkat pencemaran air	Persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu	%	12,72	25,57	-	25,57	-	-	-	-	-
2	Menurunnya tingkat pencemaran udara	Persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku mutu referensi	%	100	100	-	100	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan	Persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan	%	100	100	-	100	100	100	100,00	100,00	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Renstra th 2025	Capaian Nasional 2025	Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan III 2025 terhadap (%)			Efisiensi
							Target	Realisasi s/d Triwulan III	Realisasi 2024	Target Renstra th 2025	Capaian Nasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon	%	100	30	-	30	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem	%	100	30	-	30	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Renstra th 2025	Capaian Nasional 2025	Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan III 2025 terhadap (%)			Efisiensi
							Target	Realisasi s/d Triwulan III	Realisasi 2024	Target Renstra th 2025	Capaian Nasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Meningkatnya upaya pengurangan sampah	Persentase pengurangan sampah	%	20,95	22,08	-	22,08	9,41	44,92	42,62	-	90,61
7	Meningkatnya upaya penanganan sampah	Persentase penanganan sampah	%	53,2	69,92	-	69,92	25,92	48,72	37,07	-	27,71
8	Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan	Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan	%	0	0.06-0.12	-	0.06-0.12	-	-	-	-	-
9	Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) (%)	%	-26,21	10-15	-	10-15	-5,24	19,99	-0,01	-	-
10	Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkaran hutan	Persentase desa di sekitar lingkaran hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial (%)	%	38,93	40	-	40	38,93	100,00	97,33	-	76,69

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Renstra th 2025	Capaian Nasional 2025	Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan III 2025 terhadap (%)			Efisiensi
							Target	Realisasi s/d Triwulan III	Realisasi 2024	Target Renstra th 2025	Capaian Nasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	Meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi NTB	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	%	1,11	3.5-4.2	-	3.5-4.2	-	-	-	-	-
12	Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap peningkatan PDRB Provinsi NTB	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0,77	5.3-6.3	-	5.3-6.3	-	-	-	-	-

1. Sasaran Strategis “Menurunnya tingkat pencemaran air”

Indikator	: Persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu
Target	: 25,57%
Realisasi	: -
Uraian	:

a. Capaian Kinerja s/d Triwulan III 2025

Persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu diukur melalui kegiatan pemantauan kualitas air sungai di 10 sungai di Provinsi NTB. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah, dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Sampel kualitas air sungai diambil di beberapa sungai di wilayah NTB yaitu Tojang, Sari, Babak, Ancar, Segara, Dodokan, Brang Rea, Brang Biji, Rabalaju, dan Padolo. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap sample air yang diambil. Adapun parameter dari perhitungan IKA ini adalah pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Fosfat dan Fecal Coliform. Jika nilai indeks pencemar semakin tinggi maka semakin buruk kualitas airnya. Data kualitas air diambil dari 286 titik yang tersebar di 10 kabupaten/kota pada provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengambilan sampel pada 60 titik dilakukan oleh Dinas LHK NTB, 216 titik oleh Dinas LH Kab/Kota, dan 10 titik oleh Kementerian LHK. Sampai pada triwulan III, belum didapatkan hasil uji masing-masing titik sampel, dikarenakan uji sampel masih dalam proses dan belum terinput ke dalam aplikasi <https://sitala.kemenlh.go.id>. Sehingga belum dapat melakukan perhitungan terhadap persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan belum terdapat hasil uji parameter masing-masing sampel sehingga belum dapat melakukan perhitungan terhadap indikator tersebut sampai Triwulan III Tahun 2025.

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Sampai triwulan III tahun 2025 persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026 karena

masing-masing parameter pada sampel kualitas air sungai masih dalam proses pengujian.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi dari target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas LHK NTB dengan Gubernur NTB Tahun Anggaran 2025 tidak termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka penurunan tingkat pencemaran air yang bersumber dari usaha/kegiatan, upaya strategis dan alternatif solusi lainnya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB antara lain :

1. Pengendalian pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
2. Penetapan RPPLH Provinsi
3. Pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD
4. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
5. Penyelenggaraan KLHS untuk Kegiatan/Rencana/Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak resiko lingkungan hidup
6. Penilaian dokumen lingkungan
7. Pengawasan terhadap perzinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi
8. Sosialisasi dan pembinaan serta pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah (GPBLHS) dari tingkat dasar hingga menengah
9. Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu, yaitu :

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup, melalui kegiatan :

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
- b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan :
 - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- 4) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
- 5) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 14 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Target Kinerja Persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	P2 (Pagu Anggaran /Target Outcome)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4 x 100)
Menurunnya tingkat pencemaran air										
1	Persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu	5.166.557.938	286.481.271	25,57	-	-	202.055.453,19	-	-	-

Melihat perbandingan serapan anggaran dan pencapaian target kinerja pada seluruh program/kegiatan pendukung sasaran strategis menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya tidak sepenuhnya efisien dikarenakan beberapa target kinerja pada program/kegiatan belum tercapai pada triwulan III.

2. Sasaran Strategis “Menurunnya tingkat pencemaran udara”

Indikator	: Persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku mutu referensi
Target	: 100%
Realisasi	: -
Uraian	:

a. Capaian Kinerja s/d Triwulan III

Pemantauan kualitas udara dengan menggunakan metode passive sampler tidak digunakan lagi mulai tahun 2025 dan digantikan dengan air quality monitoring system (AMS), baik statis atau portable, dan manual aktif. Pemantauan dilaksanakan pada 4 lokasi sampling yaitu Transportasi, Industri, Pemukiman dan Perkantoran. Tempat-tempat tersebut memiliki kriteria berbeda berkaitan dengan sumber polusi yang mempengaruhi kualitas udara. Sampel kualitas udara dilakukan oleh Kementerian LHK (78 titik) dan kabupaten/kota (6 titik). Sampai pada triwulan III, belum didapatkan hasil uji parameter masing-masing titik sampel, dikarenakan uji sampel masih dalam proses dan belum terinput ke dalam aplikasi <https://sitala.kemenvh.go.id>. Sehingga belum dapat melakukan perhitungan terhadap persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku mutu referensi.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan belum terdapat hasil uji parameter masing-masing sampel sehingga belum dapat melakukan perhitungan dapat melakukan perhitungan terhadap indikator tersebut sampai Triwulan III Tahun 2025.

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Sampai triwulan III tahun 2025 Persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku mutu referensi belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026 karena masing-masing parameter pada sampel kualitas udara masih dalam proses pengujian.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi dari target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas LHK NTB dengan Gubernur NTB Tahun Anggaran 2025 tidak termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara dalam evaluasi PROPER, syarat penerbitan rekomendasi KLHS dan AMDAL/UKL-UPL, serta membangun komitmen dengan masyarakat melalui program adiwiyata/kampung iklim, dan membangun kerjasama penanganan dan pengurangan sampah dengan berbagai pihak lainnya.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku mutu referensi yaitu :

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan :
 - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 15 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	P2 (Pagu Anggaran /Target Outcome)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4 x 100)
Menurunnya tingkat pencemaran udara										
1	Persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku mutu referensi	12.959.340	6.654.600	100,00	-	-	129.593,40	-	-	-

Melihat perbandingan serapan anggaran dan pencapaian target kinerja pada seluruh program/kegiatan pendukung sasaran strategis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya tidak sepenuhnya efisien dikarenakan beberapa target kinerja pada program/kegiatan belum tercapai pada triwulan III.

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan”

Indikator	: Persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan
Target	: 100%
Realisasi	: 100%
Uraian	:

a. Capaian Kinerja s/d Triwulan III

Sampai pada triwulan III, Dinas LHK NTB tetap berupaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan seluas 745.233,74 ha melalui berbagai kegiatan antara lain perlindungan hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pembagian blok/petak pengelolaan hutan, hingga pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan Provinsi.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Sama seperti tahun sebelumnya, Dinas LHK NTB tetap berupaya mempertahankan seluruh luasan tutupan hutan dan lahan yang masih ada.

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan diukur dari indikator persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan, capaiannya pada tahun 2025 adalah sebesar 100% atau 100% dari target jangka menengah dalam Renstra 2024-2026

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi dari target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas LHK NTB dengan Gubernur NTB Tahun Anggaran 2025 tidak termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka mempertahankan tutupan hutan dan lahan, Dinas LHK NTB berupaya melakukan tata kelola hutan melalui beberapa kegiatan antara lain :

1. Penataan batas blok
2. Penyusunan RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) bagi KPH yang telah habis masa berlaku dokumennya dan RPHJPd (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek)
3. Koordinasi pencegahan dan pengamanan hutan

4. Patroli dan sosialisasi dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 5. Penegakan hukum atas pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan
 6. Pendataan terhadap pelaku/penjual satwa tidak dilindungi mulai dari perijinan, jenis satwa, dan sumber asal – usul satwa yang dijual tersebut, dan memberikan sosialisasi agar tidak mengambil/berburu di dalam kawasan hutan
 7. Monitoring Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu
 8. Inventarisasi potensi kawasan hutan
 9. Inventarisasi kawasan mangrove dalam rangka pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan yaitu :

1) Program Pengelolaan Hutan

- a. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
- b. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
- c. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- d. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- e. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi

2) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

- a. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
- b. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- c. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 16 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	P2 (Pagu Anggaran /Target Outcome)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4 x 100)
Meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan										
1	Persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan	1.191.856.000	557.825.450	100,00	100,00	5.578.254,50	11.918.560,00	0,47	0,53	53,20

Melihat perbandingan serapan anggaran dan pencapaian target kinerja pada seluruh program/kegiatan pendukung sasaran strategis persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya tidak sepenuhnya efisien dikarenakan beberapa target kinerja pada program/kegiatan belum tercapai pada triwulan III.

4. Sasaran Strategis “Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi”

Indikator	:	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon
Target	:	30%
Realisasi	:	-
Uraian	:	

a. Capaian Kinerja s/d Triwulan III

Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) diukur dari implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sub sektor kehutanan dan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas LHK NTB. Kegiatan inti dari sektor kehutanan ialah rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan kegiatan inti untuk sektor pengelolaan limbah ialah pengelolaan sampah di TPA. Kegiatan inti tersebut masih berproses sampai dengan triwulan III.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Kinerja sampai dengan triwulan III belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan kegiatan inti yang mendukung aksi mitigasi perubahan iklim masih berproses.

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut ialah Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon. Kinerja sampai dengan triwulan III belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan kegiatan inti yang mendukung aksi mitigasi perubahan iklim masih berproses.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi dari target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas LHK NTB dengan Gubernur NTB Tahun Anggaran 2025 tidak termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor sampah/limbah berfokus pada pengurangan metana melalui penerapan hierarki sampah (kurangi, guna ulang, daur ulang), pemilahan sampah organik untuk pengomposan/biogas, penghentian open dumping di TPA, serta rencana penerapan teknologi konversi limbah menjadi energi (Waste-to-Energy). Sedangkan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor sampah/limbah berfokus pada peningkatan tutupan hutan dan lahan, melalui kegiatan rehabilitasi di luar dan dalam kawasan hutan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan :
 - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 17 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	P2 (Pagu Anggaran /Target Outcome)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4 x 100)
Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi										
1	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon (%)	80.092.950	6.681.800	30,00	-	-	2.669.765,00	-	-	-

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatkan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya tidak sepenuhnya efisien dikarenakan beberapa target kinerja pada program/kegiatan belum tercapai pada triwulan III.

5. Sasaran Strategis “Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi”

Indikator	:	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon
Target	:	30%
Realisasi	:	-
Uraian	:	

a. Capaian Kinerja s/d Triwulan III

Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) diukur dari implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi perubahan iklim. Sampai pada triwulan III, Dinas LHK NTB masih melakukan kegiatan pembinaan dan penguatan kepada kelompok program kampung iklim (proklim) yang telah melakukan aksi adaptasi perubahan iklim. Pembinaan tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, meningkatkan kualitas pelaporan kegiatan, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Kinerja sampai dengan triwulan III belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan Dinas LHK NTB masih dalam proses melakukan kegiatan pembinaan dan penguatan kepada kelompok program kampung iklim (proklim) yang telah melakukan aksi adaptasi perubahan iklim..

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) diukur dari implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sub sektor kehutanan dan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas LHK NTB. Sampai pada triwulan III, kegiatan inti yang mendukung aksi adaptasi perubahan iklim masih berproses sehingga belum dapat dibandingkan kinerjanya dengan target Renstra 2024-2026.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi dari target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas LHK NTB dengan Gubernur NTB Tahun Anggaran 2025 tidak termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Terkait pencapaian sasaran meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui adaptasi, program kampung iklim (proklam) juga memiliki peranan penting. Kelompok proklam yang eksisting saat ini ialah kelompok-kelompok yang sudah melakukan aksi adaptasi perubahan iklim. Pada tahun 2025, tidak terdapat kelompok baru yang mendaftarkan lokasi Proklam ke dalam aplikasi Sistem Registrasi Nasional (SRN). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas LHK NTB, difokuskan pada kegiatan pembinaan dan penguatan kapasitas terhadap 11 (sebelas) lokasi Proklam yang tersebar di wilayah NTB. Pembinaan tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, meningkatkan kualitas pelaporan kegiatan, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan :
 - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 18 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	P2 (Pagu Anggaran /Target Outcome)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4 x 100)
Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi										
1	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem	18.700.650	8.087.550	30,00	-	-	623.355,00	-	-	-

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatkan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya tidak sepenuhnya efisien dikarenakan beberapa target kinerja pada program/kegiatan belum tercapai pada triwulan III.

6. Sasaran Strategis “Meningkatnya upaya pengurangan sampah”

Indikator : Persentase pengurangan sampah
Target : 22,08%
Realisasi : 9,41%
Uraian :

a. Capaian Kinerja s/d Triwulan III

Kondisi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, persentase pengurangan sampah mencapai 9,41%. Upaya pengurangan sampah ini didukung dengan penambahan beberapa sarana prasarana dan pengelolaan sampah skala rumah tangga pada beberapa lokasi.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Kinerja sampai dengan September 2025 jika dibandingkan dengan kinerja pada September 2024 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan penguatan sarana prasarana pengurangan sampah yang dijadwalkan baru akan terealisasi di Triwulan IV.

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Capaian persentase pengurangan sampah telah mencapai 9,41% atau 42,61% dari target yang ditetapkan dalam Renstra.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi dari target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas LHK NTB dengan Gubernur NTB Tahun Anggaran 2025 tidak termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka mendukung upaya dalam pengurangan sampah, telah diupayakan implementasi 8 pilar pengelolaan sampah antara lain :

1. Penguatan regulasi pengelolaan sampah
2. Penyediaan sarpras persampahan
3. Revitalisasi gotong royong
4. Sosialisasi pilah olah sampah dari sumbernya
5. Edukasi dan Kampanye
6. Pelibatan Para Pihak
7. Penguatan bank sampah
8. Industrialisasi pengelolaan persampahan

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase pengurangan sampah adalah:

- 1) Program Pengelolaan Persampahan melalui kegiatan :
 - a. Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 19 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase Pengurangan Sampah

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	P2 (Pagu Anggaran /Target Outcome)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4 x 100)
Meningkatnya upaya pengurangan sampah										
1	Persentase pengurangan sampah	564.079.714	22.568.000	22,08	9,41	2.398.299,68	25.547.088,51	0,09	0,91	90,61

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatkan upaya pengurangan sampah, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya tidak sepenuhnya efisien dikarenakan beberapa target kinerja pada program/kegiatan belum tercapai pada triwulan III.

7. Sasaran Strategis “Meningkatnya upaya pengurangan sampah”

Indikator : Persentase penanganan sampah
Target : 69,92%
Realisasi : 25,92%
Uraian :

a. Capaian Kinerja s/d Triwulan III

Kondisi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, persentase penanganan sampah di seluruh TPA se-NTB mencapai 25,92%. Sesuai dengan kewenangan, maka Dinas LHK NTB bertanggungjawab terhadap sampah yang masuk ke TPA Regional Kebon Kongok. Sampah yang masuk dikelola menjadi beberapa bentuk kegiatan antara lain sebagai pakan maggot Black Soldier FLY (BSF) di TPST Lingsar, pembuatan material waste to energy, pembuatan kompos, dan pemilahan produk daur ulang. Sebanyak 14.373 ton dari 83.057 sampah (17,31%) yang berhasil dikelola sampai dengan bulan September 2025.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Kinerja sampai dengan September 2025 jika dibandingkan dengan kinerja pada September 2024 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan belum adanya pelaporan penanganan sampah secara rutin oleh TPA se-NTB selain TPA Regional Kebon Kongok, sehingga mempengaruhi perhitungan persentase penanganan sampahnya.

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Capaian persentase penanganan sampah mencapai 25,92% atau 37.07% dari target yang ditetapkan dalam Renstra.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi dari target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas LHK NTB dengan Gubernur NTB Tahun Anggaran 2025 tidak termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Di tahun 2025 ini, TPA Regional Kebon Kongok sedang dalam status darurat penanganan sampah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3-250 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Sampah di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Beberapa penyebabnya antara lain kelebihan

kapasitas pengurukan sampah di landfill-2 TPA Regional Kebon Kongok dengan volume sampah sebanyak 1.035 m³ atau setara dengan 345 ton/hari yang tidak tertangani sejak tanggal 17 April 2025, selain itu telah terjadi penolakan masyarakat terhadap area yang akan dijadikan sebagai tempat penampungan sementara seluas 25 are (aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat) di kawasan TPA Regional Kebon Kongok sehingga menyebabkan gangguan pelayanan di TPA Kebon Kongok dan terjadi penumpukan sampah di Kota Mataram dan Lombok Barat. Beberapa upaya yang dilakukan setelah penetapan status tanggap darurat sampah ini, ialah dengan melakukan pengurangan ritase pengangkutan sampah ke TPA Regional, perbaikan tata kelola sampah di hulu (rumah tangga, kantor, sekolah, fasilitas umum) dan di tengah (TPS3R, TPST, pusat daur ulang, bank sampah, dan pengepul), optimalisasi ruang landfill di TPA Regional Kebon Kongok khusus untuk pengolahan sampah residu, dan optimalisasi pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase pengurangan sampah adalah:

- 1) Program Pengelolaan Persampahan melalui kegiatan :
 - a. Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
 - c. Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 20 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase Penanganan Sampah

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	P2 (Pagu Anggaran /Target Outcome)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4 x 100)
Meningkatnya upaya penanganan sampah										
1	Persentase penanganan sampah	8.625.380.962	2.311.574.663	69,92	25,92	89.181.121,27	123.360.711,70	0,72	0,28	27,71

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatkan upaya penanganan sampah, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya tidak sepenuhnya efisien dikarenakan beberapa target kinerja pada program/kegiatan belum tercapai pada triwulan III.

8. Sasaran Strategis “Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan”

Indikator : Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan

Target : 0,06%-0,12%

Realisasi : -

Uraian :

a. Capaian Kinerja s/d Triwulan III

Pengukuran indikator di atas belum dapat dilakukan karena data tutupan hutan dan lahan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 belum dirilis resmi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Denpasar.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Kinerja sampai dengan September 2025 belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena data tutupan hutan dan lahan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 belum dirilis resmi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Denpasar

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Capaian persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan tahun 2025 belum dapat dihitung karena belum ada rilis data resmi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Denpasar selaku wali data.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi dari target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas LHK NTB dengan Gubernur NTB Tahun Anggaran 2025 tidak termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka peningkatan tutupan hutan dan lahan, telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan. Rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang kritis yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif. Sedangkan penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong di luar kawasan hutan dengan tujuan agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kesuburannya, mencegah erosi, menjaga persediaan air dan mampu membantu pencegahan pemanasan global. Selain dari sumber dana APBD, rehabilitasi hutan dan lahan direncanakan bersumber dari APBN

Kementerian Kehutanan, pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) serta kegiatan Folu Net Sink.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan yaitu :

1) Program Pengelolaan Hutan

a. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara

b. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

2) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

h. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 21 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase Peningkatan Tutupan Hutan dan Lahan

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	P2 (Pagu Anggaran /Target Outcome)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4 x 100)
Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan										
1	Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan	886.270.000	131.246.000	0.06-0.12	-	-	-	-	-	-

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan, tidak sepenuhnya efisien dan dapat mendukung tercapainya target persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan sampai pada triwulan III ini. Hal ini disebabkan karena pengadaan bibit dan penanaman baru akan terealisasi pada triwulan IV, selain itu masih marak juga penebangan dan peredaran hasil hutan kayu illegal di kawasan hutan, tingginya aktivitas masyarakat dalam kawasan hutan terutama disekitar lokasi RHL, tingkat keberhasilan program RHL yang dilaksanakan rendah karena sebagian besar kawasan hutan dan lahan digunakan untuk penanaman jagung, dan masih minimnya keterlibatan masyarakat sekitar dalam ikut menjaga kawasan hutan dan lahan.

9. Sasaran Strategis “Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)”

Indikator : Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan
Target : 0,06%-0,12%
Realisasi : -
Uraian :

a. Capaian Kinerja s/d Triwulan III

Pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari retribusi dan lain-lain PAD (LLPAD) yang sah. Beberapa objek retribusi antara lain jasa umum cetak peta, pelayanan laboratorium lingkungan, jasa hasil hutan, HHBK, dan retribusi tempat rekreasi. Sedangkan untuk LLPAD yang sah, objeknya ialah hasil kerja sama daerah atau penerimaan komisi atau bentuk lainnya yang sah. Untuk mengetahui persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas LHK, perlu melihat data penerimaan secara *year over year* (YoY) di bulan yang sama. Untuk mengukur persentase peningkatan penerimaan PAD pada bulan September 2025, maka harus membandingkannya dengan penerimaan PAD pada bulan September 2024. Berdasarkan data, penerimaan PAD pada September 2024 adalah sebesar Rp. 2.959.288.957,-, dan September 2025 adalah sebesar Rp. 2.804.327.455,-. Jika dihitung persentase perubahannya maka didapatkan nilai -5,24%, hal ini menunjukkan PAD menurun sebesar 5,24% dari tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan kewenangan pusat-daerah.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan capaian persentase peningkatan PAD dari tahun 2023 ke tahun 2024, maka capaian pada Triwulan III Tahun 2025 terhadap capaian September 2024 meningkat, hal ini diupayakan dengan mendorong para pemegang PBPH dan PBPHH untuk meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi produk kehutanan, baik hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, maupun pemanfaatan jasa lingkungan.

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Capaian penerimaan PAD sampai tanggal 30 September 2025 adalah sejumlah Rp. 2.804.327.455,-. Jika dibandingkan dengan capaian September 2024 sebesar Rp. 2.959.288.957,-, maka telah terjadi penurunan penerimaan sebesar 5,24%. Hal ini disebabkan oleh perubahan kewenangan pusat-daerah.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi dari target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas LHK NTB dengan Gubernur NTB Tahun Anggaran 2025 tidak termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari retribusi dan lain-lain PAD yg sah. Beberapa objek retribusi antara lain retribusi layanan persampahan, pengelolaan limbah B3, pemakaian laboratorium lingkungan, jasa umum cetak peta, jasa pemeriksaan pengukuran dan pengujian (P3) hasil hutan, serta retribusi tempat rekreasi. Sedangkan untuk LLPAD yang sah, objeknya ialah hasil kerja sama daerah atau penerimaan komisi atau bentuk lainnya yang sah. Berdasarkan data, penerimaan PAD pada September 2024 adalah sebesar Rp. 2.959.288.957,-, dan September 2025 adalah sebesar Rp. 2.804.327.455,-. Jika dihitung persentase perubahannya maka didapatkan nilai -5,24%, hal ini menunjukkan PAD menurun sebesar 5,24% dari tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan kewenangan pusat-daerah. Berikut adalah rincian penerimaan PAD sector lingkungan hidup dan kehutanan per 30 September 2025.

Tabel 22 Realisasi PAD Dinas LHK NTB per 30 September Tahun 2025

No.	Objek PAD	Jumlah (Rp.)
1	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (BLUD)	1.113.566.000
2	Retribusi pemakaian laboratorium	668.240.000
3	Retribusi pemakaian alat dari jasa pemeriksaan, pengukuran, dan pengujian hasil hutan	10.615.000
4	Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga	23.535.000
5	Pengelolaan limbah B3	548.896.670
6	Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang sah	439.474.785
TOTAL		2.804.327.455

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

h. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 23 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase Peningkatan Penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	P2 (Pagu Anggaran /Target Outcome)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4 x 100)
Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)										
1	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	107.317.420	36.669.560	10.0-15.0	-5,24	- 6.998.007,63	-	-	-	-

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD), tidak sepenuhnya efisien dan dapat mendukung tercapainya target persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) pada triwulan III ini. Total penerimaan PAD masih akan terus bertambah hingga akhir triwulan IV 2025.

10. Sasaran Strategis “Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkaran hutan”

Indikator : Persentase desa di sekitar lingkaran hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial
Target : 40%
Realisasi : 38,93%
Uraian :

a. Capaian Kinerja s/d Triwulan III

Perhutanan sosial (PS) adalah sistem pengelolaan dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dikelola oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Program perhutanan sosial (PS) bertujuan untuk masyarakat melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Pemerintah memberikan persetujuan akses legal kepada rakyat untuk memanfaatkan hutan selama 35 tahun. Sampai pada triwulan III Tahun 2025, belum dilakukan rekapitulasi sehingga masih menggunakan data tahun 2024 yaitu sejumlah 197 dari 506 desa miskin sekitar kawasan hutan yang telah memiliki kelompok tani hutan (38,93%).

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Kinerja sampai pada triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan karena belum dilakukan rekapitulasi sehingga masih menggunakan data tahun 2024 yaitu sejumlah 197 dari 506 desa miskin sekitar kawasan hutan yang telah memiliki kelompok tani hutan (38,93%).

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkaran hutan terukur melalui keberadaan kelompok tani hutan pada desa sekitar lingkaran hutan. Berdasarkan data terakhir di tahun 2024, telah terdapat 197 desa miskin sekitar kawasan hutan yang telah memiliki kelompok tani hutan. Sampai dengan September 2025, belum dilakukan rekapitulasi penambahan desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki kelompok tani hutan.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi dari target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas LHK NTB dengan Gubernur NTB Tahun Anggaran 2025 tidak termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Kesejahteraan desa sekitar lingkaran hutan tidak terlepas dari peran kelompok tani hutan yang mengelola dan/atau memanfaatkan sumberdaya hutan dalam program perhutanan sosial. Beberapa skema Perhutanan Sosial di Provinsi NTB antara lain melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Per September 2025, belum dilakukan rekapitulasi dan updating data kelompok Perhutanan Sosial beserta dengan lokasinya.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase desa di sekitar lingkaran hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial yaitu :

- 1) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 24 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Persentase desa di sekitar lingkaran hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	P2 (Pagu Anggaran /Target Outcome)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4 x 100)
Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkaran hutan										
1	Persentase desa di sekitar lingkaran hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial	832.078.000	188.779.800	40,00	38,93	4.849.211,41	20.801.950,00	0,23	0,77	76,69

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkaran hutan, tidak sepenuhnya efisien dan dapat mendukung tercapainya target persentase desa di sekitar lingkaran hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial.

11. Sasaran Strategis “Meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi NTB”

Indikator : Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu

Target : 3,5%-4,2%

Realisasi : -

Uraian :

a. Capaian Kinerja s/d Triwulan III

Sektor kehutanan turut menyumbang capaian PDRB Provinsi NTB, meliputi penebangan segala jenis kayu dan seluruh komoditas yang dihasilkan dari kegiatan kehutanan. Sampai triwulan III Tahun 2025, belum tersedia data rilis resmi oleh BPS selaku wali data.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Sampai triwulan III Tahun 2025, belum tersedia data rilis resmi oleh BPS selaku wali data sehingga belum dapat dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya.

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Sektor kehutanan turut menyumbang capaian PDRB Provinsi NTB, meliputi penebangan segala jenis kayu dan seluruh komoditas yang dihasilkan dari kegiatan kehutanan. Untuk tahun 2025, belum tersedia data rilis resmi oleh BPS selaku wali data. Jika melihat kondisi capaian di 2024, PDRB sub sektor kehutanan mencapai ialah 1,11%.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi dari target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas LHK NTB dengan Gubernur NTB Tahun Anggaran 2025 tidak termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Sektor kehutanan turut menyumbang capaian PDRB Provinsi NTB, meliputi penebangan segala jenis kayu dan seluruh komoditas yang dihasilkan dari kegiatan kehutanan. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, belum tersedia data rilis resmi oleh BPS selaku wali data. Upaya yang dilakukan, antara lain dengan monitoring Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu. Monitoring ini dapat mendorong para pemegang PBPH dan PBPHH

untuk meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi produk kehutanan, baik hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, maupun pemanfaatan jasa lingkungan.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yaitu :

1) Program Pengelolaan Hutan

- a. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- b. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 25 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	P2 (Pagu Anggaran /Target Outcome)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4 x 100)
Meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi NTB										
1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	39.000.000	29.024.069	3.5-4.2	-	-	-	-	-	-

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi NTB, hampir seluruhnya telah efisien namun sampai pada triwulan III 2025, BPS Provinsi NTB selaku wali data terkait PDR Provinsi NTB belum merilis data kondisi PDRB tahun 2025, sehingga produktivitas urusan kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi NTB belum dapat dihitung.

12. Sasaran Strategis “Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap capaian PDRB Provinsi NTB”

Indikator : Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Target : 5,3% - 6,3%
Realisasi : -
Uraian :

a. Capaian Kinerja s/d Triwulan III

Sektor lingkungan hidup berperan dalam pencapaian PDRB pada kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang. Kategori ini mencakup kegiatan lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah oleh pemerintah dan swasta, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Perhitungan pengelolaan sampah/limbah menggunakan pendekatan pendapatan. Sampai triwulan III Tahun 2025, belum tersedia data rilis resmi oleh BPS selaku wali data.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Sampai triwulan III Tahun 2025, belum tersedia data rilis resmi oleh BPS selaku wali data sehingga belum dapat dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya.

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Untuk tahun 2025, belum tersedia data rilis resmi oleh BPS selaku wali data. Jika melihat kondisi capaian di 2024, PDRB sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mencapai ialah 0,77%.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi dari target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas LHK NTB dengan Gubernur NTB Tahun Anggaran 2025 tidak termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Sektor lingkungan hidup berperan dalam pencapaian PDRB pada kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang. Kategori ini mencakup kegiatan lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah oleh pemerintah dan swasta, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Perhitungan pengelolaan sampah/limbah menggunakan

pendekatan pendapatan. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, belum tersedia data rilis resmi oleh BPS selaku wali data.

Produktivitas pada sektor ini berkaitan dengan kinerja usaha industri pengelolaan persampahan. Munculnya inovasi dan teknologi pengelolaan sampah juga menjadi salah satu hasil positif dengan adanya program unggulan NTB Zero Waste pada periode pemerintahan 2019-2023 lalu, dari awalnya hanya berupa pemrosesan akhir dimana skemanya “Kumpul, Angkut, Buang” saat ini semakin berkembang dengan hadirnya dukungan dari para pihak.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu :

1) Program Pengelolaan Persampahan

a. Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 26 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	P2 (Pagu Anggaran /Target Outcome)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4 x 100)
Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap peningkatan PDRB Provinsi NTB										
1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	174.719.143	67.704.000	5.3-6.3	-	-	-	-	-	-

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap capaian PDRB Provinsi NTB, hampir seluruhnya telah efisien namun sampai pada Triwulan III 2025, BPS Provinsi NTB selaku wali data terkait PDRB Provinsi NTB belum merilis data kondisi PDRB tahun 2024, sehingga produktivitas urusan lingkungan hidup terhadap capaian PDRB Provinsi NTB belum dapat dihitung

3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 yang mengacu pada Renstra 2025-2029

Capaian kinerja Dinas LHK NTB Tahun 2025 berdasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas LHK NTB dengan Gubernur NTB yang mengacu pada Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 27 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Renstra th 2025	Capaian Nasional 2025	Tahun 2025		Perbandingan Realisasi 2025 terhadap (%)		
							Target	Realisasi	Realisasi 2024	Target Renstra th 2025	Capaian Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menurunnya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	70,01	74,36	-	74,36	71,24	101,76	95,80	-
		Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	85,83	82,99	-	82,99	81,14	94,54	97,77	-
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	96,24	75,62	-	75,62	81,44	84,62	107,70	-
		Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah	%	0,04	8,83	-	8,83	76,50	100,00	866,36	-
2	Meningkatnya pengelolaan hutan lestari	Skor pengurangan ancaman kepunahan dan pemanfaatan berkelanjutan	Skor	3,26	3,264	-	3,264	3,292	100,95092	100,83	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Renstra th 2025	Capaian Nasional 2025	Tahun 2025		Perbandingan Realisasi 2025 terhadap (%)		
							Target	Realisasi	Realisasi 2024	Target Renstra th 2025	Capaian Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		n keanekaragaman hayati sektor kehutanan dan lahan									
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	66,49	77,63	-	77,63	77,36	116,34832	99,65	-
		Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan	%	0,14	0,14	-	50,27	0,14	100	100,00	-
3	Meningkatnya produksi hasil hutan dan jasa lingkungan	Persentase peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	%	4	4,2	-	4,2	229,83	5745,75	5.472,14	-

1. Sasaran Strategis “Menurunnya tingkat pencemaran air”

Indikator 1	: Indeks Kualitas Air
Target	: 74,36
Realisasi	: 71,24
Uraian	:

a. Capaian Kinerja Tahun 2025

Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2025 diukur melalui kegiatan pemantauan kualitas air sungai di 10 sungai di Provinsi NTB. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah, dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Sampel kualitas air sungai diambil di 49 lokasi di wilayah NTB yaitu Tojang, Sari, Babak, Ancar, Segara, Dodokan, Brang Rea, Brang Biji, Rabalaju, dan Padolo. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap sample air yang diambil. Adapun parameter dari perhitungan IKA ini adalah pH, BOD, COD, TSS, DO, Nitrat, Total Fosfat dan Fecal Coliform. Jika nilai indeks pencemar semakin tinggi maka semakin buruk kualitas airnya. Data kualitas air diambil dari 264 titik yang tersebar di 10 kabupaten/kota pada provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluruh titik tersebut telah terverifikasi secara berjenjang mulai dari kabuapten/kota hingga pusat, sehingga dapat digunakan untuk perhitungan IKA. Pengambilan sampel pada 60 titik dilakukan oleh Dinas LHK Provinsi NTB, 194 titik oleh Dinas LH Kab/Kota, dan 10 titik oleh Kementerian LHK Data ini diambil dari titik hulu hingga ke hilir sungai. Pemantauan dilakukan pada saat musim hujan dan kemarau. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai IKA NTB berada dalam kondisi sedang, hal ini disebabkan beberapa parameter pada hasil samplingnya tidak memenuhi nilai baku mutu.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Meningkat 1,23 poin dari tahun 2024 melalui perhitungan indeks dengan rumus terbaru.

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Capaiannya tahun 2025 sebesar 71,24 poin atau 95,83% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Belum dapat dibandingkan dikarenakan nilai IKA Nasional belum dirilis oleh Kementerian LH.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

IKA menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Nilai IKA Provinsi NTB adalah gabungan hasil sampling kualitas air sungai yang dilakukan oleh Pusat (Kementerian LHK), Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Nilai IKA pada tahun 2025 adalah sebesar 71,24 poin atau meningkat 1,23 poin dari tahun 2024. Berdasarkan pengambilan sampel kualitas air sungai di tingkat lapangan, diperkirakan kondisi kualitas air mengalami peningkatan. Data kualitas air diambil dari 264 titik yang tersebar di 10 kabupaten/kota pada provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rincian 10 sampel yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK (KLHK), 60 sampel oleh Provinsi, dan 194 sampel oleh Kabupaten/Kota.

Nilai IKA NTB berada dalam kondisi sedang, terdapat beberapa sampel memiliki nilai parameter melebihi baku mutu. Oksigen terlarut atau DO (dissolved oxygen) adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorbs atmosfer/udara. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh makhluk hidup dalam air, jika kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi anaerobik yang mungkin saja terjadi. Sebanyak 28 sampel kabupaten/kota memiliki nilai DO rendah di bawah baku mutu minimal 4 mg/L yang dipersyaratkan pada lampiran VI PP Nomor 22 Tahun 2021.

Hal ini berkaitan juga dengan nilai BOD, dimana jika nilai BOD tinggi maka akan mempengaruhi nilai DO dalam air. Biological Oxygen Demand (BOD) adalah ukuran oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme untuk menguraikan sampah. Sungai yang memiliki kadar BOD tinggi merupakan indikasi tingginya pencemaran di sungai karena oksigen terlarut yang tersedia di dalam air digunakan oleh bakteri, dan hal ini mengakibatkan berkurangnya oksigen yang tersedia untuk ikan dan makhluk air lainnya. Pada hasil sampling kualitas air sungai pada tahun 2025, terdapat 2 sampel Provinsi dan 32 sampel kabupaten/kota yang nilai BOD nya di atas 3 mg/L mengacu pada baku mutu yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021.

Parameter berkaitan lainnya yang diukur dalam IKA adalah Chemical Oxygen Demand (COD) yang mengukur jumlah oksigen (mg/L) yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik dan anorganik secara kimiawi. Sungai yang memiliki kadar COD tinggi dapat menurunkan nilai DO secara drastis, yang mengancam kehidupan ikan dan biota air lainnya. Sumber pencemaran

dapat berasal dari limbah domestik (detergen, kotoran) atau limbah industri (pewarna, bahan kimia). Pada hasil sampling kualitas air sungai pada tahun 2025, terdapat 42 sampel kabupaten/kota yang nilai COD nya di atas 25 mg//L mengacu pada baku mutu yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021.

Fecal coliform adalah coliform yang berasal dari feses baik manusia maupun binatang, fecal coliform yang tinggi dapat membahayakan lingkungan, dekomposisi aerobiknya dapat menurunkan oksigen terlarut sehingga menimbulkan kematian pada ikan dan organisme akuatik lainnya. Fecal coliform tinggi juga dapat menekan pertumbuhan bakteri menguntungkan sehingga merusak keseimbangan akuatik secara keseluruhan. Berdasarkan hasil uji lab yang telah dilakukan, terdapat 8 sampel KLHK, 57 sampel Provinsi, dan 179 sampel kabupaten/kota yang melebihi baku mutu karena nilai fecal coli >1.000 mg/L Tingginya nilai E Coli disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik. Pada umumnya air limbah ini terdiri dari ekskreta (tinja dan air seni), air bekas cucian dapur dan kamar mandi, dan umumnya terdiri dari bahan-bahan organik dan anorganik.

Parameter lainnya yang diukur ialah pH untuk menunjukkan derajat keasaman atau kebasahan air yang berfungsi sebagai indikator utama kualitas air, kesehatan ekosistem, dan tingkat pencemaran. Seluruh sampel menunjukkan pH berada pada rentang 6 - 9 atau masih berada dalam baku mutu yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021

TSS (Total Suspended Solids atau Padatan Tersuspensi Total) adalah indikator penting kekeruhan dan kualitas air sungai; nilai tinggi menandakan pencemaran, sedimentasi, dan bahaya bagi ekosistem, sering kali dipengaruhi musim hujan atau limbah domestik. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2021, baku mutu nilai TSS yang dipersyaratkan ialah 50 mg/L. Berdasarkan hasil sampling, terdapat 7 sampel Provinsi dan 29 sampel kabupaten/kota yang melebihi baku mutu.

Nitrat adalah parameter kimia vital dalam mengukur kualitas air sungai, yang menunjukkan tingkat kesuburan dan pencemaran organik. Kadar tinggi (>10 mg/L menurut PP No. 22 Tahun 2021) menandakan pencemaran dari limbah domestik, pupuk pertanian, atau kotoran hewan, yang memicu eutrofikasi (ledakan alga), menurunkan oksigen terlarut, dan mengancam biota. Dimerujuk pada hasil pemantauan, terdapat 7 (tujuh) sampel Provinsi dan 3 (tiga) titik sampel kabupaten/kota yang melebihi baku mutu.

Total fosfat merupakan parameter kritis dalam pengukuran kualitas air sungai, di mana konsentrasi yang melebihi batas 0,2 mg/L berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 mengindikasikan pencemaran, seringkali berasal dari

deterjen atau limbah pertanian. Berdasarkan hasil sampling, terdapat 2 sampel KLHK, 14 sampel Provinsi, dan 71 sampel kabupaten/kota yang melebihi baku mutu.

Mengacu pada lampiran VI PP 21 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sungai di wilayah Provinsi NTB tergolong pada kelas 2, yang peruntukannya digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Status mutu airnya diklasifikasikan menjadi cemar ringan, cemar sedang, dan cemar berat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 28 Rekapitulasi Status Mutu Air Sungai di Provinsi NTB

Status Mutu Air	Jumlah pemantauan (sampel)
Memenuhi	27
Cemar Ringan	156
Cemar Sedang	78
Cemar Berat	0
Total	264

Jika dihitung persentasenya, maka titik sampel yang memenuhi baku mutu adalah sebesar 10,22%, dibawah target yang ditetapkan yaitu 13,99%. Perlu perhatian lebih lanjut terutama pada titik-titik yang status mutu airnya tercemar ringan dan sedang, dengan mengacu pada parameter yang masih melebihi baku mutu. Hasil di atas juga merupakan gabungan dari sampling Kementerian LH, Provinsi, dan kab/Kota, sehingga perlu sinergitas antar level pemerintah dalam upaya pengendalian pencemaran kualitas air sungai ke depan.

Pada tahun 2025, Dinas LHK NTB telah melakukan beberapa upaya strategis dalam rangka penanganan dan pengendalian kualitas air sungai di NTB, antara lain

1. Pembinaan dan penguatan kapasitas kelompok Program Kampung Iklim (Proklim)

Permasalahan lingkungan global saat ini berupa perubahan iklim yang ditandai dengan perubahan signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan. Kondisi tersebut disebabkan oleh meningkatnya temperatur bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Salah satu upaya

penanggulangan yang dilakukan adalah melalui Program Kampung Iklim (Proklim) yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program ini merupakan wujud penguatan komitmen internasional dalam mengendalikan laju peningkatan suhu bumi di bawah 2°C dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk pengendalian pencemaran air di tingkat lokal. Aksi nyata meliputi pengelolaan sampah (kompos), pembuatan lubang biopori, konservasi air, pengelolaan limbah cair, dan penghijauan.

Pada tahun 2025, tidak terdapat kelompok baru yang mendaftarkan lokasi Proklim ke dalam aplikasi Sistem Registrasi Nasional (SRN). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas LHK NTB, difokuskan pada kegiatan pembinaan dan penguatan kapasitas terhadap 11 (sebelas) lokasi Proklim yang tersebar di wilayah NTB. Pembinaan tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, meningkatkan kualitas pelaporan kegiatan, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.

2. Pengelolaan laboratorium lingkungan

Pengelolaan laboratorium lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran air melibatkan pengujian akurat, pemantauan rutin (sampel air bersih/limbah), dan penegakan akreditasi (KAN) untuk memastikan data valid sesuai standar lingkungan. Laboratorium lingkungan harus memiliki sistem manajemen mutu, SDM kompeten, prosedur, dan izin pengelolaan limbah (B3).

Pada tahun 2025, Dinas LHK NTB melalui UPTD Balai Laboratorium Lingkungan telah melakukan pengambilan sampel kualitas air sungai di 10 sungai untuk perhitungan Indeks Kualitas Air. Balai Laboratorium Lingkungan juga berhasil meningkatkan capaian kinerja utama melalui perluasan lingkup akreditasi yang dilaksanakan pada Agustus 2025 dalam kegiatan Surveilans II Laboratorium Lingkungan. Melalui kegiatan surveilans tersebut, laboratorium tidak hanya mempertahankan status akreditasi yang telah dimiliki, tetapi juga berhasil menambah jumlah parameter uji terakreditasi secara signifikan, dari target 7 parameter menjadi 13 parameter terakreditasi.

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah analis relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada periode tertentu. Pada awal periode, jumlah analis tercatat sebanyak 7 (tujuh) orang, kemudian mengalami peningkatan seiring bertambahnya beban kerja dan kompleksitas layanan, hingga mencapai 9 (sembilan) analis pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan

adanya penyesuaian kapasitas SDM untuk mengimbangi peningkatan jumlah pengujian dan parameter yang dilayani.

Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan mencakup 10 lokasi sungai, dengan 30 titik pengambilan sampel (Spot IKA) yang seluruhnya terlaksana sesuai target. Selain itu, kegiatan pengawasan dan pengujian kualitas lingkungan menghasilkan 391 Laporan Hasil Uji (LHU) terhadap media tanah, air, udara, dan laut. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 yaitu 435 permohonan. Jika dilihat dari jumlah sampel yang dianalisis, jumlahnya mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2019 jumlah sampel yang diuji masih relative rendah, maka pada tahun 2025 jumlah sampel meningkat drastis hingga mencapai 4.019 sampel. Lonjakan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan layanan pengujian lingkungan, sekaligus mencerminkan kemampuan laboratorium dalam mengelola beban kerja yang semakin besar secara efektif.

Perkembangan paling menonjol terlihat pada jumlah parameter uji yang mampu dilayani oleh laboratorium. Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah parameter uji masih terbatas. Hingga tahun 2025, jumlah parameter uji yang tersedia mencapai 137 parameter, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 yaitu 145 parameter, namun terjadi lonjakan yang sangat signifikan sejak tahun 2019, yang menunjukkan perluasan layanan pengujian yang sangat pesat dan mencerminkan penguatan kapasitas teknis laboratorium secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, jumlah parameter terakreditasi juga menunjukkan peningkatan yang konsisten dan strategis. Pada awal periode 2019–2021, laboratorium belum memiliki parameter terakreditasi. Namun mulai tahun 2022, parameter terakreditasi mulai bertambah secara bertahap hingga mencapai 37 parameter terakreditasi pada tahun 2025. Peningkatan ini menegaskan komitmen Balai Laboratorium Lingkungan dalam meningkatkan mutu layanan, kepatuhan terhadap standar, serta kepercayaan pengguna jasa melalui pemenuhan persyaratan akreditasi.

3. Pendampingan sekolah adiwiyata

Sekolah Adiwiyata berperan aktif dalam pengendalian pencemaran air melalui penerapan program-program konservasi dan pengelolaan limbah cair berbasis partisipatif. Tujuan utamanya adalah mengurangi pemborosan air, mencegah pencemaran sumber air (tanah dan sungai), serta meningkatkan kesadaran warga sekolah untuk menghemat dan menjaga kebersihan air. Dinas LHK NTB telah melakukan sosialisasi dan pembinaan serta pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah (GPBLHS) dari tingkat dasar

hingga menengah yang berada di seluruh Kabupaten/Kota se NTB. Selain sosialisasi, pembinaan dan pendampingan GPBLHS, dilakukan penilaian terhadap sekolah-sekolah yang telah berhasil melaksanakan GPBLHS. Penilaian tersebut akan menetapkan sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria standar Sekolah Adiwiyata Provinsi (bobot nilai $\geq 80\%$ dari nilai capaian tertinggi indikator penilaian Sekolah Adiwiyata) yang kemudian akan didorong untuk memenuhi standar Sekolah Adiwiyata Nasional ($\geq 90\%$) dan Mandiri (≥ 95) melalui pengusulan penilaian Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri. Terdapat 23 (dua puluh tiga) sekolah Adiwiyata Provinsi NTB yang telah ditetapkan sejak Tahun 2023 hingga 2025 dan masih berlaku, 6 (enam) diantaranya telah naik peringkat dan memperoleh predikat Sekolah Adiwiyata Nasional (SAN) dan masih berlaku. Sehingga sampai tahun 2025, terdapat 10 (sepuluh) sekolah yang berpredikat SAN.

Tabel 29 Sekolah Adiwiyata Provinsi NTB Tahun 2025

No.	Nama Sekolah	Lokasi		
		Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	MAS Sayang Ibu	Lingsar	Lingsar	Lombok Barat
2	SMAN 3 Sumbawa Besar	Brang Biji	Sumbawa	Sumbawa
3	SMPN 6 Taliwang	Menala	Taliwang	Sumbawa Barat
4	SDN 1 Taliwang	Kuang	Taliwang	Sumbawa Barat
5	SDN 2 Dompu	Karijawa	Dompu	Dompu
6	SMPN 1 Empang	Empang	Empang	Sumbawa
7	SMPN 3 Sumbawa Besar	Seketeng	Sumbawa	Sumbawa
8	SMPN 1 Sumbawa Besar	Bugis	Sumbawa	Sumbawa
9	SDN 2 Seteluk	Seteluk Tengah	Seteluk	Sumbawa Barat
10	SDN Sapugara	Sapugara Bree	Brang Rea	Sumbawa Barat
11	SDN Telaga Baru	Telaga Baru	Telaga Bauntung	Sumbawa Barat
12	SMPN 3 Taliwang	Bugis	Taliwang	Sumbawa Barat

No.	Nama Sekolah	Lokasi		
		Desa	Kecamatan	Kabupaten
13	SMPN 1 Maluk	Mantun	Maluk	Sumbawa Barat
14	MTsS Sayang Ibu Dasan Geria	Lingsar	Lingsar	Lombok Barat
15	SDN Uma Beringin	Uma Beringin	Unter Iwes	Sumbawa
16	SDN 11 Manggemaci	Manggemaci	Mpunda	Kota Bima
17	SMAN 1 Sumbawa Besar	Bugis	Sumbawa Besar	Sumbawa
18	SMPN 1 Labuhan Badas	Labuan	Labuhan Badas	Sumbawa
19	SMPN 1 Utan	Jorok	Utan	Sumbawa
20	SDN 14 Sumbawa	Lempeh	Sumbawa	Sumbawa
21	SDN 1 Moyo	Moyo	Moyo Hilir	Sumbawa
22	SDN Selang	Kerekeh	Unter Iwes	Sumbawa
23	SDN 1 Jembatan Kembar	Jembatan Kembar	Lembar	Lombok Barat

Tabel 30 Sekolah Adiwiyata Nasional NTB Tahun 2025

No.	Nama Sekolah	Lokasi		
		Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	MAS Sayang Ibu	Lingsar	Lingsar	Lombok Barat
2	MTsN 2 Sumbawa	Bunga Eja	Empang	Sumbawa
3	SMAN 1 Gerung	Gerung Utara	Gerung	Lombok Barat
4	SMPN 1 Labuapi	Bagik Polak	Labuapi	Lombok Barat
5	SMPN 1 Lembar	Lembar	Lembar	Lombok Barat
6	SMPN 1 Empang	Empang	Empang	Sumbawa
7	SMPN 3 Sumbawa Besar	Seketeng	Sumbawa	Sumbawa
8	SDN 2 Seteluk	Seteluk Tengah	Seteluk	Sumbawa
9	SMPN 1 Maluk	Mantun	Maluk	Sumbawa Barat
10	SDN 11 Manggemaci	Manggemaci	Mpunda	Kota Bima

4. Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi PROPER

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan salah satu instrumen penataan berlandaskan pemikiran dan analisis bahwa upaya peningkatan kinerja penataan perusahaan akan lebih efektif melalui penerapan *policy mixed instruments* (instrumen kebijakan campuran). Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat pengendalian kualitas lingkungan khususnya terhadap kualitas air, serta penegakan hukum lingkungan, dan instrumen ekonomi. Di samping itu penerapan PROPER dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan.

PROPER difokuskan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria, antara lain; perusahaan yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup, perusahaan yang berorientasi ekspor dan/atau produknya bersinggungan langsung dengan masyarakat, serta perusahaan public

Untuk periode penilaian PROPER tahun 2024 - 2025 di Provinsi NTB, terdapat 18 perusahaan peserta PROPER yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 834 Tahun 2025 tentang Peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Periode Tahun 2024 – 2025 tanggal 16 Mei 2025. Sebanyak 3 (tiga) unit Perusahaan dievaluasi oleh tim PROPER Kabupaten/Kota, 4 (empat) unit perusahaan dievaluasi oleh tim PROPER Provinsi NTB dan 11 unit perusahaan dievaluasi oleh tim PROPER Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup). Unit usaha peserta PROPER berasal dari berbagai sektor antara lain sektor pembangkit energi dan migas, pertambangan, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan sektor Pelabuhan

5. Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office)

Penerapan konsep Eco Office (kantor ramah lingkungan) merupakan langkah strategis yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas air. Dengan mengurangi beban pencemaran yang berasal dari aktivitas perkantoran, baik secara langsung maupun tidak langsung, kualitas air lingkungan sekitar dapat terjaga. Dalam implementasi Eco Office didukung dengan adanya Surat Edaran Gubernur NTB Nomor: 660/131/PSPPL-DISLHK/2021 tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi NTB. Kegiatan Eco Office terdiri dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai yang berasal dari beberapa perwakilan OPD (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja) dan satuan petugas berantas sampah. Penilaian Eco Office tahun 2025 dengan menggunakan matriks penilaian beserta bobotnya mencakup 10% perencanaan dan 90% dan dilakukan pembinaan dan penilaian kepada 47 OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB seperti tahun 2024.

Melihat seluruh upaya yang telah dirincikan di atas, maka total keseluruhan lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah 243 unit, yang terdiri dari 27 sekolah adiwiyata, 18 perusahaan yang dibina melalui PROPER, 151 kelompok proklam, dan 47 kantor Pemerintah Provinsi NTB yang telah menerapkan kantor ramah lingkungan. Angka di atas berada dibawah target 253 unit sesuai Renstra 2025-2029, namun jika dibandingkan dengan tahun 2024, angka ini meningkat terutama dari partisipasi lembaga pendidikan dan kelompok proklam

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja Indeks Kualitas Air yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator 2	:	Indeks Kualitas Udara
Target	:	75,62
Realisasi	:	81,44
Uraian	:	

a. Capaian Kinerja Tahun 2025

Indeks kualitas udara adalah parameter yang menunjukkan kondisi kualitas udara di sebuah tempat. Indeks ini dibuat untuk memudahkan masyarakat mengetahui kondisi kualitas udara dengan cara yang sederhana dan satuan-satuan yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Pemantauan kualitas udara dengan menggunakan metode passive sampler tidak digunakan lagi mulai tahun 2025 dan digantikan dengan air quality monitoring system (AMS), baik statis atau portable, dan manual aktif. Pemantauan dilaksanakan pada 4 lokasi sampling yaitu Transportasi, Industri, Pemukiman dan Perkantoran. Tempat-tempat tersebut memiliki kriteria berbeda berkaitan dengan sumber polusi yang mempengaruhi kualitas udara. Sampel kualitas udara dilakukan oleh Kementerian LHK (78 titik) dan kabupaten/kota (6 titik).

Data tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai IKU Provinsi NTB dalam kondisi baik. Terdapat 3 parameter penilaian IKU, yaitu NO₂, SO₂, dan PM_{2,5}. Untuk parameter NO₂ dan SO₂ pada seluruh sampel nilainya berada di bawah baku mutu, sedangkan untuk parameter PM_{2,5} pada 3 (tiga) sampel melebihi baku mutu.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Menurun 14,8 poin dari tahun 2024 dengan perhitungan melalui perhitungan indeks dengan rumus terbaru

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Capaiannya tahun 2025 sebesar 81,44 poin atau 107,69% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Belum dapat dibandingkan dikarenakan nilai IKU Nasional belum dirilis oleh Kementerian LH.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

IKU yaitu parameter yang menunjukkan kondisi kualitas udara di sebuah tempat. Indeks ini dibuat untuk memudahkan masyarakat mengetahui kondisi kualitas udara dengan cara yang sederhana dan satuan-satuan yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Pemantauan dilaksanakan di 4 (empat) jenis lokasi yang dianggap bisa mewakili kondisi suatu wilayah yaitu

Transportasi, Industri, Pemukiman dan Perkantoran. Nilai IKU pada tahun 2025 adalah sebesar 81,44 poin atau menurun sebesar 14,8 poin dari tahun 2024, namun melebihi target 75,62 poin yang ditetapkan. Pada tahun 2025, telah dilakukan perhitungan IKU menggunakan metode baru, yang menambahkan partikulat halus yang diameternya < 2,5 mikrometer (PM 2,5) sebagai parameter yang diukur selain NO₂ dan SO₂. Terdapat 84 titik sampel yang menjadi acuan dalam perhitungan IKU NTB, dengan rincian 76 titik oleh Kementerian LHK, dan 8 titik oleh kabupaten/kota. Dinas LHK NTB pada tahun 2025 tidak melakukan sampling dikarenakan alokasi anggaran difokuskan untuk sampling kualitas air sungai. Kualitas udara dipengaruhi oleh sumber emisi berasal dari sumber bergerak dan tidak bergerak. Peningkatan jumlah penduduk yang diiringi peningkatan aktivitas masyarakat turut mempengaruhi jumlah sumber emisi yang ada. Sumber emisi bergerak ialah aktivitas transportasi yang berasal dari kendaraan bermotor yang menghasilkan gas buang berupa karbon monoksida (CO), berbagai senyawa hidrokarbon, oksida nitrogen (NO_x), sulfur (SO_x), dan partikulat debu termasuk timbal (Pb). Sedangkan sumber emisi tidak bergerak di NTB antara lain berasal dari aktivitas pembakaran hutan, aktivitas industri dan rumah tangga, pembakaran sampah. Emisi yang dihasilkan sumber tidak bergerak ini juga menyebabkan menurunnya kualitas udara.

Berdasarkan hasil pemantauan, seluruh sampel berada pada bawah baku mutu kualitas udara yang dipersyaratkan dalam PP 21 Tahun 2021 (SO₂ < 45 µg/m³, NO₂ < 50 µg/m³, dan PM 2,5 < 15 µg/m³) maka dapat dijelaskan bahwa penurunan indeks kualitas udara dari tahun sebelumnya diperkirakan disebabkan oleh meningkatnya jumlah transportasi pribadi, meningkatnya jumlah penduduk dan permukiman, minimnya pengendalian pencemaran udara oleh pelaku usaha/industri, dan padatnya aktivitas di sekitar kawasan perkantoran yang turut berkontribusi dalam penurunan kualitas udara. Dinas LHK NTB telah berupaya melakukan penurunan tingkat pencemaran udara melalui perbaikan tata kelola perencanaan lingkungan hidup, dengan melakukan integrasi dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan melalui :

1. Pengarusutamaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), bahwa pelaksanaan RPPLH adalah pendekatan sistematis dan strategis yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi panduan dalam mengelola kualitas udara, potensi masalah, dan upaya penanggulangannya. RPPLH dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak membebani kualitas udara. Dinas LHK NTB telah memiliki dokumen RPPLH

sesuai dengan Perda 4 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi NTB, dan telah disosialisasikan ke 10 kabupaten/kota.

2. Asistensi terhadap penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) baik yang berupa KLHS untuk dokumen perencanaan daerah maupun tata ruang yang disusun oleh Kabupaten/Kota. Upaya pengendalian pencemaran udara melalui KLHS dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) pemerintah. KLHS berfungsi sebagai instrumen preventif di tingkat hulu untuk memastikan kebijakan strategis tidak merusak kualitas udara. Beberapa poin yang harus termuat dalam dokumen KLHS sebagai upaya pengendalian pencemaran udara antara lain :
 1. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Lingkungan: KLHS memuat kajian kapasitas lingkungan (air, tanah, udara) untuk menampung beban emisi dari rencana pembangunan;
 2. Evaluasi Kegiatan/Rencana/Program (KRP) yang Berpotensi Emisi Tinggi: KLHS wajib diterapkan pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan rencana zonasi lainnya untuk menilai risiko pencemaran udara;
 3. Perumusan Skenario Pembangunan Rendah Emisi: KLHS membantu merumuskan skenario yang tidak lagi business as usual (BAU), tetapi mengintervensi kebijakan agar lebih ramah lingkungan, misalnya membatasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
 4. Rekomendasi Mitigasi dalam Kebijakan: KLHS memberikan rekomendasi perbaikan KRP, seperti penetapan kawasan hijau (RTH), pengaturan tata ruang untuk mengurangi transportasi pribadi, dan pembatasan industri berbahan bakar batubara;
 5. Pemantauan dan Evaluasi Berjenjang: KLHS melibatkan pemantauan pelaksanaan rekomendasi oleh pemerintah pusat dan daerah secara berjenjang (Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota) untuk memastikan kualitas udara terjaga.

Pengumpulan data untuk penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), yang berfungsi untuk mengevaluasi kualitas udara dengan mengetahui tingkat pencemaran serta dampaknya. Data tersebut dapat menjadi acuan Dinas LHK NTB dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, serta menyusun strategi pemulihan dan peningkatan kualitas udara ke depan

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja Indeks Kualitas Udara yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi

Indikator 3	: Indeks Kualitas Air Laut
Target	: 82,99
Realisasi	: 81,14
Uraian	:

a. Capaian Kinerja Tahun 2025

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut yang meliputi parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, N-NH₃, PO₄-P dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dinas LHK NTB berperan melakukan pendampingan pemantauan oleh Kementerian LHK sejak Tahun 2021. Di Tahun 2025, pemantauan tidak didampingi oleh Dinas LHK NTB, melainkan dilakukan secara mandiri oleh Kementerian LHK sebanyak 1 (satu) kali pada 69 titik sampling. Adapun lokasi titik pantau yang dimaksud antara lain pada 67 titik yang mewakili sector pelabuhan, dan 2 titik mewakili sector wisata bahari. Nilai IKAL NTB mencapai 81,44 di tahun 2025, nilai tersebut termasuk dalam kategori baik. Hal ini didukung dengan hasil sampling yang menunjukkan bahwa nilai parameter pada seluruh titik sampel kualitas air laut berada di bawah baku mutu

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Menurun 4,69 poin dari tahun 2024

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Capaiannya tahun 2025 sebesar 81,14 poin atau 97,77% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Belum dapat dibandingkan dikarenakan nilai IKAL Nasional belum dirilis oleh Kementerian LH.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Laut merupakan habitat berbagai organisme maka kondisi kualitas air laut suatu perairan yang baik sangat penting untuk mendukung kehidupan organisme yang hidup di dalamnya. Kualitas air laut yang meliputi faktor fisika, kimia, dan biologi perlu dimonitor secara kontinu untuk mengetahui kondisi terkini suatu perairan.

Pada tahun 2025, nilai IKAL NTB mencapai 81,14 poin atau menurun sebesar 4,39 poin dari tahun sebelumnya. Pemantauan sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan, dan akan menjadi dasar bagi perhitungan IKAL. Kegiatan pemantauan ini dilakukan berdasarkan keadaan kondisi lingkungan di lokasi

tersebut yaitu pada lokasi dengan jenis peruntukan pelabuhan (67 titik) dan wisata bahari (2 titik). Lokasi pemantauan kualitas air laut yang dimaksud antara lain :

- a. PT Tiara Cipta Nirwana (8 titik)
- b. PT PLN (Persero) Wilayah NTB Sektor Tambora PLTU Sumbawa Barat (4 titik)
- c. PT PLN (Persero) UP Tambora PLTMG Bima (8 titik)
- d. PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang (27 titik)
- e. PLN (Persero) UP Tambora PLTMG Sumbawa (8 titik)
- f. PT Pertamina Patra Niaga - Integrated Terminal Ampenan (4 titik)
- g. PT Pertamina Patra Niaga - Fuel Terminal Badas (2 titik)
- h. PT Pertamina Patra Niaga - Integrated Terminal Bima (8 titik)

Penurunan nilai IKAL sebesar 4,69 poin dari tahun sebelumnya diperkirakan karena titik sampel pada tahun ini berdekatan dengan sumber dampak dari perusahaan-perusahaan tersebut. Berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang lokasi pengambilan sampelnya sebagian besar berada pada lokasi dengan peruntukan biota laut dan wisata bahari. Berdasarkan hasil pemantauan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, menunjukkan bahwa hasil uji TSS (Total Padatan Tersuspensi) seluruh titik pantau memenuhi standar baku mutu karena masih berada di bawah ambang batas baku mutu. Pengamatan terhadap sebaran TSS sering dilakukan untuk mengetahui kualitas air di suatu perairan. Karena jika nilai TSS tinggi menunjukkan tingginya tingkat pencemaran dan menghambat penetrasi cahaya ke dalam air.

Hasil uji parameter DO (Dissolve Oxygen/Oksigen Terlarut) menunjukkan bahwa seluruh titik pantau sudah memenuhi standar baku mutu DO yang seharusnya, kecuali pada 2 titik yang disampling oleh PT Tiara Cipta Nirwana Rendahnya nilai DO air laut antara lain disebabkan oleh melimpahnya limbah organik yang terbawa ke laut dan akibat meningkatnya suhu air laut. Rendahnya kandungan oksigen dalam air dapat menyebabkan terancamnya kelangsungan hidup biota laut.

Hasil uji untuk parameter minyak dan lemak, ortofosfat, dan ammonia total menunjukkan bahwa kondisi air laut pada seluruh titik sampel masih berada dalam batas aman atau memenuhi standar baku mutu. Jika kadar amonia total tinggi pada air laut wisata bahari rentan membahayakan wisatawan penikmat wisata laut karena dapat menyebabkan iritasi kulit hingga alergi. Tingginya amonia total pada dua area ini disebabkan karena letaknya

berdekatan dengan muara serta banyaknya aktifitas masyarakat di sepanjang pantai.

Upaya yang telah dilakukan Dinas LHK NTB dalam rangka pengendalian pencemaran kualitas air laut antara lain melalui :

a. Fasilitasi perizinan lingkungan

Upaya ini dilakukan sebagai instrumen preventif yang krusial untuk memastikan setiap aktivitas usaha/kegiatan di pesisir dan laut mematuhi standar lingkungan hidup. Perizinan ini mewajibkan pelaku usaha untuk mengelola limbah dan dampak sebelum operasional dimulai. Fasilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas LHK NTB pada tahun 2025 meliputi 12 (dua belas) dokumen persetujuan teknis (Pertek) dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) yang wajib dipenuhi untuk kegiatan pembuangan limbah ke laut, serta 4 (empat) dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) sektor kelautan dan perikanan yang wajib disusun untuk menilai risiko dampak, mencakup Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Jumlah total keseluruhan untuk fasilitasi Pertek dan SLO adalah 34 dokumen, sementara jumlah total keseluruhan untuk dokumen lingkungan yang difasilitasi penilaiannya adalah 73 dokumen.

b. Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen perizinan lingkungan

Pada tahun-tahun sebelumnya, pengawasan dilaksanakan hanya secara pasif (reguler tidak langsung) yaitu menilai pada ketaatan pelaporan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB merubah dan menyesuaikan pola pengawasan dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahap awal, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB membuat rencana pengawasan tahunan sesuai dengan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Nomor 188/69/PPLH-DISLHK Tahun 2025 tentang Rencana Pengawasan Tahunan Provinsi NTB Tahun 2025 Bidang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024, pengawasan dibagi menjadi 2 yaitu reguler langsung dan reguler tidak langsung. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menetapkan 31 Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan pengawasan regular langsung, yang ditetapkan berdasarkan aduan dan menimbulkan keresahan masyarakat. Adapun 1 Usaha dan/atau Kegiatan yang dilaksanakan pengawasan reguler tidak

langsung, dikarenakan sudah memiliki Surat Kelayakan Operasional (SLO) sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan pengawasan reguler tidak langsung.

Hasil pengawasan reguler langsung terhadap 29 Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan menunjukkan bahwa seluruh Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi secara langsung tidak melaksanakan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan yang telah dimiliki. Sehingga langkah-langkah yang akan ditempuh ke depan adalah memberikan sanksi administratif, melakukan pengawasan terhadap sanksi administratif yang telah diberikan, dan/atau memperberat sanksi sampai dengan pencabutan Perizinan Berusaha, menerapkan Sanksi Pidana, dan/atau Sanksi Perdata apabila dalam pengawasan lanjutan tidak ada iktikad baik dari Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan perbaikan. Kemudian untuk 2 Usaha dan/atau Kegiatan lainnya belum diawasi karena Persetujuan Lingkungannya masih dalam proses penerbitan, dan akan dilanjutkan pada Tahun 2026.

Selanjutnya, untuk pengawasan reguler tidak langsung pada 1 Usaha dan/atau Kegiatan yaitu PT Amman Mineral Industri, belum selesai dilakukan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) selaku pejabat fungsional yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan. Hal ini disebabkan karena masih tersebarnya PPLH pada unit organisasi lain di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, sehingga proses pengawasan tidak berjalan optimal, tidak fokus, dan lebih banyak mengerjakan tugas lain diluar tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, pada Tahun 2026 pengawasan terhadap PT Amman Mineral Industri akan dilanjutkan.

Jika dihitung persentasenya, maka 29 Usaha dan/atau Kegiatan telah diawasi (90,62 %) dan seluruhnya “tidak taat” (0 %), kemudian 2 Usaha dan/atau Kegiatan belum diawasi (6,25 %), dan 1 Usaha dan/atau Kegiatan yang belum selesai diawasi (3,12 %) sehingga belum diketahui ketaatannya. Dari 29 Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi, seluruhnya “tidak taat” sehingga untuk mencapai target Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sebesar 100% belum ada progres yang signifikan.

Hasil pengawasan Tahun 2025 merupakan data penting dan menjadi *baseline* untuk pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang sama di tahun-tahun mendatang. Apabila di tahun-tahun mendatang Usaha dan/atau Kegiatan tersebut berstatus “taat”, maka target Renstra dapat tercapai. Namun demikian, untuk mencapai status tersebut diperlukan sinergisitas dari banyak elemen khususnya dalam melakukan kegiatan pembinaan,

baik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melalui pejabat fungsional Pengendali Dampak Lingkungan maupun instansi-instansi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi pembinaan sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, ke depannya untuk mengejar progres target Renstra yang signifikan harus dilakukan kegiatan-kegiatan pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

- c. Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat provinsi, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan terhadap kasus – kasus pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan di Provinsi NTB. Bentuk tindak lanjut berupa koordinasi dengan instansi terkait ataupun inspeksi langsung ke lokasi terjadinya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan. Berdasarkan objek pengaduan, pada tahun 2025 kasus lingkungan yang dilaporkan terkait oleh dugaan pelanggaran dan pencemaran lingkungan hidup sebanyak 5 kasus sebagai berikut.

Tabel 31 Rekapitulasi Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Lokasi pencemaran/kerusakan	Sumber Pengaduan	Kasus Lingkungan	Tindak Lanjut
1	PT Dawajin Berkah Abadi Dusun Karang Bucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat	Unit Pelaksana Teknis Kemensos RI Sentra Paramita	Populasi lalat yang meningkat pada UPT Kemensos RI Sentra Paramita, diduga karena sanitasi budidaya ayam ras petelur yang tidak baik	Verifikasi lapangan bersama dengan Dinas LH Kabupaten Lombok Barat ke Lokasi UPT Kemensos RI Sentra Paramita dan PT Dawajin Berkah
2	Desa Belo, Kecamatan Jereweh	Masyarakat	Penambangan Emas Tanpa Izin	Verifikasi lapangan bersama dengan Dinas LH Kabupaten Sumbawa Barat
3	Dusun Pansing, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	Masyarakat	Tidak memiliki izin lingkungan, izin reklamasi, maupun izin pertambangan (galian C). Selain itu, kegiatan reklamasi dilakukan dengan cara mnenimbun kawasan pesisir yang ditumbuhi mangrove, menggunakan material tanah yang diambil dari lokasi galian C yang juga	Verifikasi lapangan ke lokasi reklamasi PT Gili Wayang Property serta koordinasi dengan Dinas LH Kabupaten Lombok Barat

No	Lokasi pencemaran/kerusakan	Sumber Pengaduan	Kasus Lingkungan	Tindak Lanjut
			berada di wilayah desa yang sama.	
4	PT. LED/ PLTU Padak Guar	Masyarakat	Pencemaran udara yang terjadi di sekitar lokasi kegiatan diakibatkan oleh debu akibat pembongkaran batubara dan kebocoran pipa Air Preheater (APH)	Rapat klarifikasi bersama dengan pihak PT LED dan PLN UIW NTB
5	PT Griya Sira Indah di Dusun Sira, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara	Masyarakat	Pembuangan air limbah ke pantai tanpa pengolahan	Rapat klarifikasi bersama dengan pihak PT Griya Sira Indah

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja Indeks Kualitas Air Laut yaitu :

1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - b. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

Indikator 4	:	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah
Target	:	8,82
Realisasi	:	76,50
Uraian	:	

a. Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi NTB Periode 2025-2045, sumber emisi gas rumah kaca untuk sektor limbah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu yang berasal dari sampah domestik dan limbah cair domestik. Sampah domestik di Provinsi NTB didasarkan atas beberapa aktivitas yaitu (1) Aktivitas penimbunan sampah baik di TPA maupun di sembarang tempat, (2) Aktivitas pembakaran langsung oleh masyarakat (open burning), dan (3) Aktivitas komposting dari sampah terolah. Sedangkan untuk perhitungan emisi limbah cair domestik, memperhitungkan 3 (tiga) aktivitas yang menjadi sumber emisi, yaitu (1) aktivitas pembuangan di septik tank, (2) aktivitas oembuanagn di jamban/latrín, dan (3) aktivitas pembuangan langsung ke sungai.

Mengacu pada program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, Dinas LHK NTB menghitung persentase penurunan emisi CO₂ eq sektor sampah/limbah yang dihasilkan dari upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menerapkan praktik pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan, antara lain pengelolaan TPA, pengurangan sampah dari rumah tangga, dan optimalisasi bank sampah untuk mengukur produktivitas kegiatan pengolahan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Jumlah emisi CO₂ eq yang tercatat pada tahun 2025 adalah sebesar 577.238,36 Ton CO₂ eq.

Pada rentang waktu dari tahun 2010 hingga 2022, Provinsi NTB mengalami penurunan emisi CO₂ eq dalam sektor kehutanan. Penurunan ini sangat signifikan dan mencerminkan upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Secara garis besar, Dinas LHK NTB telah melakukan seluruh kegiatan inti pencegahan penurunan cadangan karbon (pembentukan KEE, rehabilitasi hutan dan lahan, pembentukan perhutanan sosial) dalam rangka mitigasi perubahan iklim.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Belum dapat dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya karena masih proses perhitungan dalam AKSARA

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 karena masih proses perhitungan dalam AKSARA

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tidak ada pembandingan dengan standar nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Pada tahun 2025, berdasarkan aplikasi AKSARA Bappenas jumlah emisi Gas Rumah Kaca sector limbah/sampah adalah sebesar... Jika dilakukan perhitungan persentase penurunan emisi GRK sektor sampah/limbah, maka didapatkan angka penurunan emisi sebesar 0,00%. Upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor sampah/limbah berfokus pada pengurangan metana melalui penerapan hierarki sampah (kurangi, guna ulang, daur ulang), pemilahan sampah organik untuk pengomposan/biogas, penghentian open dumping di TPA, serta rencana penerapan teknologi konversi limbah menjadi energi (*Waste-to-Energy*).

a. Optimalisasi pengelolaan sampah di TPA/TPST Regional

Pada tahun 2025 TPA Regional Kebon Kongok sedang dalam status darurat penanganan sampah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3-250 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Sampah di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Beberapa penyebabnya antara lain kelebihan kapasitas pengurukan sampah di landfill-2 TPA Regional Kebon Kongok dengan volume sampah sebanyak 1.035 m³ atau setara dengan 345 ton/hari yang tidak tertangani sejak tanggal 17 April 2025, selain itu telah terjadi penolakan masyarakat terhadap area yang akan dijadikan sebagai tempat penampungan sementara seluas 25 are (aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat) di kawasan TPA Regional Kebon Kongok sehingga menyebabkan gangguan pelayanan di TPA Kebon Kongok dan terjadi penumpukan sampah di Kota Mataram dan Lombok Barat. Beberapa upaya yang dilakukan setelah penetapan status tanggap darurat sampah ini, ialah dengan melakukan pengurangan ritase pengangkutan sampah ke TPA Regional, perbaikan tata kelola sampah di hulu (rumah tangga, kantor, sekolah, fasilitas umum) dan di tengah (TPS3R, TPST, pusat daur ulang, bank sampah, dan pengepul), optimalisasi ruang landfill di TPA Regional Kebon Kongok khusus untuk pengolahan sampah residu, dan optimalisasi pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional.

TPST Regional yang berlokasi di Lingsar, Lombok Barat, melakukan pengolahan sampah organik dengan menggunakan metode biokonversi

melalui maggot *Black Soldier Fly* (BSF). Metode tersebut mampu mengolah sampah organik (sisa makanan, buah, sayur) yang efektif, cepat, dan ramah lingkungan. Maggot BSF mampu mendegradasi sampah organik hingga 80%, mereduksi bau, dan menghasilkan kasgot (pupuk organik) serta larva berprotein tinggi (45-50%) sebagai pakan ternak bernilai ekonomi tinggi. Metode ini dinilai cukup efektif dan berdampak pada pengurangan timbunan sampah di TPA serta pengurangan emisi gas rumah kaca. Untuk memenuhi kebutuhan pakan maggot, sumber sampah organik berasal dari aktivitas pasar, mall, hotel, pondok pesantren, hingga telah bekerjasama dengan 12 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama tahun 2025, TPST BSF Lingsar telah melakukan pengelolaan sampah organik sebanyak 182.095 ton sampah terolah dari 238.724 ton sampah organik yang masuk.

Perbaikan tata kelola sampah di tingkat rumah tangga diupayakan melalui pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola fasilitas pengolahan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan *Black Soldier Fly* (BSF) atau maggot. Pelatihan pengolahan sampah ini dilaksanakan pada 10 (sepuluh) kelompok yang tersebar di beberapa lokasi, yaitu:

1. Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur
2. Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah
3. Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
4. Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah
5. Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur
6. Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat
7. Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur
8. Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat
9. Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
10. Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima

Selain kegiatan pelatihan, Dinas LHK NTB juga memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana pendukung pengolahan sampah, antara lain kandang maggot, rak biopon, rumah gelap/kandang lalat, mesin pencacah organik, bak sampah roda, komposter bag, serta tong komposter. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung optimalisasi pengolahan sampah organik dengan metode BSF atau maggot.

Kegiatan pelatihan dan pemberian sarana prasarana ini didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kelompok sasaran pelatihan merupakan kelompok masyarakat yang telah aktif melaksanakan kegiatan pengolahan sampah menggunakan metode 3R dan BSF. Dengan adanya pelatihan serta dukungan sarana dan

prasarana ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja pengelola, mempermudah pelaksanaan pengolahan sampah organik, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan baik dari sisi ekonomi maupun ekologi.

Bank sampah, Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS3R), serta sarpras pengelola sampah Black Soldier Fly (BSF) dengan berperan penting dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Berdasarkan rekapitulasi data pengelolaan sampah berbasis bank sampah di seluruh kabupaten/kota Provinsi NTB, tercatat sebanyak 415 lokasi/kelompok bank sampah, dengan 149 lokasi berstatus aktif dan 266 lokasi berstatus tidak aktif. Sedangkan untuk TPS3R, tercatat sebanyak 78 unit/entitas yang terdata di seluruh kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 24 entitas (30,77%) berstatus aktif, sedangkan 54 entitas (69,23%) berstatus tidak aktif. Pada tahun 2025 tidak dilaksanakan pembentukan bank sampah baru secara formal. namun demikian terdapat sejumlah bank sampah yang terbentuk secara mandiri sebagai tindak lanjut dari kegiatan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah, terutama di lingkungan sekolah, yang menunjukkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sejak dini. Jumlah sarpras pengelola sampah dengan Black Soldier Fly (BSF) tercatat sebanyak 57 unit fasilitas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, 45 unit (78,95%) berstatus aktif, sedangkan 12 unit (21,05%) masih berstatus tidak aktif.

Produktivitas kegiatan pengolahan sampah dengan metode 3R dan BSF yang dapat dihitung dari persentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang beroperasi/aktif. Jika melihat kondisi ketiga sarana pengelola sampah yang aktif di atas, capaiannya sebesar 39,63% (218 unit aktif dari total 550). Angka ini menurun dari tahun 2024 yang mencapai 63,8% dikarenakan tidak adanya keberlanjutan kegiatan dan bubaranya kepengurusan dalam kelompok yang mengelola sarpras tersebut. Kondisi ini menegaskan bahwa ke depan diperlukan penguatan pembinaan dan pendampingan agar bank sampah dan TPS3R yang telah ada, termasuk yang tumbuh dari inisiatif edukatif, dapat beroperasi secara berkelanjutan sebagai instrumen pengurangan sampah dari sumber dan peningkatan nilai ekonomi sampah.

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan sampah di Provinsi NTB terus mengalami perkembangan dengan adanya dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2025 belum terdapat penambahan kegiatan industrialisasi pengelolaan sampah. Meskipun demikian, telah berkembang wacana dan inisiasi rencana penerapan teknologi konversi limbah menjadi energi (Waste-to-Energy) melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Saat ini, rencana tersebut masih berada pada tahap awal,

berupa uji karakteristik dan jenis sampah yang tersedia serta penyediaan dan penetapan lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan PLTSA.

Neraca Pengelolaan Sampah ini menunjukkan upaya Penanganan dan Pengurangan Sampah yang dilaksanakan di NTB. Penanganan sampah adalah setiap upaya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk sampah yang masuk ke TPA. Pengurangan sampah adalah setiap upaya penyelesaian sampah di sumbernya, sebelum masuk ke TPA dan umumnya dilakukan oleh Non Pemerintah. Sampai pada Desember 2025, data yang tersedia menunjukkan persentase penanganan sampah sebesar 29,87% dan persentase pengurangan sampah sebesar 4,27%. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan belum seluruh kabupaten/kota melaporkan capaian penanganan dan pengurangannya, sehingga mempengaruhi perhitungan capaiannya.

Terkait pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan setiap usaha dan/atau kegiatan, pengelolaan limbah B3 melalui penyimpanan sementara sebagai salah satu persyaratan yang harus terlampir dalam dokumen lingkungan baik dokumen UKL-UPL ataupun AMDAL. Dinas LHK NTB dalam hal ini memberikan fasilitasi pembahasan dokumen rincian teknis terhadap 27 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan permohonan pembahasan dokumen rincian teknis. Kegiatan ini sebagai bentuk pendampingan/pembinaan kepada para penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas LHK NTB juga melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi usaha dan.atau kegiatan pengumpul limbah B3 yang ada di NTB. Kegiatan verifikasi lapangan ini dilaksanakan pada 3 lokasi yaitu :

1. PT Peduli Lingkungan Lestari di Mataram
2. PT Anugerah Mandiri Jaya Energi di Mataram
3. PT Wahyu Nusantara Indah Putra di Lombok Barat

Pada tahun 2025, total limbah B3 medis dari 519 unit fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diolah oleh PPST Lemer sebesar 847,31854 ton dengan volume limbah terbanyak pada bulan Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 32 Data Limbah B3 Medis Fasyankes Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah (kg)
1.	Januari	82,50768
2.	Februari	81,41121
3.	Maret	73,1826
4.	April	67,74612
5.	Mei	72,54783
6.	Juni	57,39474

No.	Bulan	Jumlah (kg)
7.	Juli	60,92041
8.	Agustus	63,07851
9.	September	61,4736
10.	Oktober	76,053
11.	November	82,36331
12.	Desember	68,63953
TOTAL		847,31854

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah yaitu :

1. Program Pengelolaan Persampahan
 - a. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - a. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya pengelolaan hutan lestari”

Indikator 1 : Skor pengurangan ancaman kepunahan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati sektor kehutanan dan lahan

Target : 3,299

Realisasi : 3,292

Uraian :

a. Capaian Kinerja Tahun 2025

Upaya pengurangan ancaman kepunahan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati adalah 2 (dua) pilar utama yang digunakan dalam rangka mendorong pengelolaan keanekaragaman hayati daerah. Pada sektor kehutanan dan lahan, upaya pengurangan ancaman kepunahan diukur melalui :

1. Proporsi deforestasi terhadap luas tutupan hutan
2. Proporsi kawasan lindung terhadap luas daratan provinsi
3. Proporsi rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis
4. Proporsi luas kebakaran hutan dan lahan terhadap luas tutupan hutan
5. Proporsi lahan gambut non hutan terhadap total luas gambut (jika ada)

Sedangkan upaya pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati diukur melalui produktivitas kayu bulat pada areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri IUPHHK-HTI. Pada tahun 2025, didapatkan skor pengurangan ancaman kepunahan sebesar 3,287 dan skor pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati sebesar 0,004, sehingga total kedua skor ini mencapai 3,292 poin sebagaimana dirincikan sebagai berikut :

Tabel 33 Perhitungan Skor Pengurangan Ancaman Kepunahan dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan

No	Indikator	Skor Per Komponen Indikator
Indikator Pengurangan Ancaman Kepunahan		
1	Proporsi deforestasi terhadap luas tutupan hutan	0,685
2	Proporsi kawasan lindung terhadap luas daratan provinsi	0,609
3	Proporsi rehabilitasi hutan dan lahan terhadap luas lahan kritis	0,0017
4	Proporsi luas kebakaran hutan dan lahan terhadap luas tutupan hutan	0,991

No	Indikator	Skor Per Komponen Indikator
5	Proporsi lahan gambut terdegradasi terhadap total luas gambut	1
	Skor Pengurangan Ancaman Kepunahan	3,287
Indikator Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati		
1	Produktivitas kayu bulat pada areal IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI	0,004
	Skor Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati	0,004
Skor Pengurangan Ancaman Kepunahan dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati		3,292

Sumber : Dinas LHK NTB, 2025

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Skor pengurangan ancaman kepunahan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati sektor kehutanan dan lahan, meningkat 0,003 poin dari tahun sebelumnya

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Skor pengurangan ancaman kepunahan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati sektor kehutanan dan lahan, capaiannya tahun 2025 sebesar 3,292 atau 99,72% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tidak ada pembandingan dengan standar nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, salah satunya ialah potensi hilangnya keanekaragaman hayati. Karena itu, pada COP 15 Konvensi Keanekaragaman Hayati di Montreal, Canada, Desember 2022, dihasilkan salah satu kesepakatan monumental dalam rangka mendorong aksi nyata untuk merespon krisis yang terjadi tersebut dengan mengadopsi Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF). KM-GBF merupakan kerangka global yang bertujuan untuk mengurangi laju penurunan keanekaragaman hayati global pada tahun 2030.

Upaya mempertahankan keberadaan keanekaragaman hayati dilakukan melalui upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetic

(**pengurangan ancaman kepunahan**), serta pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan datang (**pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati**). Pada sector kehutanan dan lahan, pengukurannya dilakukan dengan menghitung beberapa komponen seperti pada tabel berikut

Tabel 34 Indikator Penyusun Skor Pengurangan Ancaman Kepunahan dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan

No	Indikator	Komponen Indikator	Capaian	Skor Per Komponen Indikator
Indikator Pengurangan Ancaman Kepunahan				
1	Proporsi deforestasi terhadap luas tutupan hutan	Luas deforestasi (ha)	2.347,07*	0,685
		Luas tutupan hutan (ha)	745.233,74*	
2	Proporsi kawasan lindung terhadap luas daratan provinsi	Luas kawasan lindung (ha)	438.336,04	0,609
		Luas daratan provinsi (ha)	2.015.315,00	
3	Proporsi rehabilitasi hutan dan lahan terhadap luas lahan kritis	Luas rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	1.642,51	0,0034
		Luas lahan kritis (ha)	489.477,54*	
4	Proporsi luas kebakaran hutan dan lahan terhadap luas tutupan hutan	Luas kebakaran hutan (ha)	192,60	0,991
		Luas tutupan hutan (ha)	745.233,74*	
5	Proporsi lahan gambut terdegradasi terhadap total luas gambut	Luas lahan gambut terdegradasi (ha)	0	1
		Luas total gambut (ha)	0	
Skor Pengurangan Ancaman Kepunahan				3,287
Indikator Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati				
1	Produktivitas kayu bulat pada areal IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI	Produksi kayu bulat (m3)	19.793,46	0,004
		Luas Hutan Produksi (ha)	442.520,78	
Skor Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati				0,004
Skor pengurangan ancaman kepunahan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati sektor kehutanan dan lahan				3,292

Menekan laju deforestasi adalah salah satu strategi penting menekan laju kehilangan keanekaragaman hayati. Mempertahankan tutupan hutan dan ekosistem alami mampu mencegah fragmentasi habitat, yang merupakan

penyebab utama kepunahan spesies lokal. Berdasarkan rilis data oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) VII Wilayah Denpasar, terdapat perubahan luasan tutupan hutan yang pada tahun 2024 sebesar 2,347,07 ha, sementara untuk tahun 2025 belum dirilis.

Keberadaan kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan merupakan salah satu upaya dalam memelihara dan melindungi eksistensi sumberdaya hutan yang ada di wilayah Provinsi NTB. Peran penting kegiatan ini adalah sebagai barrier dalam mengantisipasi tindakan perusakan hutan yang masih marak terjadi pada kawasan hutan NTB. Bentuk kegiatan pencegahan dan Pengamanan Hutan diantaranya berupa kegiatan koordinasi, kegiatan pendataan patroli hutan oleh pengaman hutan di wilayah KPH serta pembuatan kebijakan dalam mendukung kegiatan perlindungan hutan.

Upaya koordinasi pencegahan dan pengamanan hutan pada tahun 2025 telah dilaksanakan pada 15 (lima belas) Balai KPH dan 1 (satu) Balai Tahura Nuraksa yang bertujuan untuk mensinergikan upaya perlindungan dan pengamanan hutan agar pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan pemberantasan perusakan hutan lebih baik.

Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang telah dilakukan pada 15 Balai KPH dan 1 Balai TAHURA Nuraksa mulai bulan Januari hingga Desember 2025 sebanyak 4.050 kali dengan luas areal pengamanan sebanyak 131.454 Ha. Capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan Renstra 2025-2029 yaitu sebesar 180.441 Ha, hal ini dikarenakan beberapa KPH tidak secara utuh melaporkan realisasi luasan pengamanan hutan dari Januari hingga Desember 2025.

Dari kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan oleh KPH dan Tahura selama tahun 2025 juga didapati adanya kegiatan pembukaan lahan baru di dalam kawasan hutan tanpa izin (perambahan) yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Adapun Perambahan yang terjadi di Pulau Lombok pada BPKH Rinjani Barat seluas 150 Ha, dan di Pulau Sumbawa tersebar di 4 (empat) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yaitu, KPH Brang Beh, KPH Brang Rea Puncak Ngenas, KPH Batu Lanteh, dan KPH Ampang Plampang dengan luas 149 Ha.

Selain itu, permasalahan lainnya yang masih terjadi ialah kebakaran hutan dan lahan, yang tercatat mulai Mei hingga Oktober 2025 sebanyak 30 kasus kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di wilayah Provinsi NTB, dengan luasan Kebakaran Hutan mencapai 160,64 Ha dan kebakaran lahan mencapai 31,96 Ha. Dari 30 kasus kebakaran hutan dan lahan, ditemukan bahwa rata-rata tingkat keparahan vegetasi pada area kebakaran berada pada tingkat rendah (27 kasus), dan tingkat sedang (3 kasus). Adapun jenis vegetasi yang

terbakar antara lain adalah pepohonan (terubusan jati, bidara, lengkukun, akasia dll) dan semak belukar serta serasah.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini terus dilakukan. Adapun upaya nyata yang dilakukan yaitu membentuk Brigade Pengendali Kebakaran Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 522-268 Tahun 2025. Pertimbangan dari pembentukan brigade ini adalah (1) kebakaran hutan sebagai dampak langsung kegiatan perambahan, perladangan liar, dan kegiatan ilegal lainnya (perburuan satwa liar, illegal logging) didalam kawasan hutan, saat ini kondisi hutan di wilayah Provinsi NTB sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu penanganan secara terencana, komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan (2) sesuai rekomendasi Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bantuan sarana dan peralatan pengendalian kebakaran hutan dapat difasilitasi jika telah terbentuk satuan tugas yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengoperasikan peralatan yang akan diberikan.

Patroli pengamanan hutan yang dilakukan oleh polisi hutan, tenaga pengamanan hutan yang ada di wilayah KPH juga menghasilkan berbagai barang temuan pada lokasi pemantauan. Terdapat setidaknya 5 jenis barang temuan yaitu berupa tonggak kayu, Kayu balok/log, Chain saw, Kapak/parang dan dan Alat angkut. Jenis-jenis barang temuan ini merupakan bukti dari berbagai tindakan perusakan hutan baik berupa kegiatan illegal logging maupun perambahan kawasan hutan oleh para pelaku. Penemuan kayu di lokasi patroli juga merupakan bukti bahwa banyak pohon telah hilang/ditebang secara illegal dari dalam kawasan hutan. Hilangnya sumberdaya hutan ini tentunya dapat berdampak pada keseimbangan iklim sekitar maupun habitat berbagai jenis flora fauna yang berada pada lokasi tersebut dan mengakibatkan kerugian Negara secara matril yaitu hilangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil hutan kayu yang ditebang/diambil secara tidak sah tersebut.

Upaya pengurangan ancaman kepunahan kehati lainnya yang telah dilaksanakan antara lain terkait pengendalian dan pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak dilindungi melalui sosialisasi kepada pelaku/penjual satwa tidak dilindungi untuk mendata mulai dari perijinan, jenis satwa, dan sumber asal-usul satwa yang dijual, serta menginformasikan agar tidak mengambil/berburu di dalam kawasan hutan. Kegiatan tersebut juga didukung dengan patroli dalam rangka identifikasi dan inventarisasi untuk memastikan keberadaan habitat flora dan fauna dalam rangka pengendalian dan pengawasan TSL/ Patroli dilakukan sebanyak 4 kali yaitu

di kawasan hutan dan diluar kawasan hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) yang ada di Pulau Lombok, diantaranya wilayah Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Sambelia, Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur; RPH Senaru Putik, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara; RPH Bonga, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Nuraksa, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah. Dinas LHK NTB juga melakukan inventarisasi pengambilan data potensi Mangrove yang dilakukan di 2 (dua) tempat yaitu di Ekowisata Mangrove Bagek Kembar di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan Ekowisata Mangrove di Desa Cemara Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja Skor pengurangan ancaman kepunahan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati sektor kehutanan dan lahan yaitu :

1. Program Pengelolaan Hutan
 - a. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
 - a. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
 - b. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - c. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Indikator 2 : Indeks Kualitas Lahan
 Target : 77,63
 Realisasi : 77,36
 Uraian :

a. Capaian Kinerja Tahun 2025

Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Nilai IKTL tersebut memberikan gambaran tentang upaya pemerintah Provinsi NTB dalam hal pengendalian kerusakan hutan dan lahan dalam bentuk menekan laju deforestasi serta melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Lahan Provinsi NTB mencapai 77,36 poin berdasarkan perhitungan pada 22 kelas tutupan lahan sebagai berikut.

Tabel 35 Kondisi Tutupan Lahan Berdasarkan 22 Kelas Tutupan Lahan

No	Kelas Tutupan Lahan	Luasan (ha)
1	Hutan lahan kering primer	296.168,68
2	Hutan mangrove primer	1.465,57
3	Hutan rawa primer	-
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	545.530,86
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	9.338,14
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	-
7	Hutan tanaman	12.771,15
8	Belukar Rawa	19,61
9	Perkebunan / Kebun	1.586,84
10	Belukar	127.870,01
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	157.521,63
12	Pertanian lahan kering	382.672,19
13	Rawa	-
14	Sawah	267.165,49
15	Savanna / Padang rumput	87.335,89
16	Transmigrasi	-
17	Bandara / Pelabuhan	828,75
18	Tubuh air	8.389,36
19	Tambak	14.730,69
20	Permukiman / Lahan terbangun	41.745,65
21	Lahan terbuka	9.812,31
22	Pertambangan	2.636,11

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Meningkat 10,87 poin dari tahun 2024 dengan perhitungan melalui perhitungan indeks dengan rumus terbaru

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Indeks Kualitas Lahan, capaiannya tahun 2025 sebesar 77,36 poin atau 99,65% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Belum dapat dibandingkan dengan nilai IKL Nasional karena belum dirilis oleh Kementerian LH.

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang mengukur mutu lahan dengan menggabungkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), menunjukkan kondisi ekologi dan penggunaan lahan, termasuk hutan, vegetasi, dan gambut, untuk pemantauan lingkungan hidup.

Penataan batas blok memiliki kaitan erat dengan IKL sebagai alat manajemen untuk menjamin keberlanjutan fungsi lahan. Penataan batas yang jelas membantu menentukan peruntukan lahan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas tutupan lahan. Penataan batas yang dilakukan meliputi pengukuran, pembuatan rintis batas, dan pemancangan dan penomoran pal batas. Pada tahun 2025 Dinas LHK NTB melaksanakan penataan batas blok pada Blok Inti dalam Kawasan Hutan Lindung KPHP Unit II Pelangan yang terletak Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Selain itu, Dinas LHK NTB juga melakukan pendampingan penyusunan RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) bagi KPH yang telah habis masa berlaku dokumennya dan RPHJPd (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek) sebagai aksi tahunan yang menjabarkan operasional dari RPHJP untuk kegiatan teknis di KPH Lindung maupun KPH Produksi. Indeks Kualitas Lahan menjadi salah satu basis data utama dan indikator keberhasilan dalam dokumen perencanaan tersebut. Pengesahan RPHJPd dilakukan oleh Dinas LHK NTB sesuai kewenangannya terhadap dokumen RPHJPd dari masing-masing unit KPH (23 Unit) melalui aplikasi SI-RPHJP. Di tahun 2025, terdapat 8 RPHJPd yang sudah disahkan, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yaitu 7 RPHJPd yang berstatus sah. Untuk penyusunan dokumen RPHJP, difokuskan pada 6 (enam) unit KPH yang telah habis masa berlaku dokumen RPHJPnya. Jika dihitung persentasenya maka

capaian penyusunan RPHJP dan RPHJPD adalah sebesar 27,92% atau masih dibawah target Renstra 2025-2029 sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam mendukung penyusunan RPHJP, khususnya untuk melakukan inventarisasi hutan dan updating data potensi di KPH serta untuk kegiatan pendukung lainnya seperti pelaksanaan konsultasi publik draft RPHJP. Selain itu, masih minimnya Keterbatasan anggaran dalam mendukung penyusunan RPHJP, khususnya untuk melakukan inventarisasi hutan dan updating data potensi di KPH serta untuk kegiatan pendukung lainnya seperti pelaksanaan konsultasi publik draft RPHJP. Dari segi format penyusunan, petunjuk penyusunan RPHJP yang berlaku tidak memberikan arahan lebih detail mengenai isi pada bagian-bagian penting dari RPHJP khususnya BAB IV sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dari masing-masing KPH.

Upaya lainnya dalam mempertahankan atau meningkatkan nilai IKL ialah monitoring Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan hutan oleh perusahaan tidak merusak ekosistem, melainkan mendukung kelestarian hutan yang menjadi indikator utama kualitas lahan. Monitoring PBPH dilakukan pada aspek penutupan lahan dan keberlanjutan tegakan, dan memastikan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu tetap sejalan dengan prinsip Sustainable Forest Management (SFM), yang pada akhirnya mempertahankan dan meningkatkan indeks kualitas lahan.

Pada tahun 2025 terdapat permohonan PBPH namun lokasi yang dimohon telah memiliki Izin pemanfaatan sebelumnya. Untuk permohonan dari PT Matarama Devindo Corp (PT MDC) yang ingin melakukan pembangunan sarana wisata alam di Sekaroh, tepatnya bermohon di areal sebelah IUPJLWA PT Lombok Saka yang menghadap ke Laut Selatan Lombok. Namun, setelah ditelaah lebih lanjut dengan SK Peta Arahan Pemanfaatan Hutan (PAPH) Tahun 2025, lokasi yang dimohon tidak dapat diberikan rekomendasi dikarenakan tidak masuk peta arahan pemanfaatan. SK PAPH 2025 yang diterbitkan oleh Dirjen PHL, Kemenhut terjadi perubahan arah kebijakan, dimana sebelumnya blok pemanfaatan pada HL yang diluar PAPH dapat diberikan rekomendasi, untuk SK PAPH 2025 hanya mengakomodir areal peruntukan korporasi sebagaimana Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN). Telaah dan hasil survei lapangan mengenai kondisi wilayah yang dimohonkan sudah disampaikan ke Kementerian untuk mendapat petunjuk lebih lanjut.

Hasil monitoring PBPHH dilaksanakan pada 7 usaha/kegiatan, yang meliputi pengolahan pemanfaatan hasil hutan kayu yang mendukung peningkatan

nilai tambah dan keberlanjutan hutan. Sedangkan untuk monitoring PBPHH Bukan Kayu dilaksanakan pada 4 usaha/kegiatan, yang mencakup pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti rotan yang mendukung ekonomi lokal dan keberlanjutan sumber daya hutan.

Di tahun 2025 telah diselenggarakan inventarisasi hutan tingkat wilayah Provinsi. Inventarisasi hutan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi sistematis tentang keadaan, potensi, dan lingkungan sumber daya hutan. Kegiatan ini penting dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan indeks kualitas lahan, karena menyediakan dasar data ilmiah untuk perencanaan, pengelolaan, dan perlindungan hutan secara berkelanjutan. Dinas LHK NTB telah mengadakan bimbingan teknis untuk pelaksanaan inventarisasi hutan, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap persiapan dan pembentukan tim inventarisasi hutan.

Inventarisasi dilakukan pada 55 klaster sampling yang tersebar diseluruh wilayah KPH/ Tahura se-NTB dengan jarak antara titik klaster sejauh 10 Km dalam kawasan hutan sesuai dengan standar inventarisasi hutan nasional. Pada masing-masing klaster terdapat tiga plot ukur dengan masing-masing sub plot untuk pengambilan data vegetasi baik kayu maupun non-kayu serta tumbuhan bawah dan serasah. Pada klaster di masing-masing KPH telah dilakukan pengukuran inventarisasi pohon, non-kayu, kayu mati dan pengambilan serasah serta tumbuhan bawah di 3 plot yaitu plot pusat, plot utara dan plot timur. Pada tiap plot sudah dipasang patok dan papan nama plot sebagai penanda. Berdasarkan pengecekan terhadap dokumentasi kegiatan serta data yang dikumpulkan melalui aplikasi collect oleh tim inventarisasi, dinilai bahwa pelaksanaan inventarisasi oleh KPH telah sesuai dengan pedoman inventarisasi hutan nasional. Jumlah sampel yang dikumpulkan yaitu 2 unit sampel berupa 1 unit sampel untuk serasah dan 1 unit sampel untuk tumbuhan bawah. Sampel tersebut telah dilakukan penimbangan berat basah oleh tim inventarisasi. Kemudian akan dibawa ke laboratorium untuk di keringkan dan diukur berat keringnya. Data tersebut akan digunakan untuk pendugaan nilai cadangan karbon.

Data lainnya yang didapatkan dalam kegiatan inventarisasi hutan ialah indeks keanekaragaman hayati, yang bisa dihitung dengan menggunakan Indeks Keanekaragaman Shannon–Wiener (H'). Indeks ini merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keanekaragaman suatu komunitas organisme, dengan mempertimbangkan jumlah jenis (richness) dan proporsi individu tiap jenis (evenness) dalam suatu komunitas. Secara matematis, indeks ini dirumuskan sebagai berikut.

$$H' = - \sum_{i=1}^S p_i \ln p_i$$

dimana:

H' = indeks keanekaragaman Shannon–Wiener

S = jumlah total jenis

pi = proporsi individu jenis ke-i (pi=ni/N)

ni = jumlah individu jenis ke-i

N = jumlah total individu seluruh jenis

Setelah dilakukan rekapitulasi hasil inventarisasi hutan seluruh klaster, didapatkan nilai 251 jenis pohon dengan jumlah individu total sebanyak 1.146 individu, sehingga menghasilkan indeks keanekaragaman hayati sebesar 4,80 yang mengindikasikan bahwa tingkat keanekaragaman jenis vegetasi pohon tergolong tinggi. Nilai ini menunjukkan bahwa komunitas vegetasi memiliki komposisi jenis yang beragam.

Dinas LHK NTB juga telah melakukan penilaian KPH efektif sebagai alat kontrol dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan hutan di tingkat tapak berjalan lestari, yang secara langsung berdampak pada mempertahankan atau meningkatkan indeks kualitas lahan. Penilaian kinerja KPH yang baik mencakup indikator perlindungan hutan, seperti penanganan perambahan dan kebakaran hutan. KPH yang efektif (skor tinggi) mampu meminimalkan alih fungsi lahan ilegal dan perambahan, yang secara langsung mencegah penurunan kualitas lahan dan menjaga stabilitas ekosistem. Penilaian menekankan pada implementasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengurangan konflik lahan. Penilaian dilaksanakan pada KPH Unit II Pelangan yang memiliki dokumen RPHJP yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Pendampingan validasi penilaian untuk KPH Efektif tahun 2025 dilakukan bersama dengan tim dari Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian LHK dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IX Mataram. KPH Unit II Pelangan telah melakukan self assesment /penilaian mandiri pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung pada KPH serta survey persepsi publik kepada pihak terkait. Kepala Dinas LHK NTB melalui Tim Verifikasi yang diketuai oleh Kepala BPHL Wilayah IX melakukan verifikasi atas penilaian mandiri yang

telah diajukan oleh Kepala KPH dan risalah hasil verifikasi akan dilaporkan oleh Tim Verifikasi kepada Kepala Dinas LHK NTB. Dari hasil verifikasi diperoleh nilai sebesar 75,925 (Efektif).

Mempertahankan indeks kualitas lahan juga dapat dilakukan melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bertujuan untuk mencegah degradasi tanah, mengurangi erosi, dan mengoptimalkan fungsi hidrologis. Di tahun 2025, telah dilakukan penyusunan draft dokumen rencana pengelolaan DAS Beh. Pemilihan lokasi DAS Beh adalah berdasarkan status DAS Beh yang termasuk dalam DAS yang dipulihkan sesuai dengan hasil evaluasi kondisi DAS. Penyusunan dan implementasi rencana yang baik dapat berdampak langsung pada penurunan laju erosi, penurunan lahan kritis, dan peningkatan tutupan vegetasi.

Selain penyusunan rencana pengelolaan DAS, Dinas LHK NTB juga menyusun draft Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pemanfaatan Mata Air dalam Kawasan Hutan. Perlindungan sumber mata air meningkatkan kualitas lahan melalui beberapa cara, antara lain peningkatan infiltrasi, pencegahan erosi dan sedimentasi, perbaikan struktur tanah, serta menjaga keseimbangan hidrologi.

Keberhasilan program pengelolaan DAS juga diukur melalui persentase tutupan lahan pada sempadan sungai. Kondisi tutupan lahan pada sempadan sungai dengan jarak kiri dan kanan masing-masing 100 meter diukur melalui overlay peta sungai dan tutupan lahan, dan dihasilkan data sebagai berikut.

Tabel 36 Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai se-NTB

NO	Kelas Penutupan Lahan	Luas (ha)
1	Hutan Lahan Kering Primer	105099,0041
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	189688,2023
3	Hutan Mangrove Primer	7,997957938
4	Hutan Tanaman	3763,28093
5	Semak Belukar	42066,22312
6	Perkebunan	393,9778798
7	Permukiman	15211,68962
8	Lahan Terbuka	3016,83272
9	Savanna	34672,66482
10	Tubuh Air	3498,871892
11	Hutan Mangrove Sekunder	2827,512184
12	Pertanian Lahan Kering	139175,2766
13	Pertanian Lahan Kering Campur	63769,23249

NO	Kelas Penutupan Lahan	Luas (ha)
14	Sawah	112116,3053
15	Tambak	6549,625735
16	Bandara/Pelabuhan	232,4978827
17	Pertambangan	837,2848333

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja Indeks Kualitas Lahan yaitu :

1. Program Pengelolaan Hutan
 - a. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - b. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
2. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - a. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator 3	:	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan
Target	:	50,27
Realisasi	:	0,13
Uraian	:	

a. Capaian Kinerja Tahun 2025

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Emisi GRK ini menggambarkan banyaknya pelepasan gas yang terkandung dalam atmosfer, secara alami dan antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Radiasi inframerah ini berasal dari kegiatan yang dilaksanakan pada sektor prioritas pembangunan daerah, salah satunya sektor kehutanan dan lahan. Persentase penurunan emisi GRK merupakan perbandingan antara jumlah emisi baseline dikurangi dengan emisi proyek, yang dibandingkan dengan emisi baseline di tahun bersangkutan. Perhitungan persentase penurunan emisi GRK bertujuan untuk mengetahui dampak perubahan iklim melalui berbagai upaya untuk pengurangan emisi GRK. Pada sektor kehutanan dan lahan, penurunan emisi GRK didukung melalui kegiatan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, penegakan hukum, serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Dalam aplikasi AKSARA memuat seluruh kegiatan inti pencegahan penurunan cadangan karbon yang telah dilakukan selama tahun 2025 dalam rangka mitigasi perubahan iklim dan masih dalam proses penginputan ke dalam aplikasinya.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena penginputan aplikasi AKSARA masih dalam proses.

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tidak ada pembandingan dengan standar nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan dan berfokus pada peningkatan tutupan hutan dan lahan, melalui kegiatan

rehabilitasi di luar dan dalam kawasan hutan. Berikut rincian luas areal kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) tahun 2025 yang bersumber dari APBD dan APBN dengan total luasan 1.642,51 Ha.

Jenis Kegiatan	Luasan (ha)
RHL APBD	245,405
P1 APBN	528
P2 APBN	634
Rehab DAS/Swasta	235,1
Total	1.642,51

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan yaitu :

1. Program Pengelolaan Hutan

a. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 37 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya pengelolaan hutan lestari”

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	P2 (Pagu Anggaran /Target Outcome)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4 x 100)
Meningkatnya pengelolaan hutan lestari										
1	Skor pengurangan ancaman kepunahan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati sektor kehutanan dan lahan	2.509.441.999	2.358.384.439	3,26	3,29	716.616.359,47	768.824.141,85	0,93	0,07	6,79
2	Indeks Kualitas Lahan	1.860.914.175	1.669.336.281	77,63	77,36	21.578.804,05	23.971.585,41	0,90	0,10	9,98
3	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan	1.321.254.000	1.309.911.329	50,27	0,14	9.356.509.492,86	26.283.150,98	355,99	354,99	35.498,89

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Produksi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan”

Indikator	: Persentase peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan
Target	: 4,20
Realisasi	: 229,83
Uraian	:

a. Capaian Kinerja Tahun 2025

Peningkatan produksi hasil hutan dan jasa lingkungan salah satu upaya mendukung komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka optimalisasi sumber daya alam dan komoditas unggulan lokal NTB, salah satunya dari sektor kehutanan. Peningkatan produksi dari sector kehutanan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi hijau yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Peningkatan produksi diukur dengan membandingkan perubahan nilai tambah kehutanan tahun 2025 dengan tahun 2024, kemudian dibandingkan dengan nilai tambah kehutanan pada tahun 2024. Peningkatannya mencapai 229,83% dari capaian tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jenis komoditas HHBK dan volume produksinya. Nilai tambah dari produk kehutanan yang telah dihasilkan selama tahun 2025, meliputi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan retribusi dari jasa lingkungan sebagai berikut.

Tabel 38 Produksi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan Tahun 2025

Produk Kehutanan	Jumlah
Rimba Campuran (m3)	15.993,44
Meranti (m3)	1.375,69
Indah (m3)	963,99
Eboni (m3)	26,72
Eucaliptus (m3)	757,10
Sengon/Jeunjing/Albazia (m3)	372,05
Akasia (m3)	248,98
Sonokeling (m3)	21,33
Jati (m3)	25,88
Merbau (m3)	8,28
Kopi (ton)	559,28
Durian (Buah) (ton)	738,00
Kemiri (Biji) (ton)	16,00
Cengkeh (ton)	1,00
Kakao (ton)	439,30
Nira Nipah (liter)	241.600,00

Produk Kehutanan	Jumlah
Rotan Segi (Taman) (ton)	24,00
Rotan Seel (Ton)	561,50
Bambu apus (batang)	725,00
Lonto	1,60

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Persentase peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan meningkat 54 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Persentase peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan, capaiannya tahun 2025 sebesar 229,83 atau 5.472,14% target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tidak ada pembandingan dengan standar nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam pencapaian Target Kinerja

Sasaran strategis di atas diukur melalui peningkatan nilai tambah produk kehutanan dan jasa lingkungan. Upaya yang dilakukan, antara lain dengan monitoring Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu. Monitoring ini dapat mendorong para pemegang PBPH dan PBPHH untuk meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi produk kehutanan, baik hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, maupun pemanfaatan jasa lingkungan.

Produksi hasil hutan memiliki peran penting dalam perekonomian dan keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut penting untuk dikelola secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya hutan dan untuk melindungi ekosistem hutan yang penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan secara keseluruhan. Dalam perhitungan PDRB Provinsi NTB sub sector kehutanan, BPS Provinsi NTB memiliki kewenangan penuh dan mengacu pada *System of National Account* (SNA) sebagai acuan perhitungan. BPS NTB melakukan penghimpunan data produksi kehutanan per triwulan. Untuk mendukung sasaran strategis di atas, Dinas LHK NTB hanya bisa menghitung estimasi nilai tambah produk kehutanan dengan menggunakan jumlah produksi, perkiraan harga produsen/harga patokan yang berlaku, dan rasio nilai tambah bruto yang digunakan BPS NTB. Produksi kehutanan

meliputi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan retribusi dari pemanfaatan jasa lingkungan pada tahun 2025 dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

Tabel 39 Produksi Kehutanan dan Estimasi Nilai Tambah Bruto Sub Sektor Kehutanan Tahun 2025

Produk Kehutanan	Jumlah	Harga	Output (Jumlah x Harga)	Konsumsi Antara	Nilai Tambah Bruto
<i>Hasil Hutan Kayu</i>					
Rimba Campuran (m3)	15.993,44	310.000	4.957.966.400	4.392.758.230	565.208.170
Meranti (m3)	1.375,69	310.000	426.463.900	377.847.015	48.616.885
Indah (m3)	963,99	1.550.000	1.494.184.500	1.323.847.467	170.337.033
Eboni (m3)	26,72	9.200.000	245.824.000	217.800.064	28.023.936
Eucaliptus (m3)	757,10	310.000	234.701.000	207.945.086	26.755.914
Sengon/Jeunjing/Albazia (m3)	372,05	310.000	115.335.500	102.187.253	13.148.247
Akasia (m3)	248,98	310.000	77.183.800	68.384.847	8.798.953
Sonokeling (m3)	21,33	1.550.000	33.061.500	29.292.489	3.769.011
Jati (m3)	25,88	1.200.000	31.056.000	27.515.616	3.540.384
Merbau (m3)	8,28	1.850.000	15.318.000	13.571.748	1.746.252
<i>Hasil Hutan Bukan Kayu</i>					
Kopi (ton)	559,28	53.201.850	29.754.730.668	26.362.691.372	3.392.039.296
Durian (Buah) (ton)	738,00	20.002.880	14.762.125.440	13.079.243.140	1.682.882.300
Kemiri (Biji) (ton)	16,00	18.160.000	290.560.000	257.436.160	33.123.840
Cengkeh (ton)	1,00	133.211.000	133.211.000	118.024.946	15.186.054
Kakao (ton)	439,30	35.928.580	15.783.425.194	13.984.114.722	1.799.310.472
Nira Nipah (liter)	241.600,00	2.000	483.200.000	428.115.200	55.084.800
Rotan Sega (Taman) (ton)	24,00	635.000	15.240.000	13.502.640	1.737.360
Rotan Seel (Ton)	561,50	635.000	356.552.500	315.905.515	40.646.985
Bambu apus (batang)	725,00	5.000	3.625.000	3.211.750	413.250
<i>Pemanfaatan Jasa Lingkungan</i>					
Lonto	1,60	100.000	160.000	141.760	18.240
Retribusi		209.583.500			209.583.500

Produk Kehutanan	Jumlah	Harga	Output (Jumlah x Harga)	Konsumsi Antara	Nilai Tambah Bruto
Nilai Tambah Bruto Total					8.99.970.882

Seluruh produk kehutanan yang ditampilkan di atas ialah data yang terinput ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) oleh Operator SIPUHH yang ditunjuk oleh pemegang izin/perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, produksi kehutanan meningkat baik dari segi jumlah produksi maupun bertambahnya jenis produk kehutanan yang dihasilkan. Perhitungan di atas sifatnya estimasi dan tentunya harus mendapatkan justifikasi lebih lanjut oleh BPS Provinsi NTB.

Peningkatan produksi hasil hutan tidak terlepas dari peran kelompok tani hutan yang mengelola dan/atau memanfaatkan sumberdaya hutan dalam program perhutanan sosial. Beberapa skema Perhutanan Sosial di Provinsi NTB antara lain melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan, sampai Desember 2024 telah mencapai ± 76.371,90 Ha. Luasan ini lebih kecil jika dibandingkan kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh pengusaha skala besar dan menengah. Pada tahun 2025, Dinas LHK NTB telah melaksanakan pembinaan, penguatan, dan pendampingan terhadap 80 kelompok tani hutan yang tersebar di 15 (lima belas) KPH se-NTB. Selain memperkuat kelompok tani hutan, peran penyuluh kehutanan tidak kalah penting untuk menghasilkan KTH yang produktif dan mandiri, yang pada akhirnya meningkatkan produksi hasil hutan secara berkelanjutan. Penyuluh yang kompeten mampu mengorganisir masyarakat, menguatkan manajemen KTH (Kelompok Tani Hutan), dan meningkatkan akses mereka terhadap informasi dan inovasi. Dengan kapasitas yang lebih baik, penyuluh mampu membantu petani beradaptasi dengan perubahan iklim, yang krusial untuk mempertahankan produktivitas hasil hutan di tengah tantangan lingkungan. Pelaksanaan pembinaan penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan dilaksanakan pada 75 orang di tahun 2025.

Program perhutanan sosial juga mengukur keberhasilan kinerja dengan menghitung peningkatan nilai transaksi ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). NTE KUPS umumnya lebih tinggi dari NTE KTH, dikarenakan KUPS adalah kelompok usaha yang lebih spesifik berorientasi profit di bawah naungan KTH/perhutanan sosial, yang mengelola hasil hutan lebih intensif sehingga nilai ekonominya lebih tinggi. Di tahun 2025, NTE KUPS yang tercatat pada aplikasi GO KUPS yang dikelola oleh Balai Perhutanan Sosial Denpasar adalah sebesar Rp. 20.531.912.400, sedangkan NTE KTH yang tercatat pada aplikasi Simlul Kehutanan yang dikelola oleh Pusat Penyuluhan KLHK adalah sebesar Rp. 85.122.500. Capaian ini menurun dibandingkan Tahun 2024 yang mencatat NTE KUPS sebesar 236.793.213.440 dan NTE KTH sebesar 5.240.807.500.

Jika melihat upaya pengembangan perhutanan sosial yang sudah dilakukan Dinas LHK NTB, luasan perhutanan sosial dan jumlah kelompok mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dinas LHK NTB juga telah melaksanakan penguatan kapasitas kelompok dan penyuluh kehutanan, maka penurunan NTE yang signifikan tersebut perlu mendapat justifikasi lebih lanjut terkait keabsahannya. Upaya yang akan dilakukan ke depan ialah berkoordinasi dengan Balai Perhutanan Sosial serta Pusat Penyuluhan Kehutanan KLHK selaku pengampu aplikasi untuk melakukan justifikasi data, dan pendampingan terhadap penyuluh kehutanan dalam rangka tata kelola penginputan data, agar data yang diinput sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja
Persentase peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan yaitu :

1. Program Pengelolaan Hutan

- a. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- b. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun

2. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

- a. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 40 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya produksi hasil hutan dan jasa lingkungan”

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	P2 (Pagu Anggaran /Target Outcome)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4 x 100)
Meningkatnya produksi hasil hutan dan jasa lingkungan										
1	Persentase peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	1.499.913.400	1.455.380.179	4,20	229,83	6.332.420,39	357.122.238,10	0,02	0,98	98,23

3.3 Realisasi Anggaran

Adapun target dan realisasi anggaran per program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 41 Realisasi Anggaran s/d Triwulan III per Program berdasarkan Sasaran Strategis Renstra 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Menurunnya tingkat pencemaran air	1	Persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	47.200.000	29.294.000	62,06
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	5.012.688.938	207.211.910	4,13
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	47.187.000	29.520.000	62,56

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Program	Anggaran		
					Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3		4	5	6	7
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	29.482.000	7.262.519	24,63
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000	13.192.842	43,98
2	Menurunnya tingkat pencemaran udara	1	Persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku mutu referensi (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	12.959.340	6.654.600	51,35
3	Meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan	1	Persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	884.590.000	513.754.950	58,08

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3		4	5	6	7
				PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	307.266.000	44.070.500	14,34
4	Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi	1	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	18.700.650	8.087.550	43,25
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	61.392.300	11.392.300	18,56

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
5	Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi	1	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	18.700.650	8.087.550	43,25
6	Meningkatnya upaya pengurangan sampah	1	Persentase pengurangan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	564.079.714	22.568.000	4,00
7	Meningkatnya upaya penanganan sampah	1	Persentase penanganan sampah (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.625.380.962	2.311.574.663	26,80
8	Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan	1	Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	813.270.000	127.016.000	15,62
				PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	73.000.000	4.230.000	5,79

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Program	Anggaran		
					Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3		4	5	6	7
9	Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	1	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	107.317.420	36.669.560	34,17
10	Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkaran hutan	1	Persentase desa di sekitar lingkaran hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial (%)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	832.078.000	188.779.800	22,69
11	Meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi NTB	1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	39.000.000	29.024.069	74,42

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Program	Anggaran		
					Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3		4	5	6	7
12	Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap peningkatan PDRB Provinsi NTB	1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	174.719.143	67.704.000	38,75

Sumber : Dinas LHK NTB, 2025

Tabel 42 Realisasi Anggaran per Program berdasarkan Sasaran Strategis Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Program	Anggaran		
					Total (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3		4	5	6	7
1	Menurunnya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Air	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	4.983.796.615	4.916.435.472	98,65

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Total (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	57.482.000	57.476.000	99,99	
		2	Indeks Kualitas Air Laut	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	79.687.000	67.105.000	84,21
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000	25.570.827	85,24	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Total (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
		3	Indeks Kualitas Udara	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	47.200.000	45.806.000	97,05
		4	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	15.159.795.300	6.462.953.604	42,63
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	27.813.200	27.466.100	98,75

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Total (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
2	Meningkatnya pengelolaan hutan lestari	1	Skor pengurangan ancaman kepunahan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati sektor kehutanan dan lahan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.077.783.699	1.979.288.129	95,26
				PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	370.266.000	367.704.010	99,31
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	61.392.300	11.392.300	18,56
		2	Indeks Kualitas Lahan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.760.914.175	1.579.127.264	89,68
				PROGRAM PENGELOLAAN	100.000.000	90.209.017	90,21

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran			
				Total (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				
		3	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.321.254.000	1.309.911.329	99,14
3	Meningkatnya produksi hasil hutan dan jasa lingkungan	1	Persentase peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	152.345.400	148.167.885	97,26
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		1.347.568.000	1.307.212.294	97,01

Tabel 43 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keu	% Fisik
1	2024	100.207.617.329	93.701.245.512	93,51	93,51
2	2025	115.807.878.942	100.170.579.659	86,50	86,50

Sumber : Dinas LHK NTB, 2025

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024. Pembuatan LKjIP telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan himpunan dari pelaksanaan berbagai tugas pokok dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025. Dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Dinas LHK NTB sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, telah terserap anggaran sebesar 86,50% atau sebesar Rp. 100.170.579.659 dari pagu total sebesar Rp. 115.807.878.942,-. Pelaksanaan pencapaian kinerja ini meliputi Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pilihan Bidang Kehutanan. Adapun kondisi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menunjukkan hasil sebagai berikut :
 - a. Indeks Kualitas Air (IKA), mencapai 71,24 poin;
 - b. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), mencapai 81,14 poin
 - c. Indeks Kualitas Udara (IKU), mencapai 81,44 poin
 - d. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah, mencapai 76,50%
 - e. Skor pengurangan ancaman kepunahan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati sektor kehutanan dan lahan, mencapai 3,292 poin
 - f. Indeks Kualitas Lahan (IKL), mencapai 77,36 poin
 - g. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan, mencapai 0,13%
 - h. Persentase Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan, mencapai 229,83%
2. Permasalahan yang masih terjadi dalam pencapaian sasaran strategis yaitu :
 - a. Belum optimalnya skema pengurangan dan penanganan sampah dalam penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah

- b. Belum optimalnya upaya rehabilitasi hutan dan lahan dalam penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan
 - c. Belum ada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk pengendalian kualitas air
3. Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik ke depannya antara lain :
- a. Mendorong tumbuhnya inisiatif dari kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan mengintensifkan pendampingan terhadap kegiatan pengolahan sampah yang sudah ada seperti bank sampah.
 - b. Mendorong upaya rehabilitasi hutan dan lahan, serta meningkatkan upaya perlindungan hutan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan tutupan lahan
 - c. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pengendalian kualitas air antar Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, terutama pada titik-titik sampling sungai yang tercemar ringan hingga sedang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan di masa mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024-2026



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Majapahit Nomor 54 Selaparang, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 83126
Telepon (0370) 633071 Faximile. (0370) 633961
Lamam dislhk.ntbprov.go.id Pos-el dislhk.ntbprov@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Ahmadi, SP1
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lalu Muhamad Iqbal
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Gubernur Nusa Tenggara Barat

Lalu Muhamad Iqbal

Mataram, 2025

Pihak Pertama,

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. Ahmadi, SP1
Pembina Tingkat Muda/ IV/c
NIP. 19661107 199303 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menurunnya tingkat pencemaran air	1. Persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu	25,57%
2	Menurunnya tingkat pencemaran udara	1. Persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku mutu referensi	100%
3	Meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan	1. Persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan	100%
4	Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi	1. Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon	30%
5	Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi	1. Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem	30%
6	Meningkatnya upaya pengurangan sampah	1. Persentase pengurangan sampah	22,08%
7	Meningkatnya upaya penanganan sampah	1. Persentase penanganan sampah	69,92%
8	Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan	1. Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan	0,06-0,12%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
9	Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	1. Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	10-15%
10	Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkaran hutan	1. Persentase desa di sekitar lingkaran hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial	40%
11	Meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi NTB	1. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,5-4,2%
12	Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap peningkatan PDRB Provinsi NTB	1. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,3-6,4%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 100.000.000,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 621.527.678,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1,2, dan 5, indikator 1

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp. 75.000.000,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 4, indikator 1
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 57.000.000,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 96.500.000,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 50.000.000,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 53.500.000,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1
Program Pengelolaan Hutan	Rp. 2.968.910.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 3,8, dan 11, indikator 1
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Rp. 376.500.000,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 3, indikator 1
Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 8.174.572.300,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 6, 7, dan 12, indikator 1
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp. 100.000.000,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 8, indikator 1

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Rp. 988.328.000 ,-	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 10, indikator 1

Pihak Kedua,

Gubernur Nusa Tenggara Barat



Lalu Muhamad Iqbal

Mataram,

2025

Pihak Pertama,

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat



Ir. Ahmadi, SP1
Pembina Tingkat Muda/ IV/c
NIP. 19661107 199303 1 015

Lampiran 2 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jalan Majapahit Nomor 54 Selaparang, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 83126
Telepon (0370) 633071 Faximile. (0370) 633961
Laman dislhk.ntbprov.go.id Pos-el dislhk.ntbprov@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Ahmadi, SP1
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lalu Muhamad Iqbal
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Nusa Tenggara Barat

Lalu Muhamad Iqbal

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. Ahmadi, SP1
Pembina Tingkat Muda/ IV/c
NIP. 19661107 199303 1 015

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menurunnya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA) (Indeks) 2. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (Indeks) 3. Indeks Kualitas Udara (IKU) (Indeks) 4. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah (%)	1. 74,36 2. 82,99 3. 75,62 4. 8,83
2	Meningkatnya pengelolaan hutan lestari	1. Skor pengurangan ancaman kepunahan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati sektor kehutanan dan lahan (Skor) 2. Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Indeks) 3. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan (%)	1. 3,264 2. 77,63 3. 50,27
3.	Meningkatnya produksi hasil hutan dan jasa lingkungan	1. Persentase peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan (%)	1. 4,20

Program	Anggaran	Keterangan
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 47.200.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1 s/d 3
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 4.983.796.615	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1 s/d 3

Program		Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp.	61.392.300	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1 s/d 3
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp.	27.813.200	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1 s/d 3
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	79.687.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1 s/d 3
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	57.482.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1 s/d 3
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	30.000.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 1 s/d 3
Program Pengelolaan Hutan	Rp.	5.212.297.274	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 2, indikator 1 s/d 3
Program Pengelolaan Hutan	Rp.	100.000.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 3, indikator 1
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Rp.	370.266.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 2, indikator 1 s/d 3
Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	15.159.795.300	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 1, indikator 4

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp. 100.000.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 2, indikator 1 s/d 3
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Rp. 1.347.568.000	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis nomor 2, indikator 1 s/d 3

Mataram,

2025

Pihak Kedua,
Gubernur Nusa Tenggara Barat






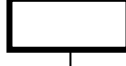
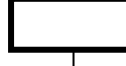

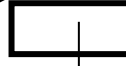
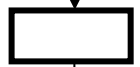

Lalu Muhamad Iqbal

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat



Ir. Ahmadi, SP1
Pembina Tingkat Muda/ IV/c
NIP. 19661107 199303 1 015

Lampiran 1 SOP Pengumpulan Data

NO	URUTAN AKTIVITAS	UNIT PELAKSANA					MUTU BAKU		
		SEKRETARIAT (Program)	KEPALA BIDANG	STAF BIDANG	KEPALA BALAI	STAF BALAI	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pengiriman permintaan form data kinerja ke bidang/balai						Formulir data isian kinerja	1 hari	Form Data Kinerja
2	Pengisian form data kinerja masing-masing bidang/balai						Formulir data isian kinerja	2 hari	Form Data Kinerja yang sudah terisi
3	Verifikasi form data kinerja						Formulir data isian kinerja sudah lengkap	1 hari	Form Data Kinerja yang sudah diverifikasi
4	Form data kinerja dari masing-masing bidang dikirimkan ke Sekretariat c.q. Program						Surat pengantar Form Data Kinerja yang sudah terisi	1 hari	Form Data Kinerja yang sudah diverifikasi
5	Rekapitulasi data kinerja semua bidang/balai						Form Data Kinerja yang sudah terisi	2 hari	Data dalam aplikasi
6	Udata data kinerja						Laporan	1 hari	Data kinerja yang sudah terupdate

Lampiran 2 Data Hasil Uji Parameter Sampel Kualitas Air Sungai

NAMA SUNGAI	NILAI PEMANTAUAN							
	PH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO (mg/L)	TOTAL PHOSPHAT ^{mg/L}	FECAL COLIFORM ^{MPN/100 mL}
	(Potential Hydrogen)	(Biological Oxygen Demand)	(Chemical Oxygen Demand)	(Total Suspended Solid)	(Dissolved Oxygen)	(Nitrat)		
Sungai Moyo	'6.52	'2.48	'16.5	'13	'4.53	'1.32	'0.043	'2800
Sungai Moyo	'8.24	'2.26	'13.1	'12	'4.78	'1.25	'0.039	'940
Sungai Moyo	'6.33	'2.5	'17.1	'16	'4.45	'1.64	'0.051	'7900
Sungai Moyo	'7.41	'2.11	'10.3	'11	'5.76	'1.58	'0.047	'490
Sungai Moyo	'6.4	'2.72	'20	'37	'4.23	'1.01	'0.15	'11000
Sungai Moyo	'7.19	'2.43	'17.7	'19	'4.35	'1.75	'0.12	'2200
Sungai Moyo	'6.34	'2.88	'24.7	'40	'4.07	'2.15	'0.27	'24000
Sungai Moyo	'6.43	'2.62	'19.2	'22	'4.3	'1.96	'0.17	'3300
Sungai Moyo	'6.35	'2.74	'22.6	'34	'4.15	'1.21	'0.33	'14000
Sungai Moyo	'6.24	'2.68	'21.7	'26	'4.23	'2.15	'0.19	'9400
Sungai Ancar	'7.13	'2.79	'18	'14.5	'5.01	'13.6	'0.962	'54000
Sungai Ancar	'7.51	'2.1	'19	'15	'4.8	'10.2	'0.661	'160000
Sungai Ancar	'7.71	'1.97	'20	'17	'5.15	'5.7	'0.589	'92000
Sungai Sori	'8.25	'0.99	'3	'16	'6.2	'0.5	'0.105	'17000
Sungai Sori	'8.34	'1.06	'3	'51	'5.9	'0.5	'0.096	'54000
Sungai Sori	'8.5	'0.54	'3	'38.5	'5.7	'0.5	'0.083	'7000
Sungai Sori	'8.56	'0.37	'3	'32	'5.6	'0.5	'0.072	'24000
Sungai Brang	'8.3	'0.53	'3	'8.5	'5.7	'0.5	'0.063	'110
Sungai Brang	'7.7	'0.9	'9	'8	'5.79	'0.5	'0.02	'9200
Sungai Brang	'7.4	'0.19	'14	'28.5	'4.93	'0.5	'0.05	'5400
Sungai Brang	'7.4	'0.1	'3	'26.5	'4.53	'0.5	'0.055	'5400
Sungai Brang Biji	'8.18	'0.59	'3	'34.5	'5.45	'0.5	'0.106	'1400
Sungai Brang Biji	'8.13	'0.45	'3	'25	'5.4	'0.5	'0.107	'11000

NAMA SUNGAI	NILAI PEMANTAUAN							
	PH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO (mg/L)	TOTAL PHOSPHAT ^{mg/L}	FECAL COLIFORM ^{MPN/100 mL}
	(Potential Hydrogen)	(Biological Oxygen Demand)	(Chemical Oxygen Demand)	(Total Suspended Solid)	(Dissolved Oxygen)	(Nitrat)		
Sungai Brang Biji	'7.94	'2.02	'3	'43	'5.08	'0.5	'0.184	'160000
Sungai Brang Biji	'8.08	'0.46	'3	'5.5	'5.55	'0.5	'0.083	'5400
Sungai Segara	'7.9	'0.84	'14	'5.5	'6.8	'4.9	'0.854	'4700
Sungai Segara	'8.21	'0.31	'5	'4	'7.2	'5.6	'0.05	'9400
Sungai Segara	'8.34	'0.26	'5	'6	'7.1	'8.1	'0.046	'3300
Sungai Segara	'8.65	'0.94	'14	'4.5	'7	'0.5	'0.046	'2400
Sungai Tojang	'8.76	'0.32	'13	'18	'5.55	'7.4	'0.198	'28000
Sungai Tojang	'8.69	'0.29	'10	'22.5	'5.79	'6.5	'1.014	'17000
Sungai Tojang	'8.47	'0.88	'14	'21	'6.44	'12.6	'0.21	'160000
Sungai Tojang	'8.26	'0.23	'3	'12	'8.35	'11.1	'0.142	'22000
Sungai Tojang	'7.71	'0.4	'17	'3	'8.58	'8.1	'0.152	'4900
Sungai Dodokan	'7.35	'0.96	'21	'2.5	'5.87	'10.3	'0.144	'310
Sungai Babak	'7.92	'0.06	'11	'56	'5.23	'0.5	'0.134	'3900
Sungai Babak	'7.85	'0.12	'8	'30.5	'5.44	'1.7	'0.139	'54000
Sungai Babak	'7.83	'0.36	'16	'7.5	'5.1	'3.4	'0.162	'11000
Sungai Babak	'7.63	'0.31	'17	'20	'4.92	'4.1	'0.171	'3200
Sungai Babak	'7.59	'2.74	'19	'4.5	'4.41	'4.7	'0.399	'92000
Sungai Rabalaju	'7.72	'2.27	'10	'24	'4.8	'0.5	'0.149	'35000
Sungai Rabalaju	'8.37	'1.34	'3	'3.5	'7.7	'0.5	'0.06	'5400
Sungai Rabalaju	'8.21	'3.12	'10	'9	'6.6	'0.5	'0.122	'24000
Sungai Rabalaju	'8.06	'2.38	'13	'20.5	'5.1	'0.5	'0.137	'92000
Sungai Rabalaju	'7.99	'2.35	'3	'2.5	'7.3	'0.5	'0.073	'7000
Sungai Sori	'8.48	'0.51	'3	'30	'6	'0.5	'0.069	'92000
Sungai Sori	'8.53	'0.33	'4	'61.5	'6.3	'0.5	'0.247	'17000
Sungai Sori	'8.63	'0.84	'3	'265	'6.8	'0.5	'0.12	'54000

NAMA SUNGAI	NILAI PEMANTAUAN							
	PH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO (mg/L)	TOTAL PHOSPHAT ^{mg/L}	FECAL COLIFORM ^{MPN/100 mL}
	(Potential Hydrogen)	(Biological Oxygen Demand)	(Chemical Oxygen Demand)	(Total Suspended Solid)	(Dissolved Oxygen)	(Nitrat)		
Sungai Sori	'8.32	'0.75	'3	'207	'6	'0.5	'0.119	'35000
Sungai Sori	'8.74	'0.98	'3	'32	'6.3	'0.5	'0.076	'160000
Sungai Sori	'8.59	'1.54	'3	'28	'6.1	'0.5	'0.031	'7000
Sungai Ancar	'7.18	'1.94	'11	'8.5	'5.45	'20.1	'0.703	'160000
Sungai Sori	'8.3	'0.85	'3	'9.5	'5.8	'0.5	'0.133	'54000
Sungai Sori	'8.27	'0.96	'3	'97	'5.4	'0.5	'0.107	'16000
Sungai Brang	'7.5	'0.59	'6	'20	'4.97	'0.5	'0.06	'1300
Sungai Brang	'7.5	'0.17	'6	'21	'4.68	'0.5	'0.053	'3500
Sungai Brang Biji	'7.89	'0.53	'3	'36.5	'4.9	'0.5	'0.152	'24000
Sungai Brang Biji	'7.9	'0.73	'3	'26	'5.83	'0.5	'0.119	'17000
Sungai Segara	'8.14	'0.46	'8	'6.5	'7.1	'2.4	'0.054	'54000
Sungai Segara	'8.5	'0.58	'12	'2.5	'6.8	'5.4	'0.049	'3300
Sungai Tojang	'8.77	'0.7	'13	'14	'5.62	'13.6	'0.282	'92000
Sungai Dodokan	'7.71	'0.92	'24	'5	'5.85	'4.7	'0.179	'9200
Sungai Dodokan	'7.31	'0.45	'21	'5.75	'5.7	'0.5	'0.169	'170
Sungai Babak	'7.87	'0.24	'9	'67.5	'5.8	'0.5	'0.123	'24000
Sungai Dodokan	'7.39	'1.17	'20	'5	'5.39	'3.6	'0.239	'16000
Sungai Dodokan	'7.49	'1.29	'16	'9	'5.83	'5	'0.25	'4300
Sungai Dodokan	'7.53	'1.23	'23	'2.5	'5.92	'0.5	'0.185	'16000
Sungai Ancar	'7.7	'3.34	'18	'10.5	'5.3	'6.9	'0.374	'92000
Sungai Ancar	'7.5	'2.37	'11	'13.5	'5.14	'27.8	'0.385	'22000
Sungai Rabalaju	'7.9	'2.91	'12	'33.5	'5	'0.5	'0.143	'14000
Sungai Padolo	'8.2	'2.47	'3	'108	'6	'0.5	'0.139	'54000
Sungai Padolo	'7.61	'4.2	'19	'35.25	'2.55	'0.5	'0.343	'14
Sungai Jatibaru	'7.59	'1.11	'3	'40	'5.2	'0.5	'0.139	'160000

NAMA SUNGAI	NILAI PEMANTAUAN							
	PH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO (mg/L)	TOTAL PHOSPHAT ^{mg/L}	FECAL COLIFORM ^{MPN/100 mL}
	(Potential Hydrogen)	(Biological Oxygen Demand)	(Chemical Oxygen Demand)	(Total Suspended Solid)	(Dissolved Oxygen)	(Nitrat)		
Sungai Jatibaru	'7.19	'2.52	'32	'4.25	'2.05	'0.5	'0.485	'1700
Sungai Jatibaru	'7.69	'3.08	'17	'105	'4.4	'0.5	'0.426	'54000
Sungai Jatibaru	'7.21	'4.8	'5	'6	'4.15	'0.5	'0.16	'5400
Sungai Ranggo	'7.86	'4.45	'31	'259	'3.3	'0.5	'0.441	'160000
Sungai Ranggo	'7.63	'8.72	'14	'24.75	'2	'0.5	'0.902	'16000
Sungai Sadia	'8.13	'3.09	'12	'29	'5.1	'0.5	'0.177	'24000
Sungai Sadia	'7.35	'4.2	'48	'237	'0.65	'0.7	'0.373	'16000
Sungai Rabasalo	'8.3	'4.17	'5	'981	'5.9	'0.5	'0.486	'54000
Sungai Rabasalo	'7.44	'2.8	'3	'7	'3.5	'0.5	'0.215	'390
Sungai Oi	'7.79	'0.79	'6	'124	'5.6	'0.5	'0.13	'17000
Sungai Oi	'7.57	'1.94	'3	'20	'4.25	'0.5	'0.126	'16000
Sungai Sambinae	'8.08	'1.62	'9	'128.5	'6.3	'0.5	'0.133	'24000
Sungai Sambinae	'7.53	'3.87	'7	'12	'6.2	'0.5	'0.134	'1400
Sungai Sori	'8.16	'0.99	'3	'47	'6	'0.5	'0.078	'3500
Sungai Sori	'8.06	'1.33	'3	'8.4	'6.9	'0.5	'0.053	'3500
Sungai Sejongong	'7.7	'0.1	'3	'59	'6.21	'8.7	'0.128	'2200
Sungai Sejongong	'6.68	'0.24	'9	'9.5	'4.73	'0.5	'0.032	'3500
Sungai Sekongkong	'7.6	'0.1	'13	'7	'5.98	'2.5	'0.032	'3500
Sungai Sekongkong	'7.43	'0.52	'3	'2.7	'4.52	'0.5	'0.04	'49
Sungai Berang	'7.7	'1.23	'10	'2.5	'5.97	'5.8	'0.029	'160000
Sungai Berang	'7.6	'0.48	'28	'21.5	'5.4	'0.5	'0.041	'9200
Sungai Jereweh	'7.8	'0.1	'3	'19	'7.1	'0.5	'0.076	'160000
Sungai Jereweh	'7.76	'0.62	'4	'8.21	'6.61	'0.5	'0.013	'49

NAMA SUNGAI	NILAI PEMANTAUAN							
	PH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO (mg/L)	TOTAL PHOSPHAT ^{mg/L}	FECAL COLIFORM ^{MPN/100 mL}
	(Potential Hydrogen)	(Biological Oxygen Demand)	(Chemical Oxygen Demand)	(Total Suspended Solid)	(Dissolved Oxygen)	(Nitrat)		
Sungai Jereweh	'7.6	'0.1	'3	'25.5	'5.69	'0.8	'0.054	'35000
Sungai Jereweh	'7.8	'0.84	'5	'2.5	'5.3	'0.5	'0.037	'46
Sungai Berang	'7.6	'0.62	'22	'11.5	'5.89	'3.3	'0.03	'7900
Sungai Berang	'7.7	'0.46	'23	'51.75	'5.5	'0.5	'0.076	'3500
Sungai Seteluk	'7.6	'2.27	'19	'2.5	'5.42	'1.2	'0.225	'2100
Sungai Seteluk	'7.45	'17.47	'34	'17	'2.5	'0.5	'0.738	'700
Sungai Tiu	'8.1	'0.67	'22	'2.5	'7.51	'0.5	'0.013	'350
Sungai Tiu	'8.3	'0.3	'3	'2.5	'6	'0.5	'0.013	'5400
Sungai Seteluk	'7.6	'1.72	'19	'2.5	'5.42	'1.7	'0.234	'92000
Sungai Seteluk	'7.47	'11.47	'20	'17	'4.9	'0.5	'0.258	'2400
Sungai Seteluk	'7.8	'1.11	'12	'73	'6.91	'3.9	'0.02	'14000
Sungai Seteluk	'7.51	'0.22	'3	'6.75	'5	'0.5	'0.139	'490
Sungai Berang	'7.5	'1.02	'27	'17	'5.61	'0.5	'0.095	'3500
Sungai Berang	'7.5	'0.54	'3	'22.5	'5.1	'0.5	'0.075	'16000
Sungai Berang	'7.7	'0.42	'9	'2.5	'6.38	'0.5	'0.035	'22000
Sungai Berang	'7.7	'0.56	'4	'5.6	'6.17	'0.5	'0.509	'790
Sungai Bangkat	'8.1	'1.02	'8	'2.5	'7.61	'2	'0.029	'3500
Sungai Lamuntet	'7.5	'1.74	'11	'2.5	'6.58	'0.5	'0.021	'490
Sungai Lamuntet	'7.6	'0.51	'3	'2.5	'8.33	'0.5	'0.055	'1700
DAS Sumbawa	'7.78	'0.1	'18	'6.5	'7.3	'4	'0.071	'630
DAS Sumbawa	'7.72	'1.91	'31	'2.5	'7.2	'0.5	'0.092	'460
DAS Sumbawa	'7.49	'0.1	'23	'6.5	'6.4	'1.8	'0.093	'6300
DAS Sumbawa	'7.17	'0.79	'43	'2.5	'7	'0.5	'0.137	'16000
DAS Sumbawa	'7.52	'2.73	'31	'2.5	'5.9	'4.9	'0.187	'22000
DAS Sumbawa	'7.3	'1.75	'30	'2.5	'4.6	'0.5	'0.311	'16000

NAMA SUNGAI	NILAI PEMANTAUAN							
	PH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO (mg/L)	TOTAL PHOSPHAT ^{mg/L}	FECAL COLIFORM ^{MPN/100 mL}
	(Potential Hydrogen)	(Biological Oxygen Demand)	(Chemical Oxygen Demand)	(Total Suspended Solid)	(Dissolved Oxygen)	(Nitrat)		
DAS Rhee	'7.4	'0.56	'24	'2.5	'6.5	'0.5	'0.129	'1400
DAS Rhee	'7.82	'1.42	'20	'2.5	'6.8	'0.5	'0.15	'16000
DAS Bera	'7.2	'0.36	'33	'6	'4.9	'0.5	'0.212	'7000
DAS Bera	'7.46	'2.13	'53	'4	'5.8	'0.5	'0.192	'2800
Sungai Sokong	'7.28	'0.66	'11	'5	'5.3	'0.5	'0.06	'1100
Sungai Sokong	'7.3	'1.43	'27	'2.5	'6.1	'0.5	'0.071	'5400
Sungai Sokong	'7.28	'0.88	'16	'4.5	'5.2	'0.5	'0.043	'5400
Sungai Sokong	'7.8	'1.46	'3	'2.5	'6.8	'0.5	'0.038	'1100
Sungai Segara	'7.03	'1.22	'9	'2.5	'5.6	'0.5	'0.051	'220
Sungai Segara	'7.71	'1.3	'18	'2.5	'6.6	'0.5	'0.067	'49
DAS Rumpang	'7.71	'2.29	'40	'25	'6	'1.381	'1.006	'9600
DAS Belimbing	'7.87	'3.72	'64	'15.5	'6.2	'2.032	'0.485	'9600
DAS Belimbing	'7.94	'3.2	'47	'30	'4.7	'2.637	'0.676	'3300
DAS Belimbing	'8.04	'2.8	'40	'12	'4.2	'2.673	'0.558	'2100
Sungai Tojang	'8.09	'4.6	'40	'27	'4.3	'1.896	'1.026	'2100
Sungai Tojang	'7.97	'4.2	'43	'24	'5.1	'1.302	'1.032	'2100
Sungai Tojang	'6.78	'4.3	'40	'11	'5.4	'1.197	'0.678	'2100
Sungai Leneng	'8.6	'4.61	'20	'24	'3.19	'2.3	'0.61	'3000
Sungai Leneng	'8	'5.1	'28	'19	'3.2	'2.3	'0.7	'3000
Sungai Leneng	'8.1	'2	'30	'12	'6.1	'2.3	'0.61	'4500
Sungai Leneng	'8.5	'5.5	'30	'16	'6	'2.3	'0.5	'3000
Sungai Srigangga	'8.3	'8.4	'26	'136	'8.05	'2.3	'0.11	'14000
Sungai Srigangga	'8.3	'9.5	'31	'11	'5.92	'2.3	'0.9	'3000
Sungai Srigangga	'8.3	'5	'27	'24	'3.8	'2.3	'0.7	'3000

NAMA SUNGAI	NILAI PEMANTAUAN							
	PH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO (mg/L)	TOTAL PHOSPHAT ^{mg/L}	FECAL COLIFORM ^{MPN/100 mL}
	(Potential Hydrogen)	(Biological Oxygen Demand)	(Chemical Oxygen Demand)	(Total Suspended Solid)	(Dissolved Oxygen)	(Nitrat)		
Sungai Srigangga	'7.8	'0.9	'21	'64	'3.1	'2.3	'0.5	'3000
Sungai Srigangga	'7.7	'6	'31	'19.6	'2.9	'2.3	'0.6	'3000
Sungai Remeneng	'7.85	'0.21	'47	'17	'4.27	'0.5	'0.125	'54000
Sungai Remeneng	'7.32	'1.13	'39	'62	'6.5	'0.5	'0.138	'9200
Sungai Remeneng	'7.75	'0.1	'3	'27.5	'5.05	'0.5	'0.128	'92000
Sungai Remeneng	'7.14	'1.42	'16	'93.2	'5.9	'0.5	'0.155	'470
Sungai Remeneng	'8.66	'1.06	'35	'9.5	'6.34	'4.6	'0.132	'92000
Sungai Remeneng	'7.15	'0.67	'8	'3.26	'7.6	'0.5	'0.148	'170
Sungai Jangkok	'8.75	'0.11	'27	'2.5	'5.14	'8.7	'0.107	'35000
Sungai Jangkok	'7.18	'0.37	'40	'6.1	'5.8	'0.5	'0.255	'3500
Sungai Jangkok	'8.7	'0.12	'24	'3	'5.24	'0.7	'0.106	'160000
Sungai Jangkok	'7.08	'0.86	'5	'22.8	'6.6	'0.7	'0.152	'3500
Sungai Raba	'6.61	'0.74	'18	'39	'5.9	'0.5	'0.194	'3500
Sungai Raba	'7.6	'2.18	'49	'30.5	'6.9	'0.5	'0.148	'16000
Sungai Silo	'7.86	'1.45	'22	'18	'5.8	'0.9	'0.109	'16000
Sungai Silo	'7.31	'7.44	'21	'33.5	'5.3	'0.6	'0.212	'16000
Sungai Jangkok	'6.46	'18.46	'18.63	'23.5	'4.76	'1.665	'0.376	'9600
Sungai Jangkok	'6.64	'4.21	'6	'8	'5.8	'1.005	'0.595	'9600
Sungai Jangkok	'6.91	'2.18	'3	'2.5	'3.94	'8.5	'0.194	'16000
Sungai Jangkok	'6.78	'1.23	'16	'35.5	'5.3	'0.5	'0.16	'160000
Sungai Jangkok	'6.67	'6.56	'6.704	'20.5	'5.32	'0.61	'0.848	'9600
Sungai Jangkok	'6.94	'2.46	'4	'6	'6.3	'0.686	'0.485	'9600

NAMA SUNGAI	NILAI PEMANTAUAN							
	PH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO (mg/L)	TOTAL PHOSPHAT ^{mg/L}	FECAL COLIFORM ^{MPN/100 mL}
	(Potential Hydrogen)	(Biological Oxygen Demand)	(Chemical Oxygen Demand)	(Total Suspended Solid)	(Dissolved Oxygen)	(Nitrat)		
Sungai Jangkok	'7.03	'2.61	'3	'2.5	'5.28	'1.6	'0.141	'9200
Sungai Jangkok	'7.17	'1.35	'9	'34.5	'6.2	'0.5	'0.122	'160000
Sungai Jangkok	'7.32	'5.16	'5.272	'22.5	'5.34	'1.122	'0.398	'9600
Sungai Jangkok	'6.77	'2.23	'4	'3	'6.5	'0.722	'0.362	'1680
Sungai Jangkok	'7.05	'1.19	'3	'2.5	'5.91	'0.5	'0.119	'9200
Sungai Jangkok	'7.56	'0.88	'8	'35.75	'6.35	'4.8	'0.112	'160000
Sungai Melayu	'7.75	'2.32	'7	'251	'2.9	'0.5	'0.442	'160000
Sungai Melayu	'7.65	'8.6	'43	'28.25	'2.35	'0.8	'1.389	'16000
Sungai Bedi	'7.78	'2.47	'11	'107	'5.8	'0.5	'0.146	'24000
Sungai Bedi	'7.53	'0.32	'26	'105.5	'1.95	'0.5	'0.325	'94
Sungai Rabadompu	'7.72	'1.78	'8	'132.5	'5.7	'0.5	'0.133	'22000
Sungai Rabadompu	'7.31	'1.3	'3	'5	'2	'0.5	'0.138	'120
Sungai Sejong	'7.8	'0.56	'31	'17	'5.77	'8.6	'0.079	'54000
Sungai Sejong	'7.09	'1.09	'7	'11	'5.33	'0.5	'0.049	'1700
Sungai Sekongkang	'7.6	'0.1	'21	'2.5	'7.44	'0.5	'0.013	'5400
Sungai Sekongkang	'7.72	'0.22	'6	'3	'4.9	'0.5	'0.125	'1300
Sungai Jereweh	'7.8	'0.49	'37	'10	'6.14	'0.5	'0.041	'160000
Sungai Jereweh	'8.07	'0.75	'17	'2.7	'5.04	'0.5	'0.031	'70
Sungai Berang	'7.8	'1.1	'34	'2.5	'6.38	'0.5	'0.029	'350
Sungai Berang	'7.8	'0.3	'34	'3.5	'6	'0.5	'0.035	'280
Sungai Tiu	'7.9	'0.17	'3	'2.5	'6.2	'8.7	'0.019	'2700

NAMA SUNGAI	NILAI PEMANTAUAN							
	PH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO (mg/L)	TOTAL PHOSPHAT ^{mg/L}	FECAL COLIFORM ^{MPN/100 mL}
	(Potential Hydrogen)	(Biological Oxygen Demand)	(Chemical Oxygen Demand)	(Total Suspended Solid)	(Dissolved Oxygen)	(Nitrat)		
Sungai Tiu	'7.9	'0.27	'3	'2.5	'5.6	'0.5	'0.13	'170
Sungai Seteluk	'7.4	'0.84	'3	'36.5	'6.01	'0.5	'0.075	'16000
Sungai Seteluk	'6.75	'13.95	'17	'11	'4.3	'0.5	'0.166	'790
Sungai Berang	'7.8	'0.67	'8	'2.5	'6.28	'1.8	'0.096	'3900
Sungai Berang	'7.6	'3.67	'39	'12.4	'6.35	'0.6	'0.061	'3500
Sungai Bangkat	'7.8	'0.71	'12	'7.75	'6.37	'2	'0.35	'1700
Sungai Bangkat	'7.6	'0.44	'4	'2.5	'6.27	'0.5	'0.018	'1100
Sungai Lamuntet	'7.5	'0.36	'4	'2.5	'5.16	'0.5	'0.033	'24000
Sungai Lamuntet	'7.4	'0.96	'3	'8.4	'6.13	'0.5	'0.045	'3500
DAS Rhee	'7.44	'0.71	'22	'12	'6.4	'7.6	'0.126	'680
DAS Rhee	'7.75	'2.51	'42	'4	'7.8	'0.5	'0.124	'1100
DAS Rhee	'7.45	'0.56	'29	'7	'6.8	'0.5	'0.122	'6300
DAS Rhee	'7.79	'2.2	'51	'7.5	'7.6	'0.5	'0.148	'5400
DAS Bera	'7.7	'0.79	'20	'2.5	'7.2	'0.5	'0.209	'54000
DAS Bera	'7.53	'2.18	'50	'2.5	'6.7	'0.5	'0.142	'3500
DAS Bera	'7.66	'0.22	'23	'2.5	'6.9	'8.4	'0.166	'16000
DAS Bera	'7.66	'2.93	'25	'2.5	'6.9	'2.6	'0.144	'350
Sungai Sokong	'8.52	'1.2	'14	'2.5	'4.5	'0.7	'0.206	'16000
Sungai Sokong	'7.1	'2.36	'26	'2.5	'5.8	'0.5	'0.311	'9200
Sungai Segara	'7.28	'1.51	'16	'8	'4.7	'1.1	'0.14	'16000
Sungai Segara	'7.22	'4.37	'30	'10	'5.1	'9.2	'0.157	'16000
Sungai Segara	'7.4	'0.68	'25	'2.5	'8.9	'0.5	'0.053	'1100
Sungai Segara	'8	'1.49	'12	'2.5	'5.3	'0.6	'0.054	'16000
DAS Rumpang	'8	'3.13	'64	'74	'5.6	'0.774	'0.761	'9600

NAMA SUNGAI	NILAI PEMANTAUAN							
	PH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO (mg/L)	TOTAL PHOSPHAT ^{mg/L}	FECAL COLIFORM ^{MPN/100 mL}
	(Potential Hydrogen)	(Biological Oxygen Demand)	(Chemical Oxygen Demand)	(Total Suspended Solid)	(Dissolved Oxygen)	(Nitrat)		
	'6.8	'2.78	'40	'8	'6.5	'1.602	'0.857	'1020
DAS Belimbing	'6.69	'2.49	'48	'6	'6.9	'1.156	'0.41	'294
DAS Belimbing	'6.95	'1.7	'40	'8	'5.4	'1.592	'0.437	'1700
Sungai Leneng	'7.8	'6.41	'38	'11	'2.91	'2.3	'0.29	'4500
Sungai Leneng	'7.1	'6.3	'32	'4	'3.2	'2.3	'0.3	'4000
Sungai Srigangga	'8	'1.17	'25	'39	'4.17	'2.3	'0.48	'4500
Sungai Srigangga	'8.5	'5	'31	'16.8	'2.1	'2.3	'0.2	'4000
Sungai Jangkok	'8.7	'0.19	'26	'18	'4.2	'0.5	'0.111	'92000
Sungai Jangkok	'7.36	'1.35	'27	'14.65	'5.8	'0.5	'0.136	'16000
Sungai Raba	'7.55	'1.84	'40	'45.5	'6.8	'0.8	'0.213	'5400
Sungai Silo	'6.4	'3.08	'6	'37.5	'4.8	'0.5	'0.246	'16000
Sungai Sulin	'8.41	'0.1	'35	'52.5	'6.17	'12.3	'0.28	'54000
Sungai Sulin	'6.85	'0.42	'37	'4.43	'4.9	'0.5	'0.315	'790
Sungai Sulin	'7.11	'0.41	'42	'5	'4.67	'0.5	'0.312	'5400
Sungai Sulin	'7.64	'0.18	'3	'73	'4.32	'27.1	'0.29	'92000
Sungai Sulin	'6.56	'0.23	'41	'8	'2.53	'0.5	'0.265	'1300
Sungai Lokok Reak	'7.76	'1.22	'6	'3	'5.9	'6.2	'0.188	'330
Sungai Lokok Reak	'7.77	'0.39	'21	'2.5	'7	'0.5	'0.227	'68
Sungai Lokok Reak	'7.96	'0.59	'13	'2.5	'6.6	'9.3	'0.148	'5400
Sungai Lokok Reak	'7.56	'2.04	'24	'2.74	'6.8	'0.5	'0.151	'2400
Sungai Lokok Reak	'7.84	'1.33	'15	'4	'5.8	'0.5	'0.193	'16000
Sungai Lokok Reak	'7.6	'1.26	'34	'2.5	'6.25	'0.5	'0.153	'3500

NAMA SUNGAI	NILAI PEMANTAUAN							
	PH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO (mg/L)	TOTAL PHOSPHAT ^{mg/L}	FECAL COLIFORM ^{MPN/100 mL}
	(Potential Hydrogen)	(Biological Oxygen Demand)	(Chemical Oxygen Demand)	(Total Suspended Solid)	(Dissolved Oxygen)	(Nitrat)		
Sungai Sulin	'7.94	'0.13	'47	'52	'5.28	'13.5	'0.299	'92000
Sungai Sokong	'8.52	'1.99	'12	'3.5	'4.8	'0.5	'0.045	'700
Sungai Sokong	'7.5	'2.05	'6	'2.5	'5.7	'0.5	'0.048	'16000
Sungai Segara	'7.38	'1.67	'13	'5.5	'5.4	'0.9	'0.054	'5400
Sungai Segara	'7.58	'1.73	'3	'3.11	'8.8	'0.5	'0.056	'1100
Sungai Lokok Reak	'7.71	'0.68	'8	'3	'6.2	'4.9	'0.154	'5400
Sungai Lokok Reak	'7.88	'0.6	'23	'2.5	'6.55	'0.5	'0.142	'2200
Sungai Mujur	'8.5	'1.2	'12	'64	'7.29	'2.3	'0.18	'13000
Sungai Mujur	'8.2	'6.86	'26	'38	'4.3	'2.3	'0.4	'9000
Sungai Mujur	'8.6	'3	'16	'8	'3.3	'2.3	'0.4	'7000
Sungai Mujur	'8.2	'0.5	'8	'22	'7.65	'2.3	'0.07	'70000
Sungai Mujur	'8	'2.49	'30.2	'19	'3.49	'2.3	'0.29	'4500
Sungai Mujur	'7.9	'5.1	'27	'30	'2.2	'2.3	'0.2	'4000
Sungai Mujur	'8	'0.3	'6	'188	'7.64	'2.3	'0.11	'43000
Sungai Mujur	'7.9	'1.45	'26	'20	'2.7	'2.3	'0.7	'4500
Sungai Mujur	'7.7	'7.2	'38	'24	'3.2	'2.3	'0.6	'3000
Sungai Babak	'8.2	'3.4	'19	'132	'7.67	'2.3	'0.16	'13000
Sungai Babak	'8.2	'1.72	'34	'40	'5.61	'2.3	'0.33	'4500
Sungai Babak	'8.1	'5	'28	'20	'3.2	'2.3	'0.4	'3000
Sungai Babak	'8	'0.4	'6	'76	'7.65	'2.3	'0.11	'110000
Sungai Babak	'8.2	'6.16	'20.6	'11	'4.44	'2.3	'0.4	'3000
Sungai Babak	'8	'5	'27	'8	'3	'2.3	'0.3	'3000
Sungai Babak	'8.2	'0.9	'12	'314	'7.78	'2.3	'0.19	'13000
Sungai Babak	'8	'3.08	'28	'22	'6.6	'2.3	'0.09	'4500

NAMA SUNGAI	NILAI PEMANTAUAN							
	PH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO (mg/L)	TOTAL PHOSPHAT ^{mg/L}	FECAL COLIFORM ^{MPN/100 mL}
	(Potential Hydrogen)	(Biological Oxygen Demand)	(Chemical Oxygen Demand)	(Total Suspended Solid)	(Dissolved Oxygen)	(Nitrat)		
Sungai Babak	'8	'6.8	'30	'4	'5	'2.3	'0.2	'4000
	'8.75	'1.54	'12	'8.6	'6.6	'0.5	'0.071	'1700
	'7.25	'0.64	'10	'6.27	'7.1	'0.5	'0.065	'390
	'6.47	'1.79	'24	'7.6	'6.8	'0.5	'0.11	'5400
	'8	'0.38	'26	'2.5	'7.04	'9.5	'0.036	'110
	'7.59	'0.19	'9	'2.5	'5.4	'0.5	'0.047	'140
Sungai Bangkat	'7.9	'0.39	'8	'2.9	'7.01	-	'0.04	'130
DAS Belimbing	'7.83	'3.64	'56	'11.5	'6.6	'1.416	'0.496	'9.6
Sungai Leneng	'8.1	'0.8	'8	'10	'7.22	'2.3	'0.16	'2000
Sungai Leneng	'8.2	'0.8	'10	'100	'7.2	'2.3	'0.22	'600
Sungai Srigangga	'8.2	'5	'19	'84	'8.04	'2.3	'0.16	'2000
Sungai Raba	'7.68	'2.21	'3	'33.5	'5.9	'0.5	'0.054	'16000
Sungai Raba	'7.66	'1.5	'3	'19	'6.5	'0.5	'0.092	'3500
Sungai Silo	'7.97	'2.06	'21	'71	'6	'0.5	'0.426	'92000
Sungai Silo	'7.89	'3.58	'5	'78	'5.4	'0.5	'0.245	'160000

NAMA SUNGAI	NILAI PEMANTAUAN							
	PH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO (mg/L)	TOTAL PHOSPHAT ^{mg/L}	FECAL COLIFORM ^{MPN/100 mL}
	(Potential Hydrogen)	(Biological Oxygen Demand)	(Chemical Oxygen Demand)	(Total Suspended Solid)	(Dissolved Oxygen)	(Nitrat)		
Sungai Pela Parado	'7.88	'2.14	'124	'10	'3.85	'6.202	'0.01	'1600
Sungai Pela Parado	'7.1	'10.4	'974	'10	'8.42	'1.7	'0.77	'1600
Sungai Pela Parado	'7.78	'2.29	'3	'10	'3.38	'6.645	'1.49	'1600
Sungai Pela Parado	'7.2	'14.72	'1500	'10	'8.85	'2.6	'0.81	'1600
Sungai Pela Parado	'7.95	'2.65	'11.8	'10	'4.19	'6.645	'0.39	'1600
Sungai Pela Parado	'7.3	'14.88	'1500	'10	'9.64	'1.2	'2.5	'1600
Sungai Leneng	'7.7	'0.5	'6	'48	'6.8	'2.3	'0.06	'500
Sungai Srigangga	'8.2	'0.5	'8	'124	'7.97	'2.3	'0.07	'600
Sungai Raba	'8.01	'2.6	'3	'25	'6	'0.5	'0.101	'3500
Sungai Silo	'7.59	'3.72	'7	'81	'4.4	'0.5	'0.225	'160000
Sungai Daha	'7.73	'0.83	'3	'2.5	'6.2	'0.5	'0.119	'35000

NAMA SUNGAI	NILAI PEMANTAUAN							
	PH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO (mg/L)	TOTAL PHOSPHAT ^{mg/L}	FECAL COLIFORM ^{MPN/100 mL}
	(Potential Hydrogen)	(Biological Oxygen Demand)	(Chemical Oxygen Demand)	(Total Suspended Solid)	(Dissolved Oxygen)	(Nitrat)		
Sungai Daha	'8.15	'1.25	'3	'3	'6.3	'0.5	'0.043	'220
Sungai Daha	'8.52	'1.07	'3	'2.5	'6	'0.5	'0.076	'92000

Lampiran 3 Data Status Mutu Air Per Sampel Kualitas Air Sungai

NO	Alamat	Sungai	STATUS MUTU (KELAS 2)
1	Sungai Babak, Babak Hilir, Desa Bagu	Sungai Babak	2.87 CEMAR RINGAN
2	Sungai Babak, Babak Tengah, Desa Pancor Dao	Sungai Babak	2.88 CEMAR RINGAN
3	Sungai Babak, Babak Hulu, Desa Aik Berik	Sungai Babak	2.43 CEMAR RINGAN
4	Sungai Mujur, Mujur Hilir, Desa Bangket Parak	Sungai Mujur	2.44 CEMAR RINGAN
5	Sungai Mujur, Mujur Tengah, Desa Mujur	Sungai Mujur	2.87 CEMAR RINGAN
6	Sungai Mujur, Mujur Hulu, Desa Selebung	Sungai Mujur	3.90 CEMAR RINGAN
7	Sungai Leneng, Sungai Leneng Hilir	Sungai Leneng	2.88 CEMAR RINGAN
8	Sungai Leneng, Sungai Leneng Tengah	Sungai Leneng	2.67 CEMAR RINGAN
9	Sungai Leneng, Sungai Leneng Hulu	Sungai Leneng	2.43 CEMAR RINGAN
10	Sungai Srigangga, Sungai Srigangga Hilir	Sungai Srigangga	2.87 CEMAR RINGAN
11	Sungai Srigangga, Sungai Srigangga Tengah	Sungai Srigangga	3.40 CEMAR RINGAN
12	Sungai Srigangga, Sungai Srigangga Hulu	Sungai Srigangga	2.44 CEMAR RINGAN
13	Sungai Daha, Sungai Daha Hilir	Sungai Daha	1.66 CEMAR RINGAN
14	Sungai Daha, Sungai Daha Tengah	Sungai Daha	3.32 CEMAR RINGAN
15	Sungai Daha, Sungai Daha Hulu,	Sungai Daha	2.50 CEMAR RINGAN
16	Sungai Raba, Sungai Raba Baka Hilir	Sungai Raba	2.66 CEMAR RINGAN
17	Sungai Raba, Sungai Raba Baka Tengah	Sungai Raba	3.32 CEMAR RINGAN
18	Sungai Raba, Sungai Raba Baka Hulu	Sungai Raba	4.99 CEMAR RINGAN
19	Sungai Silo, Sungai Silo Hilir	Sungai Silo	4.99 CEMAR RINGAN
20	Sungai Silo, Sungai Silo Tengah	Sungai Silo	5.00 CEMAR RINGAN

NO	Alamat	Sungai	STATUS MUTU (KELAS 2)
21	Sungai Silo, Sungai Silo Hulu	Sungai Silo	4.99 CEMAR RINGAN
22	Sungai Tojang, Sungai Tojang Hilir 1	Sungai Tojang	3.25 CEMAR RINGAN
23	Sungai Tojang, Sungai Tojang Tengah 1	Sungai Tojang	3.26 CEMAR RINGAN
24	Sungai Tojang, Sungai Tojang Hulu 1	Sungai Tojang	2.61 CEMAR RINGAN
25	DAS Belimbing, DAS Belimbing Hilir	DAS Belimbing	2.61 CEMAR RINGAN
26	DAS Belimbing, DAS Belimbing Tengah	DAS Belimbing	2.31 CEMAR RINGAN
27	DAS Belimbing, DAS Belimbing Hulu	DAS Belimbing	1.93 CEMAR RINGAN
28	Sungai Segara, Segara tengah	Sungai Segara	0.87 MEMENUHI
29	Sungai Segara, Segara Hilir	Sungai Segara	5.01 CEMAR SEDANG
30	Sungai Segara Tengah 2, Desa Bentek	Sungai Segara	0.86 MEMENUHI
31	Sungai Segara, Segara Hulu	Sungai Segara	0.52 MEMENUHI
32	Sungai Sokong, Sokong Hilir	Sungai Sokong	4.15 CEMAR RINGAN
33	Sungai Sokong Tengah 2, Desa Sokong	Sungai Sokong	4.98 CEMAR RINGAN
34	Sungai Sokong, Sokong Tengah	Sungai Sokong	3.32 CEMAR RINGAN
35	Sungai Sokong, Sokong Hulu	Sungai Sokong	0.86 MEMENUHI
36	Sungai Lokok Reak, Sungai Lokok Reak Hilir	Sungai Lokok Reak	2.65 CEMAR RINGAN
37	Sungai Lokok Reak Tengah 2, Desa Senaru	Sungai Lokok Reak	1.93 CEMAR RINGAN
38	Sungai Lokok Reak, Sungai Lokok Reak Tengah	Sungai Lokok Reak	2.07 CEMAR RINGAN
39	Sungai Lokok Reak, Sungai Lokok Reak Hulu	Sungai Lokok Reak	0.91 MEMENUHI
40	Sungai Berang, Sungai Berang Rea 1	Sungai Berang	2.15 CEMAR RINGAN
41	Sungai Tongo Loka, Sungai Tongo Loka Hilir		0.26

NO	Alamat	Sungai	STATUS MUTU (KELAS 2)
			MEMENUHI
42	Sungai Sejong, Sungai Sejong 2	Sungai Sejong	1.53 CEMAR RINGAN
43	Sungai Sejong, Sungai Sejong 1	Sungai Sejong	2.64 CEMAR RINGAN
44	Sungai Sekong, Sungai Sekong 2	Sungai Sekong	0.16 MEMENUHI
45	Sungai Sekong, Sungai Sekong 1	Sungai Sekong	1.11 CEMAR RINGAN
46	Sungai Jereweh, Sungai Jereweh 3	Sungai Jereweh	0.49 MEMENUHI
47	Sungai Jereweh, Sungai Jereweh 2	Sungai Jereweh	0.20 MEMENUHI
48	Sungai Jereweh, Sungai Jereweh 1	Sungai Jereweh	0.15 MEMENUHI
49	Sungai Berang, Sungai Berang Ene 3	Sungai Berang	4.12 CEMAR RINGAN
50	Sungai Berang, Sungai Berang Ene 2	Sungai Berang	2.64 CEMAR RINGAN
51	Sungai Berang, Sungai Berang Ene 1	Sungai Berang	1.18 CEMAR RINGAN
52	Sungai Tiu, Sungai Tiu Pesirak 2	Sungai Tiu	0.46 MEMENUHI
53	Sungai Tiu, Sungai Tiu Pesirak 1	Sungai Tiu	3.30 CEMAR RINGAN
54	Sungai Seteluk, Sungai Seteluk 4	Sungai Seteluk	3.44 CEMAR RINGAN
55	Sungai Seteluk, Sungai Seteluk 3	Sungai Seteluk	2.79 CEMAR RINGAN
56	Sungai Seteluk, Sungai Seteluk 2	Sungai Seteluk	3.08 CEMAR RINGAN
57	Sungai Seteluk, Sungai Seteluk 1	Sungai Seteluk	0.50 MEMENUHI
58	Sungai Berang, Sungai Berang Rea 3	Sungai Berang	4.97 CEMAR RINGAN
59	Sungai Berang, Sungai Berang Rea 2	Sungai Berang	2.65 CEMAR RINGAN
60	Sungai Bangkat, Sungai Bangkat Monteh 2	Sungai Bangkat	0.86 MEMENUHI
61	Sungai Lamuntet, Sungai Lamuntet 2	Sungai Lamuntet	2.64 CEMAR RINGAN

NO	Alamat	Sungai	STATUS MUTU (KELAS 2)
62	Sungai Lamuntet, Sungai Lamuntet 1	Sungai Lamuntet	1.53 CEMAR RINGAN
63	Sungai Babak, Babak Hilir, Desa Bagu	Sungai Babak	3.04 CEMAR RINGAN
64	Sungai Babak, Babak Tengah, Desa Pancor Dao	Sungai Babak	2.44 CEMAR RINGAN
65	Sungai Babak, Babak Hulu, Desa Aik Berik	Sungai Babak	3.05 CEMAR RINGAN
66	Sungai Mujur, Mujur Hilir, Desa Bangket Parak	Sungai Mujur	3.05 CEMAR RINGAN
67	Sungai Mujur, Mujur Tengah, Desa Mujur	Sungai Mujur	3.05 CEMAR RINGAN
68	Sungai Mujur, Mujur Hulu, Desa Selebung	Sungai Mujur	4.13 CEMAR RINGAN
69	Sungai Leneng, Sungai Leneng Hilir	Sungai Leneng	3.06 CEMAR RINGAN
70	Sungai Leneng, Sungai Leneng Tengah	Sungai Leneng	2.47 CEMAR RINGAN
71	Sungai Leneng, Sungai Leneng Hulu	Sungai Leneng	3.06 CEMAR RINGAN
72	Sungai Srigangga, Sungai Srigangga Hilir	Sungai Srigangga	3.05 CEMAR RINGAN
73	Sungai Srigangga, Sungai Srigangga Tengah	Sungai Srigangga	3.07 CEMAR RINGAN
74	Sungai Srigangga, Sungai Srigangga Hulu	Sungai Srigangga	2.43 CEMAR RINGAN
75	Sungai Babak, Babak Hilir, Desa Bagu	Sungai Babak	4.70 CEMAR RINGAN
76	Sungai Babak, Babak Tengah, Desa Pancor Dao	Sungai Babak	7.97 CEMAR SEDANG
77	Sungai Babak, Babak Hulu, Desa Aik Berik	Sungai Babak	4.69 CEMAR RINGAN
78	Sungai Mujur, Mujur Hilir, Desa Bangket Parak	Sungai Mujur	6.52 CEMAR SEDANG
79	Sungai Mujur, Mujur Tengah, Desa Mujur	Sungai Mujur	7.26 CEMAR SEDANG
80	Sungai Mujur, Mujur Hulu, Desa Selebung	Sungai Mujur	4.68 CEMAR RINGAN
81	Sungai Srigangga, Sungai Srigangga Tengah	Sungai Srigangga	4.82 CEMAR RINGAN
82	Sungai Sulin, Sungai Sulin Hilir, Rean Gerung	Sungai Sulin	1.48

NO	Alamat	Sungai	STATUS MUTU (KELAS 2)
			CEMAR RINGAN
83	Sungai Sulin, Sungai Sulin Tengah, Desa Karang Makam Kuripan	Sungai Sulin	3.31 CEMAR RINGAN
84	Sungai Sulin, Sungai Sulin Hulu, Jembatan Bil Kuripan Desa Kuripan Induk	Sungai Sulin	1.42 CEMAR RINGAN
85	Sungai Remeneng, Remeneng Hilir	Sungai Remeneng	4.13 CEMAR RINGAN
86	Sungai Remeneng, Remeneng Tengah	Sungai Remeneng	1.67 CEMAR RINGAN
87	Sungai Remeneng, Remeneng Hulu	Sungai Remeneng	0.53 MEMENUHI
88	Sungai Jangkok, Jangkok Hulu	Sungai Jangkok	2.64 CEMAR RINGAN
89	Sungai Jangkok, Jangkok Tengah	Sungai Jangkok	2.65 CEMAR RINGAN
90	Sungai Jangkok, Jangkok Hilir	Sungai Jangkok	4.98 CEMAR RINGAN
91	Sungai Jangkok, Sungai Jangkok Hilir	Sungai Jangkok	8.53 CEMAR SEDANG
92	Sungai Jangkok, Sungai Jangkok Tengah	Sungai Jangkok	8.53 CEMAR SEDANG
93	Sungai Jangkok, Sungai Jangkok Hulu	Sungai Jangkok	8.53 CEMAR SEDANG
94	Sungai Jatibaru, Sungai Jatibaru Timur	Sungai Jatibaru	2.53 CEMAR RINGAN
95	Sungai Sori, Sungai Sori Padolo Hulu 2	Sungai Sori	2.64 CEMAR RINGAN
96	Sungai Rabasalo, Sungai Rabasalo	Sungai Rabasalo	2.50 CEMAR RINGAN
97	Sungai Jatibaru, Sungai Jatibaru Barat	Sungai Jatibaru	3.31 CEMAR RINGAN
98	Sungai Ranggo, Sungai Ranggo	Sungai Ranggo	5.01 CEMAR SEDANG
99	Sungai Melayu, Sungai Melayu	Sungai Melayu	5.03 CEMAR SEDANG
100	Sungai Padolo, Sungai Padolo II	Sungai Padolo	2.51 CEMAR RINGAN
101	Sungai Bedi, Sungai Bedi	Sungai Bedi	2.52 CEMAR RINGAN
102	Sungai Sadia, Sungai Sadia	Sungai Sadia	5.03 CEMAR SEDANG

NO	Alamat	Sungai	STATUS MUTU (KELAS 2)
103	Sungai Sambinae, Sungai Sambinae	Sungai Sambinae	1.24 CEMAR RINGAN
104	Sungai Rabadompu, Sungai Rabadompu Barat	Sungai Rabadompu	1.65 CEMAR RINGAN
105	Sungai Oi, Sungai Oi Mbo	Sungai Oi	4.98 CEMAR RINGAN
106	MOYO, MOYO Nanga Talo Moyo Hilir	Sungai Moyo	4.21 CEMAR RINGAN
107	MOYO, MOYO Moyo Mekar Moyo Hilir	Sungai Moyo	2.58 CEMAR RINGAN
108	MOYO, MOYO Sradang	Sungai Moyo	1.96 CEMAR RINGAN
109	MOYO, MOYO Dusun Boak Dalam Unter Rewes	Sungai Moyo	0.65 MEMENUHI
110	MOYO, MOYO Dusun Maman Moyo Hulu	Sungai Moyo	0.72 MEMENUHI
111	DAS Sumbawa, DAS Sumbawa	DAS Sumbawa	4.99 CEMAR RINGAN
112	DAS Sumbawa, DAS Sumbawa	DAS Sumbawa	4.99 CEMAR RINGAN
113	DAS Sumbawa, DAS Sumbawa	DAS Sumbawa	1.05 CEMAR RINGAN
114	DAS Rhee, DAS Rhee	DAS Rhee	2.51 CEMAR RINGAN
115	DAS Rhee, DAS Rhee	DAS Rhee	3.32 CEMAR RINGAN
116	DAS Rhee, DAS Rhee	DAS Rhee	4.99 CEMAR RINGAN
117	DAS Bera, DAS Bera	DAS Bera	0.72 MEMENUHI
118	DAS Bera, DAS Bera	DAS Bera	2.66 CEMAR RINGAN
119	DAS Bera, DAS Bera	DAS Bera	2.53 CEMAR RINGAN
120	Sungai Jangkok, Sungai Jangkok Hilir	Sungai Jangkok	4.99 CEMAR RINGAN
121	Sungai Jangkok, Sungai Jangkok Tengah	Sungai Jangkok	4.14 CEMAR RINGAN
122	Sungai Jangkok, Sungai Jangkok Hulu	Sungai Jangkok	4.14 CEMAR RINGAN
123	Sungai Segara, Sungai Segara Tengah 2	Sungai Segara	6.06

NO	Alamat	Sungai	STATUS MUTU (KELAS 2)
			CEMAR SEDANG
124	Sungai Segara, Sungai Segara Tengah 1	Sungai Segara	2.55 CEMAR RINGAN
125	Sungai Segara, Sungai Segara Hulu 2	Sungai Segara	6.05 CEMAR SEDANG
126	Sungai Segara, Sungai Segara Hulu 1	Sungai Segara	2.06 CEMAR RINGAN
127	Sungai Segara, Sungai Segara Hilir 2	Sungai Segara	6.07 CEMAR SEDANG
128	Sungai Segara, Sungai Segara Hilir 1	Sungai Segara	6.87 CEMAR SEDANG
129	Sungai Tojang, Sungai Tojang Tengah 2	Sungai Tojang	7.70 CEMAR SEDANG
130	Sungai Tojang, Sungai Tojang Tengah 1	Sungai Tojang	8.55 CEMAR SEDANG
131	Sungai Tojang, Sungai Tojang Hulu 2	Sungai Tojang	5.49 CEMAR SEDANG
132	Sungai Tojang, Sungai Tojang Hulu 1	Sungai Tojang	3.17 CEMAR RINGAN
133	Sungai Tojang, Sungai Tojang Hilir 2	Sungai Tojang	6.07 CEMAR SEDANG
134	Sungai Tojang, Sungai Tojang Hilir 1	Sungai Tojang	5.10 CEMAR SEDANG
135	Sungai Babak, Sungai Babak Tengah 2	Sungai Babak	4.42 CEMAR RINGAN
136	Sungai Babak, Sungai Babak Tengah 1	Sungai Babak	6.87 CEMAR SEDANG
137	Sungai Babak, Sungai Babak Hulu 2	Sungai Babak	5.20 CEMAR SEDANG
138	Sungai Babak, Sungai Babak Hulu 1	Sungai Babak	5.61 CEMAR SEDANG
139	Sungai Babak, Sungai Babak hilir 2	Sungai Babak	7.70 CEMAR SEDANG
140	Sungai Babak, Sungai Babak Hilir 1	Sungai Babak	2.52 CEMAR RINGAN
141	Sungai Dodokan, Sungai Dodokan Tengah 2	Sungai Dodokan	4.99 CEMAR RINGAN
142	Sungai Dodokan, Sungai Dodokan Tengah 1	Sungai Dodokan	4.14 CEMAR RINGAN
143	Sungai Dodokan, Sungai Dodokan Hulu 2	Sungai Dodokan	0.76 MEMENUHI

NO	Alamat	Sungai	STATUS MUTU (KELAS 2)
144	Sungai Dodokan, Sungai Dodokan Hulu 1	Sungai Dodokan	0.60 MEMENUHI
145	Sungai Dodokan, Sungai Dodokan Hilir 2	Sungai Dodokan	4.99 CEMAR RINGAN
146	Sungai Dodokan, Sungai Dodokan Hilir 1	Sungai Dodokan	2.96 CEMAR RINGAN
147	Sungai Brang, Sungai Brang Rea Hilir 2	Sungai Brang	1.12 CEMAR RINGAN
148	Sungai Brang, Sungai Brang Rea Hilir 1	Sungai Brang	2.64 CEMAR RINGAN
149	Sungai Brang, Sungai Brang Rea Tengah 2	Sungai Brang	3.31 CEMAR RINGAN
150	Sungai Brang, Sungai Brang Rea Tengah 1	Sungai Brang	3.31 CEMAR RINGAN
151	Sungai Brang, Sungai Brang Rea Hulu 2	Sungai Brang	4.13 CEMAR RINGAN
152	Sungai Brang, Sungai Brang Rea Hulu 1	Sungai Brang	0.38 MEMENUHI
153	Sungai Sori, Sungai Sori Padolo Hilir 2	Sungai Sori	6.86 CEMAR SEDANG
154	Sungai Sori, Sungai Sori Padolo Hilir 1	Sungai Sori	5.21 CEMAR SEDANG
155	Sungai Sori, Sungai Sori Padolo Tengah 2	Sungai Sori	6.87 CEMAR SEDANG
156	Sungai Sori, Sungai Sori Padolo Tengah 1	Sungai Sori	5.00 CEMAR RINGAN
157	Sungai Sori, Sungai Sori Padolo Hulu 2	Sungai Sori	5.21 CEMAR SEDANG
158	Sungai Sori, Sungai Sori Padolo Hulu 1	Sungai Sori	5.61 CEMAR SEDANG
159	Sungai Brang Biji, Sungai Brang Biji Hilir 2	Sungai Brang Biji	5.62 CEMAR SEDANG
160	Sungai Brang Biji, Sungai Brang Biji Hilir 1	Sungai Brang Biji	8.54 CEMAR SEDANG
161	Sungai Brang Biji, Sungai Brang Biji Tengah 2	Sungai Brang Biji	5.21 CEMAR SEDANG
162	Sungai Brang Biji, Sungai Brang Biji Tengah 1	Sungai Brang Biji	2.51 CEMAR RINGAN
163	Sungai Brang Biji, Sungai Brang Biji Hulu 2	Sungai Brang Biji	5.09 CEMAR SEDANG
164	Sungai Brang Biji, Sungai Brang Biji Hulu 1	Sungai Brang Biji	3.31

NO	Alamat	Sungai	STATUS MUTU (KELAS 2)
			CEMAR RINGAN
165	Sungai Rabalaju, Sungai Rabalaju Hilir 2	Sungai Rabalaju	6.20 CEMAR SEDANG
166	Sungai Rabalaju, Sungai Rabalaju Hilir 1	Sungai Rabalaju	4.79 CEMAR RINGAN
167	Sungai Rabalaju, Sungai Rabalaju Tengah 2	Sungai Rabalaju	7.69 CEMAR SEDANG
168	Sungai Rabalaju, Sungai Rabalaju Tengah 1	Sungai Rabalaju	6.07 CEMAR SEDANG
169	Sungai Rabalaju, Sungai Rabalaju Hulu 2	Sungai Rabalaju	3.31 CEMAR RINGAN
170	Sungai Rabalaju, Sungai Rabalaju Hulu 1	Sungai Rabalaju	3.71 CEMAR RINGAN
171	Sungai Sori, Sungai Sori Jangka Hilir 2	Sungai Sori	6.21 CEMAR SEDANG
172	Sungai Sori, Sungai Sori Jangka Hilir 1	Sungai Sori	6.88 CEMAR SEDANG
173	Sungai Sori, Sungai Sori Jangka Tengah 2	Sungai Sori	5.22 CEMAR SEDANG
174	Sungai Sori, Sungai Sori Jangka Tengah 1	Sungai Sori	7.68 CEMAR SEDANG
175	Sungai Sori, Sungai Sori Jangka Hulu 2	Sungai Sori	8.54 CEMAR SEDANG
176	Sungai Sori, Sungai Sori Jangka Hulu 1	Sungai Sori	3.71 CEMAR RINGAN
177	Sungai Ancar, Sungai Ancar Hulu 1	Sungai Ancar	5.51 CEMAR SEDANG
178	Sungai Ancar, Sungai Ancar Hulu 2	Sungai Ancar	7.70 CEMAR SEDANG
179	Sungai Ancar, Sungai Ancar Tengah 1	Sungai Ancar	7.70 CEMAR SEDANG
180	Sungai Ancar, Sungai Ancar Tengah 2	Sungai Ancar	8.55 CEMAR SEDANG
181	Sungai Ancar, Sungai Ancar Hilir 1	Sungai Ancar	8.56 CEMAR SEDANG
182	Sungai Ancar, Sungai Ancar Hilir 2	Sungai Ancar	6.90 CEMAR SEDANG
183	MOYO, MOYO Nanga Talo Moyo Hilir	Sungai Moyo	4.82 CEMAR RINGAN
184	MOYO, MOYO Moyo Mekar Moyo Hilir	Sungai Moyo	5.65 CEMAR SEDANG

NO	Alamat	Sungai	STATUS MUTU (KELAS 2)
185	MOYO, MOYO Sradang	Sungai Moyo	4.44 CEMAR RINGAN
186	MOYO, MOYO Dusun Boak Dalam Unter Rewes	Sungai Moyo	3.92 CEMAR RINGAN
187	MOYO, MOYO Dusun Maman Moyo Hulu	Sungai Moyo	2.32 CEMAR RINGAN
188	Sungai Sulin, Sungai Sulin Hilir, Rean Gerung	Sungai Sulin	7.68 CEMAR SEDANG
189	Sungai Sulin, Sungai Sulin Tengah (Desa Karang Makam Kuripan)	Sungai Sulin	7.68 CEMAR SEDANG
190	Sungai Sulin, Sungai Sulin Hulu, Jembatan Bil Kuripan Desa Kuripan Induk	Sungai Sulin	6.86 CEMAR SEDANG
191	Sungai Remeneng, Remeneng Hilir	Sungai Remeneng	6.85 CEMAR SEDANG
192	Sungai Remeneng, Remeneng Tengah	Sungai Remeneng	7.66 CEMAR SEDANG
193	Sungai Remeneng, Remeneng Hulu	Sungai Remeneng	7.67 CEMAR SEDANG
194	Sungai Jangkok, Jangkok Hilir	Sungai Jangkok	7.67 CEMAR SEDANG
195	Sungai Jangkok, Jangkok Tengah	Sungai Jangkok	6.18 CEMAR SEDANG
196	Sungai Jangkok, Jangkok Hulu	Sungai Jangkok	8.52 CEMAR SEDANG
197	Sungai Jangkok, Sungai Jangkok Hilir	Sungai Jangkok	4.21 CEMAR RINGAN
198	Sungai Jangkok, Sungai Jangkok Tengah	Sungai Jangkok	4.20 CEMAR RINGAN
199	Sungai Jangkok, Sungai Jangkok Hulu	Sungai Jangkok	1.64 CEMAR RINGAN
200	Sungai Jangkok, Sungai Jangkok Hilir	Sungai Jangkok	4.22 CEMAR RINGAN
201	Sungai Jangkok, Sungai Jangkok Tengah	Sungai Jangkok	4.22 CEMAR RINGAN
202	Sungai Jangkok, Sungai Jangkok Hulu	Sungai Jangkok	4.21 CEMAR RINGAN
203	Sungai Sokong, Sokong Hilir	Sungai Sokong	5.00 CEMAR RINGAN
204	Sungai Sokong Tengah 2, Desa Sokong	Sungai Sokong	0.53 MEMENUHI
205	Sungai Sokong, Sokong Tengah	Sungai Sokong	2.51

NO	Alamat	Sungai	STATUS MUTU (KELAS 2)
			CEMAR RINGAN
206	Sungai Sokong, Sokong Hulu	Sungai Sokong	3.32 CEMAR RINGAN
207	Sungai Segara, Segara Hilir	Sungai Segara	4.99 CEMAR RINGAN
208	Sungai Segara Tengah 2, Desa Bentek	Sungai Segara	3.31 CEMAR RINGAN
209	Sungai Segara, Sungai Segara Tengah 1	Sungai Segara	4.99 CEMAR RINGAN
210	Sungai Segara, Segara Hulu	Sungai Segara	0.44 MEMENUHI
211	Sungai Lokok Reak, Sungai Lokok Reak Hilir	Sungai Lokok Reak	4.99 CEMAR RINGAN
212	Sungai Lokok Reak Tengah 2, Desa Senaru	Sungai Lokok Reak	7.19 CEMAR SEDANG
213	Sungai Lokok Reak, Sungai Lokok Reak Tengah	Sungai Lokok Reak	3.32 CEMAR RINGAN
214	Sungai Lokok Reak, Sungai Lokok Reak Hulu	Sungai Lokok Reak	0.68 MEMENUHI
215	Sungai Tongo Loka, Sungai Tongo Loka Hilir		0.77 MEMENUHI
216	Sungai Seteluk, Sungai Seteluk 4	Sungai Seteluk	1.86 CEMAR RINGAN
217	Sungai Seteluk, Sungai Seteluk 3	Sungai Seteluk	7.67 CEMAR SEDANG
218	Sungai Seteluk, Sungai Seteluk 2	Sungai Seteluk	8.51 CEMAR SEDANG
219	Sungai Seteluk, Sungai Seteluk 1	Sungai Seteluk	4.77 CEMAR RINGAN
220	Sungai Berang, Sungai Berang Ene 3	Sungai Berang	8.51 CEMAR SEDANG
221	Sungai Berang, Sungai Berang Ene 2	Sungai Berang	3.89 CEMAR RINGAN
222	Sungai Berang, Sungai Berang Ene 1	Sungai Berang	1.18 CEMAR RINGAN
223	Sungai Tiu, Sungai Tiu Pesirak 2	Sungai Tiu	2.24 CEMAR RINGAN
224	Sungai Tiu, Sungai Tiu Pesirak 1	Sungai Tiu	0.63 MEMENUHI
225	Sungai Jereweh, Sungai Jereweh 3	Sungai Jereweh	8.52 CEMAR SEDANG

NO	Alamat	Sungai	STATUS MUTU (KELAS 2)
226	Sungai Jereweh, Sungai Jereweh 1	Sungai Jereweh	8.51 CEMAR SEDANG
227	Sungai Jereweh, Sungai Jereweh 2	Sungai Jereweh	6.18 CEMAR SEDANG
228	Sungai Sekongkang, Sungai Sekongkang 1	Sungai Sekongkang	3.30 CEMAR RINGAN
229	Sungai Sekongkang, Sungai Sekongkang 2	Sungai Sekongkang	2.64 CEMAR RINGAN
230	Sungai Sejong, Sungai Sejong 1	Sungai Sejong	1.93 CEMAR RINGAN
231	Sungai Sejong, Sungai Sejong 2	Sungai Sejong	6.85 CEMAR SEDANG
232	Sungai Berang, Sungai Berang Rea 3	Sungai Berang	2.64 CEMAR RINGAN
233	Sungai Berang, Sungai Berang Rea 2	Sungai Berang	2.80 CEMAR RINGAN
234	Sungai Berang, Sungai Berang Rea 1	Sungai Berang	5.46 CEMAR SEDANG
235	Sungai Lamuntet, Sungai Lamuntet 1	Sungai Lamuntet	0.42 MEMENUHI
236	Sungai Lamuntet, Sungai Lamuntet 2	Sungai Lamuntet	5.60 CEMAR SEDANG
237	Sungai Bangkat, Sungai Bangkat Monteh 2	Sungai Bangkat	1.58 CEMAR RINGAN
238	Sungai Bangkat, Sungai Bangkat Monteh 1	Sungai Bangkat	2.64 CEMAR RINGAN
239	DAS Sumbawa, DAS Sumbawa	DAS Sumbawa	6.07 CEMAR SEDANG
240	DAS Bera, DAS Bera	DAS Bera	3.72 CEMAR RINGAN
241	DAS Bera, DAS Bera	DAS Bera	6.87 CEMAR SEDANG
242	DAS Bera, DAS Bera	DAS Bera	8.54 CEMAR SEDANG
243	DAS Sumbawa, DAS Sumbawa	DAS Sumbawa	3.72 CEMAR RINGAN
244	DAS Sumbawa, DAS Sumbawa	DAS Sumbawa	0.56 MEMENUHI
245	DAS Rhee, DAS Rhee	DAS Rhee	1.93 CEMAR RINGAN

NO	Alamat	Sungai	STATUS MUTU (KELAS 2)
246	DAS Rhee, DAS Rhee	DAS Rhee	5.21 CEMAR SEDANG
247	DAS Rhee, DAS Rhee	DAS Rhee	1.42 CEMAR RINGAN
248	DAS Belimbing, DAS Belimbing Hilir	DAS Belimbing	4.21 CEMAR RINGAN
249	DAS Belimbing, DAS Belimbing Hulu	DAS Belimbing	1.83 CEMAR RINGAN
250	Sub DAS Rumpang, Sub DAS Rumpang Hilir	DAS Rumpang	4.22 CEMAR RINGAN
251	Sub DAS Rumpang, Sub DAS Rumpang Tengah	DAS Rumpang	4.21 CEMAR RINGAN
252	Sub DAS Rumpang, Sub DAS Rumpang Hulu		2.96 CEMAR RINGAN
253	Sungai Sambinae, Sungai Sambinae	Sungai Sambinae	5.61 CEMAR SEDANG
254	Sungai Sadia, Sungai Sadia	Sungai Sadia	5.60 CEMAR SEDANG
255	Sungai Ranggo, Sungai Ranggo	Sungai Ranggo	8.54 CEMAR SEDANG
256	Sungai Rabasalo, Sungai Rabasalo	Sungai Rabasalo	6.88 CEMAR SEDANG
257	Sungai Rabadompu, Sungai Rabadompu Barat	Sungai Rabadompu	5.47 CEMAR SEDANG
258	Sungai Padolo, Sungai Padolo II	Sungai Padolo	6.85 CEMAR SEDANG
259	Sungai Oi, Sungai Oi Mbo	Sungai Oi	5.07 CEMAR SEDANG
260	Sungai Melayu, Sungai Melayu	Sungai Melayu	8.53 CEMAR SEDANG
261	Sungai Sori, Sungai Sori Padolo Hulu 2	Sungai Sori	2.64 CEMAR RINGAN
262	Sungai Jatibaru, Sungai Jatibaru Timur	Sungai Jatibaru	8.51 CEMAR SEDANG
263	Sungai Jatibaru, Sungai Jatibaru Barat	Sungai Jatibaru	6.86 CEMAR SEDANG
264	Sungai Bedi, Sungai Bedi	Sungai Bedi	5.61 CEMAR SEDANG

Lampiran 4 Data Hasil Uji Parameter Sampel Kualitas Udara

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI	NILAI PEMANTAUAN		
			NO ₂ (Åµg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (Åµg/m ³) (Sulfur Dioksida)	PM _{2.5} (Åµg/m ³) (Partikulat)
1	Transportasi	Polsek Rasanae Barat, Jl. Sultan Muhammad Salahuddin, Kel. Dara	'7.98	'6.55	'11.29
2	Transportasi	Polsek Rasanae Barat, Jl. Sultan Muhammad Salahuddin, Kel. Dara	'5.92	'8.12	'11.29
3	Industri / Agro Industri	CV. Bintang Jaya, Dusun Rasanggano, Desa Mangge Asi	'10.86	'6.1	'11.54
4	Industri / Agro Industri	CV. Bintang Jaya, Dusun Rasanggano, Desa Mangge Asi	'9.79	'7.3	'11.54
5	Transportasi	Jl. By-Pass-BIL,Simpang 5, Monumen Patung Sapi, Gerung	'6.98	'5.52	'13.91
6	Transportasi	Jl. By-Pass-BIL,Simpang 5, Monumen Patung Sapi, Gerung	'7.13	'4.63	'13.91
7	Industri	Komplek Pelabuhan Lembar (Kantor Syahbandar Lembar)	'6.35	'11.38	'13.91
8	Industri	Komplek Pelabuhan Lembar (Kantor Syahbandar Lembar)	'7.25	'9.88	'13.91
9	Pemukiman	Jl. Jenderal Sudirman BTN Pemda Gerung	'3.12	'7.38	'13.91
10	Pemukiman	Jl. Jenderal Sudirman BTN Pemda Gerung	'3.64	'4.72	'13.91
11	Perkantoran	Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang, Gerung . Kantor DLH Kab. Lombok Barat	'4.84	'5.38	'13.91
12	Perkantoran	Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang, Gerung . Kantor DLH Kab. Lombok Barat	'4.74	'5.15	'13.91
13	Transportasi	Jl. Gajah Mada No. 37 Leneng PrayaKab. Loteng - NTB	'8.11	'8.58	'13.35
14	Transportasi	Jl. Gajah Mada No. 37 Leneng PrayaKab. Loteng - NTB	'5.56	'6.36	'13.35
15	Industri	Industri Genteng Bun Duduk Jl TGH Ibrahim Embung Duduk Ds Labulia, Jonggat Ubung Loleng	'6.89	'3.72	'13.35
16	Industri	Industri Genteng Bun Duduk Jl TGH Ibrahim Embung Duduk Ds Labulia, Jonggat Ubung Loleng	'4.04	'1.43	'13.35
17	Pemukiman	BTN Pemda Blok B No 6 Bonter Bunut Baik praya kab Loteng NTB	'2.5	'6.62	'13.35
18	Pemukiman	BTN Pemda Blok B No 6 Bonter Bunut Baik praya kab Loteng NTB	'2.5	'5.96	'13.35

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI	NILAI PEMANTAUAN		
			NO ₂ (Åµg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (Åµg/m ³) (Sulfur Dioksida)	PM _{2.5} (Åµg/m ³) (Partikulat)
19	Perkantoran	DLH LotengJl. Mamik Ocet Thalib Leneng Praya, Loteng	'7.2	'1.43	'13.35
20	Perkantoran	DLH LotengJl. Mamik Ocet Thalib Leneng Praya, Loteng	'3.79	'2.49	'13.35
21	Transportasi	SPBU Pancor	'10.93	'9.39	'12.54
22	Transportasi	SPBU Pancor	'10.41	'7.06	'12.54
23	Industri/Agro Industri	PT. Iradat AmanPringabaya	'10.24	'6.57	'12.54
24	Industri/Agro Industri	PT. Iradat AmanPringabaya	'13.57	'6.95	'12.54
25	Pemukiman	Lingkungan Kebon Talo Selong	'7.2	'4.45	'12.54
26	Pemukiman	Lingkungan Kebon Talo Selong	'6.8	'3.98	'12.54
27	Perkantoran/Komersial	Dinas LH dan Kebersihan Kab. Lotim	'13.11	'5.36	'12.54
28	Perkantoran/Komersial	Dinas LH dan Kebersihan Kab. Lotim	'13.87	'6.06	'12.54
29	Transportasi	Tugu Adipura Jl. Garuda Sumbawa Besar	'14.76	'5.88	'12.09
30	Transportasi	Tugu Adipura Jl. Garuda Sumbawa Besar	'13.47	'7.95	'12.09
31	Industri	PT. Santosa Utama Lestari Jl. Lintas Sumbawa-Bima Kec. Moyo Hilir	'9.54	'3.74	'12.09
32	Industri	PT. Santosa Utama Lestari Jl. Lintas Sumbawa-Bima Kec. Moyo Hilir	'10.46	'4.37	'12.09
33	Perkantoran/Komersial	Dinas LH Kab. Sumbawa Jl. Garuda 96 Sumbawa Besar	'9.48	'1.63	'12.09
34	Perkantoran/Komersial	Dinas LH Kab. Sumbawa Jl. Garuda 96 Sumbawa Besar	'11.03	'4.22	'12.09
35	Transportasi	Jl Soekarno-Hatta, Dompus Kompleks Pasar Dompus	'14.22	'9.2	'11.54
36	Transportasi	Jl Soekarno-Hatta, Dompus Kompleks Pasar Dompus	'12.63	'10.18	'11.54
37	Perkantoran/Komersial	Jl Beringin No 1 Dompus Kompleks Kantor Bupati	'8.65	'3.01	'11.54
38	Perkantoran/Komersial	Jl Beringin No 1 Dompus Kompleks Kantor Bupati	'8.59	'2.12	'11.54
39	Transportasi	Kantor Desa Talabiu, Jl Lintas Sumbawa Talabiu Kec Wona	'8.18	'7.33	'11.46
40	Transportasi	Kantor Desa Talabiu, Jl Lintas Sumbawa Talabiu Kec Wona	'7.25	'5.8	'11.46
41	Pemukiman	Jl Pendidikan Ruku Kec. BoloKantor Polsek Bolo	'8.73	'4.49	'11.46
42	Pemukiman	Jl Pendidikan Ruku Kec. BoloKantor Polsek Bolo	'9.13	'5.43	'11.46

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI	NILAI PEMANTAUAN		
			NO ₂ (Åµg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (Åµg/m ³) (Sulfur Dioksida)	PM _{2.5} (Åµg/m ³) (Partikulat)
43	Perkantoran/Komersial	Kantor Bupati Bima,Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kec Woha	'2.54	'6.45	'11.46
44	Perkantoran/Komersial	Kantor Bupati Bima,Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kec Woha	'2.39	'5.3	'11.46
45	Transportasi	Depan RSUD Asy-Syifa Kab Sumbawa Barat	'14.32	'7.82	'12.34
46	Transportasi	Depan RSUD Asy-Syifa Kab Sumbawa Barat	'12.98	'6.59	'12.34
47	Industri	Kantor Camat Maluk Kab. Sumbawa Barat	'11.37	'9.14	'12.34
48	Industri	Kantor Camat Maluk Kab. Sumbawa Barat	'10.68	'9.47	'12.34
49	Pemukiman	Kantor Kelurahan SampirKab. Sumbawa Barat	'5.72	'1.53	'12.34
50	Pemukiman	Kantor Kelurahan SampirKab. Sumbawa Barat	'5.88	'2.83	'12.34
51	Perkantoran	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumbawa Barat	'7.26	'4.02	'12.34
52	Perkantoran	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumbawa Barat	'5.95	'4.74	'12.34
53	Transportasi	SPBU Desa Jenggala	'5.75	'10.26	'13.32
54	Transportasi	SPBU Desa Jenggala	'2.58	'8.76	'13.32
55	Industri/Agro Industri	Kantor Desa Pemenang Barat	'6.59	'3.06	'13.32
56	Industri/Agro Industri	Kantor Desa Pemenang Barat	'3.73	'4.37	'13.32
57	Pemukiman	BTN Nusantara Sokong Tanjung	'4.12	'1.43	'13.32
58	Pemukiman	BTN Nusantara Sokong Tanjung	'2.3	'2.61	'13.32
59	Perkantoran/Komersial	Kantor Bupati Lombok Utara, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung	'0.96	'5.12	'13.32
60	Perkantoran/Komersial	Kantor Bupati Lombok Utara, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung	'0.95	'4.16	'13.32
61	Transportasi	Kantor PerkimJl. Sandubaya No. 88	'6.41	'9.55	'14.01
62	Transportasi	Kantor PerkimJl. Sandubaya No. 88	'6.74	'9.9	'14.01
63	Industri/Agro Industri	Kantor LurahJl.Swadaya No 65 Kekalik	'15.1	'16.36	'14.01
64	Industri/Agro Industri	Kantor LurahJl.Swadaya No 65 Kekalik	'17.83	'10.32	'14.01
65	Pemukiman	Jl. Gg H. Nursamin Otak Desa, Basan Agung	'5.15	'7.2	'14.01

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI	NILAI PEMANTAUAN		
			NO ₂ (Åµg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (Åµg/m ³) (Sulfur Dioksida)	PM _{2.5} (Åµg/m ³) (Partikulat)
66	Pemukiman	Jl. Gg H. Nursamin Otak Desa, Basan Agung	'6.72	'5.82	'14.01
67	Perkantoran/Komersial	Kantor Walikota Mataram, Jl. Pejanggik	'13.94	'9.86	'14.01
68	Perkantoran/Komersial	Kantor Walikota Mataram, Jl. Pejanggik	'12.12	'9	'14.01
69	Industri/Agro Industri	SMPN 6 Kota Bima	'7.33	'9.81	'11.29
70	Industri/Agro Industri	SMPN 6 Kota Bima	'9.43	'8.16	'11.29
71	Pemukiman	Kantor Lurah Sarae Jl. Mawar Utara Kel. Sarae	'9.16	'6.36	'11.29
72	Pemukiman	Kantor Lurah Sarae Jl. Mawar Utara Kel. Sarae	'7.85	'6.34	'11.29
73	Perkantoran/Komersial	Kantor Walikota Bima Jl. Soekarno Hatta	'6.27	'8.24	'11.29
74	Perkantoran/Komersial	Kantor Walikota Bima Jl. Soekarno Hatta	'10.17	'4.62	'11.29
75	Permukiman	Jl. Mujair Kelurahan Bali (Depan Kantor Kelurahan Bali)	'4.95	'7.62	'11.54
76	Permukiman	Jl. Mujair Kelurahan Bali (Depan Kantor Kelurahan Bali)	'5.5	'4.38	'11.54
77	Permukiman	Kompleks Perumahan BTN Griya Idola Dusun Griya Idola Kecamatan Labuhan Badas	'4.26	'3.64	'12.09
78	Permukiman	Kompleks Perumahan BTN Griya Idola Dusun Griya Idola Kecamatan Labuhan Badas	'3.91	'5.53	'12.09
81	Transportasi	Kantor Desa Talabiu, Jl Lintas Sumbawa Talabiu Kec Wona	'8.18	'7.33	'0
82	Transportasi	Kantor Desa Talabiu, Jl Lintas Sumbawa Talabiu Kec Wona	'7.25	'5.8	'0
83	Pemukiman	Jl Pendidikan Ruku Kec. Bolo Kantor Polsek Bolo	'8.73	'4.49	'0
84	Pemukiman	Jl Pendidikan Ruku Kec. Bolo Kantor Polsek Bolo	'9.13	'5.43	'0
85	Perkantoran/Komersial	Kantor Bupati Bima, Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kec Woha	'2.54	'6.45	'0
86	Perkantoran/Komersial	Kantor Bupati Bima, Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kec Woha	'2.39	'5.3	'0

Lampiran 5 Hasil Uji Kualitas Air Laut Provinsi NTB

NO	LOKASI	NILAI PEMANTAUAN				
		TSS (mg/L)	DO (mg/L)	MINYAK & LEMAK (mg/L)	AMONIA TOTAL (mg/L)	ORTOFOSFAT (PO4-P) (mg/L)
1	Titik Pantau 1 PT PLN (Persero) Wilayah NTB Sektor Tambora PLTU Sumbawa Barat	14,36	5,24	0,58	0,035	0,009
2	ALT4 Sebelah Utara Pulau Lombok - PT Tiara Cipta Nirwana	12	5,82	1	0,062	0,232
3	ALT2 Sebelah Utara Pulau Lombok - PT Tiara Cipta Nirwana	22,5	5,82	1	0,062	0,125
4	ALT1 Sebelah Utara Pulau Lombok - PT Tiara Cipta Nirwana	20,5	4,82	1	0,062	0,132
5	ALT3 Sebelah Utara Pulau Lombok - PT Tiara Cipta Nirwana	2,5	3,86	1	0,062	0,046
6	TP-Air Laut 4 (AL 4) - PT Pertamina Patra Niaga - Integrated Terminal Bima	22	6,9	0,28	0,05	0,1
7	TP-Air Laut 3 (AL 3) - PT Pertamina Patra Niaga -	14	6,7	0,28	0,05	0,1

NO	LOKASI	NILAI PEMANTAUAN				
		TSS (mg/L)	DO (mg/L)	MINYAK & LEMAK (mg/L)	AMONIA TOTAL (mg/L)	ORTOFOSFAT (PO4-P) (mg/L)
	Integrated Terminal Bima					
8	TP-Air Laut 2 (AL 2) - PT Pertamina Patra Niaga - Integrated Terminal Bima	16	6,9	0,28	0,05	0,1
9	TP- Air Laut 1 (AL 1) - PT Pertamina Patra Niaga - Integrated Terminal Bima	11	6,8	0,28	0,05	0,1
10	TP-Air Laut 4 (AL 4) - PT Pertamina Patra Niaga - Integrated Terminal Bima	10	5,9	0,28	0,19	0,01
11	TP-Air Laut 3 (AL 3) - PT Pertamina Patra Niaga - Integrated Terminal Bima	8	5,7	0,28	0,14	0,01
12	TP-Air Laut 2 (AL 2) - PT Pertamina Patra Niaga - Integrated Terminal Bima	10	5,6	0,28	0,09	0,01
13	TP- Air Laut 1 (AL 1) - PT Pertamina Patra Niaga - Integrated	9	5,7	0,28	0,12	0,01

NO	LOKASI	NILAI PEMANTAUAN				
		TSS (mg/L)	DO (mg/L)	MINYAK & LEMAK (mg/L)	AMONIA TOTAL (mg/L)	ORTOFOSFAT (PO4-P) (mg/L)
	Terminal Bima					
14	250 m setelah intake PLTMG - PT PLN (Persero) UP Tambora PLTMG Sumbawa	10	6,78	1	0,01	0,01
15	500 m setelah intake PLTMG - PT PLN (Persero) UP Tambora PLTMG Sumbawa	8	7,4	1	0,01	0,01
16	500 m setelah output PLTMG - PT PLN (Persero) UP Tambora PLTMG Sumbawa	8	7,4	1	0,01	0,01
17	250 m setelah output PLTMG - PT PLN (Persero) UP Tambora PLTMG Sumbawa	8	7,44	1	0,01	0,01
18	250 m setelah intake PLTMG - PT PLN (Persero) UP Tambora PLTMG Sumbawa	6,6	5,9	0,559	0,035	0,0085
19	500 m setelah intake PLTMG - PT PLN (Persero) UP Tambora	6,4	6,1	0,559	0,035	0,0085

NO	LOKASI	NILAI PEMANTAUAN				
		TSS (mg/L)	DO (mg/L)	MINYAK & LEMAK (mg/L)	AMONIA TOTAL (mg/L)	ORTOFOSFAT (PO4-P) (mg/L)
	PLTMG Sumbawa					
20	500 m setelah output PLTMG - PT PLN (Persero) UP Tambora PLTMG Sumbawa	6,6	6	0,559	0,035	0,0085
21	250 m setelah output PLTMG - PT PLN (Persero) UP Tambora PLTMG Sumbawa	6	5,9	0,559	0,035	0,0085
22	ALT4 Sebelah Utara Pulau Lombok - PT Tiara Cipta Nirwana	15	5,2	0	0,03	0,003
23	ALT3 Sebelah Utara Pulau Lombok - PT Tiara Cipta Nirwana	17,5	5,3	0	0,03	0,003
24	ALT2 Sebelah Utara Pulau Lombok - PT Tiara Cipta Nirwana	0	0	0,1	0	0
25	ALT1 Sebelah Utara Pulau Lombok - PT Tiara Cipta Nirwana	0	0	0,1	0	0
26	TP-2 Titik kontrol, 20 meter dari outfall - PT Pertamina Patra Niaga - Integrated	14,4	6,9	0,28	0,05	0,1

NO	LOKASI	NILAI PEMANTAUAN				
		TSS (mg/L)	DO (mg/L)	MINYAK & LEMAK (mg/L)	AMONIA TOTAL (mg/L)	ORTOFOSFAT (PO4-P) (mg/L)
	Terminal Ampenan					
27	TP-1 10 meter dari outfall - PT Pertamina Patra Niaga - Integrated Terminal Ampenan	21,5	6,9	0,28	0,05	0,1
28	TP-2 Titik kontrol, 20 meter dari outfall - PT Pertamina Patra Niaga - Integrated Terminal Ampenan	13	5,8	0,28	0,05	0,01
29	TP-1 10 meter dari outfall - PT Pertamina Patra Niaga - Integrated Terminal Ampenan	18	5,8	0,28	0,056	0,01
30	Air Laut titik 9 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	36	5,77	0,5	0,14	0,015
31	Air Laut titik 8 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	29	6,26	0,5	0,22	0,015
32	Air Laut titik 7 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	30	5,58	0,5	0,13	0,015
33	Air Laut titik 6 PT PLN	32	5,39	0,5	0,22	0,015

NO	LOKASI	NILAI PEMANTAUAN				
		TSS (mg/L)	DO (mg/L)	MINYAK & LEMAK (mg/L)	AMONIA TOTAL (mg/L)	ORTOFOSFAT (PO4-P) (mg/L)
	Indonesia Power PLTU Jeranjang					
34	Air Laut titik 5 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	29	7,21	0,5	0,19	0,015
35	Air Laut titik 4 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	28	6,11	0,5	0,21	0,015
36	Air Laut titik 3 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	33	5,67	0,5	0,2	0,015
37	Air Laut titik 2 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	32	5,53	0,5	0,18	0,015
38	Air Laut titik 1 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	29	6,58	0,5	0,15	0,015
39	Air Laut titik 9 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	30	5,69	0,5	0,15	0,015
40	Air Laut titik 8 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	28	6,11	0,5	0,23	0,015
41	Air Laut titik 7 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	34	5,88	0,5	0,11	0,015

NO	LOKASI	NILAI PEMANTAUAN				
		TSS (mg/L)	DO (mg/L)	MINYAK & LEMAK (mg/L)	AMONIA TOTAL (mg/L)	ORTOFOSFAT (PO4-P) (mg/L)
42	Air Laut titik 6 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	36	5,26	0,5	0,26	0,015
43	Air Laut titik 5 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	28	7,02	0,5	0,2	0,015
44	Air Laut titik 4 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	26	6,12	0,5	0,21	0,015
45	Air Laut titik 3 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	36	5,63	0,5	0,19	0,015
46	Air Laut titik 2 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	31	5,22	0,5	0,17	0,015
47	Air Laut titik 1 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	29	6,56	0,5	0,16	0,015
48	Air Laut titik 9 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	23	6,21	0,5	0,007	0,015
49	Air Laut titik 8 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	28	6,08	0,5	0,007	0,015
50	Air Laut titik 7 PT PLN Indonesia	28	6,01	0,5	0,007	0,015

NO	LOKASI	NILAI PEMANTAUAN				
		TSS (mg/L)	DO (mg/L)	MINYAK & LEMAK (mg/L)	AMONIA TOTAL (mg/L)	ORTOFOSFAT (PO4-P) (mg/L)
	Power PLTU Jeranjang					
51	Air Laut titik 6 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	25	6,15	0,5	0,007	0,015
52	Air Laut titik 5 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	24	6,18	0,5	0,007	0,015
53	Air Laut titik 4 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	26	6,03	0,5	0,007	0,015
54	Air Laut titik 3 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	22	6,11	0,5	0,007	0,015
55	Air Laut titik 2 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	26	5,59	0,5	0,007	0,015
56	Air Laut titik 1 PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	27	6,43	0,5	0,007	0,015
57	Titik Pantau 4 PT PLN (Persero) Wilayah NTB Sektor Tambora PLTU Sumbawa Barat	13,77	5,24	0,19	0,035	0,0085

NO	LOKASI	NILAI PEMANTAUAN				
		TSS (mg/L)	DO (mg/L)	MINYAK & LEMAK (mg/L)	AMONIA TOTAL (mg/L)	ORTOFOSFAT (PO4-P) (mg/L)
58	Titik Pantau 3 PT PLN (Persero) Wilayah NTB Sektor Tambora PLTU Sumbawa Barat	14,74	5,43	0,19	0,035	0,0085
59	Titik Pantau 2 PT PLN (Persero) Wilayah NTB Sektor Tambora PLTU Sumbawa Barat	15,33	5,43	0,58	0,035	0,0085
60	SW-4 di luar Zona ZID PT PLN (Persero) UP Tambora PLTMG Bima	10	6,99	1	0,01	0,01
61	SW-3 di luar Zona ZID PT PLN (Persero) UP Tambora PLTMG Bima	10	7,4	1	0,01	0,01
62	SW-2 di dalam Zona ZID PT PLN (Persero) UP Tambora PLTMG Bima	8	7,19	1	0,01	0,01
63	SW-1 di dalam Zona ZID PT PLN (Persero) UP Tambora PLTMG Bima	8	7,71	1	0,01	0,01
64	SW-4 di luar Zona ZID PT PLN (Persero)	11	0	1	0,1	0

NO	LOKASI	NILAI PEMANTAUAN				
		TSS (mg/L)	DO (mg/L)	MINYAK & LEMAK (mg/L)	AMONIA TOTAL (mg/L)	ORTOFOSFAT (PO4-P) (mg/L)
	UP Tambora PLTMG Bima					
65	SW-3 di luar Zona ZID PT PLN (Persero) UP Tambora PLTMG Bima	8	0	1	0,04	0
66	SW-2 di dalam Zona ZID PT PLN (Persero) UP Tambora PLTMG Bima	8	0	1	0,04	0
67	SW-1 di dalam Zona ZID PT PLN (Persero) UP Tambora PLTMG Bima	10	0	1	0,08	0
68	TP-1 18 meter dari outfall - PT Pertamina Patra Niaga - Fuel Terminal Badas	11	5,8	0,28	0,05	0,012
69	TP-1 18 meter dari outfall - PT Pertamina Patra Niaga - Fuel Terminal Badas	14	6	0,28	0,05	0

Lampiran 6 Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Mengajukan Permohonan Persetujuan Teknis (Pertek) dan SLO Tahun 2025

Lampiran 7 Dokumen Lingkungan Yang Dinilai Tahun 2025

Lampiran 8 Hasil Perhitungan Indeks Keanekaragaman Hayati

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Jumlah Individu	Pi	Ln(Pi)	-(Pi*Ln(Pi))
1	Afi	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
2	Ajan	Diospyros malabarica	25	0.022	-3.825	0.083
3	Albizia	Albizia sp.	1	0.001	-7.044	0.006
4	Angi	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
5	Ara	Diospyros ferrea	10	0.009	-4.741	0.041
6	Asam	Tamarindus indica	1	0.001	-7.044	0.006
7	Bajur	Camptostemon schultzii	10	0.009	-4.741	0.041
8	Balik Layar	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
9	Balu	Eugenia clavimirtus	1	0.001	-7.044	0.006
10	Bara	Gyrocarpus americanus	5	0.004	-5.435	0.024
11	Barang	Galearia sp.	2	0.002	-6.351	0.011
12	Baru	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
13	Bebatu	Unknown	4	0.003	-5.658	0.020
14	Bengkal	Neonauclea calycina	8	0.007	-4.965	0.035
15	Bentawa	Wrightia calycina	1	0.001	-7.044	0.006
16	Beringin	Ficus benjamina	13	0.011	-4.479	0.051
17	Berora	Unknown	8	0.007	-4.965	0.035
18	Beru	Garga floribunda	1	0.001	-7.044	0.006
19	Besira	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
20	Binong	Tetrameles nudiflora	10	0.009	-4.741	0.041
21	Bintangor	Calophyllum inophyllum	9	0.008	-4.847	0.038
22	Ble	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
23	Blinat	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
24	Boro	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
25	Buah Puin	Unknown	12	0.010	-4.559	0.048
26	Bulu ayam	Palaquium obtusifolium	5	0.004	-5.435	0.024
27	Bungur	Lagerstroemia speciosa	18	0.016	-4.154	0.065
28	Butun Lainnya	Barringtonia sp.	1	0.001	-7.044	0.006
29	Coro	Ficus variegata	12	0.010	-4.559	0.048
30	Dadap	Unknown	4	0.003	-5.658	0.020
31	Dangar	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
32	Dao	Dracontomelon mangiferum	4	0.003	-5.658	0.020

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Jumlah Individu	Pi	Ln(Pi)	-(Pi*Ln(Pi))
33	Dato	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
34	Doat	Eugenia cuminii	12	0.010	-4.559	0.048
35	Doka	Anisoptera polyandra	1	0.001	-7.044	0.006
36	Dope	Bauhinia malabarica	1	0.001	-7.044	0.006
37	Durian	Durio sp.	7	0.006	-5.098	0.031
38	Dusu	Chisocheton sp.	4	0.003	-5.658	0.020
39	Duwa	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
40	Feli	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
41	Foo Doro	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
42	Gaharu	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
43	Garu	Unknown	6	0.005	-5.252	0.027
44	Gelicung	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
45	Genitri	Elaeocarpus sphaericus	8	0.007	-4.965	0.035
46	Gentangir	Calophyllum soulatri	7	0.006	-5.098	0.031
47	Getasan	Buchanania arborescens	6	0.005	-5.252	0.027
48	Globe	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
49	Grepek	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
50	Haju sori	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
51	Halai	Alstonia spectabilis	2	0.002	-6.351	0.011
52	Heci	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
53	Imba	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
54	Ipil	Unknown	4	0.003	-5.658	0.020
55	Isu	Durio oxleyanus	1	0.001	-7.044	0.006
56	Jabon putih	Anthocephalus cadamba	2	0.002	-6.351	0.011
57	Jambu	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
58	Jambu air	Ctenolophon sp.	7	0.006	-5.098	0.031
59	Jambu hutan	Eugenia densiflora	19	0.017	-4.100	0.068
60	Jati	Tectona sp.	5	0.004	-5.435	0.024
61	Jelatang	Laportea peltata	5	0.004	-5.435	0.024
62	Jelatang bulan	Dipterocarpus sp.	10	0.009	-4.741	0.041
63	Jemeti	Strombosia zeylanica	1	0.001	-7.044	0.006
64	Jemplung	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
65	Jeruju Putih	Acanthus ebracteatus	1	0.001	-7.044	0.006
66	Jintung	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Jumlah Individu	Pi	Ln(Pi)	-(Pi*Ln(Pi))
67	Kabae	Albizia chinensis	1	0.001	-7.044	0.006
68	Kabahi kafa	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
69	Kabusu	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
70	Kaleang	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
71	Kamojang	Pygeum pullei	1	0.001	-7.044	0.006
72	Kamonca	Unknown	4	0.003	-5.658	0.020
73	Kanuna	Cordia subcordata	2	0.002	-6.351	0.011
74	Kara	Acacia tomentosa	5	0.004	-5.435	0.024
75	Karanu	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
76	Karet Hutan	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
77	Karodo	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
78	Kasuang	Anacardiaceae costanum	10	0.009	-4.741	0.041
79	Katepul	Artocarpus rigidus	4	0.003	-5.658	0.020
80	Kawat	Mezzetia Spp	2	0.002	-6.351	0.011
81	Kayu batu	Dipterocarpus gracilis	12	0.010	-4.559	0.048
82	Kayu Beberat	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
83	Kayu besi	Intsia sp.	3	0.003	-5.945	0.016
84	Kayu dara	Caesalpinia crista	1	0.001	-7.044	0.006
85	Kayu hitam	Diospyros yeobi	2	0.002	-6.351	0.011
86	Kayu kunyit	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
87	Kayu nangka	Artocarpus dasyphyllus	3	0.003	-5.945	0.016
88	Kayu tinum	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
89	Kayu tolang	Fraxinus griffithii	2	0.002	-6.351	0.011
90	Kayu tong	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
91	Kayu Tulang Lainnya	Clerodendrum sp.	2	0.002	-6.351	0.011
92	Keleang	Pterospermum javanicum	22	0.019	-3.953	0.076
93	Kelokos	Eugenia jamboloides	2	0.002	-6.351	0.011
94	Kemang	Pterocarpus indicus	4	0.003	-5.658	0.020
95	Kemiri	Aleurites moluccana	3	0.003	-5.945	0.016
96	Kemunas	Camptosperma brevipetiolata	1	0.001	-7.044	0.006
97	Kentok Celeng	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
98	Kesambi	Schleichera oleosa	18	0.016	-4.154	0.065
99	Kesi	Canarium oleosum	13	0.011	-4.479	0.051

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Jumlah Individu	Pi	Ln(Pi)	-(Pi*Ln(Pi))
100	Kesuna	Dysoxylum amooroides	1	0.001	-7.044	0.006
101	Ketapang Lainnya	Terminalia sp.	1	0.001	-7.044	0.006
102	Ketimus	Protium javanicum	73	0.064	-2.754	0.175
103	Koncala	Ardisia sp.	2	0.002	-6.351	0.011
104	Krikis	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
105	Kujawas	Psidium sp.	1	0.001	-7.044	0.006
106	Kukin	Schoutenia ovata	53	0.046	-3.074	0.142
107	Kukulat	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
108	Laban	Vitex pubescens	8	0.007	-4.965	0.035
109	Lamoyang	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
110	Lampada	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
111	Lanang	Podocarpus sp.	1	0.001	-7.044	0.006
112	Lanta dolo	Unknown	4	0.003	-5.658	0.020
113	Lasa	Acer niveum	2	0.002	-6.351	0.011
114	Lasar	Aquilaria sp.	2	0.002	-6.351	0.011
115	Lasi	Ficus callosa	3	0.003	-5.945	0.016
116	Lelise	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
117	Lema	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
118	Lempinyo	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
119	Lemuru	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
120	Lende	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
121	Lengkaran	Ficus annulata	1	0.001	-7.044	0.006
122	Lenong	Unknown	4	0.003	-5.658	0.020
123	Loba	Artocarpus reticulatus	4	0.003	-5.658	0.020
124	Loi	Alstonia sp.	3	0.003	-5.945	0.016
125	Longkor kode	Chisocheton microcarpus	6	0.005	-5.252	0.027
126	Luha	Pittosporum monticolum	1	0.001	-7.044	0.006
127	Luhu	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
128	Mahoni	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
129	Maladi	Unknown	12	0.010	-4.559	0.048
130	Malaka	Phyllanthus sp.	2	0.002	-6.351	0.011
131	Mangga Batu	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
132	Me siong	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
133	Melinjo	Gnetum sp.	2	0.002	-6.351	0.011

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Jumlah Individu	Pi	Ln(Pi)	-(Pi*Ln(Pi))
134	Mera	Pometia sp.	1	0.001	-7.044	0.006
135	Mila	Feronia elephantun	1	0.001	-7.044	0.006
136	Modeng	Unknown	4	0.003	-5.658	0.020
137	Monar	Garcinia archboldiana	1	0.001	-7.044	0.006
138	Monggo	Unknown	10	0.009	-4.741	0.041
139	Mpampa	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
140	Mposu	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
141	Mudi	Eugenia polyantha	1	0.001	-7.044	0.006
142	Na'a	Unknown	4	0.003	-5.658	0.020
143	Nale	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
144	Ndangge	Unknown	6	0.005	-5.252	0.027
145	Ndanta dolo	Unknown	5	0.004	-5.435	0.024
146	Ndao	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
147	Nehu	Lagerstroemia ovalifolia	2	0.002	-6.351	0.011
148	Nila	Microcos tomentosa	1	0.001	-7.044	0.006
149	Niu	Unknown	39	0.034	-3.380	0.115
150	Noreh	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
151	Ntana	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
152	Ntanda me'e	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
153	Nteli	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
154	Nunang	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
155	Pampah	Dysoxylum sp.	1	0.001	-7.044	0.006
156	Panga	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
157	Pano	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
158	Panto	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
159	Parina	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
160	Pasi	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
161	Pato	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
162	Paya	Eugenia cymosa	1	0.001	-7.044	0.006
163	Peko	Rouwelfia javanica	4	0.003	-5.658	0.020
164	Pelas	Unknown	6	0.005	-5.252	0.027
165	Perek mayung	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
166	Piko	Ervatamia macrocarpa	1	0.001	-7.044	0.006
167	Pingam	Artocarpus odoratissimus	2	0.002	-6.351	0.011

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Jumlah Individu	Pi	Ln(Pi)	-(Pi*Ln(Pi))
168	Pit	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
169	Pohon tagambe	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
170	Pohon Ular	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
171	Pola	Horsfieldia spp	3	0.003	-5.945	0.016
172	Pucat	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
173	Pulai	Alstonia scholaris	9	0.008	-4.847	0.038
174	Putat	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
175	Ragan	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
176	Rame	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
177	Randu	Gossampinus malabarica	5	0.004	-5.435	0.024
178	Ranginpil	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
179	Rapat	Podocarpus blumei	5	0.004	-5.435	0.024
180	Rapat bewe	Drypetes longifolia	30	0.026	-3.643	0.095
181	Rau	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
182	Reko	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
183	Renga	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
184	Rerongan	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
185	Rike	Drypetes sp.	12	0.010	-4.559	0.048
186	Rimas	Duabanga moluccana	8	0.007	-4.965	0.035
187	Rinda	Gironniera subaequalis	6	0.005	-5.252	0.027
188	Rino	Grewia koordersiana	35	0.031	-3.489	0.107
189	Rita	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
190	Ritip	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
191	Rondo-rondo	Couthovia celebica	19	0.017	-4.100	0.068
192	Rondukaka	Premna tomentosa	10	0.009	-4.741	0.041
193	Sabun	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
194	Sada	Planchonella nitida	2	0.002	-6.351	0.011
195	Safare	Unknown	22	0.019	-3.953	0.076
196	Salaapi	Parinari costatum	10	0.009	-4.741	0.041
197	Salaika	Castanopsis acuminatissima	16	0.014	-4.271	0.060
198	Salam	Syzygium polyanthum	7	0.006	-5.098	0.031
199	Salipu	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
200	Sanggar	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Jumlah Individu	Pi	Ln(Pi)	-(Pi*Ln(Pi))
201	Sangkareng	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
202	Santan	Mangifera gedebe	8	0.007	-4.965	0.035
203	Sara'a	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
204	Sareo	Albizia lebbekioides	2	0.002	-6.351	0.011
205	Sari mangge	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
206	Sawo	Manilkara kauki	7	0.006	-5.098	0.031
207	Sawo daun besar	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
208	Sawo Hutan	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
209	Selimoto	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
210	Semela	Memecylon sp.	1	0.001	-7.044	0.006
211	Semira	Shorea kunstleri	1	0.001	-7.044	0.006
212	Sentul	Sandoricum emarginatum	1	0.001	-7.044	0.006
213	Sepang Lanang	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
214	Serahak	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
215	Serelok	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
216	Seriwi	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
217	Sipit	Daphniphyllum glaucescens	1	0.001	-7.044	0.006
218	Slado	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
219	Slipu	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
220	Soga	Peltophorum pterocarpa	1	0.001	-7.044	0.006
221	Soka	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
222	Sono	Grewia sp.	2	0.002	-6.351	0.011
223	Sukwa	Ficus melinocarpa	1	0.001	-7.044	0.006
224	Suli	Acacia oraria	1	0.001	-7.044	0.006
225	Suren	Toona sureni	19	0.017	-4.100	0.068
226	Tanjung	Mimusops elengi	1	0.001	-7.044	0.006
227	Tanuk	Celtis wightii	4	0.003	-5.658	0.020
228	Tanyung	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
229	Tapis	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
230	Telutu	Unknown	2	0.002	-6.351	0.011
231	Temayong	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
232	Tempoak	Eugenia polycephala	26	0.023	-3.786	0.086
233	Tende Bote	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Jumlah Individu	Pi	Ln(Pi)	-(Pi*Ln(Pi))
234	Tere	Artocarpus elasticus	16	0.014	-4.271	0.060
235	Teruntum Lainnya	Lumnitzera sp.	1	0.001	-7.044	0.006
236	Teruntun Lainnya	Aegialitis sp.	4	0.003	-5.658	0.020
237	Trembesi	Albizia saman	1	0.001	-7.044	0.006
238	Trina	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
239	Trotu	Unknown	5	0.004	-5.435	0.024
240	Tula	Unknown	5	0.004	-5.435	0.024
241	U'a Mpu'u	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
242	Udu	Litsea accedentoides	1	0.001	-7.044	0.006
243	Uju	Elmerrillia papuana	2	0.002	-6.351	0.011
244	Wadjo	Adenantha pavonina	1	0.001	-7.044	0.006
245	Wala	Planchonia valida	1	0.001	-7.044	0.006
246	Wamba	Unknown	3	0.003	-5.945	0.016
247	Waru Lainnya	Hibiscus sp.	5	0.004	-5.435	0.024
248	Woro	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
249	Wosu	Unknown	1	0.001	-7.044	0.006
250	Wou	Garuga floribunda	2	0.002	-6.351	0.011
251	Wune	Antidesma bunius	3	0.003	-5.945	0.016
			1146			4.802

Lampiran 9 Peserta PROPER di Wilayah Provinsi NTB

No.	NAMA PERUSAHAAN	SUB SEKTOR	KABUPATEN/ KOTA	PERINGKAT	EVALUATOR	KET.
1.	PT. PLN (Persero) Pusat Listrik PLTD Dompu	Energi PLTD	Kab. Dompu	Biru	KLH/BPLH	
2.	PT. PLN (Persero) - Batam PLTG MPP 50MW	Energi PLTG	Kab. Lombok Barat	Biru	KLH/BPLH	
3.	PT. PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang	Energi PLTU	Kab. Lombok Barat	Biru	KLH/BPLH	
4.	PT. Narmada Awet Muda	Minuman Kemasan	Kab. Lombok Barat	-	KLH/BPLH	
5.	PT. Pertamina Patra Niaga - Aviation FT Bandara Internasional Lombok (BIL)	Migas Distribusi	Kab. Lombok Tengah	Biru	KLH/BPLH	
6.	PT. PLN (Persero) Pusat Listrik PLTD Paokmotong	Energi PLTD	Kab. Lombok Timur	Biru	KLH/BPLH	
7.	PT. Lombok Energy Dynamics	Energi PLTU	Kab. Lombok Timur	-	KLH/BPLH	
8.	PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Sektor Tambora Pusat Listrik Labuhan	Energi PLTD	Kab. Sumbawa	Biru	KLH/BPLH	
9.	PT Pertamina Patra Niaga - Fuel Terminal Badas	Migas Distribusi	Kab. Sumbawa	Biru	Provinsi	Rapor Biru (Berdasarkan hasil supervisi)
10.	PT PLN (Persero) Wilayah NTB Sektor Tambora PLTU Sumbawa Barat	PLTU	Kab. Sumbawa Barat	Biru	KLH/BPLH	

No.	NAMA PERUSAHAAN	SUB SEKTOR	KABUPATEN/ KOTA	PERINGKAT	EVALUATOR	KET.
11.	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Tambang Mineral	Kab. Sumbawa Barat	-	KLH/BPLH	
12.	PT. PLN (Persero) Pusat Listrik Bima PLTD Bima dan PLTD Niu	Energi PLTD	Kota Bima	Biru	Kabupaten/Kota	Rapor Biru (Berdasarkan hasil supervisi)
13.	PT. PLN (Persero) Pusat Listrik Bima PLTD Niu	Energi PLTD	Kota Bima	Biru	Kabupaten/Kota	Rapor Biru (Berdasarkan hasil supervisi)
14.	PT PLN (Persero) UPK Tambora PLTMG Bima	Energi PLTMG	Kota Bima	-	Provinsi	Rapor Biru (Berdasarkan hasil supervisi)
15.	PT Pertamina Patra Niaga - Integrated Terminal Bima	Migas Distribusi	Kota Bima	Biru	Kabupaten/Kota	Rapor Biru (Berdasarkan hasil supervisi)
16.	PT. PLN (Persero) Pusat Listrik Ampenan dan Pusat Listrik Taman	Energi PLTD	Kota Mataram	Biru	KLH/BPLH	
17.	PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Lombok PLTGU Lombok Peaker	Energi PLTGU	Kota Mataram	Biru	Provinsi	Rapor Biru (Berdasarkan hasil supervisi)
18.	PT. Pertamina Patra Niaga - Integrated Terminal Ampenan	PLTD	Kota Mataram	Biru	Provinsi	Rapor Biru (Berdasarkan hasil supervisi)

Lampiran 10 Daftar Permohonan Pembahasan Dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3

No.	Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1.	CV Global Ummah	Penggalian Pasir	Dusun Lendang Karang, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
2.	PT Gama Royal Pelataran	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan, Terapung/Galangan Kapal	Dusun Baran Tapen, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur
3.	PT Amman Mineral Industri	Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Tembaga	Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat
4.	PT Chri Van Investment	Budidaya Tambak Udang	Dusun Pulur, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia
5.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calabai	Operasional Pelabuhan Calabai	Kabupaten Dompu
6.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calabai	Operasional Pelabuhan Kilo	Kabupaten Dompu
7.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sape	Operasional Pelabuhan Sape	Kabupaten Bima
8.	PT Sino Indo Mutiara	Budidaya Kerang Mutiara	Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat
9.	PT PLN UIP Nusa Tenggara	PLTMG 2 (2 x 50 MW)	Desa Padakguar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur

No.	Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan
10.	RSUD Praya	Operasional RSUD Praya	Operasional RSUD Praya di Jl. H. Lalu Hasim, Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah
11.	PT Telawas Lestari Makmur	Sarana dan Prasarana Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam	Jl. Rauh Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat
12.	CV Jaya Utama Keling	Pemecah Batu dan Penjualan Batu dan Pasir	Dusun Karang Kubu, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah
13.	PT Lombok Energy Dynamics	Operasional PLTU (2 x 30 MW) IPP Lombok Timur	Jl. Raya Sambelia Km.2, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur
14.	Koperasi Salonong Bukit Lestari	Pertambangan Emas dan Perak	Blok Lantung 2, Desa Ai Mual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa
15.	PT Beach Villas Lombok	Villa	Desa Sigar Penjali, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
16.	PT Sarana Bukit Alami	Taman Wisata Alam Pelangan	Blok pemanfaatan Taman Wisata Alam, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat
17.	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	Jalan Ahmad Yani No.1, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram

No.	Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan
18.	PT Prodia Widyahusada, Tbk.	Laboratorium Medis dan Klinik Utama	Jalan pejanggik No. 107, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara
19.	PT Pesona Alam Gili Petagan	Usaha Kehutanan Lainnya Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Desa Padakguar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur
20.	Koperasi Salonong Bukit Lestari Dua	Pertambangan Emas dan Perak	Desa Ai Mual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa
21.	Koperasi Bhara Satonda	Pertambangan Emas dan Perak	Blok Natawera, Desa Lepadi, Kecamatan Pjo, Kabupaten Dompu
22.	Dinas LH Lombok Utara	Tempat pemerosesan Akhir (TPA) Jugil	Desa Sambil Bangkol. Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara
23.	Koperasi Doro Karombo Dudu	Izin Pertambangan Tembaga (Cu)	Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima
24.	Koeprasi Puncak Doro Wau	Izin Pertambangan Tembaga (Cu)	Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima
25.	Koperasi Lantung Mandiri Bersatu	Pertambangan Emas dan Perak	Blok Lantung I, Desa Pendesa, Kecamatan Lantung
26.	Koperasi Produsen Mineral elang Mas	Pertambangan Emas dan Perak	Desa Ai Mual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa
27.	Koperasi Produsen Sumbawa HJ Mining	Pertambangan Emas dan Perak	Desa Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat

Lampiran 11 Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Mengajukan Permohonan Persetujuan Teknis (Pertek) dan SLO Tahun 2025

No.	Nama Instansi/Perusahaan	Jenis dan Lokasi Kegiatan	Jenis Pertek	Nomor dan Tanggal Penerbitan Pertek
1.	PT Anugerah Berkah Berkelimpahan	Budidaya tambak Udang di Desa Kiwu, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu	Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pembuangan Air Limbah ke Laut) Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	660/411/PSPP-DLHK/2025 tanggal 6 Februari 2025 660/410/PSPP-DLHK/2025 tanggal 6 Februari 2025
2.	PT Tepat Guna Reforindo	Penambangan Kerikil/Sirtu di Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Masih proses
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah	Operasional RSUD Praya di Jl. H. Lalu Hasim, Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pemuangan ke Badan Air Permukaan	050/2942/PSPP-DLHK/2025 tanggal 21 Juli 2025
4.	CV Delapan Semeton	Budidaya Tambak Udang di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur	Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pembuangan Air Limbah ke Laut) Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Masih proses
5.	PT Amman Mineral Industri	Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Tembaga serta Fasilitas Pendukungnya di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat	Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pembuangan Air Limbah ke Laut)	Masih proses
6.	PT Sarana Bukit Alami	Taman Wisata Alam Pelangan di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah)	050/2919/PSPP-DLHK/2025 tanggal 15 Juli 2025
7.	PT Vanname Airtsintu Sejahtera	Budidaya Tambak Udang di Desa Obel-obel, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur	Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pembuangan Air Limbah ke Laut)	Masih proses

No.	Nama Instansi/Perusahaan	Jenis dan Lokasi Kegiatan	Jenis Pertek	Nomor dan Tanggal Penerbitan Pertek
			Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	
8.	PT Telawas Lestari Makmur	Rencana Sarana dan Prasarana Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Tanjung Tamba RTK 19 Pantai telawas, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah)	Masih proses
9.	Koperasi Salonong Bukit Lestari	Pertambangan Emas dan Perak di Desa Ai Mual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah) Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	660/3517/PSPP-DISLHK/2025 tanggal 1 September 2025
10.	PT Prodia Widyahusada, Tbk.	Laboratorium Medis dan Klinik Utama Prodia	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu- Peresapan di Permukaan Tanah)	660/3601/DLHK/2025 tanggal 8 September 2025
11.	CV Berkat Samudera Biru	Budidaya Tambak Udang di Dusun Sanggrahan/Batu Guring Desa Labuhan Mapin, kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa	Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pembuangan Air Limbah ke Laut) Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Masih proses
12.	Koperasi Bhara Satonda	Pertambangan Rakyat (IPR) Komoditas Emas dan perak di Blok Natawera, Desa Iepadi, kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah) Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	660/2684/PSPP-DISLHK/2025 tanggal 6 November 2025
13.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara	Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) Jugil di Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga,	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pemanfaatan	Masih proses

No.	Nama Instansi/Perusahaan	Jenis dan Lokasi Kegiatan	Jenis Pertek	Nomor dan Tanggal Penerbitan Pertek
		Kabupaten Lombok Utara	Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah)	
14.	Koperasi Salonong Bukit Lestari Dua	Pertambangan Emas dan Perak di Desa Ai Mual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah) Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Masih proses
15.	CV Vennamas Jaya	Budidaya Tambak Udang di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur	Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pembuangan Air Limbah ke Laut) Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Masih proses
16.	Koperasi Lantung Mandiri Bersatu	Pertambangan Rakyat (IPR) Komoditas emas dan Perak di Desa Padesa, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	660/2958/PSPP-DISLHK/2025 tanggal 21 November 2025
17.	PT Panen Berkah Sejahtera Bersama	Budidaya Tambak Udang di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur	Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pembuangan Air Limbah ke Laut) Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Masih proses
18.	Koperasi Produsen Mineral Elang Mas	Penambangan Emas di Blok Lantung 2, Desa Ai Mual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah (Masih proses
19.	Koperasi Usaha Puncak Bersatu	Pertambangan Rakyat Komoditas Emas dan Perak di Blok Pesa, Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	Masih proses
20.	Koperasi Rengge Diwu Kengke	Pertambangan Rakyat Komoditas Emas dan Perak di Blok Pesa, Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah	Masih proses

No.	Nama Instansi/Perusahaan	Jenis dan Lokasi Kegiatan	Jenis Pertek	Nomor dan Tanggal Penerbitan Pertek
21.	PT Cahaya Samudera Embar-embar	Budidaya Tambak Udang di Dusun Embar-embar, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pembuangan Air Limbah ke Laut)	Masih proses
22.	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah di Jalan Ahmad Yani No.1, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah)	660/3139/PSPP-DISLHK/2025 tanggal 4 Desember 2025
23.	Hotel Villa Ombak	Operasional Jasa dan Akomodasi Hotel dan Restoran Vila Ombak di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah)	Masih proses
24.	PT Paradise Point	Rencana Sarana dan Prasarana Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Tanjung Tampa RTK 22 Kabupaten Lombok Tengah	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah)	Masih proses
25.	Koperasi Produsen Sumbawa HJ Mining	Pertambangan Rakyat Komoditas emas dan perak di Blok Brang Iler, Desa Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah)	Masih proses
26.	CV Dash Mar Ale	Tupai Resort di Desa Prabu, kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah) Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Masih proses
27.	PT Panen Berkat Sejahtera Bersama	Budidaya Tambak Udang di Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur	Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pembuangan Air Limbah ke Laut)	Masih proses

No.	Nama Instansi/Perusahaan	Jenis dan Lokasi Kegiatan	Jenis Pertek	Nomor dan Tanggal Penerbitan Pertek
			Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	
28.	PT Panen Berkat Sejahtera Bersama	Budidaya Tambak Udang di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur	Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pembuangan Air Limbah ke Laut) Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Masih proses
29.	PT Wutama Vaname Bahagia	Budidaya Tambak Udang di Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur	Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pembuangan Air Limbah ke Laut) Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Masih proses
30.	PT Bibit Unggul	Produksi Calon Indukan Udang Vaname di Desa Rempek, kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pembuangan Air Limbah ke Laut) Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Masih proses
31.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram	Pengolahan Sampah Terpadu TPST Sandubaya	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Masih proses
32.	Rumah Sakit Patuh Patuh Patju	Operasional RSUD Patuh Patju di Jl. H. Lalu Anggrat BA No. 2, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah)	Masih proses
33	PT Mitradelta Bahari Pratama	Budidaya Tambak Udang di Desa Sampungu, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima	SLO Air Limbah	Belum dapat diproses karena belum memenuhi persyaratan administrasi
34	RSUD Praya	Operasional RSUD Praya di Jl. H. Lalu Hasim, Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	SLO Air Limbah	Belum dapat diproses karena belum memenuhi persyaratan administrasi

Lampiran 12 Daftar Bank Sampah

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
1	Kawo Sejahtera	2018	BSU	Kawo	Pujut	Kab. Lombok Tengah	Aktif
2	BS Berkarya Mertak	2018	BSU	Mertak	Pujut	Kab. Lombok Tengah	Tidak
3	Bs Sangkrang	2018	BSU	Sangkrang	Praya Timur	Kab. Lombok Tengah	Tidak
4	BS Yadaen	2018	BSU	Dasan Baru	Kopang	Kab. Lombok Tengah	Tidak
5	Karya Sejahtera	2018	BSU	Sepakek	Pringgarata	Kab. Lombok Tengah	Tidak
6	BS Rahayu	2018	BSU	Montong Gamang	Kopang	Kab. Lombok Tengah	Tidak
7	Briuk Sejahtera	2018	BSU	Bunut Baoq	Praya	Kab. Lombok Tengah	Tidak
8	Maju Mandiri	2018	BSU	Pengadang	Praya Tengah	Kab. Lombok Tengah	Tidak
9	BS Bintang Kenalu	2018	BSU	Jango	Janapria	Kab. Lombok Tengah	Tidak
10	BS Maju Bersama	2018	BSU	Penujak	Batu Jai	Kab. Lombok Tengah	Tidak
11	BS Bersama	2018	BSU	Serage	Praya Barat Daya	Kab. Lombok Tengah	Tidak
12	BS Penujak	2018	BSU	Penujak	Praya Barat Daya	Kab. Lombok Tengah	Tidak
13	BS Maju Sejahtera	2018	BSU	Jago	Praya	Kab. Lombok Tengah	Tidak
14	BS Jempong Sejahtera	2018	BSU	Jempong	Sekarbela	Kota. Mataram	Tidak
15	BS Loang Balok	2018	BSU	Kekalik	Sekarbela	Kota. Mataram	Tidak
16	BS Selagalas	2018	BSU	Selagalas	Sandubaya	Kota. Mataram	Tidak
17	BS Pelangan	2018	BSU	Pelangan	Sekotong	Kab. Lombok Utara	Tidak
18	Bs Tunas Muda	2018	BSU	Cendi Manik	Sekotong Tengah	Kab. Lombok Utara	Tidak
19	Bs Mutiara	2018	BSU	Lembar Selatan	Lembar	Kab. Lombok Utara	Tidak
20	Bs Beriuk Pede Genem	2018	BSU	Sigerongan	Lingsar	Kab. Lombok Utara	Tidak
21	Bs Geger Girang Genem	2018	BSU	Langko	Lingsar	Kab. Lombok Utara	Tidak
22	Bs Sejahtera	2018	BSU	Peteluan Indah	Lingsar	Kab. Lombok Utara	Tidak
23	BS Karya Sejahtera	2018	BSU	Banyumulek		Kab. Lombok Utara	Tidak
24	BS Kebon Ayu Mandiri	2018	BSU	Kebon Ayu	Gerung	Kab. Lombok Utara	Tidak

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
25	BS Bina Masyarakat Mandiri	2018	BSU	Kuripan Utara	Kuripan	Kab. Lombok Utara	Tidak
26	BS Ar-Rohman Sejahtera	2018	BSU	Tempos	Gerung	Kab. Lombok Utara	Tidak
27	Bs Onor Semangat	2018	BSU	Lingsar	Lingsar	Kab. Lombok Utara	Tidak
28	BS Bersemi	2018	BSU	Telaga Waru	Labu Api	Kab. Lombok Utara	Tidak
29	BS Pesona	2018	BSU	Dasan Geres	Gerung	Kab. Lombok Utara	Tidak
30	BS Al-Fadila	2018	BSU	Aikmel Timur	Aikmel	Kab. Lombok Timur	Tidak
31	BS Tunas Mekar	2018	BSU	Apitaik	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
32	Bs Sangalang	2018	BSU	Gunung Malang	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
33	BS Montong Bagian	2018	BSU	Lenenk	Lenek	Kab. Lombok Timur	Tidak
34	BS Bareng Kelayu Jorong	2018	BSU	Kelayu Jorong	Selong	Kab. Lombok Timur	Tidak
35	Bs Bintang Seruni	2018	BSU	Seruni Mumbul	Labuan Lombok	Kab. Lombok Timur	Tidak
36	BS Embang-Embangan	2018	BSU	Pringgabaya Utara	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
37	BS Karya Mandiri TJ	2018	BSU	Tanjung Luar	Keruak	Kab. Lombok Timur	Tidak
38	BS Karya Mandiri LB	2018	BSU	Labuan Pandan	Sambelia	Kab. Lombok Timur	Tidak
39	BS Ninata	2018	BSU	Ketangga	Lenek	Kab. Lombok Timur	Tidak
40	BS wangi seroja	2018	BSU	pohgading	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
41	BS Gerbang majapahit	2018	BSU	Jineng	Wanasaba	Kab. Lombok Timur	Tidak
42	BS Karya semarang	2018	BSU	Pringgabaya Induk	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
43	BS Proyek Indah	2018	BSU	Senanggali	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
44	BS Samban Rinjani	2018	BSU	Beririk Jarak	Wanasaba	Kab. Lombok Timur	Tidak
45	BS. 7.0 SR Pemanang Timur *	2018	BSU	Pemanang Timur	Pemanang	Kab. Lombok Utara	Tidak
46	BS. 7.0 SR Medana *	2018	BSU	Medana	Tanjung	Kab. Lombok Utara	Tidak
47	BS. 7.0 SR Sokong *	2018	BSU	Sokong	Tanjung	Kab. Lombok Utara	Tidak
48	BS. 7.0 SR Gondang *	2018	BSU	Gondang	Gangga	Kab. Lombok Utara	Tidak

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
49	BS. 7.0 SR Gumantar *	2018	BSU	Gumantar	Kayangan	Kab. Lombok Utara	Tidak
50	BS. 7.0 SR Dangieng *	2018	BSU	Dangieng	Kayangan	Kab. Lombok Utara	Tidak
51	Bank Sampah Maju Bersama	2019	BSU	Kota Raja	Sikur	Kab. Lombok Timur	Tidak
52	Bank Sampah Muda Karya	2019	BSU	Gelora	Sikur	Kab. Lombok Timur	Tidak
53	Bank Sampah Gemilang	2019	BSU	Loyok	Sikur	Kab. Lombok Timur	Tidak
54	Bank Sampah Sikur Berkah	2019	BSU	Sikur	Sikur	Kab. Lombok Timur	Tidak
55	Bank Sampah Bersih Mandiri YPH PPD NW Pancor	2019	BSU	Kelurahan Pancor	Selong	Kab. Lombok Timur	Tidak
56	Bank Sampah Inges	2019	BSU	Dasan Lekong	Sukamulia	Kab. Lombok Timur	Tidak
57	Bank Sampah Bergerak	2019	BSU	Danarase	Keruak	Kab. Lombok Timur	Tidak
58	Bank Sampah Mitra Bahari	2019	BSU	Ketapang	Keruak	Kab. Lombok Timur	Tidak
59	Bank Sampah Daspan	2019	BSU	Selong	Selong	Kab. Lombok Timur	Tidak
60	Bank Sampah Kita Bersih Muhajirin	2019	BSU	Sekarteja	Selong	Kab. Lombok Timur	Tidak
61	Bank Sampah KSM Gili Care	2019	BSU	Gili Indah	Pemenang	Kab. Lombok Utara	Tidak
62	Bank Sampah Pemuda Peduli Sampah	2019	BSU	Pendua	Kayangan	Kab. Lombok Utara	Tidak
63	Bank Sampah Sampah Pilah Pilih Berkah	2019	BSU	Melaka	Pemenang	Kab. Lombok Utara	Tidak
64	Redeem Institute Bank Sampah Saripah	2019	BSU	Sekotong Timur	Lembar	Kab. Lombok Barat	Tidak
65	Bank Sampah Jagak Diri	2019	BSU	Jagaraga	Kuripan	Kab. Lombok Barat	Tidak
66	Bank Sampah AS-Shohwah	2019	BSU	Beleke	Gerung	Kab. Lombok Barat	Aktif
67	Bank Sampah Bunga Teratai Mas	2019	BSU	Gelogor	Kediri	Kab. Lombok Barat	Tidak
68	Bank Sampah Perempuan Hebat	2019	BSU	Perempuan	Labuapi	Kab. Lombok Barat	Tidak
69	Bank Sampah RNF	2019	BSU	Kediri Selatan	Kediri	Kab. Lombok Barat	Tidak
70	Bank Sampah Amanah	2019	BSU	Batu Kumbang	Lingsar	Kab. Lombok Barat	Tidak

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
71	Bank Sampah Desa Sandik	2019	BSU	Sandik	Gunung Sari	Kab. Lombok Barat	Tidak
72	Bank Sampah Anak Kampung	2019	BSU	Kuripan Timur	Kuripan	Kab. Lombok Barat	Tidak
73	Bank Sampah Nemu Rahayu	2019	BSU	Cendi Manik	Sekotong	Kab. Lombok Barat	Tidak
74	Bank Sampah Urip Lestari	2019	BSU	Banyu Urip	Gerung	Kab. Lombok Barat	Tidak
75	Bank Sampah Rahmatan Lil 'Alamin	2019	BSU	Lembar	Lembar	Kab. Lombok Barat	Tidak
76	Bank Sampah Badil Abadi	2019	BSU	Taman Indah	Pringgarata	Kab. Lombok Tengah	Tidak
77	Bank Sampah Garden Aik Berik	2019	BSU	Aik Berik	Batukliang Utara	Kab. Lombok Tengah	Tidak
78	Bank Sampah "As-Shirof" Lantan	2019	BSU	Lantan	Batukliang Utara	Kab. Lombok Tengah	Tidak
79	Bank Sampah Lombok Bangkit	2019	BSU	Parina	Jonggat	Kab. Lombok Tengah	Tidak
80	Bank Sampah Teratak	2019	BSU	Teratak	Batukliang Utara	Kab. Lombok Tengah	Tidak
81	Bank Sampah "Bersih Bersama" Pemepek	2019	BSU	Pemepek	Pringgarata	Kab. Lombok Tengah	Tidak
82	Bank Sampah "Bajang Peripih Dedoro" Hijau Asri	2019	BSU	Murbaya	Pringgarata	Kab. Lombok Tengah	Tidak
83	Bank Sampah "Geosamalas Recycle" Tanak Beak	2019	BSU	Tanah Beak	Batukliang Utara	Kab. Lombok Tengah	Tidak
84	Bank Sampah "Ngiring Maju" Tampak Siring	2019	BSU	Tampak Siring	Batukliang	Kab. Lombok Tengah	Tidak
85	Bank Sampah GGS Rubbish Care	2019	BSU	Pringgarata	Pringgarata	Kab. Lombok Tengah	Tidak
86	Bank Sampah Sinar Fajar	2019	BSU	Mujur	Praya Timur	Kab. Lombok Tengah	Tidak
87	Bank Sampah Barokah	2019	BSU	Beber	Batukliang	Kab. Lombok Tengah	Tidak
88	Bank Sampah Punia Bersinar	2019	BSU	Punia	Mataram	Kota. Mataram	Tidak
89	Bank Sampah Udayana	2019	BSU	Monjok Barat	Selaparang	Kota. Mataram	Tidak
90	Bank Sampah Bakti Karya Rinjani	2019	BSU	Cakranegara Utara	Cakranegara	Kota. Mataram	Tidak
91	Bank Sampah Barokah	2019	BSU	Mandalika	Sandubaya	Kota. Mataram	Tidak

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
92	Bank Sampah'Persada'' Pagesangan Barat	2019	BSU	Pagesangan Barat	Mataram	Kota. Mataram	Tidak
93	Bank Sampah Anak Kampung Pelita	2019	BSU	Dasan Agung Baru	Selaparang	Kota. Mataram	Tidak
94	KSM Cinta Bersih	2019	BSU	Dasan Cermen	Sandubaya	Kota. Mataram	Tidak
95	Bank Sampah Dasan Agung (Asipa)	2019	BSU	Dasan Agung	Selaparang	Kota. Mataram	Tidak
96	Bank Sampah Gelisah	2019	BSU	Banjar	Ampenan	Kota. Mataram	Aktif
97	Bank Sampah Udakamas	2019	BSU	Karang Baru	Selaparang	Kota. Mataram	Tidak
98	Bank Sampah UNU	2019	BSU	Dasan Agung	Selaparang	Kota. Mataram	Tidak
99	Bank Sampah Pagutan Pondok Perasi	2019	BSU	Bintaro	Ampenan	Kota. Mataram	Tidak
100	Bank Sampah Kertasari KSB	2019	BSU	Kertasari	Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	Aktif
101	Bank Sampah Sekongkang Mandiri	2019	BSU	Sekongkang Atas	Sekongkang	Kab. Sumbawa Barat	Aktif
102	Bank Sampah Kelompok Pemuda Berbagi	2019	BSU	Lab. Sumbawa	Labuan Badas	Kab. Sumbawa	Tidak
103	Bank Sampah Karang Taruna Liang Melik	2019	BSU	Nijang	Unter Iwes	Kab. Sumbawa	Aktif
104	Bank Sampah Lestari	2019	BSU	Jorok	Unter Iwes	Kab. Sumbawa	Aktif
105	Bank Sampah Cahaya Anugerah Merente	2019	BSU	Merente	Alas	Kab. Sumbawa	Aktif
106	Bank Sampah Raberas	2019	BSU	Seketeng	Sumbawa	Kab. Sumbawa	Tidak
107	Bank Sampah Labangka 4	2019	BSU	Labangka 4	Labangka	Kab. Sumbawa	Tidak
108	Bank Sampah Peduli Lingkungan	2019	BSU	Motong	Utan	Kab. Sumbawa	Aktif
109	Bank Sampah Bumdes Sahabat	2019	BSU	Semamung	Moyo Hulu	Kab. Sumbawa	Aktif
110	Bank Sampah Brang Bayan	2019	BSU	Empang Atas	Empang	Kab. Sumbawa	Aktif
111	Bank Sampah Kebun Jeruk	2019	BSU	Lekong	Alas Barat	Kab. Sumbawa	Aktif
112	Bank Sampah Maronge	2019	BSU	Maronge	Maronge	Kab. Sumbawa	Aktif
113	Bank Sampah Medang 4 Chgange	2019	BSU	Medang	Lab. Badas	Kab. Sumbawa	Aktif

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
114	Bank Sampah Indonesia Kreatif Wawondoru	2019	BSU	Wawondoru	Woja	Kab. Dompus	Aktif
115	Bank Sampah Sahabat Mengajar Ta'a	2019	BSU	Ta'a	Kempo	Kab. Dompus	Aktif
116	Bank Sampah The Gade Temba Ngela	2019	BSU	Dorotangga	Dompus	Kab. Dompus	Aktif
117	Bank Sampah Cantika	2019	BSU	Oi Maci	Sape	Kab. Bima	Aktif
118	Bank Sampah Makmur	2019	BSU	Belo	Pali Belo	Kab. Bima	Aktif
119	Bank Sampah Fajar Bersinar	2019	BSU	Tambe	Bolo	Kab. Bima	Aktif
120	Bank Sampah "Berjaya"	2019	BSU	Ule	Asa Kota	Kota. Bima	Aktif
121	Bank Sampah "Berkah"	2019	BSU	Oimbo	Rasanae Timur	Kota. Bima	Aktif
122	Bank Sampah Karaso Rasa	2019	BSU	Rabangodu Selatan	Raba	Kota. Bima	Aktif
123	Bank Sampah Agung Jaya	2022	BSI	Darussalam	Bolo	Kab. Bima	Aktif
124	Bank Sampah Teke Berdaya	2022	BSU	Teke	Palibelo	Kab. Bima	Aktif
125	Bank sampah Hu'u Raya	2022	BSI	Huu	Hu'u	Kab. Dompus	Aktif
126	Bank Sampah Mountrash Dompus	2022	BSI	Madaprana	Woja	Kab. Dompus	Aktif
127	Bank Sampah Tuti's ofarm Lakey Dompus	2022	BSU	Huu	Hu'u	Kab. Dompus	Aktif
128	Bank Sampah Rahayu Nuantara Green	2022	BSU	nn	nn	Kab. Dompus	Aktif
129	Bank Sampah Jelateng Asri	2022	BSU	Gegerung	Lingsar	Kab. Lombok Barat	Tidak
130	Bank Sampah Kekait Berseri	2022	BSI	Kekait	Gunung Sari	Kab. Lombok Barat	Aktif
131	Bank Sampah Rapetan	2022	BSU	Penimbung	Gunung Sari	Kab. Lombok Barat	Tidak
132	Bank Sampah REPO'MANGGIS	2022	BSU	Sesela	Gunung Sari	Kab. Lombok Barat	Tidak
133	Bank Sampah Jarkomsat	2022	BSU	Buwun Mas	Sekotong	Kab. Lombok Barat	Tidak
134	Bank Sampah Pancor Kelayu Batu Kumbang	2022	BSU	Lingsar	Lingsar	Kab. Lombok Barat	Tidak
135	Bank Sampah Onos	2022	BSU	Lingsar	Lingsar	Kab. Lombok Barat	Tidak

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
136	Bank Sampah Pedas Lombok NTB	2022	BSI	Karang Bayan	Lingsar	Kab. Lombok Barat	Tidak
137	Bank Sampah SMPN 1 Lembar	2022	BSU	Lembar	Lembar	Kab. Lombok Barat	Tidak
138	Bank Sampah Maju Berkarya	2022	BSU	Lembar	Lembar	Kab. Lombok Barat	Tidak
139	Bank Sampah Bahtera	2022	BSU	Bagik Polak	Labu Api	Kab. Lombok Barat	Tidak
140	Bank Sampah Putri Mandiri	2022	BSU	Kuranji Dalang	Labu Api	Kab. Lombok Barat	Tidak
141	Bank Sampah Beriuk Maju	2022	BSU	Labu Api	Labu Api	Kab. Lombok Barat	Tidak
142	Bank Sampah Raudatul Jannah	2022	BSU	Labu Api	Labu Api	Kab. Lombok Barat	Tidak
143	Bank Sampah Bersemi	2022	BSU	Telaga Waru	Labu Api	Kab. Lombok Barat	Tidak
144	Bank Sampah Bisa	2022	BSU	Telaga Waru	Labu Api	Kab. Lombok Barat	Tidak
145	Bank sampah Gentar	2022	BSU	Bengkel	Labu Api	Kab. Lombok Barat	Tidak
146	Bank Sampah Karomah	2022	BSI	Bagik Polak	Labu Api	Kab. Lombok Barat	Tidak
147	Bank sampah Sasaka	2022	BSU	Kuripan	Kuripan	Kab. Lombok Barat	Tidak
148	Bank Sampah Sasak Mandiri	2022	BSU	Kuripan	Kuripan	Kab. Lombok Barat	Tidak
149	Bank Sampah Giri Sasak Maju	2022	BSU	Kuripan Selatan	Kuripan	Kab. Lombok Barat	Tidak
150	Bank Sampah Timur Raya Ramah	2022	BSU	Jagaraga	Kuripan	Kab. Lombok Barat	Tidak
151	Bank Sampah Banyu Darling	2022	BSU	Banyumulek	Kediri	Kab. Lombok Barat	Tidak
152	Bank Sampah Pesolah Gubug	2022	BSU	Kediri	Kediri	Kab. Lombok Barat	Tidak
153	Bank Sampah Siung Gemilang	2022	BSU	Lelede	Kediri	Kab. Lombok Barat	Aktif
154	Bank Sampah Pade Angen	2022	BSU	Gunung Sari	Gunung Sari	Kab. Lombok Barat	Tidak
155	Bank Sampah Assalam	2022	BSU	Gunung Sari	Gunung Sari	Kab. Lombok Barat	Tidak
156	Bank Sampah Shankara Form Lombok	2022	BSU	Sesela	Gunung Sari	Kab. Lombok Barat	Tidak
157	Bank Sampah Baitul Hidayah	2022	BSU	Midang	Gunung Sari	Kab. Lombok Barat	Tidak
158	Bank Sampah Taman Sari Green	2022	BSU	Taman Sari	Gunung Sari	Kab. Lombok Barat	Tidak
159	Bank Sampah Sasak Meresik Midang	2022	BSU	Midang	Gunung Sari	Kab. Lombok Barat	Tidak

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
160	Bank Sampah Repo' Manggis	2022	BSU	Sesela	Gunung Sari	Kab. Lombok Barat	Tidak
161	Bank Sampah Cahaya Mandiri	2022	BSU	Gunung Sari	Gunung Sari	Kab. Lombok Barat	Tidak
162	Bank Sampah Al Barokah	2022	BSU	nn	Narmada	Kab. Lombok Barat	Tidak
163	Bank sampah KSM Bersinar	2022	BSU	Narmada	Narmada	Kab. Lombok Barat	Tidak
164	Bank Sampah Pulo Kecil	2022	BSU	Lembuak	Narmada	Kab. Lombok Barat	Tidak
165	Bank Sampah Syariah Bank SampahS	2022	BSU	nn	Narmada	Kab. Lombok Barat	Tidak
166	Bank Sampah Annazofah	2022	BSU	Gerung Utara	Gerung	Kab. Lombok Barat	Tidak
167	Bank Sampah Gerung Selatan	2022	BSU	Gerung Selatan	Gerung	Kab. Lombok Barat	Tidak
168	Bank Sampah KWT Madusari	2022	BSU	Tempos	Gerung	Kab. Lombok Barat	Tidak
169	Bank Sampah Bersinar SMAN 1 Gerung	2022	BSU	Gerung Utara	Gerung	Kab. Lombok Barat	Aktif
170	Bank Sampah Mandiri Sejahtera	2022	BSI	Beleke	Gerung	Kab. Lombok Barat	Tidak
171	Bank Sampah Paman Sam	2022	BSI	Narmada	Narmada	Kab. Lombok Barat	Tidak
172	Bank Sampah Assokhwah	2022	BSU	Beleke	Gerung	Kab. Lombok Barat	Tidak
173	Bank Sampah Saripah	2022	BSU	Sekotong Timur	Lembar	Kab. Lombok Barat	Tidak
174	Bank Sampah Pesona	2022	BSU	Dasan Geres	Gerung	Kab. Lombok Barat	Tidak
175	Bank Sampah Onor Semangat	2022	BSU	Lingsar	Lingsar	Kab. Lombok Barat	Tidak
176	Bank Sampah Ar-Rohman Sejahtera	2022	BSU	Tempos	Gerung	Kab. Lombok Barat	Tidak
177	Bank Sampah Bina Masyarakat Mandiri	2022	BSU	Kuripan Utara	Kuripan	Kab. Lombok Barat	Tidak
178	Bank Sampah Kebon Ayu Mandiri	2022	BSU	Kebunayu	Gerung	Kab. Lombok Barat	Tidak
179	Bank Sampah Sejahtera	2022	BSU	Peteluan Indah	Lingsar	Kab. Lombok Barat	Tidak
180	Bank Sampah Geger Girang Genem	2022	BSU	Langko	Lingsar	Kab. Lombok Barat	Tidak
181	Bank Sampah Beriuk Pede Genem	2022	BSU	Sigerongan	Lingsar	Kab. Lombok Barat	Tidak

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
182	Bank Sampah Mutiara	2022	BSU	Lembar Selatan	Lembar	Kab. Lombok Barat	Aktif
183	Bank Sampah Tunas Muda	2022	BSU	Cendi Manik	Sekotong	Kab. Lombok Barat	Tidak
184	Bank Sampah Pelangan	2022	BSU	Pelangan	Sekotong	Kab. Lombok Barat	Tidak
185	KSM SENGKOL 2	2022	BSU	Sengkol	Pujut	Kab. Lombok Tengah	Tidak
186	KSM SENGKOL 1	2022	BSU	Sengkol	Pujut	Kab. Lombok Tengah	Tidak
187	Bank Sampah Beriuk Sejahtera	2022	BSU	Bunut Baok	Praya	Kab. Lombok Tengah	Tidak
188	Bank Sampah Induk Regional Bumi Tastura Bersatu	2022	BSI	Sepakek	Pringgarata	Kab. Lombok Tengah	Tidak
189	Bank Sampah Ngiring Maju	2022	BSU	Tampak Siring	Batukliang	Kab. Lombok Tengah	Tidak
190	Bank Sampah Geosamalas Recycle	2022	BSU	Tanak Beaq	Batukliang Utara	Kab. Lombok Tengah	Tidak
191	Bank Sampah Hijau Asri	2022	BSU	Murbaya	Pringgarata	Kab. Lombok Tengah	Tidak
192	Bank Sampah Bersih Bersama	2022	BSU	Pemepek	Pringgarata	Kab. Lombok Tengah	Tidak
193	Bank Sampah Maju Sejahtera	2022	BSU	Jago	Praya	Kab. Lombok Tengah	Tidak
194	Bank Sampah Penujak	2022	BSU	Penujak	Praya Barat	Kab. Lombok Tengah	Tidak
195	Bank Sampah Bersama	2022	BSU	Serage	Praya Barat Daya	Kab. Lombok Tengah	Tidak
196	Bank Sampah Bintang Kenalu	2022	BSU	Jango	Janapria	Kab. Lombok Tengah	Tidak
197	Bank Sampah Maju Mandiri	2022	BSU	Pengadang	Praya Tengah	Kab. Lombok Tengah	Tidak
198	Bank Sampah Briuk Sejahtera	2022	BSU	Bunut Baok	Praya	Kab. Lombok Tengah	Tidak
199	Bank Sampah Rahayu	2022	BSU	Montong Gamang	Kopang	Kab. Lombok Tengah	Tidak
200	Bank Sampah Karya Sejahtera	2022	BSU	Sepakek	Pringgarata	Kab. Lombok Tengah	Tidak
201	Bank Sampah Yadaen	2022	BSU	Dasan Baru	Kopang	Kab. Lombok Tengah	Tidak
202	Bank Sampah Sangkrang	2022	BSU	Sengkerang	Praya Timur	Kab. Lombok Tengah	Tidak
203	Bank Sampah Berkarya Mertak	2022	BSU	Mertak	Pujut	Kab. Lombok Tengah	Tidak
204	Bank Sampah Kawo Sejahtera	2022	BSU	Kawo	Pujut	Kab. Lombok Tengah	Tidak

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
205	KSM GREEN VILLAGE	2022	BSU	Tetebatu Selatan	Sikur	Kab. Lombok Timur	Tidak
206	Bank Sampah. DARA KUNCI	2022	BSU	Dara Kunci	Sambelia	Kab. Lombok Timur	Tidak
207	Bank Sampah. SUGIH BAHAGIA	2022	BSU	Sugian	Sambelia	Kab. Lombok Timur	Aktif
208	Bank Sampah. BAJANG POPULER	2022	BSU	Labuhan Pandan	Sambelia	Kab. Lombok Timur	Tidak
209	Bank Sampah. PADAK GUAR JAYA	2022	BSU	Padak Guar	Sambelia	Kab. Lombok Timur	Tidak
210	Bank Sampah. LINDA LESTARI	2022	BSU	Madayin	Sambelia	Kab. Lombok Timur	Tidak
211	Bank Sampah. LINGKUNGAN BERSERI	2022	BSU	Kembang Kerang	Aikmel	Kab. Lombok Timur	Tidak
212	Bank Sampah. BINA SEJAHTERA	2022	BSU	Kembang Kerang	Aikmel	Kab. Lombok Timur	Tidak
213	Bank Sampah. DUA SEKAWAN	2022	BSU	Kembang Kerang	Aikmel	Kab. Lombok Timur	Tidak
214	Bank Sampah. LUMBUNG PANDANG	2022	BSU	Selaparang	Suela	Kab. Lombok Timur	Tidak
215	Bank Sampah. SELAPARANG	2022	BSU	Selaparang	Suela	Kab. Lombok Timur	Tidak
216	Bank Sampah. KARYA BERSAMA (Bank SampahKB)	2022	BSU	Sapit	Suela	Kab. Lombok Timur	Tidak
217	Bank Sampah. KUANG RENGE TRAN	2022	BSU	Puncak Jeringo	Suela	Kab. Lombok Timur	Tidak
218	Bank Sampah. PADE ANGEN	2022	BSU	Pohgading	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
219	Bank Sampah. KAYANGAN	2022	BSU	Labuhan Lombok	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
220	Bank Sampah. HARAPAN	2022	BSU	Labuhan Lombok	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
221	Bank Sampah. PANTAI AYUNAN	2022	BSU	Gunung Malang	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Aktif
222	Bank Sampah. HARUM JAYA	2022	BSU	Pringgabaya	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
223	Bank Sampah. MITRA MANDIRI	2022	BSU	Gunung Malang	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
224	Bank Sampah. SINAR KAYANGAN	2022	BSU	Labuhan Lombok	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
225	Bank Sampah. SUKSES BERSAMA	2022	BSU	Labuhan Lombok	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
226	Bank Sampah. CIPTA DANA	2022	BSU	Gunung Malang	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
227	Bank Sampah. 31	2022	BSU	Pohgading Timur	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Aktif
228	Bank Sampah. BARANG BANTUN	2022	BSU	Labuhan Lombok	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
229	Bank Sampah. ASA MANDIRI	2022	BSU	Pohgading	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
230	Bank Sampah. MULTIGUNA	2022	BSU	Seruni Mumbul	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Aktif
231	Bank Sampah. BINA BARENG	2022	BSU	Korleko Selatan	Labuhan Haji	Kab. Lombok Timur	Tidak
232	Bank Sampah. PEREMPUAN MANDIRI	2022	BSU	Ketangga	Suela	Kab. Lombok Timur	Tidak
233	Bank Sampah. MAJU MANDIRI	2022	BSU	Bagik Papan	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
234	Bank Sampah. BANJAR GETAS	2022	BSU	Telaga Waru	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
235	Bank Sampah. TERUS MAJU	2022	BSU	Teko	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
236	Bank Sampah. FAHMI JAYA	2022	BSU	Labuhan Lombok	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
237	Bank Sampah. KIAT SUKSES	2022	BSU	Gunung Malang	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
238	Bank Sampah. KARYA MULYA	2022	BSU	Sukamulia Timur	Sukamulia	Kab. Lombok Timur	Tidak
239	Bank Sampah. JANTUK	2022	BSU	Jantuk	Sukamulia	Kab. Lombok Timur	Tidak
240	Bank Sampah. BERKAH MANDIRI	2022	BSU	Setanggor	Sukamulia	Kab. Lombok Timur	Tidak
241	Bank Sampah. ANNAZOVA	2022	BSU	Lendang Nangka	Masbagik	Kab. Lombok Timur	Tidak
242	Bank Sampah. IKHLAS BERKARYA	2022	BSU	Masbagik Timur	Masbagik	Kab. Lombok Timur	Tidak
243	Bank Sampah. PAUD DW	2022	BSU	Lendang Nangka	Masbagik	Kab. Lombok Timur	Tidak
244	Bank Sampah. GELORA MANDIRI	2022	BSU	Gelora	Sikur	Kab. Lombok Timur	Tidak
245	Bank Sampah. MONTONG BAAN	2022	BSU	Montongbaan	Sikur	Kab. Lombok Timur	Tidak
246	Bank Sampah. JOMAN (JOBEN AMAN)	2022	BSU	Pesanggrahan	Montong Gading	Kab. Lombok Timur	Tidak
247	Bank Sampah. RINDANG GELORA	2022	BSU	Montong Betok	Montong Gading	Kab. Lombok Timur	Tidak
248	Bank Sampah. BUNGAH	2022	BSU	Sukadana	Terara	Kab. Lombok Timur	Tidak
249	Bank Sampah. SAKRA SELATAN	2022	BSU	Gereneng	Sakra Timur	Kab. Lombok Timur	Tidak

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
250	Bank Sampah. LANDAH GEMILANG	2022	BSU	Pematung	Sakra Barat	Kab. Lombok Timur	Tidak
251	Bank Sampah. MANDIRI	2022	BSU	Boyemare	Sakra Barat	Kab. Lombok Timur	Tidak
252	Bank Sampah. BUMI JAYA	2022	BSU	Bungtiang	Sakra Barat	Kab. Lombok Timur	Tidak
253	Bank Sampah. AL- BAROKAH	2022	BSU	Bungtiang	Sakra Barat	Kab. Lombok Timur	Tidak
254	Bank Sampah. BERSIH BERDIRI	2022	BSU	Sakra	Sakra	Kab. Lombok Timur	Tidak
255	Bank Sampah. KABAR	2022	BSU	Kabar	Sakra	Kab. Lombok Timur	Tidak
256	Bank Sampah. RUMBUK ASRI	2022	BSU	Rumbuk	Sakra	Kab. Lombok Timur	Tidak
257	Bank Sampah. KETAPANG INDAH	2022	BSU	Ketapang Raya	Keruak	Kab. Lombok Timur	Tidak
258	Bank Sampah. SUMBER REJEKI	2022	BSU	Jerowaru	Jerowaru	Kab. Lombok Timur	Tidak
259	Bank Sampah. SULTAN TANJUNG	2022	BSU	Tanjung	Labuhan Haji	Kab. Lombok Timur	Tidak
260	Bank Sampah. BERMIS 1	2022	BSU	Khusus Kota Selong	Selong	Kab. Lombok Timur	Tidak
261	Bank Sampah. GAWAH BERU	2022	BSU	Kelayu Jorong	Selong	Kab. Lombok Timur	Tidak
262	Bank Sampah. TATAR LESTARI	2022	BSU	Kelayu Utara	Selong	Kab. Lombok Timur	Tidak
263	Bank Sampah. BAJANG BARENG MAJU	2022	BSU	Majidi	Selong	Kab. Lombok Timur	Tidak
264	Bank Sampah. GANDOR CERIA	2022	BSU	Khusus Kota Selong	Selong	Kab. Lombok Timur	Tidak
265	Bank Sampah. BANJAR BERKARYA	2022	BSU	Khusus Kota Selong	Selong	Kab. Lombok Timur	Tidak
266	Bank Sampah. KALA AYU	2022	BSU	Kelayu Utara	Selong	Kab. Lombok Timur	Tidak
267	Bank Sampah. DESA DASAN BOROK	2022	BSU	Dasan Borok	Suralaga	Kab. Lombok Timur	Tidak
268	Bank Sampah. ITA PERCAYA	2022	BSU	Waringin	Suralaga	Kab. Lombok Timur	Tidak
269	Bank Sampah. AS- SYAGOF	2022	BSU	Tebaban	Suralaga	Kab. Lombok Timur	Tidak
270	Bank Sampah. GEGER GIRANG	2022	BSU	Waringin	Suralaga	Kab. Lombok Timur	Tidak
271	Bank Sampah. JAMJENG	2022	BSU	Dames Damai	Suralaga	Kab. Lombok Timur	Tidak
272	Bank Sampah. BERSIH BERSERI	2022	BSU	Masbagik Selatan	Masbagik	Kab. Lombok Timur	Tidak

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
	UPTD KEC. MASBAGIK						
273	Bank Sampah. ARRAHMAN ASRI	2022	BSU	Masbagik Selatan	Masbagik	Kab. Lombok Timur	Tidak
274	Bank Sampah. LINSI SEKOMAQ	2022	BSU	Kesik	Masbagik	Kab. Lombok Timur	Tidak
275	Bank Sampah. MITRA WISATA	2022	BSU	Tetebatu	Sikur	Kab. Lombok Timur	Tidak
276	Bank Sampah. GAPTA	2022	BSU	Rensing	Sakra Barat	Kab. Lombok Timur	Tidak
277	Bank Sampah. AL- GHANI	2022	BSU	Tanak Kaken	Sakra Barat	Kab. Lombok Timur	Tidak
278	Bank Sampah Induk Regional Bina Mandiri	2022	BSU	Loyok	Sikur	Kab. Lombok Timur	Tidak
279	Bank Sampah Mandiri Sandubaya	2022	BSU	Sandubaya	Selong	Kab. Lombok Timur	Aktif
280	Bank Sampah Bergerak	2022	BSU	Danerase	Keruak	Kab. Lombok Timur	Tidak
281	Bank Sampah Bina Sejahtera	2022	BSU	Tetebatu	Sikur	Kab. Lombok Timur	Tidak
282	Bank Sampah Bina Mandiri	2022	BSU	Kembang Kuning	Sikur	Kab. Lombok Timur	Tidak
283	Bank Sampah Samban Rinjani	2022	BSU	Beriri Jarak	Wanasaba	Kab. Lombok Timur	Tidak
284	Bank Sampah Proyek Indah	2022	BSU	Pringgabaya	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
285	Bank Sampah Karya semarang	2022	BSU	Pringgabaya	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
286	Bank Sampah Gerbang majapahit	2022	BSU	Karang Baru	Wanasaba	Kab. Lombok Timur	Tidak
287	Bank Sampah wangi seroja	2022	BSU	Pohgading	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
288	Bank Sampah Ninata	2022	BSU	Kembang Kerang Daya	Aikmel	Kab. Lombok Timur	Tidak
289	Bank Sampah Karya Mandiri LB	2022	BSU	Labuhan Pandan	Sambelia	Kab. Lombok Timur	Tidak
290	Bank Sampah Karya Mandiri TJ	2022	BSU	Tanjung Luar	Keruak	Kab. Lombok Timur	Tidak
291	Bank Sampah Embang-Embanan	2022	BSU	Pringgabaya	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
292	Bank Sampah Bintang Seruni	2022	BSU	Seruni Mumbul	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
293	Bank Sampah Bareng Kelayu Jorong	2022	BSU	Kelayu Jorong	Selong	Kab. Lombok Timur	Tidak
294	Bank Sampah Montong Bagian	2022	BSU	Lenek	Aikmel	Kab. Lombok Timur	Tidak

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
295	Bank Sampah Sangalang	2022	BSU	Gunung Malang	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
296	Bank Sampah Tunas Mekar	2022	BSU	Apitaik	Pringgabaya	Kab. Lombok Timur	Tidak
297	Bank Sampah Al-Fadila	2022	BSU	Aikmel Timur	Aikmel	Kab. Lombok Timur	Tidak
298	Bank Sampah Pilih Sampah	2022	BSU	Malaka	Pemenang	Kab. Lombok Utara	Tidak
299	Bank Sampah TATEDE	2022	BSU	Tatede	Lopok	Kab. Sumbawa	Aktif
300	Bank Sampah BOTO	2022	BSU	Lape	Lape	Kab. Sumbawa	Aktif
301	Bank Sampah Pramuka	2022	BSU	Motong	Utan	Kab. Sumbawa	Aktif
302	Bank Sampah Mutiara Semawa	2022	BSU	Karang Dima	Labuhan Badas	Kab. Sumbawa	Aktif
303	Bank Sampah Lunyuk	2022	BSU	Lunyuk Ode	Lunyuk	Kab. Sumbawa	Aktif
304	Bank Sampah As Salam	2022	BSU	Empang Bawah	Empang	Kab. Sumbawa	Aktif
305	Bank Sampah Tecnopark Induk	2022	BSI	Leseng	Moyohulu	Kab. Sumbawa	Aktif
306	Bank sampah Samawa	2022	BSU	Brang Bara	Sumbawa	Kab. Sumbawa	Aktif
307	Bank Sampah Marente	2022	BSU	Labuhan Alas	Alas	Kab. Sumbawa	Aktif
308	Bank Sampahu 05 Lestari	2022	BSU	Jorok	Unter Iwes	Kab. Sumbawa	Aktif
309	Nijang Liang Melik	2022	BSU	Nijang	Unter Iwes	Kab. Sumbawa	Aktif
310	Bank Sampah Induk Regional ESTEPE	2022	BSU	Pernek	Moyohulu	Kab. Sumbawa	Aktif
311	Bank Sampah apaAktif	2022	BSU	Bugis	Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	Aktif
312	Bank Sampah Lestari	2022	BSU	Benete	Maluk	Kab. Sumbawa Barat	Aktif
313	Bank Sampah Darling	2022	BSU	Meraran	Seteluk	Kab. Sumbawa Barat	Aktif
314	Bank Sampah Linow	2022	BSU	Seloto	Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	Aktif
315	Bank Sampah Sahabat Bumi	2022	BSU	Banjar	Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	Aktif
316	Bank Sampah Ai-Ikhlas	2022	BSU	Menala	Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	Aktif
317	Bank Sampah Kompi Handal	2022	BSU	Dalam	Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	Aktif
318	Bank Sampah Induk Lisan	2022	BSI	Kebon Talo	Ampenan Utara	Kota. Mataram	Aktif
319	Bank Sampah Induk Regional Gemilang	2022	BSU	Mayura	Cakranegara	Kota. Mataram	Tidak

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
320	Bank Sampah Persada	2022	BSU	Pagesangan Barat	Mataram	Kota. Mataram	Tidak
321	Bank Sampah Loang Balok	2022	BSU	Tanjung Karang Permai	Sekarbela	Kota. Mataram	Tidak
322	Bank Sampah Jempong Sejahtera	2022	BSU	Jempong Baru	Sekarbela	Kota. Mataram	Tidak
323	Bank Sampah Siwe Kreatif	2022	BSU	Tonggondoa	Palibelo	Kab. Bima	Aktif
324	Bank Sampah Sampela Lempo	2022	BSU	Tonggondoa	Palibelo	Kab. Bima	Aktif
325	Bank Sampah Ana Siwe Tolu	2022	BSU	Tonggondoa	Palibelo	Kab. Bima	Aktif
326	Bank Sampah Ama Jeri	2022	BSU	Tonggondoa	Palibelo	Kab. Bima	Aktif
327	Bank Sampah Dua Ngingi Ana	2022	BSU	Tonggondoa	Palibelo	Kab. Bima	Aktif
328	Bank Sampah Ama Heku	2022	BSU	Tonggondoa	Palibelo	Kab. Bima	Aktif
329	Bank Sampah Meci Ana	2022	BSU	Tonggorisa	Palibelo	Kab. Bima	Aktif
330	Bank Sampah Uta Londe Belo	2022	BSU	Belo	Palibelo	Kab. Bima	Aktif
331	Bank Sampah Bombo Roi	2022	BSU	Roi	Palibelo	Kab. Bima	Aktif
332	Bank Sampah Ragi Jaya	2022	BSU	Ragi	Palibelo	Kab. Bima	Aktif
333	Bank Sampah Padolo Indah	2022	BSU	Padolo	Palibelo	Kab. Bima	Aktif
334	Bank Sampah Bombo Ntonggu	2022	BSU	Ntonggu	Palibelo	Kab. Bima	Aktif
335	Bank Sampah Diwu Kalodo	2022	BSU	Ntonggu	Palibelo	Kab. Bima	Aktif
336	Bank Sampah Siwe Tangguh	2022	BSU	Samili	Woha	Kab. Bima	Aktif
337	Bank Sampah Cako	2022	BSU	Samili	Woha	Kab. Bima	Aktif
338	Bank Sampah Sigi	2022	BSU	Samili	Woha	Kab. Bima	Aktif
339	Bank Sampah Ina Sokata	2022	BSU	Samili	Woha	Kab. Bima	Aktif
340	Bank Sampah Oi Wamba	2022	BSU	Kalampa	Woha	Kab. Bima	Aktif
341	Bank Sampah Kalampa Jaya	2022	BSU	Kalampa	Woha	Kab. Bima	Aktif
342	Bank Sampah Dua Nusa	2022	BSU	Tente	Woha	Kab. Bima	Aktif
343	Bank Sampah Mamaju Bersama	2022	BSU	Tente	Woha	Kab. Bima	Aktif
344	Bank Sampah Katipu	2022	BSU	Tenga	Woha	Kab. Bima	Aktif
345	Bank Sampah Siwe Lembo ade	2022	BSU	Tenga	Woha	Kab. Bima	Aktif

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
346	Bank Sampah Bani Insan	2022	BSU	Rabakodo	Woha	Kab. Bima	Aktif
347	Bank Sampah Oi Wantu	2022	BSU	Baralau	Monta	Kab. Bima	Aktif
348	Bank Sampah Ngaro No'e	2022	BSU	Baralau	Monta	Kab. Bima	Aktif
349	Bank SampahDoro Wele	2022	BSU	Sakuru	Monta	Kab. Bima	Aktif
350	Bank Sampah Same Ngawa	2022	BSU	Sakuru	Monta	Kab. Bima	Aktif
351	Bank Sampah Limbu jaya	2022	BSU	Wadu Wani	Woha	Kab. Bima	Aktif
352	Bank Sampah Peka Rade	2022	BSU	Rade	Mada Pangga	Kab. Bima	Aktif
353	Bank Sampah Rangga Joo	2022	BSU	Samili	Woha	Kab. Bima	Aktif
354	Bank SampahKabani	2022	BSU	Samili	Woha	Kab. Bima	Aktif
355	Bank Sampah Mango Moro	2022	BSU	Tonggondoa	Palibelo	Kab. Bima	Aktif
356	Bank Sampah Uru Ana	2022	BSU	Tonggondoa	Palibelo	Kab. Bima	Aktif
357	Bank Sampah Ungga	2022	BSU	Ungga	Praya Barat Daya	Kab. Lombok Tengah	Tidak
358	Bank Sampah We Save	2022	BSI	Dorobara	Dompu	Kab. Dompu	Aktif
359	Bank Sampah Induk Bintang Sejahtera	2022	BSI	Tanak Awu	Pujut	Kab. Lombok Tengah	Aktif
360	Bank Sampah Putri Nyale	2022	BSI	Kute	Pujut	Kab. Lombok Tengah	Aktif
361	Bank Sampah Usaha Lestari Kuli Farm	2022	BSI	Maluk		Kab. Sumbawa Barat	Aktif
362	Bank Sampah Mountrash Dompu Green Asri	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
363	Bank Sampah Madarangga Bersinar	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
364	Bank Sampah Adu Mandiri	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
365	Bank Sampah Cinta Berbagi	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
366	Bank Sampah Bahari Bersama	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
367	Bank Sampah Daha Bersinar	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
368	Bank Sampah Desa Marada	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
369	Bank Sampah Raso Rasa	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
370	Bank Sampah Kantika Rasa	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
371	Bank Sampah Mangge Asi	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
372	Bank Sampah Wawonduru	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
373	Bank Sampah Kempo	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
374	Bank Sampah SMA NEGERI 1 PAJO	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
375	Bank Sampah SMKN 1 DOMPU	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
376	Bank Sampah Cempi Jaya	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
377	Bank Sampah Pemuda Dore Kreatif	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
378	Bank Sampah Generasi Mumbu Berkarya	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
379	Bank Sampah Kel. Kandai Dua	2022	BSU			Kab. Dompu	Aktif
380	Bank sampah Balubu	2022	BSU			Kota. Bima	Aktif
381	Bank Sampah Gemini	2022	BSU			Kota. Bima	Aktif
382	Bank Sampah Sarae Maraso	2022	BSU			Kota. Bima	Aktif
383	Bank Sampah Sori wosu	2022	BSU			Kota. Bima	Aktif
384	Bank Sampah Kabua Masaki	2022	BSU			Kota. Bima	Aktif
385	Bank Sampah Al HAQIQI		BSU	Tanak Awu	Pujut	Kab. Lombok Tengah	Aktif
386	Bank sampah darmanji hebat		BSU	Darmaji	Kopang	Kab. Lombok Tengah	Aktif
387	Bank Sampah As-Syhuada		BSU	Lendnag Nangka	Masbagik	Kab. Lombok Timur	Aktif
388	bank Sampah Karya Maju		BSU	Denggen Timur	Selong	Kab. Lombok Timur	Aktif
389	Bank Sampah Persada Lotara		BSU	Gondang	Gangga	Kab. Lombok Utara	Tidak
390	Bank Sampah Barang Bantuan		BSU	Barang Bantuan	Pribggabaya	Kab. Lombok Timur	Aktif
391	Bank Sampah Rumpil Inges		BSU	karang sukun	Mataram	Kota. Mataram	Aktif

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
392	Bank Sampah SMP 10 Mataram		BSU	Dayan peken	Ampenan	Kota. Mataram	Aktif
393	Bank Sampah Man 1 mataram		BSU	Dasan agung baru	Selaparang	Kota. Mataram	Aktif
394	Bank Sampah SDN 19 Cakranegara		BSU	Sapta marga	cakra negara	Kota. Mataram	Aktif
395	Bank Sampah SMA 4 Mataram		BSU	dasan cermen	sandubaya	Kota. Mataram	Aktif
396	Bank Sampah SDN 5 Cakranegara		BSU	Bertais	Sandubaya	Kota. Mataram	Aktif
397	Bank Sampah Mts 2 Mataram		BSU	Rembiga	Selaparang	Kota. Mataram	Aktif
398	Bank Sampah SDN 35 Mataram		BSU	Pagesangan timur	Mataram	Kota. Mataram	Aktif
399	Bank Sampah Rumpil Inges		BSU	karang sukun	mataram	Kota. Mataram	Aktif
400	Bank Sampah P2L Kenanga		BSU	punia	mataram	Kota. Mataram	Aktif
401	Bank Sampah Kelompok P2L Pagesangan Indah		BSU	pagesangan	mataram	Kota. Mataram	Aktif
402	Bank Sampah Kelompok Simpatik		BSU	abian tubuh baru	sandubaya	Kota. Mataram	Aktif
403	Bank Sampah Istana Maggot		BSU	karang tatah	selaparang	Kota. Mataram	Aktif
404	Bank Sampah Kelompok Ikrar Al-Ihsan		BSU	lingkungan bawak bagek barat	ampenan	Kota. Mataram	Aktif
405	Bank Sampah Kleompok Bajang Dedara Turide Barat		BSU	kelurahan turida	sandubaya	Kota. Mataram	Aktif
406	Bank Sampah KMPS Urip		BSU	kelurahan rembiga	selaparang	Kota. Mataram	Aktif
407	Bank Sampah pelcing		BSU	babakan	sandubaya	Kota. Mataram	Aktif
408			BSU	ampenan selatan	ampenan	Kota. Mataram	Aktif
409	Bank Sampah ibra		BSU	banjar	ampenan	Kota. Mataram	Aktif
410	Bank Sampah Kelompok Raka		BSU	pagutan timur	mataram	Kota. Mataram	Aktif
411	Bank Sampah Astra Brawijaya		BSU	Jl. Brawijaya, Cakranegara Selatan	cakranegara	Kota. Mataram	Aktif
412	Bank Sampah Astra Ampenan		BSU	Jl. Adi Sucipto	ampenan	Kota. Mataram	Aktif
413			BSU	jl n sriwijaya	cakranegara	Kota. Mataram	Aktif

No	Nama	Tahun	Jenis	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Status
414	Bank Sampah trac		BSU	jln pancaka, mataram barat	selaparang	Kota. Mataram	Aktif
415	Bank Sampah RA Perwanida II		BSU	Jl. Kesra Raya, Tj. Karang Permai	Sekarbela	Kota. Mataram	Aktif

Lampiran 13 Daftar TPS3R/TPST/Pusat Daur Ulang

No	Sarpras	Kelompok	Tahun	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Keterangan
1	TPS 3R	TPS3R MADA WAU JAYA	2015	Mada Wau	Mada Pangga	Kab. Bima	Tidak Aktif
2	TPS 3R	Desa Kempo	2021	Desa Kempo	Kempo	Kab. Dompu	Tidak Aktif
3	TPS 3R	KSM Mashur	2021	Soro	Kempo	Kab. Dompu	Tidak Aktif
4	TPS 3R	TPS 3R Nanga Miro	2021	Nanga Miro	Pekat	Kab. Dompu	Tidak Aktif
5	TPS 3R	TPS3R MULEJATI	2021	Kuripan	Kuripan	Kab. Lombok Barat	Tidak Aktif
6	TPS 3R	KPP Pancor Mas	2020	Montong Are	Kediri	Kab. Lombok Barat	Tidak Aktif
7	TPS 3R	KSM Gapuk Mandiri	2020	Gapuk	Gerung	Kab. Lombok Barat	Tidak Aktif
8	TPS 3R	KSM Berkarya	2017	Midang	Gunung Sari	Kab. Lombok Barat	Aktif
9	TPS 3R	KSM Bumi Lestari Babussalam	2016	Babussalam	Gerung	Kab. Lombok Barat	Tidak Aktif
10	TPS 3R	KSM Bayuan Sari	2016	Gerung Selatan	Gerung	Kab. Lombok Barat	Tidak Aktif
11	TPS 3R	KSM Lembu Sari	2012	Lembuak	Narmada	Kab. Lombok Barat	Tidak Aktif
12	TPS 3R	KSM BAROKAH	2015	Badrain	Narmada	Kab. Lombok Barat	Tidak Aktif
13	TPS 3R	TPS 3R Beleke	2008	Beleke	Gerung	Kab. Lombok Barat	Tidak Aktif
14	TPS 3R	TPS 3R Mambalan	2020	Mambalan	Gunung Sari	Kab. Lombok Barat	Tidak Aktif
15	TPS 3R	TPS 3R Gapuk Utara	2020	Gapuk Utara	Gerung	Kab. Lombok Barat	Tidak Aktif
16	TPS 3R	TPS 3R Dasan Geres	2007	Dasan Geres	Gerung	Kab. Lombok Barat	Tidak Aktif
17	TPST	Pemkab	2021	Senteluk	Batulayar	Kab. Lombok Barat	Aktif
18	PDU	PDU	2022	Lingsar	Lingsar	Kab. Lombok Barat	Aktif
19	TPS 3R	TPS3R BOUNJERUK ASRI	2021	Bonjeruk	Jonggat	Kab. Lombok Tengah	Aktif
20	TPS 3R	KSM Teguh Karya	2018	Kopang Rembiga	Kopang	Kab. Lombok Tengah	Tidak Aktif
21	TPS 3R	KSM Bhakti	2018	Puyung	Jonggat	Kab. Lombok Tengah	Aktif
22	TPS 3R	KSM Ikhlas	2016	Semparu	Kopang	Kab. Lombok Tengah	Aktif
23	TPS 3R	KSM Mandiri	2016	Jontlak	Praya Tengah	Kab. Lombok Tengah	Tidak Aktif

No	Sarpras	Kelompok	Tahun	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Keterangan
24	TPS 3R	TPS 3R Pujut	2015	Pengengat	Pujut	Kab. Lombok Tengah	Tidak Aktif
25	TPS 3R	KSM Mandiri Clean	2014	Ganti	Praya Timur	Kab. Lombok Tengah	Tidak Aktif
26	TPS 3R	TPS 3 R Aik Darek	2015	Aik Dareq	Batukliang	Kab. Lombok Tengah	Tidak Aktif
27	PDU	PDU Batunyale		Batunyala	Praya tengah	Kab. Lombok Tengah	Aktif
28	TPS3R	KMP Selebung Madani	2025	Selebung	Batukliang Utara	Kab. Lombok Tengah	Aktif
29	TPS3R	KMP Selebung Madani	2025	Mas Mas	Batukliang Utara	Kab. Lombok Tengah	Tidak Aktif
30	TPS 3R	TPS3R Selagik	2022	Selagik	Terara	Kab. Lombok Timur	Tidak Aktif
31	TPST	Timbe Kedit/ITF	2018	Geres	Labuan Haji	Kab. Lombok Timur	Tidak Aktif
32	TPS 3R	TPS3R Anjani	2018	Anjani	Suralaga	Kab. Lombok Timur	Aktif
33	TPS 3R	KSM Rumbuk Asri	2018	Rumbuk	Sakra	Kab. Lombok Timur	Tidak Aktif
34	TPS 3R	TPS3R Montong Beter	2017	Montong Beter	Sakra Barat	Kab. Lombok Timur	Tidak Aktif
35	TPS 3R	KSM Biru Rinjani	2016	Kalijaga Baru	Aikmel	Kab. Lombok Timur	Tidak Aktif
36	TPS 3R	KSM Milu Bareng	2016	Masbagik Selatan	Masbagik	Kab. Lombok Timur	Tidak Aktif
37	TPS 3R	KSM Sembalun	2015	Sembalun Bumbang	Sembalun	Kab. Lombok Timur	Tidak Aktif
38	TPS 3R	KSM Tunagati	2013	Kelayu Jorong	Selong	Kab. Lombok Timur	Tidak Aktif
39	TPS 3R	KSM Lestari	2015	Lendang Nangka	Masbagik	Kab. Lombok Timur	Tidak Aktif
40	TPS 3R	TPS 3R Kabar	2021	Kabar	Sakra	Kab. Lombok Timur	Tidak Aktif
41	TPS 3R	TPS3R Jerowaru	2020	Jerowaru	Jerowaru	Kab. Lombok Timur	Tidak Aktif
42	TPS 3R	TPS3R Sakra	2020	Sakra	Sakra	Kab. Lombok Timur	Tidak Aktif
43	TPS 3R	TPS3R GEMARIPAH	2021	Bentek	Gangga	Kab. Lombok Utara	Tidak Aktif
44	TPS 3R	TPS3R REPELI APANBAYA	2019	Gondang	Gangga	Kab. Lombok Utara	Aktif
45	TPS 3R	TPS3R Bunga Teratai	2021	Sokong	Tanjung	Kab. Lombok Utara	Tidak Aktif
46	TPS 3R	TPS3R Beriuk Maju	2021	Akar Akar	Bayan	Kab. Lombok Utara	Tidak Aktif
47	TPS 3R	TPS 3R Anyar Berkarya	2021	Anyar	Bayan	Kab. Lombok Utara	Aktif

No	Sarpras	Kelompok	Tahun	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Keterangan
48	TPS 3R	KPP Jenggala Mandiri	2019	Jenggala	Tanjung	Kab. Lombok Utara	Aktif
49	TPS 3R	Sigar Penjalin Berkarya	2017	Sigar Penjalin	Tanjung	Kab. Lombok Utara	Aktif
50	TPS 3R	TPS 3R Genggalang	2022	Genggelang	Gangga	Kab. Lombok Utara	Aktif
51	TPS 3R	TPS 3R Bangkit Bersih	2022	Karang Bajo	Bayan	Kab. Lombok Utara	Aktif
52	TPS 3R	TPS 3R Loka Karya	2022	Sambik Elen	Bayan	Kab. Lombok Utara	Tidak Aktif
53	TPS 3R	TPS 3R Berlian	2022	Manggala	Pemenang	Kab. Lombok Utara	Aktif
54	TPS 3R	TPS 3R Geger Bersih	2022	Kayangan	Kayangan	Kab. Lombok Utara	Aktif
55	TPS 3R	TPS 3 R Turun Tangis	2022	Sesait	Kayangan	Kab. Lombok Utara	Aktif
56	TPS 3R	TPS 3R Ite Peduli	2022	Gondang	Gangga	Kab. Lombok Utara	Aktif
57	TPS 3R	Gempal	2022	Pememngang Timur	Pemenang	Kab. Lombok Utara	Tidak Aktif
58	TPS 3R	TPS 3R Arung Rinjani		Senaru	Bayan	Kab. Lombok Utara	Aktif
59	TPS 3R	TPS 3R Labuan Badas	2020	Labuhan Alas	Alas	Kab. Sumbawa	Tidak Aktif
60	TPS 3R	TPS 3R Lunyuk Ode	2020	Lunyuk Ode	Lunyuk	Kab. Sumbawa	Tidak Aktif
61	TPS 3R	TPS 3R Semamung	2020	Semamung	Moyohulu	Kab. Sumbawa	Tidak Aktif
62	TPS 3R	TPS3R SAMPAR GILAR	2020	Sepakat	Plampang	Kab. Sumbawa	Tidak Aktif
63	TPS 3R	KEPALA DESA PLAMPANG	2021	Plampang	Plampang	Kab. Sumbawa	Aktif
64	TPS 3R	TPS3R MOBER (Moyo Bersih)	2021	Labuan Haji	Labuhan Badas	Kab. Sumbawa	Tidak Aktif
65	TPS 3R	TPS 3R Rhee	2023	Rhee	Rhee	Kab. Sumbawa	Tidak Aktif
66	TPS 3R	TPS 3R Luk	2023	Luk	Rhee	Kab. Sumbawa	Tidak Aktif
67	TPS 3R	TPS 3R Lopok	2023	Lopok	Lopok	Kab. Sumbawa	Tidak Aktif
68	TPS 3R	TPS 3R Tatede	2023	Tatede	Lopok	Kab. Sumbawa	Tidak Aktif
69	TPS 3R	TPS3R BANGKAT MONTEH MEMBANGUN	2020	Bangkit Monteh	Brang Rea	Kab. Sumbawa Barat	Tidak Aktif

No	Sarpras	Kelompok	Tahun	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Keterangan
70	TPS 3R	Desa Lamusung	2020	Lamusung	Seteluk	Kab. Sumbawa Barat	Tidak Aktif
71	TPS 3R	Ikhsan	2016	Sampir	Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	Tidak Aktif
72	TPS 3R	Kompi Handal	2018	Kelurahan Dalam	Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	Tidak Aktif
73	TPS 3R	KSM Pali	2015	Melayu	Asakota	Kota Bima	Tidak Aktif
74	TPST	KSM Karya Mandiri	2012	Mandalika	Sandubaya	Kota Mataram	Aktif
75	TPS 3R	Dasan Cermen	2015	Dasan Cermen	Sandubaya	Kota Mataram	Tidak Aktif
76	TPS 3R	Pagutan	2010	Pagutan	Mataram	Kota Mataram	Tidak Aktif
77	TPS 3R	Karang Buyuk		Karang Buyuk	Mataram	Kota Mataram	Aktif
78	TPS 3R	Sandubaya		Sandubaya	Mataram	Kota Mataram	Aktif

Lampiran 14 Daftar Sebaran Fasilitas Pengelolaan Sampah dengan Black Soldier Fly

No	Fasilitas	Nama	Sumber	Desa	Kecamatan	Kab/Kota
1	BSF/	Kamaruddin (Bank Sampah Lisan)	APBD	Ampenan Utara	Ampenan	Kota Mataram
2	TPSTR BSF	DLHK NTB	APBD	Lingsar	Lingsar	Kab. Lombok Barat
3	BSF	Bale Maggot Sukarara	DBHCHT	Sukarara	Jonggat	Kab. Lombok Tengah
4	BSF	Kelompok Budidaya Maggot Keluarga	DBHCHT	Jerowaru	Jerowaru	Kab. Lombok Timur
5	BSF	Bank Sampah Sultan	DBHCHT	Tanjung	Labuhan Haji	Kab. Lombok Timur
6	BSF	TPS 3 R Lestari	DBHCHT	Lendang Nangka	Masbagik	Kab. Lombok Timur
7	BSF	Ibu Atun	DBHCHT	Aik Darek	Batukeliang	Kab. Lombok Tengah
8	BSF	Desa	DBHCHT	Semparu	Kopang	Kab. Lombok Tengah
9	BSF	Azwadi	DBHCHT	Sesela	Gunung Sari	Kab. Lombok Barat
10	BSF	Ibu Zuriatun	DBHCHT	Gapuk	Gerung	Kab. Lombok Barat
11	BSF	Desa	DBHCHT	Dasan lekong	Sukamulia	Kab. Lombok Timur
12	BSF	Hamid	DBHCHT	Lelede	Kediri	Kab. Lombok Barat
13	BSF	Na	DBHCHT	Lape	Lape	Kab. Sumbawa
14	BSF	Aziz	DBHCHT	Gangga	Gangga	Kab. Lombok Utara
15	BSF	Maggot Unggul Mataram	DBHCHT	Mataram Timur	Mataram	Kota Mataram
16	BSF	Proklim Lestari	DBHCHT	Pesanggerahan	Montong Gading	Kab. Lombok Timur
17	BSF	Ratmaji Irwin	Mandiri	Lanci Jaya	Manggalewa	Kab. Dompu
18	BSF	Solihin Meliadi	Mandiri	Labuan Tereng	Lembar	Kab. Lombok Barat
19	BSF	Robi Hasyar	Mandiri	Sigerongan	Lingsar	Kab. Lombok Barat
20	BSF	Teguh Prasadjo	Mandiri	Merembu	Labu Api	Kab. Lombok Barat
21	BSF	Hadiansyah	Mandiri	Bagik Polak	Labu Api	Kab. Lombok Barat
22	BSF	H.Muhammad Helmi	Mandiri	Gapuk	Gerung	Kab. Lombok Barat
23	BSF	Abdul Gani	Mandiri	Gapuk	Gerung	Kab. Lombok Barat

No	Fasilitas	Nama	Sumber	Desa	Kecamatan	Kab/Kota
24	BSF	Abdul Hamis	Mandiri	Lelede	Kediri	Kab. Lombok Barat
25	BSF	Muzakir Salim Khairi	Mandiri	Sigerongan	Lingsar	Kab. Lombok Barat
26	BSF	Rohiman	Mandiri	Karang Bayan Barat	Lingsar	Kab. Lombok Barat
27	BSF	Munazi	Mandiri	Batu Kumbung	Lingsar	Kab. Lombok Barat
28	BSF	BSF Midang	Mandiri	Midang	Gunung Sari	Kab. Lombok Barat
29	BSF	Rumah Maggot Lombok	Mandiri	Saribaye	Lingsar	Kab. Lombok Barat
30	BSF	Lalu Satria Budiman	Mandiri	Lingsar	Lingsar	Kab. Lombok Barat
31	BSF	Imron	Mandiri	Sintung	Pringgarata	Kab. Lombok Tengah
32	BSF	Ahyar Rosidi	Mandiri	Sintung	Pringgarata	Kab. Lombok Tengah
33	BSF	Muzaili	Mandiri	Prapen	Praya	Kab. Lombok Tengah
34	BSF	BS Alhakiki	Mandiri	Tanak Awu	Pujut	Kab. Lombok Tengah
35	BSF	mandiri	Mandiri	Sengkol	Pujut	Kab. Lombok Tengah
36	BSF	Ujipuddin	Mandiri	Lenek Daya	Aikmel	Kab. Lombok Timur
37	BSF	Muhammad yasid	Mandiri	Masbagik Timur	Masbagik	Kab. Lombok Timur
38	BSF	Roji	Mandiri	Jenggala	Tanjung	Kab. Lombok Utara
39	BSF	Lalu Juanda	Mandiri	Bertais	Sandubaya	Kota Mataram
40	BSF	BSF IP3IK	Mandiri	Monjok Timur	Selaparang	Kota Mataram
41	BSF	Husnul Amri	Mandiri	Pagesangan Barat	Mataram	Kota Mataram
42	BSF	Jerowaru Bersatu	Mandiri	Jerowaru	Jerowaru	Kab. Lombok Timur
43	BSF	Teduh Rindang	DBHCHT	Kembang kuning	Sikur	Kab. Lombok Timur
44	BSF	KMPS URIP	Mandiri	Rembiga	Selaparang	Kota Mataram
45	BSF	Amman	Mandiri	Sekongkang Atas	Sekongkang Atas	Kab. Sumbawa Barat
46	BSF	Insan Peduli Lingkungan	POKIR	Langko	Lingsar	Kab. Lombok Barat
47	BSF	Bajang Kreatif	POKIR	Teratak	Batukliang Utara	Kab. Lombok Tengah
48	BSF	Pemuda Karang Sidemen	POKIR	Karang Sidemen	Batukliang Utara	Kab. Lombok Tengah
49	BSF	Karang Taruna	POKIR	Rarang Selatan	Terara	Kab. Lombok Timur

No	Fasilitas	Nama	Sumber	Desa	Kecamatan	Kab/Kota
50	BSF	Biokonfermag	DBHCHT	Desa Bakan	janapria	Kab. Lombok Tengah
51	BSF	UPS Tumpak	DBHCHT	Tumpak	Pujut	Kab. Lombok Tengah
52	BSF	Kelompok Kampung Iklim Lestari Alam	DBHCHT	Batu Mekar	Lingsar	Kab. Lombok Barat
53	BSF	Kelompok Kampung Iklim Rindang Asri	DBHCHT	Tanak Beak	Batukliang Utara	Kab. Lombok Tengah
54	BSF	Bank Sampah Unit MG Datu Sakti	DBHCHT	Surabaya Utara	Sakra Timur	Kab. Lombok Timur
55	BSF	Kuli Farm	DBHCHT	Benete	Maluk	Kab. Sumbawa Barat
56	BSF	BUMDesa Karya Bersama	DBHCHT	Rato	Bolo	Kab. Bima
57	BSF	Bank Sampah Induk Mountrash Dompou	DBHCHT	Madaprama	HU'U	Kab. Dompou

Lampiran 15 Neraca Pengelolaan Sampah

Data Capaian Pengelolaan Sampah Prov NTB Tahun 2025									
NO	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN							
		Jumlah Penduduk	TIMBULAN SAMPAH (Ton/Tahun)	PENGURANGAN SAMPAH (ton)	%	PENANGANAN SAMPAH (ton)	%	Metode	Keterangan
1	Kabupaten Lombok Barat	771.858	112.691	60	0,05	32.859	29	Control Landfil	Sumber Data SIPSN
2	Kabupaten Lombok Tengah	1.142.173	166.757	-	-	21.119	13	Open Dumping	Sumber Data SIPSN
3	Kabupaten Lombok Timur	1.449.920	211.688	3.747	1,77	41.269	19	Open Dumping	Sumber Data SIPSN
4	Kabupaten Lombok Utara	272.058	39.720	60	0,15	23.477	59	controlled landfill	Sumber Data SIPSN
5	Kabupaten Sumbawa Barat	157.335	22.971	-	-	13.629	59	controlled landfill	Sumber Data SIPSN
6	Kabupaten Sumbawa Besar	529.234	96.585	3.747	3,88	14.756	15	Open Dumping	Sumber Data SIPSN
7	Kabupaten Dompu	279.884	40.863	288	0,70	15.538	38	Open Dumping	Data Pengurangan di dapat dari Bank sampah induk Mountras (44 Sekolah 1 TPS3r)24 Ton/Bulan yang bisa di kelola
8	Kabupaten Bima	545.571	99.567	30	0,03	11.509	12	Open Dumping	Data Pengurangan di dapat dari data fasilitas yang aktif (Bank Sampah 39 unit BSF 1 Unit,
9	Kota Mataram	464.566	101.740	31.475	30,94	73.409	72	Control Landfil	Data Pengurangan di dapat dari perbandingan dari data fasilitas yang aktif pada tahun 2024 dengan fasilitas tahun 2025 hasil monev
10	Kota Bima	166.114	30.316	18	0,06	28.098	93	Open Dumping	Data Pengurangan di dapat dari data fasilitas yang aktif (Bank Sampah 8 unit
		5.778.713	922.899	39.425	4,27	275.663	29,87		

Lampiran 16 Rincian Lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2025 (APBD)

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi			Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan					
1	3	4	5	6	Desa	Kecamatan	Kabupaten	8	9	10
1.	Pengadaan Bibit	Dinas LHK NTB	DBH DR		Sigar Penjalin	Tanjung	Lombok Utara	0,67	Jabon	34
									Sengon	54
									Durian	12
									Alpukat	30
									Klengkeng	31
									Mangga	34
									Nangka	40
									Sawo	32
2	Bibit Bakti Sosial	KPH Topaso	DBH DR		Matua	Woja	Dompu	20	Jabon, Kemiri, Alpukat, Sawo, Mahoni	1.643
					Raba Baka	Woja	Dompu	25	Jabon, Kemiri, Alpukat, Sawo, Mahoni	1.643
					Kareke	Dompu	Dompu	20	Jabon, Kemiri, Alpukat, Sawo, Mahoni	1.643

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi			Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan					
					Mbawi	Dompu	Dompu	20	Jabon, Kemiri, Alpukat, Sawo, Mahoni	1.643
					Hu'u	Hu'u	Dompu	20	Jabon, Kemiri, Alpukat, Sawo, Mahoni	1.642
					Dorebara	Dompu	Dompu	20	Alpukat, Lengkeng, Nangka, Sawo, Kemiri, Jabon	1.526
3	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Marowa	DBH DR		Parado Wane	Parado	Bima	25,00	Kelengkeng, Alpukat, Kemiri	136
					Madapangga	Madapangga	Bima	20,00	Kelengkeng, Alpukat, Kemiri	110
					Woro	Madapangga	Bima	3,00	Kemiri, Alpukat	200,00
					Woro	Madapangga	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	60,00
					Woro	Madapangga	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	70,00
					Woro	Madapangga	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	60,00
					Woro	Madapangga	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	50,00

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi			Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan					
					Woro	Madapangga	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	60,00
					Woro	Madapangga	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	70,00
					Woro	Madapangga	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	60,00
					Woro	Madapangga	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	70,00
					Woro	Madapangga	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	60,00
					Woro	Madapangga	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	70,00
					Woro	Madapangga	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	80,00
					Woro	Madapangga	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	70,00
					Woro	Madapangga	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	70,00
					Simpasai	Monta	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	45,00
					Simpasai	Monta	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	45,00
					Simpasai	Monta	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	45,00
					Dena	Madapangga	Bima	2,00	Kemiri, Alpukat	200,00
					Tonda	Madapangga	Bima	3,00	Kemiri, Alpukat	200,00
					Tonda	Madapangga	Bima	3,00	Kemiri, Alpukat	150,00

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi			Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan					
					Woro	Madapangga	Bima	2,45	Kemiri, Alpukat	980
					Simpasai	Monta	Bima	0,76	Kemiri, Alpukat	305
					Tonda	Madapangga	Bima	0,98	Kemiri, Alpukat	390
					Tonda	Madapangga	Bima	0,73	Kemiri, Alpukat	290
4	Bibit Bakti Sosial	KPH Batulanteh			Serading	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Kakiang	Moyo Hilir	Sumbawa	0,02	Alpukat, Kelengkeng	8
					Olat Rawa	Moyo Hilir	Sumbawa	0,04	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	15
					Bugis	Sumbawa	Sumbawa	0,04	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	15
					Uma Sima	Sumbawa	Sumbawa	0,63	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	250
					Serading	Moyo Hilir	Sumbawa	0,02	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	8
					Serading	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Serading	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi			Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan					
					Serading	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Serading	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Serading	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Serading	Moyo Hilir	Sumbawa	0,06	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	25
					Medang	Labuhan Badas	Sumbawa	0,13	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	50
					Semamung	Moyo Hulu	Sumbawa	0,25	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	100
					Batudulang	Batulanteh	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Seketeng	Sumbawa	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Samapuin	Sumbawa	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Kerekeh	Unter iwes	Sumbawa	0,38	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	150

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi			Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan					
					Marga Karya	Moyo Hulu	Sumbawa	0,20	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	80
					Kelungkung	Batulanteh	Sumbawa	0,38	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	150
					Serading	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Uma Sima	Sumbawa	Sumbawa	0,05	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	20
					Serading	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Serading	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Serading	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Serading	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Kakiang	Moyo Hilir	Sumbawa	0,04	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	15
					Lempeh	Sumbawa	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi			Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan					
					Serading	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Batudulang	Batulanteh	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Uma Sima	Sumbawa	Sumbawa	0,04	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	15
					Seketeng	Sumbawa	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Sebotok	Labuhan Badas	Sumbawa	0,23	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	90
					Tepal	Batulanteh	Sumbawa	0,13	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	50
					Kakiang	Moyo Hilir	Sumbawa	0,04	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	15
					Batudulang	Batulanteh	Sumbawa	0,04	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	15
					Pungka	Unter iwes	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Pungka	Unter iwes	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi			Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan					
						Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Berare	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Sengkal	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Sengkal	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
						Moyo	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Olat Rawa	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Uma Beringin	Unter iwes	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
					Olat Rawa	Moyo Hilir	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	5
						Sumbawa	Sumbawa	0,75	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	300
					Pernek	Moyo Hulu	Sumbawa	0,01	Nangka, Alpukat, Kelengkeng	4

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi			Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan					
5	Bibit Bantuan Sosial	KPH Ampang Riwo	DBH DR		Kandai Dua	Woja	Dompu	0,0125	Alpukat	5
					Dorotangga	Dompu	Dompu	0,0125	Alpukat	5
					Madaprana	Woja	Dompu	0,05	Alpukat	20
					Tolo Oi	Tarano	Sumbawa	0,0625	Alpukat	25
					Kandai Dua	Woja	Dompu	0,04	Alpukat	16
					Madaprana	Woja	Dompu	0,025	Alpukat	10
					Soriutu	Manggalewa	Dompu	0,025	Alpukat	10
					Kwangko	Manggalewa	Dompu	0,005	Alpukat	2
					Potu	Dompu	Dompu	0,005	Alpukat	2
					Mata	Tarano	Sumbawa	0,005	Alpukat	2
					Kareke	Dompu	Dompu	0,015	Alpukat	6
					Kandai Dua	Woja	Dompu	0,03	Alpukat	12
					Darusalam	Bolo	Bima	0,05	Alpukat	20
					Karijawa	Dompu	Dompu	0,025	Alpukat	10
					Soriutu	Manggalewa	Dompu	0,005	Alpukat	2
					Riwo	Woja	Dompu	0,125	Alpukat	50
	Riwo	Woja	Dompu	0,125	Alpukat	50				
	Riwo	Woja	Dompu	0,125	Alpukat	50				
	Mata	Tarano	Sumbawa	0,125	Alpukat	50				
	Mata	Tarano	Sumbawa	0,125	Alpukat	50				
	Mata	Tarano	Sumbawa	0,125	Alpukat	50				
	Jado	Dompu	Dompu	0,0075	Alpukat	3				
6	Bibit Bakti Sosial	KPH MDM	DBH DR	Jati Baru	Manggalewa	Dompu	0,75	Kemiri	300	

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi			Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan					
					Nungga	Rasanae Timur	Kota Bima	0,75	Kemiri	300
					Nipa	Ambalawi	Bima	0,625	Kemiri	250
					Pesa	Wawo	Bima	0,625	Kemiri	250
					Sari	Sape	Bima	0,875	Kemiri	350
					Kaowa	Lambitu	Bima	1	Kemiri	400
					Ntoke	Wera	Bima	0,75	Kemiri	300
					Kalodu	Langgudu	Bima	0,875	Kemiri	350
7	Bibit Bansos		DBH DR		Kempo	Kempo	Dompu	0,175	Alpukat	70
					Kempo	Kempo	Dompu	0,625	Alpukat	250
					Ta'a	Kempo	Dompu	0,25	Alpukat	100
					Ta'a	Kempo	Dompu	0,2	Alpukat	80
					Ta'a	Kempo	Dompu	0,5	Alpukat	200
8	Bibit Produktif	KPH Orong Telu	DBH DR		Lenangguar	Lenangguar	Sumbawa	0,375	Alpukat	150
					Ledang	Lenangguar	Sumbawa	0,375	Alpukat	150
					Brang Punik Kemang Menir	Lenangguar	Sumbawa	0,375	Alpukat	150
					Kokar Prung Desa Harapan Jaya			0,375	Alpukat	150
					Lenangguar	Lenangguar	Sumbawa	0,095	Alpukat	38
					Tatebal	Lenangguar	Sumbawa	0,095	Alpukat	38
					Ledang	Lenangguar	Sumbawa	0,095	Alpukat	38

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi			Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan					
9	Bibit Produktif	KPH Pelangan Tastura	DBH DR		Mareje Timur	Lembar	Lombok Barat	0,875	Alpukat	350
					Mareje Timur	Lembar	Lombok Barat	0,835	Nangka	334
10	Bibit Bakti Sosial	KPH Brang Beh	DBH DR		Perung	Lunyuk	Sumbawa	0,0075	Alpukat, Nangka	3
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,025	Alpukat, Durian	10
					Perung	Lunyuk	Sumbawa	0,0075	Alpukat, Nangka	3
					Perung	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat, Nangka, Durian	5
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat, Nangka	4
					Padasuka	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat, Durian	4
					Perung	Lunyuk	Sumbawa	0,0075	Alpukat, Nangka	3
					Perung	Lunyuk	Sumbawa	0,005	Alpukat, Nangka	2
					Perung	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat, Nangka	4
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat, Nangka, Durian	5
	Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat, Durian	5				

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi			Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan					
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat, Durian	5
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat, Durian	5
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat, Durian	5
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat, Durian	5
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat, Durian	5
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat, Durian	5
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat, Durian	5
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat, Durian	5
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat, Nangka, Durian	4
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat, Nangka, Durian	4
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,005	Alpukat	2
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,005	Alpukat	2
					Perung	Lunyuk	Sumbawa	0,005	Alpukat	2
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,005	Alpukat	2

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi			Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan					
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat, Nangka, Durian	4
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat, Nangka, Durian	4
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,005	Alpukat	2
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat, Nangka, Durian	4
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat, Nangka, Durian	5
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat, Durian	4
					Padasuka	Lunyuk	Sumbawa	0,0075	Alpukat, Nangka	3
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,025	Alpukat	10
					Padasuka	Lunyuk	Sumbawa	0,025	Alpukat	10
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,0075	Alpukat, Nangka, Durian	3
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat, Durian	4
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,025	Alpukat, Durian	10

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi			Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan					
					Padasuka	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat, Nangka	4
					Perung	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat	4
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,0225	Alpukat, Durian	9
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,0675	Alpukat, Nangka, Durian	27
					Perung	Lunyuk	Sumbawa	0,0075	Alpukat, Nangka	3
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,025	Alpukat, Durian	10
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat, Durian	5
					Padasuka	Lunyuk	Sumbawa	0,0175	Alpukat, Durian	7
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,005	Alpukat, Nangka	2
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,025	Alpukat	10
					Perung	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat	4
					Krida	Lunyuk	Sumbawa	0,02	Alpukat, Nangka, Durian	8
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Durian, Nangka	4
					Lunyuk Ode	Lunyuk	Sumbawa	0,03	Alpukat, Nangka, Durian	12

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi			Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan					
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat, Durian	4
					Perung	Lunyuk	Sumbawa	0,03	Alpukat, Nangka	12
					Emang Lestari	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat, Durian	5
					Jamu	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat, Durian	4
					Jamu	Lunyuk	Sumbawa	0,025	Alpukat, Durian	10
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,0375	Alpukat, Durian	15
					Jamu	Lunyuk	Sumbawa	0,025	Alpukat	10
					Lunyuk Ode	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat, Durian	4
					Lunyuk Ode	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat, Nangka, Durian	4
					Perung	Lunyuk	Sumbawa	0,01	Alpukat, Nangka	4
					Perung	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat	5
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,0275	Durian	11
					Lunyuk Ode	Lunyuk	Sumbawa	0,035	Alpukat, Durian	14
					Padasuka	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat	5
					Krida	Lunyuk	Sumbawa	0,025	Alpukat	10
					Krida	Lunyuk	Sumbawa	0,0575	Alpukat, Durian	23

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi			Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan					
					Padasuka	Lunyuk	Sumbawa	0,375	Alpukat, Nangka, Durian	150
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,025	Alpukat, Durian	10
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,025	Alpukat, Durian	10
					Jamu	Lunyuk	Sumbawa	0,0375	Alpukat, Durian	15
					Jamu	Lunyuk	Sumbawa	0,0425	Alpukat, Nangka, Durian	17
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Alpukat	5
					Lunyuk Belo	Lunyuk	Sumbawa	0,0125	Durian	5
					Lunyuk rea	Lunyuk	Sumbawa	0,075	Durian	30
	Bibit Bakti Sosial	KPH Rinjani Timur	DBH DR		Lendang Nangka Utara	Masbagik	Lombok Timur	0,5	Alpukat	200
					Sukamulia	Sukamulia	Lombok Timur	0,125	Alpukat	50
					Kesik	Masbagik	Lombok Timur	0,0625	Alpukat	25
					Perian	Montong Gading	Lombok Timur	0,4	Alpukat	160
					Lenting	Sakra Timur	Lombok Timur	0,3125	Alpukat	125
					Pringgabaya	Pringgabaya	Lombok Timur	0,25	Alpukat	100
					Toya	Aikmel	Lombok Timur	0,0625	Alpukat	25
					Kembang Kuning	Sikur	Lombok Timur	0,0725	Alpukat	29

Lampiran 17 Rincian Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2025 (Dana Swasta)

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi		Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	Keterangan
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan				
1	RHL FoluNetSink30	BKPH Brang Rea Puncak Ngengas	Folu Net Sink 30	Desa Kalabeso Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa		73	Manggis, Kelngkeng , Durian, Alpukat	2.200	30,1369863
2	Penghijauan Aipapang	Pemda Sumbawa dan KPH BRPN	Pemda Sumbawa	Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa		50	Sengon Laut	5.200	104
3	Penghijauan Perhutanan Sosial KTH Sagena Indah	PT. AMMAN dan KPH BRPN	PT. AMMAN	Desa Kiantar Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat		48	Sengon Laut	1.600	33,3333333
4	Penghijauan Penanaman Kopi Robusta	PT. AMMAN dan KPH BRPN	PT. AMMAN		Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat	10	Kopi Robusta	1.600	160

No	Kegiatan	Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi		Luas (Ha)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	Keterangan
				Dalam Kawasan	Luar Kawasan				
5	Rehabilitasi DAS IPPKH Bintang Bano Sumbawa Barat	Dinas LH Kab. Sumbawa Barat	Pemda Sumbawa Barat	Desa Senayan, Tapir, Kelanir, Mantar Kec. Poto Tano dan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat		54,1	Trembesi, Mahoni, Mimba, Asam Mente	33.850	625,693161

Lampiran 18 Rincian Rehabilitasi Hutan dan Lahan (APBN)

No	Pemangku Kawasan	Tipe Swakelola	Lokasi	Luas (Ha)
P1				
1	BKPH Rinjani Barat	Swakelola Tipe 2	Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara	42
2	BKPH Pelangan Tastura	Swakelola Tipe 2	Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	50
3	BKPH Pelangan Tastura	Swakelola Tipe 2	Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	76
4	BKPH Pelangan Tastura	Swakelola Tipe 2	Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	50
5	BKPH Pelangan Tastura	Swakelola Tipe 2	Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	50
6	BKPH Pelangan Tastura	Swakelola Tipe 2	Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	50
7	BKPH Rinjani Timur	Swakelola Tipe 4	Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur	43
8	BKPH Rinjani Timur	Swakelola Tipe 4	Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur	47
9	BKPH Rinjani Timur	Swakelola Tipe 4	Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur	47
10	BKPH Brang Rea Puncak Ngengas	Swakelola Tipe 2	Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa	73
P2				
11	BKPH Pelangan Tastura	Swakelola Tipe 2	Desa Lantan, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah	140
12	BKPH Rinjani Timur	Swakelola Tipe 2	Blok II, Desa Gunung Malang, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur	293
13	BKPH Rinjani Timur	Swakelola Tipe 2	Blok III, Desa Padak Guar, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur	201